



BADAN
PANGAN
NASIONAL

NATIONAL
FOOD
AGENCY (NFA)

PETA KETAHANAN DAN KERENTANAN PANGAN

FOOD SECURITY AND VULNERABILITY ATLAS
TAHUN 2024

(Data Indikator Tahun 2023)





PETA KETAHANAN DAN KERENTANAN PANGAN

FOOD SECURITY AND VULNERABILITY ATLAS TAHUN 2024

(Data Indikator Tahun 2023)

BADAN PANGAN NASIONAL



**KEPALA BADAN PANGAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PANGAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 558 TAHUN 2024**

TENTANG

**PETA KETAHANAN DAN KERENTANAN PANGAN NASIONAL TAHUN 2024
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

KEPALA BADAN PANGAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** : a. bahwa untuk memberi informasi situasi ketahanan dan kerentanan pangan sebagai dasar rekomendasi kebijakan di bidang pangan, termasuk pengendalian kerawanan pangan, perlu disusun peta ketahanan dan kerentanan pangan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 10 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan, Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Nasional ditetapkan oleh Kepala Badan Pangan Nasional;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional tentang Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Nasional Tahun 2024;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);

3. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2021 tentang Badan Pangan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 162);
4. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 2 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pangan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 372) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 2 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pangan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 387);
5. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 10 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1301);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PANGAN NASIONAL TENTANG PETA KETAHANAN DAN KERENTANAN PANGAN NASIONAL TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Nasional Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat dimanfaatkan dan digunakan untuk:

- a. dasar perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan di bidang Pangan; dan
- b. penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan di bidang Pangan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 Oktober 2024

KEPALA BADAN PANGAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

ARIEF PRASETYO ADI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Menteri Keuangan Republik Indonesia;
3. Menteri Sosial Republik Indonesia;
4. Menteri Pertanian Republik Indonesia;
5. Menteri Kesehatan Republik Indonesia;
6. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia;
7. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
8. Gubernur di seluruh Indonesia;
9. Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional;
10. Direktur Utama Perum BULOG;
11. Kepala Badan Pusat Statistik;
12. Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika;
13. Kepala Badan Informasi Geospasial;
14. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
15. Deputi Sekretaris Wakil Presiden Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Penanggulangan Kemiskinan, Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
16. Sekretaris Utama Badan Pangan Nasional;
17. Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi, Badan Pangan Nasional;
18. Tim Penyusun Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Nasional Tahun 2024.

**LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA BADAN PANGAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 558 TAHUN 2024
TENTANG
PETA KETAHANAN DAN KERENTANAN PANGAN NASIONAL
TAHUN 2024**

DAFTAR ISI

Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional | 1
Daftar Isi | 6
Daftar Tabel | 8
Daftar Gambar | 8
Daftar Peta | 9
Ringkasan Eksekutif Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan 2024 | 11
Daftar Definisi dan Singkatan | 16
Tentang FSVA | 19



Bab 1 : Pendahuluan

1.1. Latar Belakang 25
1.2. Kerangka Konsep Ketahanan Pangan dan Gizi 26



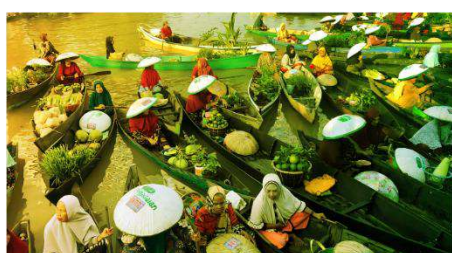
Bab 2 : Metodologi

2.1. Indikator dan Sumber Data FSVA 31
2.2. Analisis 33
2.3. Pembahasan Hasil Analisis 37



Bab 3 : Situasi Ketahanan Pangan dan Gizi

3.1. Ketahanan Pangan di Indonesia 41
3.2. Perubahan Status Ketahanan Pangan 48



Bab 4 : Indeks Ketahanan Pangan

Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten/Kota 55
Perubahan Skor IKP Kabupaten/Kota 62
Indeks Ketahanan Pangan Provinsi 63
Perubahan Skor IKP Provinsi 64



Bab 5 : Ketersediaan Pangan

5.1. Rasio Konsumsi Normatif per Kapita terhadap Ketersediaan Bersih	71
5.2. Capaian Ketersediaan Pangan	73
5.3. Tantangan Peningkatan Ketersediaan Pangan	74



Bab 6 : Keterjangkauan Pangan

6.1. Akses terhadap Listrik	83
6.2. Kemiskinan	87
6.3. Pangsa Pengeluaran Pangan	92
6.4. Tantangan Peningkatan Akses Pangan	96



Bab 7 : Pemanfaatan Pangan

7.1. Kecukupan Tenaga Kesehatan	103
7.2. Akses ke Air Bersih	107
7.3. Lama Sekolah Perempuan Berusia di Atas 15 Tahun	111
7.4. Balita Stunting	115
7.5. Angka Harapan Hidup	120
7.6. Tantangan Peningkatan Pemanfaatan Pangan	123



Bab 8 : Sumber Daya Alam dan Ketangguhan Terhadap Bencana

8.1. Bencana Alam	129
8.2. Variabilitas Iklim dan Parameter Klimatologi	133
8.3. Kehilangan Produksi Akibat Kekeringan, Banjir dan OPT	143



Bab 9 : Rekomendasi Kebijakan

9.1. Rekomendasi Pengentasan Kabupaten Rentan Rawan Pangan	150
9.2. Rekomendasi Pengentasan Kota Rentan Rawan Pangan	152
9.3. Sinergi dan Kerja Sama Lintas Program dan Lintas Sektor	154

Bab 10 : Penutup | **153**

Daftar Pustaka | **159**

Lampiran | **161**

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.	Ringkasan Indikator dan Sumber Data FSVA Nasional Tahun 2024.....	32
Tabel 2.2.	<i>Cut off Point</i> Indikator Individu.....	33
Tabel 2.3.	Bobot Indikator Individu.....	35
Tabel 2.4.	<i>Cut off Point</i> Skor Komposit.....	36
Tabel 3.1.	Persentase Kabupaten Berdasarkan Kelompok Prioritas per Provinsi.....	42
Tabel 3.2.	Nilai Rata-Rata Kelompok Kabupaten Prioritas Rentan dan Prioritas Tahan Pangan.....	44
Tabel 3.3.	Persentase Kota Berdasarkan Kelompok Prioritas per Provinsi.....	45
Tabel 3.4.	Nilai Rata-rata Kelompok Kota Prioritas Rentan dan Prioritas Tahan.....	46
Tabel 3.5.	Sebaran Kabupaten/Kota per Prioritas pada FSVA Tahun 2020-2024.....	48
Tabel 3.6.	Perubahan Tingkat Prioritas Kabupaten per Provinsi pada FSVA Tahun 2023-2024.....	48
Tabel 3.7.	Perubahan Tingkat Prioritas Kota per Provinsi pada FSVA Tahun 2023-2024.....	50
Tabel 3.8.	Perkembangan Skor GHI Internasional.....	51
Tabel 4.1.	Peringkat dan Indeks Ketahanan Pangan (IKP) Kabupaten 2024.....	55
Tabel 4.2.	Peringkat dan Indeks Ketahanan Pangan (IKP) Kota 2024.....	61
Tabel 4.3.	Peringkat dan Indeks Ketahanan Pangan (IKP) Provinsi 2024.....	63
Tabel 5.1	Produksi Padi, Jagung, Ubi Kayu dan Ubi Jalar Tahun 2023 (Ton).....	70
Tabel 6.1.	Persentase Rumah Tangga Tanpa Akses Listrik per Provinsi 2019-2023.....	84
Tabel 6.2.	Persentase Penduduk Hidup di Bawah Garis Kemiskinan per Provinsi Tahun 2019-2023.....	88
Tabel 6.3.	Persentase Rumah Tangga dengan Pangsa Pengeluaran Pangan >65% Tahun 2019-2023..	93
Tabel 7.1.	Rasio Jumlah Penduduk per Tenaga Kesehatan Terhadap Kepadatan Penduduk 2019-2023.....	103
Tabel 7.2.	Sebaran Kota Menurut Kelompok Rasio Jumlah Penduduk per Tenaga Kesehatan Terhadap Tingkat Kepadatan Penduduk.....	105
Tabel 7.3.	Persentase Rumah Tangga Tanpa Akses ke Air Bersih 2019-2023.....	108
Tabel 7.4.	Rata-rata Lama Sekolah Perempuan Berusia di Atas 15 Tahun 2019-2023.....	112
Tabel 7.5.	Klasifikasi WHO untuk <i>Underweight</i> , <i>Stunting</i> , dan <i>Wasting</i> dalam Populasi.....	115
Tabel 7.6.	Prevalensi Balita <i>Stunting</i> per Provinsi Tahun 2019-2023.....	116
Tabel 7.7.	Angka Harapan Hidup Per Provinsi Tahun 2019-2023 (tahun).....	120
Tabel 7.8.	Konsumsi Energi dan Protein serta Skor PPH Tahun 2019-2023.....	124
Tabel 8.1.	Negara yang Mengalami Bencana Alam Terbanyak 2023.....	130
Tabel 8.2.	Bencana Alam yang Terjadi di Indonesia dan Kerusakannya 2019-2023.....	132
Tabel 8.3.	Perbandingan Area Puso Padi dan Jagung Akibat Banjir, Kekeringan dan Organisme Pengganggu Tanaman 2019 - 2023.....	144

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1.	Kerangka Konseptual Ketahanan Pangan dan Gizi.....	27
Gambar 3.1.	Sebaran Kabupaten Rentan Rawan Pangan.....	42
Gambar 4.1.	Perubahan Skor Kabupaten/Kota antara IKP 2023 dan IKP 2024.....	62
Gambar 4.2.	Peta Indeks Ketahanan Pangan Provinsi 2024.....	63
Gambar 4.3.	Perubahan Skor Provinsi antara IKP 2023 dan IKP 2024.....	64
Gambar 5.1.	Produksi Padi, Jagung, Ubi Kayu, Ubi Jalar dan Sagu Tahun 2014-2023.....	69
Gambar 5.2.	Sebaran Kabupaten Menurut Kelompok Rasio Konsumsi Normatif per Kapita terhadap Produksi Bersih Sereal.....	72
Gambar 5.3.	Pola Panen Tahun 2021-2024.....	76
Gambar 6.1.	Sebaran Kabupaten/Kota Menurut Kelompok Rumah Tangga Tanpa Akses Listrik.....	85
Gambar 6.2.	Sebaran Kabupaten Menurut Kelompok Penduduk Miskin.....	90

Gambar 6.3. Sebaran Kota Menurut Kelompok Penduduk Miskin.....	90
Gambar 6.4. Sebaran Kabupaten Menurut Kelompok Rumah Tangga dengan Pangsa Pengeluaran Pangan >65%.....	94
Gambar 6.5. Sebaran Kota Menurut Kelompok Rumah Tangga dengan Pangsa Pengeluaran Pangan >65%.....	94
Gambar 7.1. Sebaran Kabupaten Menurut Kelompok Rasio Jumlah Penduduk per Tenaga Kesehatan terhadap Tingkat Kepadatan Penduduk	105
Gambar 7.2. Sebaran Kabupaten Menurut Kelompok Rumah Tangga Tanpa Akses ke Air Bersih	109
Gambar 7.3. Sebaran Kota Menurut Kelompok Rumah Tangga Tanpa Akses ke Air Bersih	109
Gambar 7.4. Sebaran Kabupaten Menurut Kelompok Lama Sekolah Perempuan Berusia di Atas 15 Tahun.....	113
Gambar 7.5. Sebaran Kota Menurut Kelompok Lama Sekolah Perempuan Berusia di Atas 15 Tahun	113
Gambar 7.6. Sebaran Kabupaten Menurut Kelompok Persentase Balita <i>Stunting</i>	118
Gambar 7.7. Sebaran Kota Menurut Kelompok Persentase Balita <i>Stunting</i>	118
Gambar 7.8. Sebaran Kabupaten Menurut Kelompok Angka Harapan Hidup	121
Gambar 7.9. Sebaran Kota Menurut Kelompok Angka Harapan Hidup	121
Gambar 8.1. Sebaran Bencana Alam per Provinsi 2019 – 2023.....	131
Gambar 8.2. Curah Hujan Indonesia Tahun 2023	135
Gambar 8.3. Curah Hujan Rata-Rata Normal Indonesia 1991-2020	136
Gambar 8.4. Sifat Hujan Indonesia Tahun 2023 terhadap Curah Hujan Normal 1991-2020	137
Gambar 8.5. Prakiraan Awal Musim Hujan Tahun 2024/2025	139
Gambar 8.6. Perbandingan Prakiraan Awal Musim Hujan Tahun 2024/2025 terhadap Normal (1991-2020).....	140
Gambar 8.7. Perbandingan Prakiraan Durasi Musim Hujan Tahun 2024/2025 terhadap Normal (1991-2020).....	141
Gambar 8.8. Perbandingan Prakiraan Puncak Musim Hujan Tahun 2024/2025 terhadap Normal (1991-2020).....	142
Gambar 9.1. Kerangka Pengentasan Daerah Rentan Rawan Pangan	150
Gambar 9.2. Kerangka Intervensi Peningkatan Ketahanan Pangan Wilayah Kabupaten.....	152
Gambar 9.3. Kerangka Intervensi Peningkatan Ketahanan Pangan Wilayah Kota.....	153
Gambar 9.4. Sinergi dan Kolaborasi untuk Pangan Nasional Bersama Sektor Pentahelix ABGCM.....	154

DAFTAR PETA

Peta 3.1. Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Tahun 2024.....	47
Peta 5.1. Peta Rasio Konsumsi Normatif per Kapita terhadap Produksi Bersih Pangan Tahun 2024.....	77
Peta 6.1. Peta Persentase Rumah Tangga Tanpa Akses Listrik Tahun 2024.....	86
Peta 6.2. Peta Persentase Penduduk Hidup di Bawah Garis Kemiskinan Tahun 2024	91
Peta 6.3. Peta Persentase Rumah Tangga dengan Proporsi Pengeluaran untuk Pangan Lebih dari 65% terhadap Total Pengeluaran Tahun 2024.....	95
Peta 7.1. Peta Rasio Jumlah Penduduk per Tenaga Kesehatan terhadap Kepadatan Penduduk Tahun 2024.....	106
Peta 7.2. Peta Persentase Rumah Tangga Tanpa Akses ke Air Bersih Tahun 2024	110
Peta 7.3. Peta Rata-Rata Lama Sekolah Perempuan Berusia di Atas 15 Tahun Tahun 2024.....	114
Peta 7.4. Peta Persentase Balita dengan Tinggi Badan di Bawah Standar (<i>Stunting</i>) Tahun 2024.....	119
Peta 7.5. Peta Angka Harapan Hidup Tahun 2024.....	122





RINGKASAN EKSEKUTIF

PETA KETAHANAN DAN KERENTANAN PANGAN

FOOD SECURITY AND VULNERABILITY ATLAS (FSVA) 2024

1. *Food Security and Vulnerability Atlas (FSVA)* disusun dalam bentuk peta tematik sebagai bentuk inovasi dan transformasi penyediaan data dan informasi kerawanan pangan. FSVA menjadi *strategic tools* bagi Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam merumuskan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan di bidang pangan serta mendukung penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan inovasi di bidang pangan di wilayah masing-masing.
2. FSVA Nasional 2024 menganalisis situasi ketahanan dan kerentanan pangan pada tingkat kabupaten/kota yang mencakup 416 kabupaten dan 98 kota yang disusun menggunakan data tahun 2023 untuk mencerminkan status ketahanan pangan tahun tersebut. Penyusunannya dilakukan secara terpisah antara kabupaten dan kota untuk mengakomodasi perbedaan karakteristik wilayah. FSVA Kabupaten menggunakan sembilan indikator yang mewakili tiga aspek ketahanan pangan; ketersediaan, keterjangkauan, dan pemanfaatan pangan. FSVA Kota menggunakan delapan indikator dengan fokus pada aspek keterjangkauan dan pemanfaatan pangan. Seluruh indikator yang digunakan dalam analisis dibobot berdasarkan *expert judgement* untuk menghasilkan angka komposit.
3. Analisis Komposit menghasilkan Indeks Ketahanan Pangan (IKP) yang selanjutnya dibagi menjadi enam kelas status ketahanan pangan wilayah, yaitu: Prioritas 1 (sangat rentan); Prioritas 2 (rentan); Prioritas 3 (agak rentan); Prioritas 4 (agak tahan); Prioritas 5 (tahan); dan Prioritas 6 (sangat tahan).
4. Berdasarkan perbandingan FSVA 2023 dan 2024, menunjukkan perbaikan situasi ketahanan pangan di Indonesia. Jumlah wilayah rentan rawan pangan (Prioritas 1-3) turun dari 68 kabupaten/kota menjadi 62 kabupaten/kota, dengan rincian: 21 kabupaten Prioritas 1; 18 kabupaten/kota Prioritas 2; dan 23 kabupaten Prioritas 3. Kabupaten Prioritas 1 sebagian besar terletak di Provinsi Papua (17 kabupaten) dan Papua Barat (4 kabupaten). Kota yang rentan rawan pangan hanya satu, yaitu Kota Subulussalam di Provinsi Aceh, yang masuk dalam Prioritas 2.

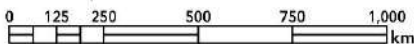
5. Karakteristik kabupaten rentan rawan pangan adalah mempunyai rasio konsumsi per kapita terhadap ketersediaan pangan tinggi, prevalensi balita *stunting* tinggi, persentase penduduk di bawah garis kemiskinan tinggi, dan persentase rumah tangga tanpa akses air bersih tinggi. Karakteristik kota rentan rawan pangan adalah mempunyai prevalensi balita *stunting* yang tinggi dan akses terhadap air bersih rendah.
6. Sebagai preskripsi untuk membangun wilayah rentan menjadi tahan pangan, direkomendasikan implementasi program dan kegiatan ketahanan pangan bagi:
 - a. Kabupaten di wilayah timur Indonesia, terutama yang berada di Pulau Papua yang terdapat jumlah wilayah rentan rawan pangan terbanyak;
 - b. Kabupaten di wilayah 3TP (Terdepan, Terluar, Tertinggal, Perbatasan), dan wilayah kepulauan yang menghadapi tantangan ketersediaan dan distribusi pangan;
 - c. Kabupaten yang menghadapi masalah ketersediaan pangan, air bersih, kemiskinan, dan balita *stunting*; serta
 - d. Kota yang menghadapi masalah balita *stunting* dan akses air bersih.
7. Program peningkatan ketahanan pangan dan pengentasan kerentanan pangan harus ditekankan pada penyebab utama (indikator) kerentanan pangan yang ditinjau dari aspek ketersediaan pangan, keterjangkauan pangan, dan pemanfaatan pangan.
 - a. Permasalahan utama aspek ketersediaan pangan adalah terbatasnya jumlah produksi untuk mencukupi permintaan konsumsi penduduk, direkomendasikan program dan kegiatan:
 - 1) Peningkatan penyediaan pangan dengan mendorong produksi pangan yang aman dan sesuai dengan potensi biodiversitas pangan serta kearifan lokal di masing-masing wilayah, mengoptimalkan pemanfaatan lahan untuk meningkatkan indeks pertanaman, dan menerapkan teknologi inovatif spesifik lokasi untuk meningkatkan produktivitas usaha pertanian pangan;
 - 2) Peningkatan penyediaan pangan melalui pengembangan cadangan pangan pemerintah daerah (CPPD provinsi, kabupaten/kota, desa) dan penguatan lumbung pangan masyarakat; terutama pada kabupaten di wilayah kepulauan yang sering mengalami gangguan akses pangan dan wilayah yang bukan sentra produksi pangan;
 - 3) Pengelolaan keluar masuk barang untuk menjamin ketersediaan pangan yang cukup bagi penduduk;
 - 4) Penanganan *food loss and waste* di sepanjang rantai pasok pangan; dari panen di tingkat usahatani sampai dengan konsumsi di tingkat rumah tangga (*from farm to table*); dan
 - 5) Kajian dan diseminasi hasil penelitian untuk peningkatan ketersediaan pangan.
 - b. Permasalahan utama aspek keterjangkauan pangan adalah terbatasnya daya beli masyarakat karena kemiskinan dan keterbatasan infrastruktur, direkomendasikan program dan kegiatan:
 - 1) Stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP), sehingga pangan terjangkau bagi seluruh masyarakat melalui pemerataan ketersediaan pangan antarwaktu antarwilayah termasuk daerah rentan rawan pangan dan penerapan kebijakan harga pangan dengan memperhatikan kepentingan produsen dan konsumen;
 - 2) Perluasan akses terhadap sistem informasi pasar dan harga pangan di seluruh wilayah Indonesia;
 - 3) Perbaikan sistem logistik pangan untuk menjamin pemerataan pangan yang aman dan terjangkau termasuk fasilitasi distribusi pangan untuk meningkatkan kelancaran perdagangan antarwilayah;

- 4) Pemanfaatan kerja sama antardaerah untuk memenuhi kebutuhan pangan dan peningkatan ekonomi;
 - 5) Peningkatan kegiatan ekonomi wilayah untuk menciptakan lapangan kerja produktif dan produktivitas kerja yang tinggi;
 - 6) Fasilitasi pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), koperasi dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) untuk menggerakkan ekonomi wilayah dan meningkatkan penyediaan pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman (B2SA);
 - 7) Penyaluran bantuan sosial (tunai dan/atau pangan) bagi kelompok masyarakat berpendapatan rendah dan terdampak bencana (alam dan sosial). Jenis bantuan pangan yang disalurkan untuk memenuhi gizi masyarakat dengan memperhatikan bahan pangan lokal; dan
 - 8) Pembangunan infrastruktur dasar (terutama berupa jalan usahatani, irigasi, listrik, jaringan internet) untuk meningkatkan aktivitas ekonomi wilayah.
- c. Permasalahan utama aspek pemanfaatan pangan adalah gizi balita, akses air bersih, rasio tenaga kesehatan, dan tingkat pendidikan perempuan, direkomendasikan program dan kegiatan:
- 1) Pemerataan pembangunan fasilitas, peningkatan layanan, dan penyediaan tenaga kesehatan;
 - 2) Penurunan prevalensi balita stunting dan peningkatan gizi masyarakat melalui intervensi gizi spesifik (1.000 Hari Pertama Kehidupan) dan sensitif (peningkatan akses pangan, layanan kesehatan, dan peningkatan pendapatan keluarga);
 - 3) Peningkatan akses terhadap air bersih dengan pembangunan fasilitas dan layanan air bersih disertai sosialisasi dan penyuluhan tentang perilaku hidup bersih dan sehat serta sanitasi dan higienitas lingkungan;
 - 4) Peningkatan pemenuhan konsumsi pangan B2SA; dan
 - 5) Peningkatan partisipasi perempuan dalam program wajib belajar dan program kejar paket/pendidikan kesetaraan melalui penyuluhan, fasilitasi dan dukungan anggaran pendidikan.
8. Sinergi lintas sektor dan koordinasi pusat-daerah sangat diperlukan untuk membangun sistem pangan berkelanjutan. Kerjasama antarbidang dan antarpihak dari unsur *Academic, Business, Community, Government, and Media* (ABCGM) akan mampu mengoptimalkan dukungan dalam mengatasi keterbatasan sumber daya alam, sumber dana dan sumber daya manusia dalam menangani kerawanan pangan dan mencapai target SDGs, terutama tujuan 1 (Tanpa Kemiskinan) dan tujuan 2 (Tanpa Kelaparan).
9. Diperlukan komitmen dan konsistensi semua pihak dalam mendukung ketahanan pangan, termasuk melalui penguatan regulasi ketahanan pangan, dukungan anggaran yang berkelanjutan, kelembagaan pangan yang kuat, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan penerapan teknologi dan program inovatif untuk menangani kerawanan pangan.

Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Tahun 2024



Datum : WGS 84
Sistem Koordinat : Geografis
Referensi Spasial : SRGI 2013



LEGENDA

Batas Administrasi

- Ibukota Provinsi
- Batas Negara
- Batas Provinsi
- Danau

Batimetri (meter)

- 0 - <200
- 200 - <500
- 500 - <1000
- 1000 - <2000
- 2000 - <4000
- 4000 - <6000
- 6000 - <8000
- >8000

Kerentanan Berdasarkan Indeks Ketahanan Pangan Komposit

- Sangat Rentan
- Rentan
- Agak Rentan
- Agak Tahan
- Tahan
- Sangat Tahan

Sumber Data :

1. KSA Padi 2023, BPS
2. SUSENAS 2023, BPS
3. Data UHHS 2023, BPS
4. Data produksi jagung, ubi kayu, ubi jalar, dan sagu 2023, Kementan
5. Data CPPD dan Bantuan Pangan CPP 2023, Bapanas
6. SKI 2023, Kemenkes
7. SISDMK 2023, Kemenkes
8. Peta Batas Wilayah RBI 2023, BIG
9. Batimetri Indonesia

Riwayat Peta :

Peta ini disusun berdasarkan hasil analisa komposit data indikator ketahanan pangan pada kabupaten dan kota. Nilai cut-off skor komposit menentukan klasifikasi kerentanan pangan pada tingkat kabupaten dan kota.

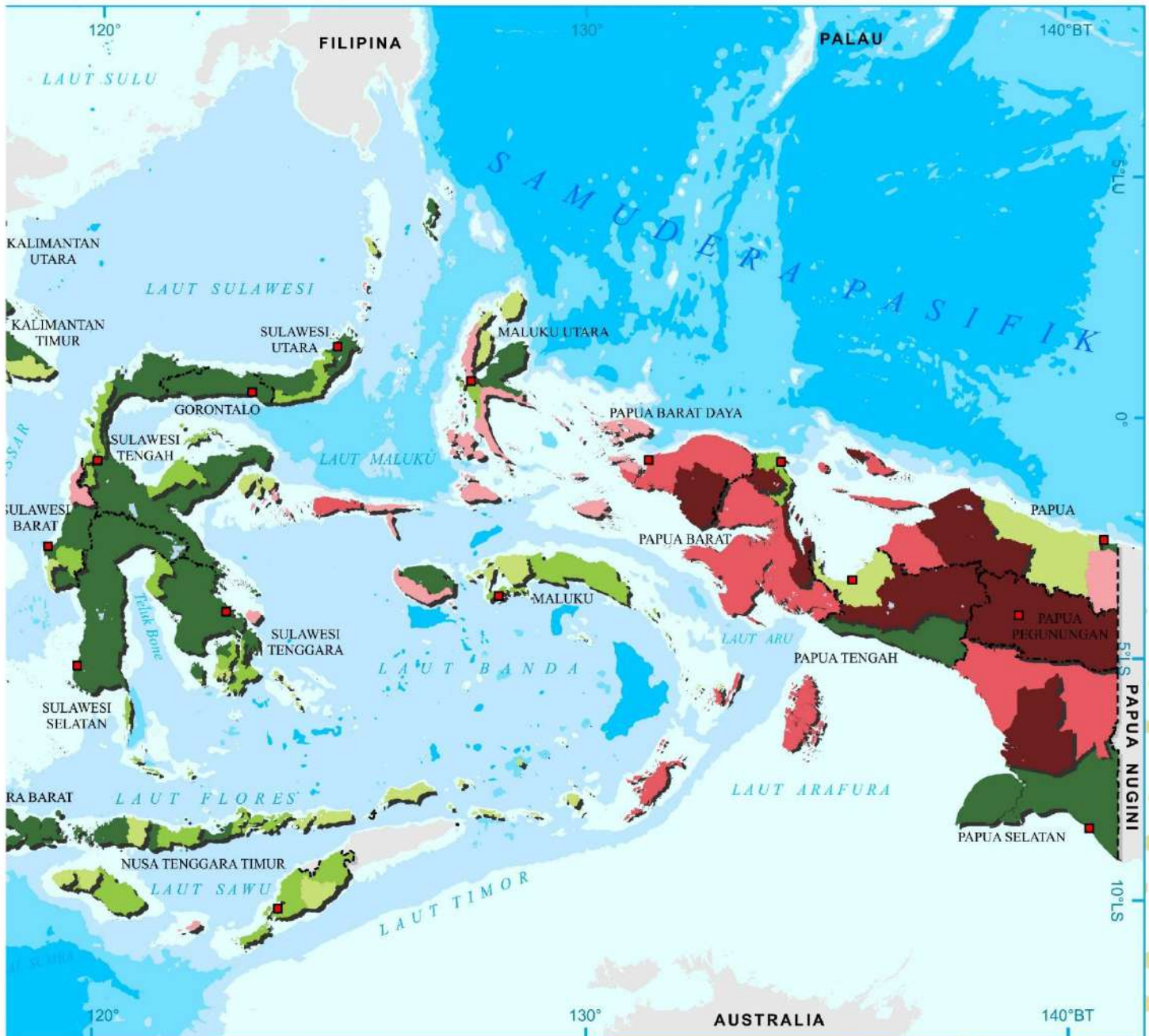
Diproduksi Oleh :

Badan Pangan Nasional Tahun 2024



BADAN PANGAN NASIONAL

NATIONAL FOOD AGENCY (NFA)



DAFTAR DEFINISI DAN SINGKATAN

Definisi

Ketahanan Pangan	Kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan (Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012).
Kerentanan Pangan	Kondisi ketidakmampuan negara hingga perseorangan untuk memenuhi kebutuhan Pangan minimum untuk dapat hidup sehat aktif, dan produktif secara berkelanjutan yang berhubungan dengan kondisi ekosistem wilayah setempat dan faktor-faktor fisik, sosial dan lingkungan yang tidak berubah dengan cepat seperti kondisi iklim, sumber daya alam (tanah, air), sumberdaya genetik tanaman dan hewan, sistem pemerintahan daerah, infrastruktur publik, pola hubungan sosial, kepemilikan lahan, distribusi pendapatan, dan tingkat pendidikan.
Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Peta tematik yang menggambarkan visualisasi geografis dari hasil analisis indikator ketahanan dan kerentanan pangan. Peta tematik yang menggambarkan visualisasi geografis dari hasil analisis indikator ketahanan dan kerentanan pangan.
Indeks Ketahanan Pangan	Indeks komposit yang mengukur ketahanan dan kerentanan pangan wilayah dari tiga aspek yaitu ketersediaan, keterjangkauan dan pemanfaatan pangan. Nilai IKP dapat menunjukkan capaian ketahanan pangan dan gizi wilayah (kabupaten/kota/provinsi) dan peringkat (ranking) relatif antara satu wilayah dibandingkan dengan wilayah lain.
Status Ketahanan Pangan	Tingkat kerentanan pangan suatu daerah (kabupaten/kota) terhadap kerawanan pangan, diukur berdasarkan nilai komposit dari sembilan indikator yang dipakai dalam pembuatan peta ini. Tingkat kerentanan pangan dapat dipakai untuk menentukan prioritas pembangunan ketahanan pangan. Enam status ketahanan pangan dalam FSVA, yaitu sangat rentan (prioritas 1), rentan (prioritas 2), agak rentan (prioritas 3), agak tahan (prioritas 4), tahan (prioritas 5) dan sangat tahan pangan (prioritas 6).
Ketersediaan Pangan	Kondisi tersedianya pangan dari hasil produksi dalam negeri, cadangan pangan, dan pemasukan pangan (termasuk impor dan bantuan pangan).

Keterjangkauan Pangan Tingkat Rumah Tangga	Kemampuan rumah tangga untuk memperoleh cukup pangan yang bergizi, melalui satu atau kombinasi dari berbagai sumber pangan seperti: produksi sendiri, persediaan pangan yang dimiliki rumah tangga, pembelian, barter, hadiah, sajian dalam suatu pertemuan, pinjaman dan bantuan pangan.
Pemanfaatan Pangan	Penggunaan pangan oleh rumah tangga dan kemampuan individu untuk menyerap dan metabolisme zat gizi. Pemanfaatan pangan meliputi cara penyimpanan, pengolahan, penyiapan pangan dengan memperhatikan aspek keamanan makanan dan minuman, kondisi kebersihan, kebiasaan pemberian makan (terutama bagi individu dengan kebutuhan makanan khusus), distribusi makanan dalam rumah tangga sesuai dengan kebutuhan individu (pertumbuhan, kehamilan dan menyusui), dan status kesehatan setiap anggota rumah tangga.
Daerah Rentan Rawan Pangan	Daerah yang memiliki karakteristik yang menyebabkannya berpotensi mengalami kejadian rawan pangan. Dalam FSVA, kabupaten/kota yang termasuk daerah rentan rawan pangan adalah daerah yang masuk pada prioritas 1 sampai 3.
Kerentanan terhadap kerawanan pangan kronis	Ketidakmampuan jangka panjang untuk memenuhi kebutuhan pangan minimum dan biasanya berhubungan dengan kondisi ekosistem wilayah setempat dan faktor-faktor fisik, sosial, dan lingkungan yang tidak berubah dengan cepat, seperti kondisi iklim, sumber daya alam (tanah, air), sumber daya genetik tanaman dan hewan, sistem pemerintahan daerah, infrastruktur publik, pola hubungan sosial, kepemilikan lahan, distribusi pendapatan, tingkat pendidikan, dan lain-lain.
Kerentanan terhadap kerawanan pangan transien	Ketidakmampuan sementara untuk memenuhi kebutuhan pangan minimum yang bersifat jangka pendek yang sebagian besar berhubungan dengan faktor dinamis yang dapat berubah dengan cepat, disebabkan karena kejadian bencana, baik alam, non alam, maupun sosial.
Cut off Point Komposit	Hasil penjumlahan dari masing-masing perkalian antara bobot indikator individu dengan <i>cut off point</i> indikator individu hasil standarisasi <i>z-score</i> dan <i>distance to scale</i> (0-100). Menghasilkan enam kelompok prioritas pembangunan ketahanan pangan.
Intervensi	Upaya yang dilakukan baik secara sektoral maupun lintas sektor, di pusat maupun daerah dalam bentuk kebijakan, program, dan/atau kegiatan yang bertujuan untuk mengentaskan daerah rentan rawan pangan pada lokus berdasarkan FSVA.

Singkatan

AKE	Angka Kecukupan Energi
BKP	Badan Ketahanan Pangan
BMKG	Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika
BNPB	Badan Nasional Penanggulangan Bencana
BPS	Badan Pusat Statistik
BRIN	Badan Riset dan Inovasi Nasional
CPPD	Cadangan Pangan Pemerintah Daerah
DTKS	Data Terpadu Kesejahteraan Sosial
FIA	<i>Food Insecurity Atlas</i>
FLW	<i>Food Loss and Waste</i>
FSVA	<i>Food Security and Vulnerability Atlas</i>
GFSI	<i>Global Food Security Index</i>
IKP	Indeks Ketahanan Pangan
JPS	Jaring Pengaman Sosial
KKS	Kartu Keluarga Sejahtera
KPM	Keluarga Penerima Manfaat
KSA	Kerangka Sampel Area
NCPR	<i>Normative Consumption Production Ratio</i>
OPT	Organisme Pengganggu Tanaman
PDRB	Produk Domesti Regional Bruto
PPH	Pola Pangan Harapan
PPP	<i>Purchasing Power Parity</i>
RTP	Rumah Tangga Petani
SAE	<i>Small Area Estimation</i>
SUSENAS	Survei Sosial Ekonomi Nasional
WFP	<i>World Food Programme</i>
WNPG	Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi



TENTANG FSVA

Food Security and Vulnerability Atlas (FSVA) atau Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan merupakan peta tematik yang menggambarkan kondisi ketahanan pangan dan kerentanan terhadap rawan pangan pada tahun tertentu baik secara komposit maupun menurut masing-masing indikator.

Sejarah Singkat Perkembangan FSVA di Indonesia

Penyusunan FSVA tingkat nasional dimulai dengan diterbitkannya Peta Kerawanan Pangan atau *Food Insecurity Atlas (FIA)* pada tahun 2005. Penyusunan FIA merupakan hasil kerja sama antara Badan Ketahanan Pangan (BKP) dengan *World Food Programme (WFP)* yang dimulai sejak tahun 2002.

Tujuan utama pembuatan FIA adalah untuk mengidentifikasi titik-titik rawan pangan tingkat kabupaten di Indonesia, menemu-kenali penyebab kerawanan pangan di suatu kabupaten, serta menyediakan petunjuk dalam mengembangkan strategi mitigasi yang tepat untuk penanganan kerawanan pangan kronis. Sepuluh indikator digunakan untuk mengukur kerawanan pangan pada FIA tahun 2005. Pemanfaatan FIA dalam perencanaan penanganan kerawanan pangan ternyata tidak optimal, karena ada semacam keengganan atau penolakan dari pimpinan daerah terhadap penggunaan istilah "Rawan Pangan" yang disematkan pada daerahnya yang dikategorikan rawan pangan dalam buku FIA.

Dalam rangka meningkatkan kualitas informasi tentang kerentanan pangan di daerah dan untuk mengatasi kesalahpahaman dari pimpinan daerah tentang istilah "rawan pangan" yang melekat pada judul buku FIA, pada tahun 2009 BKP meneruskan kerja sama dengan WFP menyusun dan menerbitkan FSVA. Di samping menambahkan informasi tentang status situasi ketahanan pangan setempat, penggunaan istilah rawan pangan juga diganti dengan "kerentanan terhadap rawan pangan". Indikator yang digunakan masih sama dengan indikator FIA tahun 2005, kecuali angka kematian bayi yang datanya tidak tersedia.

Kualitas FSVA terus ditingkatkan seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan untuk melayani kebutuhan pengguna, khususnya dalam menentukan fokus penanganan daerah dan program utama penanganan rentan pangan. Peningkatan kualitas FSVA terutama terkait dengan penyempurnaan indikator yang digunakan agar menjadi lebih sederhana, namun di sisi lain semakin tajam dan akurat

dalam merepresentasikan kondisi ketahanan dan kerentanan terhadap rawan pangan di suatu daerah. Pertimbangan lain dalam perubahan yang dilakukan adalah kesinambungan ketersediaan data. Salah satu yang disesuaikan pada FSVA 2015, yaitu indikator pengukuran pertumbuhan balita yang semula menggunakan prevalensi gizi kurang (BB/U) diubah menjadi prevalensi stunting (TB/U) untuk mengukur kerawanan pangan dan gizi kronis serta mendukung program pemerintah untuk mengentaskan stunting.

Pada penyusunan FSVA tahun 2018, penyempurnaan beberapa indikator kembali dilakukan. Beberapa perubahan indikator yang signifikan adalah (a) persentase desa dengan akses penghubung yang tidak memadai diganti dengan persentase rumah tangga dengan pengeluaran pangan yang tinggi, (b) persentase perempuan di atas 15 tahun yang buta huruf diganti menjadi rata-rata lama sekolah perempuan di atas 15 tahun, dan (c) persentase rumah tangga yang tinggal lebih dari lima km dari fasilitas kesehatan diganti menjadi rasio jumlah penduduk per tenaga kesehatan terhadap tingkat kepadatan penduduk. Ketiga indikator tersebut secara konsisten digunakan hingga penyusunan FSVA 2024 ini.

Metode perhitungan yang digunakan untuk analisis komposit juga terus disempurnakan. FSVA 2005 dan FSVA 2009 menggunakan metode analisis komponen utama (*principal component analysis*), sementara itu FSVA 2015 menggunakan metode analisis gerombol (*clustering*) dan analisis diskriminan. FSVA 2018 hingga FSVA 2024 menggunakan metode pembobotan dengan *expert judgement* mengacu pada metode yang dikembangkan dalam penyusunan *Global Food Security Index* (GFSI).

FSVA Nasional tahun 2024 masih menggunakan basis data di 416 kabupaten dan 98 kota yang tersebar di 34 Provinsi. Pemekaran wilayah provinsi masih belum dianalisis pada FSVA Nasional tahun 2024 ini.

Penyusunan FSVA Nasional ditindaklanjuti dengan penyusunan FSVA di tingkat provinsi dengan lokus kecamatan, dan di tingkat kabupaten/kota dengan lokus desa/kelurahan. Upaya tersebut dilakukan agar lokasi intervensi program dapat lebih fokus dan tepat sasaran. Sejalan dengan itu, penyusunan FSVA melibatkan partisipasi aktif pemangku kepentingan pembangunan sistem pangan di tingkat pusat (Bappenas, BPS, Kementerian Pertanian, Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial, Kementerian Dalam Negeri, Kemendesa PDTT, Kementerian PUPR, BIG, BMKG, BNPB, BRIN, TNP2K, BULOG, WFP, perguruan tinggi, pakar) dan tingkat daerah (Dinas/Kantor/Unit Kerja yang menangani urusan pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota). Keseluruhan proses penyusunan FSVA 2024 ini di bawah koordinasi Badan Pangan Nasional.

Pemanfaatan FSVA

FSVA digunakan dan dimanfaatkan sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan di bidang pangan. FSVA memberi dua informasi penting yang dapat dimanfaatkan oleh pengguna, baik di tingkat pusat maupun daerah dalam perencanaan dan evaluasi situasi ketahanan pangan di masing-masing wilayah. Informasi pertama menggambarkan wilayah tahan dan rentan terhadap kerawanan pangan, dan informasi kedua menyajikan karakteristik daerah rentan rawan pangan.

FSVA menyediakan informasi untuk pelaksanaan program yang lebih bersifat preventif, yaitu memberi indikasi awal bahwa di daerah-daerah (lokus) tertentu dapat saja terjadi kerawanan pangan apabila tidak segera dilakukan tindakan-tindakan yang relevan dan sistematis untuk pencegahan dan penanganannya. Peta ini tidak hanya menyajikan data dan informasi, tetapi juga menyajikan rekomendasi yang bersifat preskriptif meski masih secara umum. Dalam menganalisis dan mengartikan situasi ketahanan pangan suatu daerah berdasarkan informasi yang disajikan dalam FSVA, dibahas pula

keterkaitannya dengan faktor risiko lain seperti kejadian bencana alam dan guncangan lain baik dari luar daerah maupun dari daerah itu sendiri. Hal ini dilakukan agar peta FSVA ini lebih “hidup” dan lebih bermanfaat bagi pengguna.

Persentase daerah rentan rawan pangan sebagai hasil FSVA merupakan salah satu indikator kinerja Pembangunan Daerah di bidang pangan. Indikator ini merupakan urusan wajib non pelayanan dasar sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024. Dalam peraturan tersebut juga disebutkan bahwa untuk memperkuat ketahanan pangan dan antisipasi krisis pangan, diperlukan kesiapsiagaan, pengendalian dan intervensi kerawanan pangan dan gizi, berbasis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (FSVA), dan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi.

Implementasi pemanfaatan hasil FSVA sebagai salah satu dasar dalam menetapkan lokus dan target intervensi program pengentasan daerah rentan rawan pangan, penurunan kemiskinan, penurunan stunting, pembangunan desa dan program-program pembangunan ketahanan pangan yang bersifat lintas sektor. Instansi-instansi yang menggunakan informasi FSVA antara lain Sekretariat Wakil Presiden; Kementerian Keuangan; Kementerian Pertanian; Kementerian PPN/Bappenas; Kementerian Dalam Negeri; Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi; Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; Kementerian Kesehatan; Lembaga Ketahanan Nasional; Dewan Ketahanan Nasional; WFP; dan beberapa Perguruan Tinggi. Di tingkat daerah, FSVA dimanfaatkan oleh BAPPEDA, Dinas Pertanian, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. FSVA dimanfaatkan pula untuk penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan di bidang pangan dalam upaya membangun sistem pangan yang lebih resilien dan berkelanjutan.





BAB 1

PENDAHULUAN





1.1. Latar Belakang

Target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau *Sustainable Development Goals* (SDGs), khususnya tujuan SDG-1 adalah pengentasan kemiskinan dan tujuan SDG-2 adalah mengakhiri kelaparan melalui ketahanan pangan, perbaikan gizi dan sistem pertanian berkelanjutan. Indikator tercapainya tujuan ini adalah apabila setiap orang, khususnya warga miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan termasuk ibu hamil, bayi, lansia, dan disabilitas memiliki akses atas pangan yang aman, bergizi, dan cukup sepanjang tahun, untuk dapat hidup sehat, cerdas, aktif, dan produktif. Target menghilangkan kelaparan dan menjamin akses pangan bagi semua orang, dan target menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi dapat dicapai atau merupakan hasil dari pembangunan sistem pangan, perbaikan gizi masyarakat, dan pelayanan kesehatan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 telah menetapkan tujuh Agenda Pembangunan Nasional, yaitu: (1) Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan; (2) Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan; (3) Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing; (4) Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan; (5) Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pembangunan ekonomi dan pelayanan dasar; (6) Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim; dan (7) Memperkuat stabilitas politik hukum pertahanan dan keamanan (polhukhankam) serta transformasi pelayanan publik.

Dalam rangka mendukung pencapaian target SDGs dan agenda Pembangunan Nasional yang tertuang dalam RPJMN tersebut perlu tersedia data dan informasi yang akurat untuk penyusunan kebijakan, program dan kegiatan yang tepat dengan sasaran terfokus. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan Pasal 114 dan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi Pasal 75 mengamanatkan pemerintah dan pemerintah daerah berkewajiban membangun, menyusun, dan mengembangkan Sistem Informasi Pangan dan Gizi yang terintegrasi, yang dapat digunakan untuk perencanaan, pemantauan dan evaluasi, stabilisasi pasokan dan harga pangan serta sebagai sistem peringatan dini masalah pangan dan potensi kerawanan pangan dan gizi. Data dan informasi tentang ketahanan pangan dan gizi yang komprehensif, akurat dan mutakhir dapat menjadi salah satu dasar bagi para pembuat keputusan dalam penetapan kebijakan dan program intervensi serta lokus program, baik di tingkat pusat maupun tingkat wilayah.

Oleh karena itu, pengembangan Sistem Informasi Pangan dan Gizi yang terintegrasi mutlak diperlukan untuk mendukung peran tersebut. Badan Pangan Nasional terus berupaya melakukan inovasi dan transformasi dalam penyediaan data dan informasi, salah satunya melalui penyediaan *Food Security and Vulnerability Atlas* (FSVA).

FSVA merupakan peta tematik yang menggambarkan visualisasi geografis wilayah rentan terhadap kerawanan pangan. FSVA disusun untuk menyediakan informasi ketahanan pangan yang akurat, komprehensif, dan tertata dengan baik guna mendukung upaya pencegahan dan penanganan kerawanan pangan dan gizi, sehingga dapat memberi arah dan rekomendasi kepada pembuat keputusan dalam penyusunan program, kebijakan, serta pelaksanaan intervensi di tingkat pusat dan daerah.

FSVA pertama kali diterbitkan tahun 2009, hasil dari kerja sama BKP (sebagai Sekretariat Dewan Ketahanan Pangan) dan *World Food Programme* (WFP). Setelah itu, FSVA diperbaharui (*updated*) secara berkala dan terakhir setiap tahun, dengan menyempurnakan metodologi dan menggunakan data terbaru yang tersedia. Terakhir, pada tahun 2022, Kepala Badan Pangan Nasional telah mengeluarkan Peraturan Badan Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penyusunan FSVA. Peraturan tersebut disusun untuk memberi kerangka operasional dalam penyusunan FSVA baik oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, serta upaya untuk memperluas pemanfaatan hasil FSVA. FSVA tahun 2024 ini disusun dengan berpedoman pada Peraturan Badan tersebut.

Mengingat pentingnya FSVA sebagai dasar bagi penyusunan kebijakan dan program ketahanan pangan, maka pemutakhiran FSVA perlu dilakukan secara rutin agar mencerminkan kondisi ketahanan dan kerentanan pangan terbaru sebagai hasil dari pembangunan yang telah dilakukan, tidak hanya pada tingkat nasional tetapi hingga tingkat kabupaten/kota. Sejalan dengan itu, pembangunan ketahanan pangan dan penanganan masalah kerawanan pangan perlu dilakukan secara komprehensif melalui pembangunan sumber daya manusia berkualitas, tidak hanya pembangunan infrastruktur semata.

1.2. Kerangka Konsep Ketahanan Pangan dan Gizi

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi, pengertian ketahanan pangan dan gizi adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan pangan dan gizi bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, memenuhi kecukupan gizi, merata dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk mewujudkan status gizi yang baik agar dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.

Kerangka konseptual ketahanan pangan dan gizi dalam penyusunan FSVA 2024 (Gambar 1.1) dibangun berdasarkan tiga pilar ketahanan pangan: ketersediaan pangan, akses pangan dan pemanfaatan pangan, serta mengintegrasikan aspek gizi dan keamanan pangan di dalam keseluruhan pilar tersebut. Pilar ketersediaan pangan didefinisikan sebagai kondisi tersedianya pangan dari hasil produksi dalam negeri, cadangan pangan, serta impor dan bantuan pangan.

Pilar akses atau keterjangkauan pangan pada tingkat rumah tangga didefinisikan sebagai kemampuan rumah tangga untuk memperoleh cukup pangan yang bergizi, melalui satu atau kombinasi dari berbagai sumber pangan seperti: produksi sendiri, persediaan pangan yang dimiliki rumah tangga, pembelian, barter, hadiah dan sajian dalam suatu pertemuan, pinjaman dan bantuan pangan. Dalam

kerangka ketahanan pangan, akses atas pangan menjadi penting karena pangan yang tersedia dalam jumlah yang cukup di suatu wilayah belum tentu dapat dimanfaatkan apabila rumah tangga tersebut memiliki keterbatasan akses fisik, ekonomi atau sosial.

Pilar pemanfaatan pangan merujuk pada penggunaan pangan oleh rumah tangga dan kemampuan individu untuk mengkonsumsi pangan dan tubuh dapat menyerap dan memetabolisme zat gizi dengan baik. Pemanfaatan pangan meliputi cara penyimpanan, pengolahan, penyiapan dan pemenuhan persyaratan keamanan makanan dan minuman. Pemanfaatan pangan juga berkaitan dengan kondisi kebersihan, kebiasaan pemberian makan (terutama bagi individu dengan kebutuhan makanan khusus), distribusi makanan dalam rumah tangga sesuai dengan kebutuhan individu (pertumbuhan, kehamilan dan menyusui), dan status kesehatan setiap anggota rumah tangga. Mengingat peran yang besar dari seorang ibu dalam meningkatkan status gizi keluarga, terutama untuk bayi dan anak-anak, pendidikan ibu sering digunakan sebagai salah satu *proxy* untuk mengukur kualitas pemanfaatan pangan rumah tangga.



Gambar 1.1. Kerangka Konseptual Ketahanan Pangan dan Gizi

Untuk mendukung berjalannya ketiga pilar tersebut secara konvergen, diperlukan lingkungan strategis di tingkat nasional dan daerah yang kondusif, di antaranya: situasi politik dan ekonomi makro yang kondusif; perdagangan internasional dan domestik yang berkeadilan bagi pelaku usaha pangan (termasuk petani) dan konsumen (terutama kelompok masyarakat berpendapatan rendah); ketersediaan sumber daya alam yang pengelolaannya mengacu pada prinsip pembangunan berkelanjutan; kemampuan adaptasi dan mitigasi perubahan kondisi iklim; serta ketersediaan infrastruktur dan teknologi serta inovasi yang mendukung bagi peningkatan aneka ragam produksi dan pengolahan pangan dengan pertumbuhan yang berlanjut setiap tahun.

Pencapaian ketahanan pangan dan gizi tercermin dari status pangan dan gizi individu atau perseorangan yang memiliki kemampuan menjalani hidup sehat, aktif, dan produktif serta kreatif secara berkelanjutan. Dengan kualitas individu seperti itu, kualitas SDM Indonesia secara keseluruhan diharapkan mampu berkিপrah dan bersaing dalam tataran pergaulan global.





BAB 2

METODOLOGI





2.1. Indikator dan Sumber Data FSVA

Ketahanan dan kerentanan pangan merupakan permasalahan multi-dimensi yang membutuhkan penanganan secara komprehensif dari berbagai sektor. Kompleksitas masalah ketahanan pangan dapat dikurangi dengan memilah beberapa indikator *proxy* yang dipakai ke dalam tiga kelompok yang berbeda tetapi saling berhubungan, yaitu ketersediaan pangan, keterjangkauan pangan, dan pemanfaatan pangan.

Berdasarkan hasil telaah Tim FSVA, sembilan indikator digunakan untuk mengukur ketahanan dan kerentanan terhadap kerawanan pangan kronis (Tabel 2.1). Kerentanan terhadap kerawanan pangan kronis adalah ketidakmampuan jangka panjang untuk memenuhi kebutuhan pangan minimum dan berhubungan dengan kondisi ekosistem wilayah setempat serta faktor-faktor fisik, sosial, dan lingkungan yang tidak berubah dengan cepat. Faktor tersebut antara lain kondisi iklim, sumber daya alam (lahan, air), sumber daya genetik tanaman dan hewan, sistem pemerintahan daerah, infrastruktur publik, pola hubungan sosial, pola kepemilikan dan pengusahaan lahan, distribusi pendapatan, dan tingkat pendidikan kepala rumah tangga.

Indikator kerentanan terhadap kerawanan pangan dan gizi kronis, yaitu rasio konsumsi pangan terhadap produksi (padi, jagung, ubi kayu, ubi jalar, dan sagu), persentase penduduk miskin, pangsa pengeluaran pangan rumah tangga terhadap pengeluaran total, infrastruktur listrik, akses terhadap air minum dan fasilitas kesehatan, angka harapan hidup, tingkat pendidikan perempuan dan stunting pada balita. Pemilihan indikator didasarkan pada: (i) keterwakilan tiga pilar ketahanan pangan; (ii) tingkat sensitivitas dalam mengukur situasi ketahanan pangan dan gizi; dan (iii) ketersediaan data secara berkala.

FSVA juga menyajikan informasi terkait data kejadian bencana alam yang memiliki dampak terhadap ketahanan pangan, estimasi hilangnya produksi padi yang disebabkan oleh banjir, kekeringan dan organisme pengganggu tanaman, serta variabilitas curah hujan. Perubahan faktor dinamis tersebut mempengaruhi penyediaan, aksesibilitas dan pemanfaatan pangan yang menyebabkan menurunnya ketahanan pangan, dan akhirnya menyebabkan kerawanan pangan kronis.

Tabel 2.1.
Ringkasan Indikator dan Sumber Data FSVA Nasional Tahun 2024

Indikator	Definisi	Sumber Data
Ketersediaan Pangan		
Rasio konsumsi normatif per kapita terhadap produksi bersih beras, jagung, ubi jalar, ubi kayu, dan sagu, serta stok beras pemerintah daerah dan bantuan pangan	Rasio konsumsi normatif per kapita terhadap produksi bersih serealida dan umbi-umbian (padi, jagung, ubi kayu, ubi jalar, dan sagu), serta stok beras pemerintah daerah. Konsumsi normatif serealida dan umbi-umbian adalah 300 gram/kapita/hari	<ul style="list-style-type: none"> • BPS 2023 (Produksi Padi) • Kementan 2023 (Produksi Jagung, Ubi Kayu, Ubi Jalar, dan Sagu) • Bapanas 2023 (CPPD dan Bantuan CPP)
Akses Pangan		
Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan	Dikategorikan miskin apabila pengeluaran per kapita sebulan lebih rendah dari garis kemiskinan	BPS 2023 (SUSENAS)
Persentase rumah tangga dengan proporsi pengeluaran untuk pangan lebih dari 65 persen terhadap total pengeluaran	Rumah tangga dengan proporsi pengeluaran untuk makanan lebih dari 65% dibandingkan dengan total pengeluaran (makanan dan non makanan) rumah tangga	BPS 2023 (SUSENAS)
Persentase rumah tangga tanpa akses listrik	Rumah tangga yang tidak memiliki akses terhadap listrik dari PLN dan/atau non PLN, misalnya generator	BPS 2023 (SUSENAS)
Pemanfaatan Pangan		
Rata-rata lama sekolah perempuan di atas 15 tahun	Rata-rata lama bersekolah (total tahun bersekolah sampai pendidikan tertinggi yang ditamatkan dan kelas tertinggi yang pernah diduduki) oleh perempuan berumur 15 tahun ke atas	BPS 2023 (SUSENAS)
Persentase rumah tangga tanpa akses ke air bersih	Rumah tangga yang menggunakan sumber utama air untuk minum berasal dari sumber tak terlindung, mata air tak terlindung, air permukaan, air hujan, dan lainnya dengan jarak kurang dari 10 meter ke jamban	BPS 2023 (SUSENAS)
Rasio jumlah penduduk per tenaga kesehatan terhadap tingkat kepadatan penduduk	Jumlah penduduk per jumlah tenaga kesehatan (dokter umum, dokter spesialis, dokter gigi, bidan, tenaga kesehatan masyarakat, tenaga gizi, tenaga keterampilan fisik, dan tenaga keteknisian medis) dibandingkan dengan tingkat kepadatan penduduk	Kementerian Kesehatan 2023 (Sistem Informasi SDM Kesehatan)
Persentase balita dengan tinggi badan di bawah standar (<i>stunting</i>)	Anak di bawah lima tahun yang tinggi badannya kurang dari -2 Standar Deviasi (-2 SD) dengan indeks tinggi badan menurut	Kementerian Kesehatan 2023 (Survei Kesehatan Indonesia)

Indikator	Definisi	Sumber Data
	umur (TB/U) dari referensi khusus untuk tinggi badan terhadap usia dan jenis kelamin (Standar WHO, 2005)	
Angka harapan hidup pada saat lahir	Perkiraan lama hidup rata-rata bayi baru lahir dengan asumsi tidak ada perubahan pola mortalitas sepanjang hidupnya	BPS 2023 (Umur Harapan Hidup Saat Lahir)
Sumber Daya Alam dan Ketangguhan Terhadap Bencana		
Bencana alam	Bencana alam yang terjadi yang diperkirakan berdampak terhadap ketahanan pangan.	BNPB 2023 (Data 5 tahun terakhir)
Variabilitas curah hujan	Perubahan curah hujan bulanan yang disebabkan oleh perubahan suhu permukaan laut sebesar satu derajat celsius.	BMKG 2023
Kehilangan produksi	Kehilangan produksi tanaman pangan akibat banjir, kekeringan dan organisme pengganggu tanaman (OPT).	Kementerian Pertanian 2023

2.2. Analisis

Analisis Indikator Individu

Analisis indikator individu dilakukan dengan mengelompokkan indikator individu ke dalam beberapa kelas berdasarkan metode sebaran empiris atau mengikuti standar pengelompokan yang sudah ditetapkan berdasarkan aturan nasional atau internasional yang berlaku. Berdasarkan hal tersebut, pengelompokan delapan indikator dilakukan dengan mengikuti pola sebaran empiris, sedangkan pengelompokan satu indikator yaitu persentase balita stunting dilakukan dengan mengikuti aturan *World Health Organization* (WHO) yang disajikan pada Tabel 2.2.

Tabel 2.2.
Cut off Point Indikator Individu

Indikator	Range	Kelompok
Ketersediaan Pangan		
1 Rasio konsumsi normatif per kapita terhadap produksi bersih beras, jagung, ubi jalar, dan ubi kayu, serta stok beras pemerintah daerah dan bantuan pangan	$\geq 1,50$	Defisit tinggi
	1,25 - <1,50	Defisit sedang
	1,00 - <1,25	Defisit rendah
	0,75 - <1,00	Surplus rendah
	0,50 - <0,75	Surplus sedang
	< 0,50	Surplus tinggi
Akses terhadap Pangan		
2 Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan	≥ 35	Sangat buruk
	25 - < 35	Buruk
	20 - < 25	Agak buruk
	15 - < 20	Agak baik

Indikator	Range	Kelompok
3	10 - < 15	Baik
	<10	Sangat baik
	≥ 70	Sangat buruk
	60 - <70	Buruk
	50 - <60	Agak buruk
	40 - <50	Agak baik
4	30 - <40	Baik
	< 30	Sangat baik
	≥ 50	Sangat buruk
	40 - < 50	Buruk
	30 - < 40	Agak buruk
	20 - < 30	Agak baik
5	10 - < 20	Baik
	< 10	Sangat baik
	< 6	Sangat buruk
	6 - < 6,5	Buruk
	6,5 - < 7,5	Agak buruk
	7,5 - < 8,5	Agak baik
6	8,5 - < 9	Baik
	≥ 9	Sangat baik
	≥ 70	Sangat buruk
	60 - <70	Buruk
	50 - <60	Agak buruk
	40 - <50	Agak baik
7	30 - <40	Baik
	< 30	Sangat baik
	≥30	Sangat buruk
	20 - <30	Buruk
	15 - <20	Agak buruk
	10 - <15	Agak baik
8	5 - <10	Baik
	<5	Sangat baik
	≥ 40	Sangat buruk
	30 - < 39	Buruk
	20 - < 29	Kurang
	< 20	Baik
9	≤58	Sangat buruk
	>58 – 61	Buruk
	>61 – 64	Agak buruk
	>64 – 67	Agak baik
	>67 – 70	Baik
	> 70	Sangat baik

Analisis Komposit

Berdasarkan kesepakatan dalam Kelompok Kerja Teknis FSVA, pendekatan yang diadopsi untuk analisis komposit adalah dengan menggunakan metode pembobotan. Metode pembobotan digunakan untuk menentukan tingkat kepentingan relatif indikator terhadap masing-masing aspek ketahanan pangan. Metode pembobotan dalam penyusunan FSVA mengacu pada metode yang dikembangkan oleh *The Economist Intelligence Unit* (EIU) dalam penyusunan *Global Food Security Index* (GFSI). Goodridge (2007) menyatakan bahwa apabila variabel yang digunakan dalam perhitungan indeks berbeda, maka perlu dilakukan secara tertimbang (pembobotan) untuk membentuk indeks agregat yang disesuaikan dengan tujuannya. Indeks komposit tersebut selanjutnya disebut Indeks Ketahanan Pangan (IKP).

Langkah-langkah perhitungan analisis komposit sebagai berikut:

1. Standarisasi nilai indikator dengan menggunakan *z-score* dan *distance to scale* (0 – 100)
2. Menghitung skor komposit kabupaten/kota dengan cara menjumlahkan hasil perkalian antara masing-masing nilai indikator yang sudah distandarisasi dengan bobot indikator, dengan rumus:

$$Y(j) = \sum_{i=1}^9 a_i X_{ij} \dots \dots \dots (1)$$

Keterangan:

- Y_j : Skor komposit kabupaten/kota ke-j
- a_i : Bobot masing-masing indikator ke-i
- X_{ij} : Nilai standarisasi masing-masing indikator ke-i pada kabupaten/kota ke-j
- i : Indikator ke 1, 2, ..., 9
- j : Kabupaten ke 1, 2, ..., 416; Kota ke 1, 2, ..., 98

Besaran bobot masing-masing indikator berdasarkan rekomendasi para ahli (*expert judgement*) yang berasal dari akademisi dan pemerintah. Khusus untuk analisis wilayah perkotaan hanya menggunakan delapan indikator yang berasal dari aspek keterjangkauan dan pemanfaatan pangan, mengingat ketersediaan pangan di tingkat perkotaan secara umum tidak dipengaruhi oleh produksi yang berasal dari wilayah sendiri tetapi berasal dari perdagangan antar wilayah. Oleh karena itu, pada perhitungan komposit wilayah perkotaan indikator rasio konsumsi normatif terhadap produksi bersih tidak digunakan. Nilai bobot 0,30 dari indikator aspek ketersediaan pangan kemudian dialihkan kepada delapan indikator lain secara proporsional berdasarkan masing-masing aspek. Bobot setiap indikator mencerminkan signifikansi atau pentingnya indikator tersebut dalam menentukan tingkat ketahanan pangan suatu wilayah (Tabel 2.3).

Tabel 2.3.
Bobot Indikator Individu

No	Indikator	Bobot	
		Kabupaten	Kota
Aspek Ketersediaan Pangan			
1	Rasio konsumsi normatif per kapita terhadap produksi bersih beras, jagung, ubi jalar, dan ubi kayu, serta stok beras pemerintah daerah dan bantuan pangan	0,30	-
Sub Total		0,30	-

No	Indikator	Bobot	
		Kabupaten	Kota
Aspek Keterjangkauan Pangan			
2	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan	0,15	0,20
3	Persentase rumah tangga dengan proporsi pengeluaran untuk pangan lebih dari 65 persen terhadap total pengeluaran	0,075	0,125
4	Persentase rumah tangga tanpa akses listrik	0,075	0,125
Sub Total		0,30	0,45
Aspek Pemanfaatan Pangan			
5	Persentase rumah tangga tanpa akses ke air bersih	0,15	0,18
6	Angka harapan hidup pada saat lahir	0,10	0,13
7	Rata-rata lama sekolah perempuan di atas 15 tahun	0,05	0,08
8	Rasio jumlah penduduk per tenaga kesehatan terhadap tingkat kepadatan penduduk	0,05	0,08
9	Persentase balita dengan tinggi badan di bawah standar (stunting)	0,05	0,08
Sub Total		0,40	0,55

3. Mengelompokkan kabupaten/kota ke dalam enam kelompok prioritas berdasarkan *cut off point* skor komposit (Tabel 2.4). Skor komposit yang dihasilkan pada masing-masing wilayah (Indeks Ketahanan Pangan) dibagi ke dalam 6 kelompok berdasarkan *cut off point* skor komposit. *Cut off point* skor komposit merupakan hasil penjumlahan dari masing-masing perkalian antara bobot indikator individu dengan *cut off point* indikator individu hasil standarisasi *z-score* dan *distance to scale* (0-100).

$$K(j) = \sum_{i=1}^9 a_i C_{ij} \dots \dots \dots (2)$$

Keterangan:

- K_j : *Cut off point* skor komposit ke-j
- a_i : Bobot indikator ke-i
- C_{ij} : Nilai standarisasi *cut off point* indikator ke-i komposit ke-j
- i : indikator ke 1,2,3,.....9
- j : komposit ke 1,2,3,.....6

Tabel 2.4.
Cut off Point Skor Komposit

Kelompok IKP	Kabupaten	Kota
1	<= 41,52	<= 28,84
2	> 41,52 – 51,42	> 28,84 – 41,44
3	> 51,42 – 59,58	> 41,44 – 51,29
4	> 59,58 – 67,75	> 51,29 – 61,13
5	> 67,75 – 75,68	> 61,13 – 70,64
6	> 75,68	> 70,64

Kabupaten/kota diklasifikasikan dalam enam kelompok ketahanan pangan dan gizi berdasarkan tingkat kerentanan pangan. Kabupaten/kota yang berada pada Prioritas 1, 2 dan 3 merupakan wilayah rentan pangan dengan klasifikasi sangat rentan (Prioritas 1), rentan (Prioritas 2), dan agak rentan (Prioritas 3). Kabupaten/kota pada Prioritas 4, 5, dan 6 merupakan wilayah tahan pangan dengan klasifikasi agak tahan (Prioritas 4), tahan (Prioritas 5), dan sangat tahan (Prioritas 6). Tujuan dari penentuan prioritas ini adalah untuk mengidentifikasi kabupaten/kota yang lebih rentan terhadap terjadinya kerawanan pangan dan gizi serta mengukur perubahan statusnya dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Pemetaan

Hasil analisis indikator individu dan komposit kemudian divisualisasikan oleh Badan Informasi Geospasial (BIG) dalam bentuk peta dengan menggunakan *software ArcGIS*. Peta-peta yang dihasilkan menggunakan pola warna seragam dalam gradasi warna merah dan hijau. Gradasi merah menunjukkan variasi tingkat kerentanan pangan dan gradasi hijau menunjukkan variasi ketahanan pangan. Untuk kedua kelompok warna tersebut, warna yang semakin tua menunjukkan tingkat yang lebih tinggi dari ketahanan atau kerentanan pangan.

2.3. Pembahasan Hasil Analisis FSVA

Penyusunan FSVA 2024 untuk 416 kabupaten dan 98 kota dilakukan secara terpisah antara kabupaten dan kota atas dasar pertimbangan terdapat perbedaan karakteristik penentu ketahanan pangan antara kabupaten dan kota. Pada FSVA 2024 pembahasan masih mencakup 34 provinsi belum memperhitungkan pemekaran provinsi Daerah Otonom Baru (DOB). Data yang digunakan dalam penyusunan FSVA 2024 merupakan data-data tahun 2023, sehingga hasil analisis yang diperoleh akan memberi gambaran status ketahanan pangan wilayah tahun 2023.

Status kerentanan terhadap kerawanan pangan suatu wilayah tidak menggambarkan bahwa daerah tersebut mengalami kerawanan pangan, akan tetapi memberi peringatan kepada pengambil kebijakan bahwa ada wilayah yang berpotensi rawan pangan. Apabila tanpa intervensi yang tepat dan sistematis, maka daerah rentan tersebut dapat berubah menjadi rawan pangan. Oleh karena itu dalam analisis FSVA ini juga tersedia preskripsi atau resep umum untuk mencegah dan mengatasi masalah agar situasi tidak mengarah pada kerawanan pangan. Tentunya preskripsi ini harus dijabarkan lebih rinci sesuai situasi dan kondisi masing-masing daerah.

Penting untuk menegaskan bahwa indikator yang disajikan adalah rata-rata wilayah sehingga suatu kabupaten/kota yang diidentifikasi relatif lebih tahan pangan (kelompok Prioritas 4-6), tidak berarti semua kecamatan, desa serta penduduk di dalamnya juga tahan pangan. Demikian juga, tidak semua kecamatan, desa serta penduduk di kabupaten Prioritas 1-3 tergolong rentan pangan. Untuk dapat mengidentifikasi daerah mana yang benar-benar rentan pangan pada level kecamatan dan desa, diperlukan adanya tindak lanjut berupa pembuatan peta provinsi dan kabupaten hingga unit wilayah terkecil.





**HAPUS
RAWAN
PANGAN
INDONESIA**



BAB 3
SITUASI KETAHANAN
PANGAN DAN GIZI





3.1. Ketahanan Pangan di Indonesia

Hasil Analisis Wilayah Kabupaten

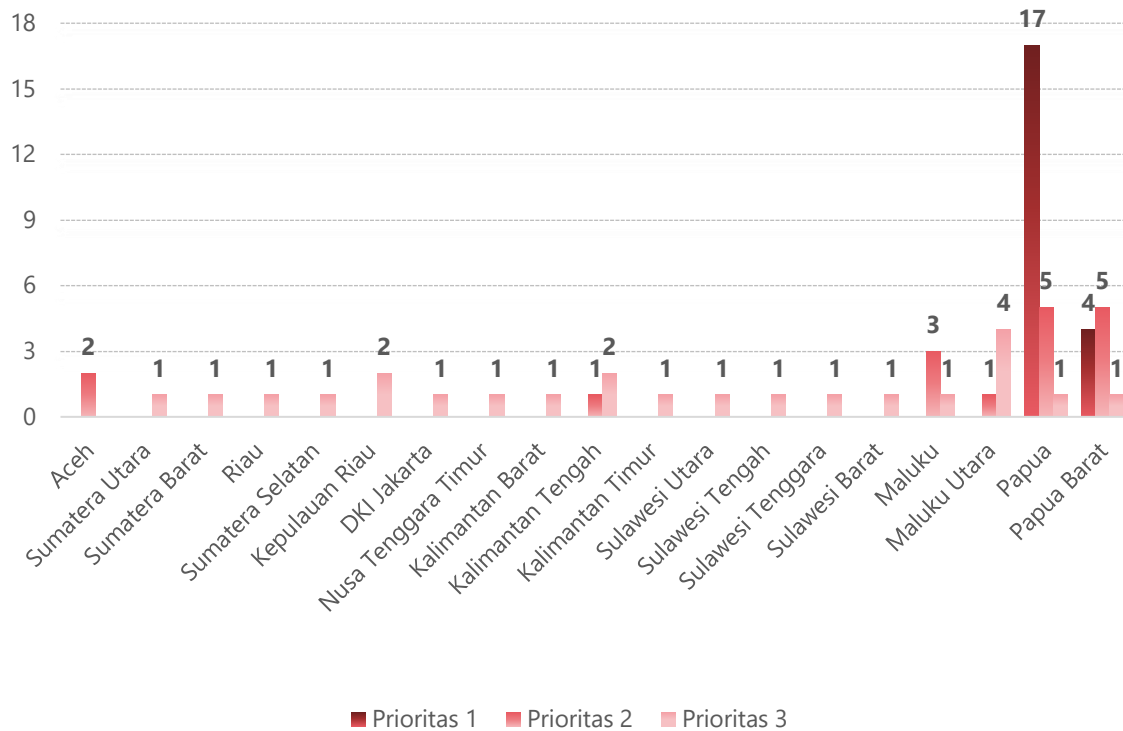
Dari total 416 kabupaten, sebanyak 61 kabupaten (14,66%) termasuk ke dalam Prioritas 1-3 (rentan rawan pangan) dan sebanyak 355 kabupaten (85,34%) lain telah masuk Prioritas 4-6 (tahan pangan) dengan rincian sebagai berikut: 21 kabupaten Prioritas 1 (sangat rentan), 17 kabupaten Prioritas 2 (rentan), 23 kabupaten Prioritas 3 (agak rentan), 39 kabupaten Prioritas 4 (agak tahan), 71 kabupaten Prioritas 5 (tahan), dan 245 kabupaten Prioritas 6 (sangat tahan).

Secara umum, indikator yang menyebabkan kerentanan terhadap kerawanan pangan di 416 kabupaten adalah:

- a. tingginya rasio konsumsi per kapita terhadap ketersediaan bersih per kapita,
- b. tingginya prevalensi balita *stunting*,
- c. tingginya persentase penduduk hidup di bawah garis kemiskinan, dan
- d. tingginya persentase rumah tangga tanpa akses air bersih.

Secara umum kabupaten di provinsi di wilayah timur Indonesia memiliki tingkat ketahanan pangan yang lebih rendah dibandingkan wilayah barat Indonesia. Selain itu, kabupaten yang terletak di kepulauan juga memiliki tingkat kerentanan terhadap kerawanan pangan yang lebih tinggi dibandingkan daerah bukan kepulauan dengan penyebab/karakteristik yang sama. Sebaran kabupaten rentan rawan pangan sebagai berikut (Gambar 3.1):

- a. Kabupaten Prioritas 1 di Provinsi Papua dan Papua Barat.
- b. Kabupaten Prioritas 2 di Provinsi Papua, Papua Barat, Maluku Utara, Maluku, Kalimantan Tengah, dan Aceh.
- c. Kabupaten Prioritas 3 di Provinsi Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Sumatera Selatan, Kepulauan Riau, DKI Jakarta, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat.



Gambar 3.1. Sebaran Kabupaten Rentan Rawan Pangan

Provinsi yang memiliki kabupaten dengan tingkat kerentanan terhadap kerawanan pangan yang tinggi (Prioritas 1) adalah Provinsi Papua dan Papua Barat yaitu 60,71% kabupaten di Provinsi Papua dan 33,33% di Provinsi Papua Barat. Sebaliknya wilayah kabupaten dengan kategori sangat tahan (Prioritas 6) berada Provinsi Lampung, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Bali dan Gorontalo (Tabel 3.1).

Tabel 3.1. Persentase Kabupaten Berdasarkan Kelompok Prioritas per Provinsi

Provinsi	Prioritas						Total
	1	2	3	4	5	6	
Aceh	0%	11%	0%	0%	11%	78%	100%
Sumatera Utara	0%	0%	4%	8%	24%	64%	100%
Sumatera Barat	0%	0%	8%	0%	0%	92%	100%
Riau	0%	0%	10%	30%	50%	10%	100%
Jambi	0%	0%	0%	11%	78%	11%	100%
Sumatera Selatan	0%	0%	8%	8%	31%	54%	100%
Bengkulu	0%	0%	0%	11%	67%	22%	100%
Lampung	0%	0%	0%	0%	0%	100%	100%
Kep. Bangka Belitung	0%	0%	0%	67%	17%	17%	100%
Kep. Riau	0%	0%	40%	60%	0%	0%	100%
DKI Jakarta*	0%	0%	100%	0%	0%	0%	100%
Jawa Barat	0%	0%	0%	0%	6%	94%	100%
Jawa Tengah	0%	0%	0%	0%	0%	100%	100%

Provinsi	Prioritas						Total
	1	2	3	4	5	6	
Di Yogyakarta	0%	0%	0%	0%	0%	100%	100%
Jawa Timur	0%	0%	0%	0%	3%	97%	100%
Banten	0%	0%	0%	0%	50%	50%	100%
Bali	0%	0%	0%	0%	0%	100%	100%
Nusa Tenggara Barat	0%	0%	0%	0%	25%	75%	100%
Nusa Tenggara Timur	0%	0%	5%	24%	52%	19%	100%
Kalimantan Barat	0%	0%	8%	0%	42%	50%	100%
Kalimantan Tengah	0%	8%	15%	31%	8%	38%	100%
Kalimantan Selatan	0%	0%	0%	0%	9%	91%	100%
Kalimantan Timur	0%	0%	14%	29%	0%	57%	100%
Kalimantan Utara	0%	0%	0%	25%	25%	50%	100%
Sulawesi Utara	0%	0%	9%	9%	27%	55%	100%
Sulawesi Tengah	0%	0%	8%	8%	17%	67%	100%
Sulawesi Selatan	0%	0%	0%	0%	5%	95%	100%
Sulawesi Tenggara	0%	0%	7%	13%	27%	53%	100%
Gorontalo	0%	0%	0%	0%	0%	100%	100%
Sulawesi Barat	0%	0%	17%	17%	17%	50%	100%
Maluku	0%	33%	11%	22%	22%	11%	100%
Maluku Utara	0%	13%	50%	25%	0%	13%	100%
Papua Barat	33%	42%	8%	0%	17%	0%	100%
Papua	61%	18%	4%	11%	0%	7%	100%
Total	5%	4%	6%	9%	17%	59%	100%

*DKI Jakarta hanya memiliki 1 Kabupaten yaitu Kepulauan Seribu

Kabupaten-kabupaten yang termasuk dalam Prioritas 1-3 (61 kabupaten) perlu mendapatkan perhatian khusus oleh pemerintah, baik pusat maupun daerah. Penyebab kerentanan pangan di wilayah tersebut adalah: i) tingginya rasio konsumsi per kapita terhadap ketersediaan bersih per kapita, ii) tingginya prevalensi balita *stunting*, iii) tingginya persentase penduduk hidup di bawah garis kemiskinan, dan iv) tingginya persentase rumah tangga tanpa akses air bersih.

Rata-rata rasio konsumsi normatif terhadap produksi pangan di daerah rentan rawan pangan Prioritas 1-3 adalah 4,66, yang artinya kebutuhan pangan di wilayah tersebut lebih tinggi empat kali dibandingkan dari kemampuan wilayah tersebut untuk memproduksi pangan. Oleh karena itu, kabupaten-kabupaten tersebut sangat tergantung pada *supply* pangan dari wilayah lain yang merupakan daerah sentra untuk memenuhi kebutuhan pangan penduduknya.

Rata-rata persentase balita *stunting* pada daerah rentan pangan sebesar 31,33%. Angka tersebut jauh lebih tinggi dibandingkan dengan angka *stunting* di kabupaten tahan pangan, yaitu 23,30%. Penyebab terjadinya *stunting* pada balita bersifat multifaktor, baik langsung maupun tidak langsung. Memperhatikan kondisi tersebut, maka penanganan *stunting* harus dilaksanakan oleh lintas sektor dengan program-program yang koheren. Program penanganan *stunting* tidak hanya dilaksanakan di kabupaten rentan rawan pangan saja namun juga di kabupaten yang tahan pangan.

Rata-rata angka kemiskinan di kabupaten rentan rawan pangan sebesar 21,68%, sedangkan di kabupaten tahan pangan sebesar 11,08%. Angka ini di atas rata-rata angka kemiskinan nasional yang sebesar 9,36% (Susenas Maret 2023). Diperlukan program/kegiatan langsung ke masyarakat untuk meningkatkan pendapatan/daya beli seperti penciptaan lapangan kerja baru.

Indikator persentase rumah tangga tanpa akses air bersih di kabupaten rentan rawan pangan rata-rata sebesar 53,47%, sedangkan pada kabupaten tahan pangan sebesar 29,07%. Ketersediaan air bersih masih menjadi masalah baik di kabupaten rentan maupun tahan pangan. Oleh karena itu, pembangunan dan perbaikan sarana dan prasarana akses air bersih harus terus dilaksanakan di seluruh wilayah Indonesia. Air bersih merupakan bagian dari persyaratan untuk hidup sehat, aktif, dan produktif sebagaimana asupan konsumsi yang beragam, bergizi, seimbang, dan aman.

Ketersediaan pangan, stunting, kemiskinan, dan air bersih merupakan indikator yang sering muncul sebagai penyebab kerentanan terhadap kerawanan pangan di wilayah rentan rawan pangan. Namun, penyebab kerawanan pangan di tiap kabupaten berbeda-beda, sehingga penanganannya diperlukan pendekatan spesifik wilayah. Nilai rata-rata kelompok kabupaten prioritas rentan dan tahan pangan disajikan dalam Tabel 3.2.

Tabel 3.2.
Nilai Rata-Rata Kelompok Kabupaten Prioritas Rentan dan Prioritas Tahan Pangan

Indikator	Prioritas Rentan (1 – 3)	Prioritas Tahan (4 – 6)
Rasio konsumsi terhadap produksi	4,66	1,13
Angka kemiskinan	21,68	11,08
Pengeluaran pangan >65%	31,95	26,34
Terbatasnya akses ke listrik	14,83	0,88
Terbatasnya akses ke air bersih	53,47	29,07
Angka harapan hidup	66,08	70,21
Rasio penduduk per tenaga kesehatan	16,56	2,95
Lama sekolah perempuan >15 tahun	7,69	8,50
Stunting pada balita	31,33	23,30

Hasil Analisis Wilayah Perkotaan

Secara umum, wilayah perkotaan memiliki tingkat ketahanan pangan yang lebih baik dibandingkan dengan wilayah kabupaten (Tabel 3.3). Dari 98 kota, satu kota (1,02%) masuk kelompok Prioritas 1-3 (rentan terhadap kerawanan pangan) dan 97 kota (98,98%) masuk kelompok Prioritas 4-6 (tahan terhadap kerawanan pangan) dengan rincian sebagai berikut: satu kota merupakan Prioritas 2, dua kota Prioritas 4, lima kota Prioritas 5 dan 90 kota Prioritas 6. Provinsi yang memiliki wilayah perkotaan rentan rawan pangan adalah Aceh yang masuk ke Prioritas 2 yaitu Kota Subulussalam. Kota tersebut dikategorikan daerah rentan pangan karena tingginya persentase rumah tangga tanpa akses ke air bersih.

Tabel 3.3.
Persentase Kota Berdasarkan Kelompok Prioritas per Provinsi

Provinsi	Prioritas						Total
	1	2	3	4	5	6	
Aceh	0%	20%	0%	0%	0%	80%	100%
Sumatera Utara	0%	0%	0%	0%	13%	88%	100%
Sumatera Barat	0%	0%	0%	0%	0%	100%	100%
Riau	0%	0%	0%	0%	0%	100%	100%
Jambi	0%	0%	0%	0%	0%	100%	100%
Sumatera Selatan	0%	0%	0%	25%	50%	25%	100%
Bengkulu	0%	0%	0%	0%	0%	100%	100%
Lampung	0%	0%	0%	0%	0%	100%	100%
Kep. Bangka Belitung	0%	0%	0%	0%	0%	100%	100%
Kep. Riau	0%	0%	0%	0%	0%	100%	100%
DKI Jakarta	0%	0%	0%	0%	0%	100%	100%
Jawa Barat	0%	0%	0%	0%	0%	100%	100%
Jawa Tengah	0%	0%	0%	0%	0%	100%	100%
Di Yogyakarta	0%	0%	0%	0%	0%	100%	100%
Jawa Timur	0%	0%	0%	0%	0%	100%	100%
Banten	0%	0%	0%	0%	0%	100%	100%
Bali	0%	0%	0%	0%	0%	100%	100%
Nusa Tenggara Barat	0%	0%	0%	0%	0%	100%	100%
Nusa Tenggara Timur	0%	0%	0%	0%	0%	100%	100%
Kalimantan Barat	0%	0%	0%	0%	50%	50%	100%
Kalimantan Tengah	0%	0%	0%	0%	0%	100%	100%
Kalimantan Selatan	0%	0%	0%	0%	0%	100%	100%
Kalimantan Timur	0%	0%	0%	0%	0%	100%	100%
Kalimantan Utara	0%	0%	0%	0%	0%	100%	100%
Sulawesi Utara	0%	0%	0%	0%	0%	100%	100%
Sulawesi Tengah	0%	0%	0%	0%	0%	100%	100%
Sulawesi Selatan	0%	0%	0%	0%	0%	100%	100%
Sulawesi Tenggara	0%	0%	0%	0%	0%	100%	100%
Gorontalo	0%	0%	0%	0%	0%	100%	100%
Maluku	0%	0%	0%	50%	0%	50%	100%
Maluku Utara	0%	0%	0%	0%	50%	50%	100%
Papua Barat	0%	0%	0%	0%	0%	100%	100%
Papua	0%	0%	0%	0%	0%	100%	100%
Total	0%	1%	0%	2%	5%	92%	100%

Secara umum, indikator yang menyebabkan tingginya angka kerentanan terhadap rawan pangan di wilayah perkotaan adalah: i) tingginya prevalensi balita *stunting*, ii) tingginya persentase rumah tangga tanpa akses air bersih, dan iii) tingginya persentase penduduk hidup di bawah garis kemiskinan (Tabel 3.4). Rata-rata persentase balita *stunting* pada wilayah kota rentan pangan sebesar 29,60%, sedangkan di kota tahan pangan sebesar 18,91%.

Persentase rumah tangga tanpa akses air bersih pada kota rentan pangan sebesar 55,11%, sedangkan di kota tahan pangan sebesar 11,48%. Persentase penduduk hidup di bawah garis kemiskinan pada kota rentan pangan sebesar 16,41%, sedangkan di kota tahan pangan sebesar 6,59%. Ketiga indikator tersebut menunjukkan perbedaan yang signifikan antara kota tahan pangan dan kota rentan pangan. Pengentasan daerah rentan rawan pangan wilayah perkotaan juga harus dilakukan secara spesifik sesuai dengan akar utama penyebab kerentanan terhadap kerawanan pangan di wilayah tersebut.

Tabel 3.4.
Nilai Rata-rata Kelompok Kota Prioritas Rentan dan Prioritas Tahan

Indikator	Prioritas Rentan (1 – 3)	Prioritas Tahan (4 – 6)
Angka kemiskinan	16,41	6,59
Pengeluaran pangan >65%	26,01	11,83
Terbatasnya akses ke listrik	0,00	0,06
Terbatasnya akses ke air bersih	55,11	11,48
Angka harapan hidup	64,41	72,82
Rasio penduduk per tenaga kesehatan	1,40	0,13
Lama sekolah perempuan >15 tahun	8,78	10,85
<i>Stunting</i> pada balita	29,60	18,91

Peta 3.1.

Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Tahun 2024



LEGENDA

Batas Administrasi

- ibukota Provinsi
- Batas Negara
- Batas Provinsi
- Danau

Datum : WGS 84
Sistem Koordinat : Geografis
Referensi Spasial : SRG 2013

0 125 250 500 750 1.000 km

Batimetri (meter)

- 0 - <200
- 200 - <500
- 500 - <1000
- 1000 - <2000
- 2000 - <4000
- 4000 - <6000
- 6000 - <8000
- >8000

Kerentanan Berdasarkan Indeks Ketahanan Pangan Komposit

- Sangat Rentan
- Rentan
- Agak Rentan
- Agak Tahan
- Tahan
- Sangat Tahan

- Sumber Data :
1. KSA Paqi 2023, BPS
 2. SUSENAS 2023, BPS
 3. Data UHHSI 2023, BPS
 4. Data produksi jagung, ubi kayu, ubi jalar, dan sagu 2023, Kementan
 5. Data CPPD dan Bantuan Pangan CPP 2023, Bapenas
 6. SKI 2023, Kemenkes
 7. SISDMK 2023, Kemenkes
 8. Peta Batas Wilayah RBI 2023, BIG
 9. Batimetri Indonesia

Riwayat Peta :

Peta ini disusun berdasarkan hasil analise komposit data indikator ketahanan pangan pada kabupaten dan kota. Nilai cut-off skor komposit menentukan klasifikasi kerentanan pangan pada tingkat kabupaten dan kota.

Diproduksi Oleh :
Badan Pangan Nasional Tahun 2024

3.2. Perubahan Status Ketahanan Pangan

Perubahan tingkat kerentanan terhadap kerawanan pangan dilihat dengan membandingkan kondisi 416 kabupaten dan 98 kota antara FSVA tahun 2023 dan 2024. Jumlah kabupaten/kota rentan rawan pangan (Prioritas 1-3) mengalami penurunan dari 68 kabupaten/kota pada FSVA tahun 2023 menjadi 62 kabupaten/kota pada FSVA tahun 2024. Jumlah Kabupaten/kota prioritas 1 dan prioritas 2 tidak mengalami perubahan dari tahun sebelumnya. Kabupaten/kota prioritas 3 menurun dari 29 menjadi 23 kabupaten/kota. Hal ini menunjukkan terjadinya perbaikan status ketahanan pangan wilayah kabupaten/kota (Tabel 3.5).

Tabel 3.5.
Sebaran Kabupaten/Kota per Prioritas pada FSVA Tahun 2020-2024

Prioritas	Jumlah Kabupaten/Kota				
	2020	2021	2022	2023	2024
1	27	29	26	21	21
2	19	17	16	18	18
3	24	28	32	29	23
4	47	43	48	39	41
5	113	106	108	83	76
6	284	291	284	324	335
Total kabupaten/kota	514	514	514	514	514

Perubahan Status Ketahanan Pangan Kabupaten Tahun pada FSVA Tahun 2023-2024

Hasil perbandingan status ketahanan pangan pada FSVA tahun 2023 dan 2024 menunjukkan bahwa dari total 416 kabupaten, terdapat 12,02% kabupaten mengalami kenaikan sebanyak 1 tingkat. Namun terdapat 0,24% kabupaten mengalami penurunan status sebanyak 3 tingkat, 1,44% kabupaten mengalami penurunan sebanyak 2 tingkat dan 3,61% kabupaten mengalami penurunan 1 tingkat. Kabupaten yang tidak mengalami perubahan status sebesar 82,69%. Perubahan tingkat prioritas kabupaten per provinsi secara detail terdapat pada Tabel 3.6.

Tabel 3.6.
Perubahan Tingkat Prioritas Kabupaten per Provinsi pada FSVA Tahun 2023-2024

Provinsi	Turun 3 tingkat atau lebih	Turun 2 tingkat	Turun 1 tingkat	Tidak ada perubahan	Naik 1 tingkat	Naik 2 tingkat	Naik 3 tingkat atau lebih
Aceh	0	0	0	15	3	0	0
Sumatera Utara	0	0	1	21	3	0	0
Sumatera Barat	0	0	0	11	1	0	0
Riau	0	0	0	6	4	0	0
Jambi	0	0	0	6	3	0	0
Sumatera Selatan	0	0	3	9	1	0	0

Provinsi	Turun			Tidak ada perubahan	Naik 1 tingkat	Naik 2 tingkat	Naik 3 tingkat atau lebih
	3 tingkat atau lebih	Turun 2 tingkat	Turun 1 tingkat				
Bengkulu	0	0	0	9	0	0	0
Lampung	0	0	0	10	3	0	0
Kep. Bangka Belitung	0	0	1	4	1	0	0
Kep. Riau	0	0	0	3	2	0	0
DKI Jakarta	0	0	0	1	0	0	0
Jawa Barat	0	0	0	17	1	0	0
Jawa Tengah	0	0	0	29	0	0	0
DI Yogyakarta	0	0	0	4	0	0	0
Jawa Timur	0	0	0	27	2	0	0
Banten	0	0	0	4	0	0	0
Bali	0	0	0	8	0	0	0
Nusa Tenggara Barat	0	0	0	5	3	0	0
Nusa Tenggara Timur	0	0	1	20	0	0	0
Kalimantan Barat	0	0	0	10	2	0	0
Kalimantan Tengah	0	0	0	12	1	0	0
Kalimantan Selatan	0	0	0	10	1	0	0
Kalimantan Timur	0	0	0	6	1	0	0
Kalimantan Utara	0	0	0	4	0	0	0
Sulawesi Utara	0	0	2	8	1	0	0
Sulawesi Tengah	0	0	1	9	2	0	0
Sulawesi Selatan	0	0	0	21	0	0	0
Sulawesi Tenggara	0	0	0	11	4	0	0
Gorontalo	0	0	0	5	0	0	0
Sulawesi Barat	0	0	1	4	1	0	0
Maluku	0	1	1	6	1	0	0
Maluku Utara	0	1	0	5	2	0	0
Papua Barat	0	0	2	5	5	0	0
Papua	1	4	2	19	2	0	0
Total	1	6	15	344	50	0	0

Keterangan:

1. Warna hijau sangat tua menunjukkan peningkatan prioritas sebanyak tiga tingkat atau lebih
2. Warna hijau tua menunjukkan peningkatan prioritas sebanyak dua tingkat
3. Warna hijau muda menunjukkan peningkatan prioritas sebanyak satu tingkat
4. Warna kuning menunjukkan tidak adanya perubahan prioritas
5. Warna merah muda menunjukkan penurunan sebanyak satu tingkat
6. Warna merah tua menunjukkan penurunan prioritas sebanyak dua tingkat
7. Warna merah sangat tua menunjukkan penurunan prioritas sebanyak tiga tingkat atau lebih

Perubahan Status Ketahanan Pangan Kota pada FSVA Tahun 2023-2024

Berdasarkan hasil perbandingan situasi ketahanan pangan di 98 kota, bahwa secara umum terjadi peningkatan situasi ketahanan pangan pada FSVA tahun 2023-2024. Peningkatan status pada wilayah kota tersebut secara umum disebabkan oleh penurunan angka kemiskinan, penurunan persentase rumah tangga dengan pengeluaran pangan >65% terhadap total pengeluaran, penurunan persentase rumah tangga tanpa akses listrik dan tanpa akses air bersih, peningkatan angka harapan hidup serta peningkatan rata-rata lama sekolah perempuan di atas 15 tahun. Sebanyak 1,02% kota pada FSVA tahun 2024 mengalami kenaikan 1 tingkat, yaitu Kota Padangsidempuan, serta 98,98% kota tidak mengalami perubahan status ketahanan pangan. Perubahan status ketahanan pangan dapat dilihat secara detail pada Tabel 3.7.

Tabel 3.7.
Perubahan Tingkat Prioritas Kota per Provinsi pada FSVA Tahun 2023-2024

Provinsi	Turun 3 tingkat atau lebih	Turun 2 tingkat	Turun 1 tingkat	Tidak ada perubahan	Naik 1 tingkat	Naik 2 tingkat	Naik 3 tingkat atau lebih
Aceh	0	0	0	5	0	0	0
Sumatera Utara	0	0	0	7	1	0	0
Sumatera Barat	0	0	0	7	0	0	0
Riau	0	0	0	2	0	0	0
Jambi	0	0	0	2	0	0	0
Sumatera Selatan	0	0	0	4	0	0	0
Bengkulu	0	0	0	1	0	0	0
Lampung	0	0	0	2	0	0	0
Kep. Bangka Belitung	0	0	0	1	0	0	0
Kep. Riau	0	0	0	2	0	0	0
DKI Jakarta	0	0	0	5	0	0	0
Jawa Barat	0	0	0	9	0	0	0
Jawa Tengah	0	0	0	6	0	0	0
DI Yogyakarta	0	0	0	1	0	0	0
Jawa Timur	0	0	0	9	0	0	0
Banten	0	0	0	4	0	0	0
Bali	0	0	0	1	0	0	0
Nusa Tenggara Barat	0	0	0	2	0	0	0
Nusa Tenggara Timur	0	0	0	1	0	0	0
Kalimantan Barat	0	0	0	2	0	0	0
Kalimantan Tengah	0	0	0	1	0	0	0
Kalimantan Selatan	0	0	0	2	0	0	0
Kalimantan Timur	0	0	0	3	0	0	0
Kalimantan Utara	0	0	0	1	0	0	0
Sulawesi Utara	0	0	0	4	0	0	0

Provinsi	Turun				Tidak ada perubahan	Naik 1 tingkat	Naik 2 tingkat	Naik 3 tingkat atau lebih
	3 tingkat atau lebih	Turun 2 tingkat	Turun 1 tingkat					
Sulawesi Tengah	0	0	0	1	0	0	0	
Sulawesi Selatan	0	0	0	3	0	0	0	
Sulawesi Tenggara	0	0	0	2	0	0	0	
Gorontalo	0	0	0	1	0	0	0	
Maluku	0	0	0	2	0	0	0	
Maluku Utara	0	0	0	2	0	0	0	
Papua Barat	0	0	0	1	0	0	0	
Papua	0	0	0	1	0	0	0	
Total	0	0	0	97	1	0	0	

Keterangan:

1. Warna hijau sangat tua menunjukkan peningkatan prioritas sebanyak tiga tingkat atau lebih
2. Warna hijau tua menunjukkan peningkatan prioritas sebanyak dua tingkat
3. Warna hijau muda menunjukkan peningkatan prioritas sebanyak satu tingkat
4. Warna kuning menunjukkan tidak adanya perubahan prioritas
5. Warna merah muda menunjukkan penurunan sebanyak satu tingkat
6. Warna merah tua menunjukkan penurunan prioritas sebanyak dua tingkat
7. Warna merah sangat tua menunjukkan penurunan prioritas sebanyak tiga tingkat atau lebih

Perbandingan dengan Ukuran Internasional

Global Hunger Index (GHI) dirancang untuk mengukur tingkat kelaparan (*hunger*) yang terjadi di sebuah negara secara komprehensif yang mencerminkan berbagai dimensi kelaparan dari waktu ke waktu. Indikator yang digunakan dalam dalam GHI meliputi 1) prevalensi kekurangan gizi (*prevalence of undernourishment/PoU*), 2) prevalensi stunting, 3) prevalensi wasting, dan 4) angka kematian bayi.

Hasil GHI tahun 2024 menunjukkan bahwa Indonesia berada pada peringkat 77 dari 127 negara. Skor GHI Indonesia sebesar 16,9, turun sebanyak 1,4 dibandingkan tahun 2016 (skor 18,3). Berbeda dengan negara lain dengan penduduk terbanyak yaitu China dan India. China masuk dalam kelompok peringkat pertama dalam GHI dengan skor <5, sedangkan India menempati urutan 105 pada tahun 2024 dengan skor 27,3 pada tahun 2024 (Tabel 3.8).

Tabel 3.8.
Perkembangan Skor GHI Internasional

Negara	Tahun				Ranking
	2000	2008	2016	2024	
China	13,4	7,2	<5	<5	1-22 ¹
Indonesia	25,7	28,2	18,3	16,9	77
India	38,4	35,2	29,3	27,3	105

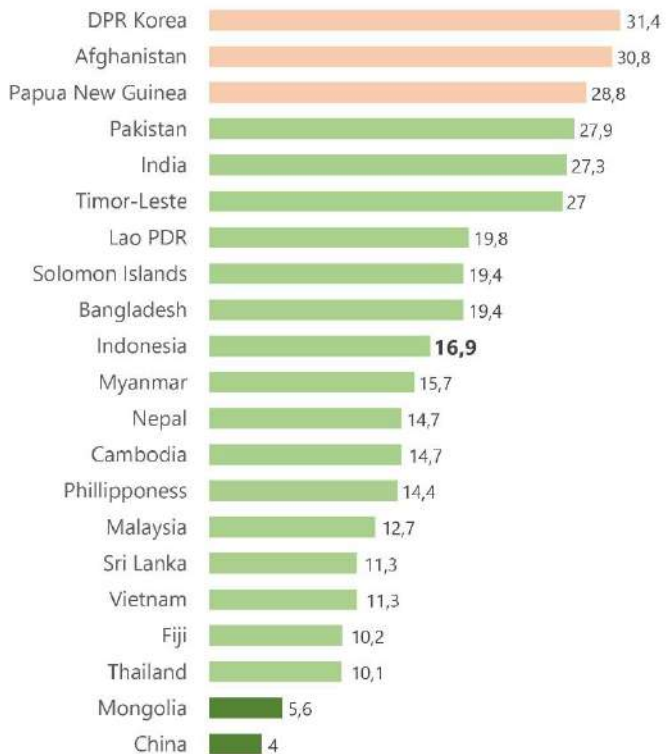
1-20¹ : merupakan kelompok negara dengan ranking terbaik yang memiliki skor <5

Sumber: *Global Hunger Index* 2024

GLOBAL FOOD SECURITY

Beberapa indeks dan laporan digunakan untuk mengukur dan melacak ketahanan pangan global serta kondisi kelaparan di berbagai negara. Global Hunger Index (GHI), yang diterbitkan oleh Concern Worldwide dan Welthungerhilfe, merupakan salah satu alat ukur kelaparan global. GHI menggunakan empat indikator—kekurangan pangan, stunting, wasting, dan kematian balita—yang sejalan dengan target *Sustainable Development Goals* (SDGs) dari PBB. Pada tahun 2024, nilai GHI Indonesia adalah 16,9, menunjukkan tingkat kelaparan moderat dan menempatkan Indonesia pada peringkat 77 dari 127 negara. Namun, peringkat ini lebih tinggi daripada negara-negara Asia Tenggara lain seperti Thailand, Vietnam, dan Malaysia. Hasil GHI Indonesia tidak dapat dibandingkan langsung dengan tahun-tahun sebelumnya karena perubahan metodologi dan negara-negara yang dinilai.

Global Hunger Index Score in the south, east, and southeast asia, 2024



Source: Global Hunger Index, 2024

Note: $GHI \leq 9$ ~ rendah, $10 > GHI > 19.9$ ~ moderat, $20 > GHI > 34.9$ ~ Serious, $35 > GHI > 49.9$ ~ mengkhawatirkan, $GHI \geq 50$ Sangat mengkhawatirkan

Laporan State of Food Security and Nutrition in the World (SOFI), diterbitkan oleh organisasi PBB seperti FAO, WFP, dan UNICEF, menyajikan gambaran kondisi ketahanan pangan global, termasuk biaya makanan sehat di berbagai negara. Berdasarkan laporan SOFI, tingkat ketidacukupan konsumsi pangan Indonesia pada 2021-2023 (7,2%) lebih tinggi dari rata-rata Asia Tenggara (6,9%). Biaya makanan sehat di Indonesia meningkat dari USD 2,60 ppp per orang per hari pada 2017 menjadi USD 4,65 ppp pada 2022, dengan 46,5% populasi belum mampu memenuhi biaya tersebut. Angka ini tergolong lebih tinggi jika dibandingkan dengan negara Asia Tenggara lainnya, mengingat tahun 2022 biaya makanan sehat di Asia Tenggara hanya sebesar USD 4,35 ppp per orang per hari dengan tingkat populasi yang tidak dapat memenuhi sebanyak 36,3%.

Global Report on Food Crises (GRFC), yang memantau kerawanan pangan akut di negara-negara yang mengalami krisis, menggunakan data utama dari Integrated Food Security Phase Classification (IPC) yang mengklasifikasikan kerawanan pangan menjadi lima fase. Menurut GRFC 2024, lebih dari 282 juta orang di 59 negara mengalami krisis pangan pada 2023, yang dipicu oleh konflik, bencana alam ekstrem, dan guncangan ekonomi. Di Asia, negara-negara seperti Afghanistan, Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka, dan Myanmar termasuk dalam laporan GRFC. Meskipun Indonesia tidak dimasukkan dalam GRFC karena tidak dianggap mengalami krisis pangan akut yang memerlukan intervensi mendesak, Indonesia adalah negara yang rawan bencana alam dan krisis pangan dapat diperparah dengan terjadinya bencana alam.

Referensi

- FAO, IFAD, UNICEF, WFP and WHO. 2024. The State of Food Security and Nutrition in the World 2024 – Financing to end hunger, food insecurity and malnutrition in all its forms. Rome. <https://doi.org/10.4060/cd1254en>
- FSIN and Global Network Against Food Crises. 2024. GRFC 2024. Rome. www.fsinplatform.org/grfc2024
- Global Hunger Index 2024: How Gender Justice Can Advance Climate Resilience and Zero Hunger. Concern Worldwide, Welthungerhilfe 2024. <https://www.globalhungerindex.org>



BAB 4

INDEKS KETAHANAN PANGAN





IKP merupakan indeks komposit yang mengukur ketahanan dan kerentanan pangan wilayah dari tiga aspek, yaitu ketersediaan, keterjangkauan, dan pemanfaatan pangan yang digunakan dalam penyusunan FSVA. IKP memiliki peran yang sangat strategis dalam mengukur capaian pembangunan ketahanan pangan di suatu wilayah, mengukur kinerja daerah dalam memenuhi urusan wajib pemerintah, dan merupakan salah satu alat dalam menentukan prioritas pembangunan daerah dan prioritas intervensi program. Secara khusus, penyusunan IKP Nasional dilakukan dengan tujuan mengevaluasi capaian ketahanan pangan dan gizi wilayah kabupaten/kota dan provinsi, serta memberi gambaran peringkat (*ranking*) pencapaian ketahanan pangan wilayah kabupaten/kota dan provinsi dibandingkan dengan wilayah kabupaten/kota dan provinsi lain. IKP yang disusun diharapkan dapat digunakan sebagai dasar intervensi program, sehingga lebih fokus dan tepat sasaran.

INDEKS KETAHANAN PANGAN KABUPATEN/KOTA

Berdasarkan peringkat IKP Kabupaten, lima kabupaten dengan urutan skor terbaik adalah Badung (92,90), Gianyar (92,77), Tabanan (92,51) di Provinsi Bali, Sukoharjo (90,93) di Provinsi Jawa Tengah, serta Gresik (93,75) di Provinsi Jawa Timur. Sedangkan lima kabupaten dengan urutan skor terendah berada di Provinsi Papua, yaitu Intan Jaya (14,14), Nduga (17,10), Lanny Jaya (21,33), Deiyai (21,35), dan Mamberamo Tengah (21,51). Peringkat dan IKP kabupaten secara lengkap dapat dilihat pada Tabel 4.1.

Tabel 4.1.
Peringkat dan Indeks Ketahanan Pangan (IKP) Kabupaten 2024

Peringkat	Kabupaten	IKP	Peringkat	Kabupaten	IKP
1	Badung	92,90	8	Lamongan	90,30
2	Gianyar	92,77	9	Karanganyar	89,67
3	Tabanan	92,51	10	Tanah Datar	89,40
4	Sukoharjo	90,93	11	Sragen	89,37
5	Gresik	90,90	12	Karawang	89,04
6	Pati	90,88	13	Wonogiri	88,91
7	Demak	90,47	14	Kudus	88,81

Peringkat	Kabupaten	IKP
15	Tulang Bawang	88,78
16	Ponorogo	88,74
17	Tapin	88,58
18	Blora	88,53
19	Mesuji	88,18
20	Penajam Paser Utara	88,11
21	Magetan	87,98
22	Sidenreng Rappang	87,92
23	Soppeng	87,90
24	Luwu Timur	87,73
25	Boyolali	87,70
26	Jembrana	87,64
27	Bojonegoro	87,63
28	Ngawi	87,53
29	Gowa	87,53
30	Bekasi	87,48
31	Klungkung	87,47
32	Tulungagung	87,35
33	Pringsewu	87,35
34	Mojokerto	87,32
35	Grobogan	87,29
36	Kutai Kertanegara	87,17
37	Jepara	87,00
38	Pinrang	86,94
39	Agam	86,92
40	Sumedang	86,88
41	Rembang	86,85
42	Pesisir Selatan	86,71
43	Barru	86,67
44	Wajo	86,65
45	Bantaeng	86,59
46	Indramayu	86,52
47	Sumbawa Barat	86,47
48	Blitar	86,43
49	Jombang	86,43
50	Madiun	86,22
51	Purworejo	86,22
52	Deli Serdang	86,20
53	Tabalong	85,94
54	Konawe	85,89
55	Tuban	85,85
56	Sumbawa	85,82

Peringkat	Kabupaten	IKP
57	Banyuwangi	85,77
58	Kulon Progo	85,73
59	Luwu Utara	85,66
60	Bone	85,66
61	Subang	85,65
62	Klaten	85,64
63	Solok Selatan	85,60
64	Semarang	85,57
65	Kolaka Timur	85,54
66	Serdang Bedagai	85,35
67	Bombana	85,33
68	Lampung Timur	85,22
69	Ogan Komering Ulu Timur	85,17
70	Banggai	85,14
71	Padang Pariaman	85,08
72	Dharmas Raya	84,98
73	Lampung Tengah	84,93
74	Sleman	84,91
75	Nganjuk	84,88
76	Bangka Selatan	84,87
77	Kendal	84,83
78	Batang	84,77
79	Aceh Besar	84,72
80	Cilacap	84,69
81	Takalar	84,63
82	Poso	84,60
83	Sidoarjo	84,49
84	Lampung Selatan	84,46
85	Konawe Selatan	84,41
86	Toba Samosir	84,33
87	Merauke	84,07
88	Bolaang Mongondow	84,02
89	Karangasem	83,97
90	Pangandaran	83,86
91	Kerinci	83,76
92	Tulang Bawang Barat	83,74
93	Bulukumba	83,73
94	Maros	83,73
95	Tegal	83,71
96	Kolaka	83,69
97	Mimika	83,64
98	Buleleng	83,26

Peringkat	Kabupaten	IKP
99	Ciamis	83,20
100	Hulu Sungai Selatan	83,19
101	Trenggalek	83,17
102	Tanah Bumbu	83,15
103	Gunung Kidul	82,97
104	Pacitan	82,94
105	Bantul	82,92
106	Barito Kuala	82,85
107	Cirebon	82,77
108	Ngada	82,72
109	Balangan	82,70
110	Kapuas	82,66
111	Limapuluh Koto	82,59
112	Majalengka	82,58
113	Solok	82,56
114	Dairi	82,50
115	Simalungun	82,42
116	Sinjai	82,31
117	Karo	82,28
118	Luwu	82,23
119	Pasaman	82,09
120	Sijunjung	82,05
121	Boalemo	81,91
122	Berau	81,91
123	Pulang Pisau	81,88
124	Pemalang	81,81
125	Pohuwato	81,71
126	Jeneponto	81,67
127	Barito Utara	81,65
128	Banjar	81,54
129	Mamuju	81,47
130	Morowali	81,44
131	Kuningan	81,43
132	Buton Utara	81,40
133	Serang	81,39
134	Hulu Sungai Tengah	81,30
135	Dompu	81,24
136	Bengkayang	81,24
137	Morowali Utara	81,21
138	Kebumen	81,21
139	Hulu Sungai Utara	81,20
140	Kediri	81,19

Peringkat	Kabupaten	IKP
141	Barito Timur	81,16
142	Aceh Tamiang	81,16
143	Humbang Hasundutan	81,16
144	Malang	81,09
145	Pangkajene dan Kepulauan	81,00
146	Pasaman Barat	80,91
147	Pesawaran	80,85
148	Bireuen	80,83
149	Banyumas	80,74
150	Pekalongan	80,65
151	Bandung	80,63
152	Cianjur	80,60
153	Tanah Laut	80,59
154	Samosir	80,35
155	Bone Bolango	80,32
156	Pasuruan	80,31
157	Enrekang	80,31
158	Labuhan Batu Utara	80,30
159	Toraja Utara	80,25
160	Situbondo	80,22
161	Buru	80,21
162	Magelang	80,20
163	Purwakarta	80,19
164	Bolaang Mongondow Utara	80,12
165	Sigi	80,06
166	Paser	80,04
167	Buol	79,97
168	Langkat	79,92
169	Sumenep	79,77
170	Konawe Utara	79,71
171	Aceh Jaya	79,69
172	Halmahera Timur	79,63
173	Minahasa	79,61
174	Way Kanan	79,61
175	Lumajang	79,58
176	Ogan Komering Ilir	79,54
177	Lombok Tengah	79,50
178	Gorontalo	79,50
179	Musi Banyuasin	79,48
180	Banjarnegara	79,40
181	Toli-Toli	79,39
182	Kepulauan Talaud	79,36

Peringkat	Kabupaten	IKP
183	Banyuasin	79,17
184	Pamekasan	79,08
185	Muna Barat	79,06
186	Garut	78,99
187	Jember	78,97
188	Sampang	78,97
189	Pidie Jaya	78,95
190	Temanggung	78,91
191	Parigi Moutong	78,91
192	Gorontalo Utara	78,88
193	Nunukan	78,80
194	Brebes	78,79
195	Penukal Abab Lematang Ilir	78,79
196	Minahasa Utara	78,79
197	Sukabumi	78,59
198	Sanggau	78,51
199	Tasikmalaya	78,47
200	Purbalingga	78,47
201	Bondowoso	78,44
202	Batu Bara	78,37
203	Mamuju Tengah	78,29
204	Aceh Barat	78,27
205	Bima	78,26
206	Tapanuli Utara	78,14
207	Aceh Barat Daya	78,05
208	Manggarai Barat	78,00
209	Katingan	77,99
210	Wonosobo	77,87
211	Musi Rawas	77,66
212	Tangerang	77,60
213	Ogan Ilir	77,55
214	Simeulue	77,54
215	Tapanuli Selatan	77,29
216	Sikka	77,22
217	Aceh Timur	77,19
218	Bangli	77,19
219	Ketapang	77,17
220	Aceh Utara	77,12
221	Siak	77,06
222	Gayo Lues	77,06
223	Lebong	77,06
224	Labuhan Batu	76,96

Peringkat	Kabupaten	IKP
225	Landak	76,96
226	Tana Toraja	76,88
227	Aceh Tenggara	76,87
228	Lampung Utara	76,82
229	Padang Lawas	76,75
230	Pidie	76,69
231	Asahan	76,65
232	Bulungan	76,61
233	Nagan Raya	76,60
234	Mukomuko	76,57
235	Kayong Utara	76,53
236	Tanggamus	76,40
237	Lampung Barat	76,18
238	Sintang	76,17
239	Bangkalan	76,02
240	Polewali Mandar	75,87
241	Minahasa Tenggara	75,82
242	Bandung Barat	75,79
243	Pesisir Barat	75,77
244	Lombok Barat	75,74
245	Manggarai	75,69
246	Pandeglang	75,63
247	Muara Enim	75,62
248	Ogan Komering Ulu Selatan	75,37
249	Kota Baru	75,34
250	Pakpak Bharat	75,32
251	Bolaang Mongondow Timur	75,22
252	Nagekeo	75,20
253	Lahat	75,19
254	Padang Lawas Utara	75,14
255	Merangin	75,01
256	Manokwari Selatan	74,91
257	Bengkulu Selatan	74,91
258	Kaur	74,75
259	Malinau	74,67
260	Kapuas Hulu	74,43
261	Bangka	74,35
262	Probolinggo	74,22
263	Batang Hari	74,13
264	Donggala	73,97
265	Mempawah	73,85
266	Sekadau	73,84

Peringkat	Kabupaten	IKP
267	Aceh Selatan	73,84
268	Tapanuli Tengah	73,81
269	Kuantan Sisingi	73,80
270	Tojo Una-Una	73,78
271	Timor Tengah Utara	73,61
272	Bungo	73,39
273	Lombok Timur	73,32
274	Mamasa	73,19
275	Nias Utara	73,17
276	Rejang Lebong	73,11
277	Kotawaringin Timur	73,03
278	Ogan Komering Ulu	73,01
279	Ende	72,93
280	Minahasa Selatan	72,82
281	Lebak	72,76
282	Bengkulu Utara	72,62
283	Buton	72,59
284	Kepahiang	72,43
285	Nias	72,41
286	Selayar	72,03
287	Muna	71,93
288	Maluku Tengah	71,92
289	Manokwari	71,81
290	Bolaang Mongondow Selatan	71,81
291	Malaka	71,78
292	Seluma	71,61
293	Pelalawan	71,59
294	Tebo	71,36
295	Sumba Barat	71,31
296	Rote Ndao	71,27
297	Belu	71,21
298	Kepulauan Meranti	71,15
299	Sumba Timur	70,98
300	Sambas	70,83
301	Seram Bagian Timur	70,57
302	Mandailing Natal	70,54
303	Kupang	70,45
304	Kolaka Utara	70,26
305	Lembata	70,11
306	Buton Selatan	70,01
307	Bogor	70,01

Peringkat	Kabupaten	IKP
308	Tanjung Jabung Timur	69,99
309	Tanjung Jabung Barat	69,60
310	Indragiri Hilir	69,30
311	Aceh Tengah	69,08
312	Kubu Raya	68,90
313	Rokan Hilir	68,67
314	Flores Timur	68,61
315	Muaro Jambi	68,51
316	Lombok Utara	68,39
317	Empat Lawang	67,42
318	Barito Selatan	67,09
319	Buton Tengah	67,07
320	Timor Tengah Selatan	67,02
321	Nabire	66,97
322	Manggarai Timur	66,92
323	Jayapura	66,89
324	Banggai Kepulauan	66,50
325	Sumba Tengah	65,96
326	Maluku Barat Daya	65,95
327	Nias Selatan	65,87
328	Majene	65,80
329	Bengkalis	65,75
330	Sarolangun	65,64
331	Nias Barat	65,35
332	Seruyan	65,03
333	Alor	63,81
334	Sarmi	63,07
335	Karimun	62,68
336	Wakatobi	62,54
337	Sumba Barat Daya	62,53
338	Belitung	62,34
339	Halmahera Utara	62,34
340	Kotawaringin Barat	62,27
341	Bengkulu Tengah	62,14
342	Belitung Timur	62,02
343	Sukamara	61,78
344	Kutai Timur	61,64
345	Seram Bagian Barat	61,29
346	Tana Tidung	61,25
347	Kutai Barat	60,87
348	Pulau Morotai	60,71
349	Indragiri Hulu	60,71

Peringkat	Kabupaten	IKP
350	Natuna	60,51
351	Kepulauan Sangihe	60,47
352	Bintan	60,42
353	Bangka Tengah	60,38
354	Bangka Barat	60,25
355	Kampar	59,69
356	Musi Rawas Utara	59,58
357	Melawi	59,56
358	Lamandau	59,34
359	Rokan Hulu	58,88
360	Kepulauan Seribu	58,05
361	Labuhan Batu Selatan	57,85
362	Pasangkayu	57,34
363	Sabu Rajjua	56,66
364	Mahakam Ulu	56,53
365	Gunung Mas	56,38
366	Kepulauan Anambas	55,34
367	Raja Ampat	54,42
368	Keerom	54,21
369	Konawe Kepulauan	54,01
370	Kepulauan Mentawai	53,86
371	Buru Selatan	53,32
372	Kep. Siau Tagulandang Biaro	53,11
373	Halmahera Barat	53,07
374	Lingga	53,02
375	Halmahera Tengah	52,96
376	Halmahera Selatan	52,69
377	Banggai Laut	51,91
378	Kepulauan Sula	51,76
379	Murung Raya	51,29
380	Sorong	50,88
381	Kepulauan Tanimbar	49,94
382	Maluku Tenggara	49,43

Peringkat	Kabupaten	IKP
383	Biak Namfor	49,23
384	Pulau Taliabu	48,28
385	Fak-Fak	48,20
386	Kaimana	48,19
387	Waropen	47,38
388	Bener Meriah	46,98
389	Kepulauan Yapen	46,80
390	Aceh Singkil	46,10
391	Asmat	45,99
392	Tambrauw	45,92
393	Boven Digoel	43,19
394	Kepulauan Aru	43,15
395	Teluk Bintuni	43,12
396	Maybrat	41,27
397	Sorong Selatan	40,39
398	Yalimo	37,80
399	Teluk Wondama	36,76
400	Pegunungan Arfak	35,53
401	Mappi	35,44
402	Supiori	32,69
403	Dogiyai	31,37
404	Jayawijaya	30,40
405	Puncak	30,12
406	Yahukimo	25,62
407	Pegunungan Bintang	25,07
408	Puncak Jaya	24,19
409	Mamberamo Raya	23,09
410	Tolikara	22,83
411	Paniai	22,27
412	Mamberamo Tengah	21,51
413	Deiyai	21,35
414	Lanny Jaya	21,33
415	Nduga	17,10
416	Intan Jaya	14,14

Berdasarkan peringkat IKP Kota, lima kota dengan urutan skor terbaik adalah Denpasar (96,37) di Provinsi Bali, Bekasi (93,90) di Provinsi Jawa Barat, Surabaya (93,06) di Provinsi Jawa Timur, Solok (92,90) di Provinsi Sumatera Barat, dan Bukittinggi (92,86) di Provinsi Sumatera Barat. Sedangkan lima kota dengan urutan skor terendah adalah Subulussalam (41,12) di Provinsi Aceh, Pagar Alam (57,79) di Provinsi Sumatera Selatan, Tual (59,11) di Provinsi Maluku, Tidore Kepulauan (64,68) di Provinsi Maluku

Utara, dan Lubuk Linggau (66,10) di Provinsi Sumatera Selatan. Peringkat dan IKP kota secara lengkap dapat dilihat pada Tabel 4.2.

Tabel 4.2.
Peringkat dan Indeks Ketahanan Pangan (IKP) Kota 2024

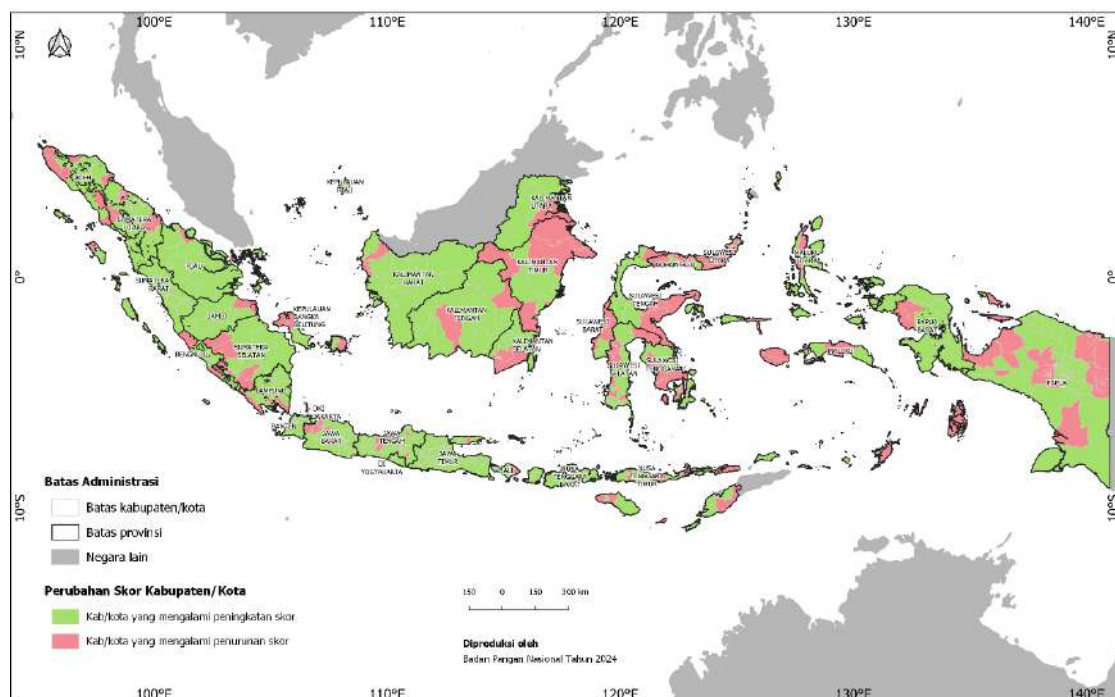
Peringkat	Kota	IKP	Peringkat	Kota	IKP
1	Kota Denpasar	96,37	38	Kota Pangkal Pinang	87,27
2	Kota Bekasi	93,90	39	Kota Sungai Penuh	87,06
3	Kota Surabaya	93,06	40	Kota Padang Panjang	87,05
4	Kota Solok	92,90	41	Kota Gorontalo	86,50
5	Kota Bukittinggi	92,86	42	Kota Banjar Baru	86,34
6	Kota Semarang	92,74	43	Kota Tangerang	85,92
7	Kota Madiun	92,29	44	Kota Jambi	85,88
8	Kota Pekanbaru	92,20	45	Kota Metro	85,78
9	Kota Jakarta Timur	91,81	46	Kota Tegal	85,73
10	Kota Jakarta Pusat	91,63	47	Kota Banjarmasin	85,62
11	Kota Bandung	91,55	48	Kota Bogor	85,53
12	Kota Magelang	91,41	49	Kota Bandar Lampung	84,64
13	Kota Salatiga	91,35	50	Kota Ambon	84,56
14	Kota Jakarta Barat	91,35	51	Kota Yogyakarta	84,21
15	Kota Balikpapan	91,23	52	Kota Pasuruan	84,16
16	Kota Jakarta Selatan	90,52	53	Kota Pariaman	84,08
17	Kota Medan	90,25	54	Kota Tomohon	83,92
18	Kota Pematang Siantar	89,82	55	Kota Cirebon	83,78
19	Kota Depok	89,81	56	Kota Palembang	83,62
20	Kota Samarinda	89,68	57	Kota Sawah Lunto	83,45
21	Kota Kendari	89,67	58	Kota Tanjung Pinang	83,22
22	Kota Padang	89,63	59	Kota Palopo	83,05
23	Kota Payakumbuh	89,33	60	Kota Lhokseumawe	83,03
24	Kota Mojokerto	89,30	61	Kota Pare-Pare	82,76
25	Kota Bontang	88,89	62	Kota Palu	82,43
26	Kota Batam	88,83	63	Kota Bitung	82,00
27	Kota Malang	88,76	64	Kota Batu	81,31
28	Kota Cimahi	88,68	65	Kota Sibolga	81,03
29	Kota Tangerang Selatan	88,67	66	Kota Sukabumi	80,90
30	Kota Ternate	88,24	67	Kota Blitar	80,80
31	Kota Binjai	88,22	68	Kota Palangka Raya	80,69
32	Kota Banda Aceh	87,96	69	Kota Bau-Bau	80,49
33	Kota Makasar	87,95	70	Kota Kotamobago	80,21
34	Kota Surakarta	87,67	71	Kota Mataram	80,15
35	Kota Manado	87,56	72	Kota Cilegon	80,12
36	Kota Tarakan	87,53	73	Kota Banjar	78,92
37	Kota Jakarta Utara	87,42	74	Kota Bengkulu	78,72

Peringkat	Kota	IKP
75	Kota Probolinggo	78,62
76	Kota Jayapura	78,35
77	Kota Pekalongan	78,27
78	Kota Langsa	78,05
79	Kota Tebing Tinggi	77,31
80	Kota Kediri	76,67
81	Kota Sorong	76,32
82	Kota Dumai	76,30
83	Kota Kupang	75,94
84	Kota Bima	75,53
85	Kota Tanjung Balai	74,59
86	Kota Tasikmalaya	74,37

Peringkat	Kota	IKP
87	Kota Sabang	73,80
88	Kota Pontianak	72,55
89	Kota Serang	71,95
90	Kota Padang Sidempuan	71,32
91	Kota Singkawang	68,27
92	Kota Prabumulih	68,11
93	Kota Gunungsitoli	66,12
94	Kota Lubuklinggau	66,10
95	Kota Tidore Kepulauan	64,68
96	Kota Tual	59,11
97	Kota Pagar Alam	57,79
98	Kota Subulussalam	41,12

PERUBAHAN SKOR IKP KABUPATEN/KOTA

Perubahan skor dilihat dengan membandingkan skor IKP tahun 2023 dengan IKP 2024 pada 416 kabupaten dan 98 kota. Secara total, sebanyak 369 kabupaten/kota (71,79%) mengalami peningkatan skor dan 145 kabupaten/kota (28,21%) mengalami penurunan skor. Penurunan skor disebabkan oleh peningkatan rasio konsumsi terhadap ketersediaan pangan, peningkatan prevalensi balita stunting, penurunan akses terhadap air bersih, serta penurunan rata-rata lama sekolah perempuan. Perubahan skor setiap kabupaten/kota disajikan dalam Gambar 4.1.

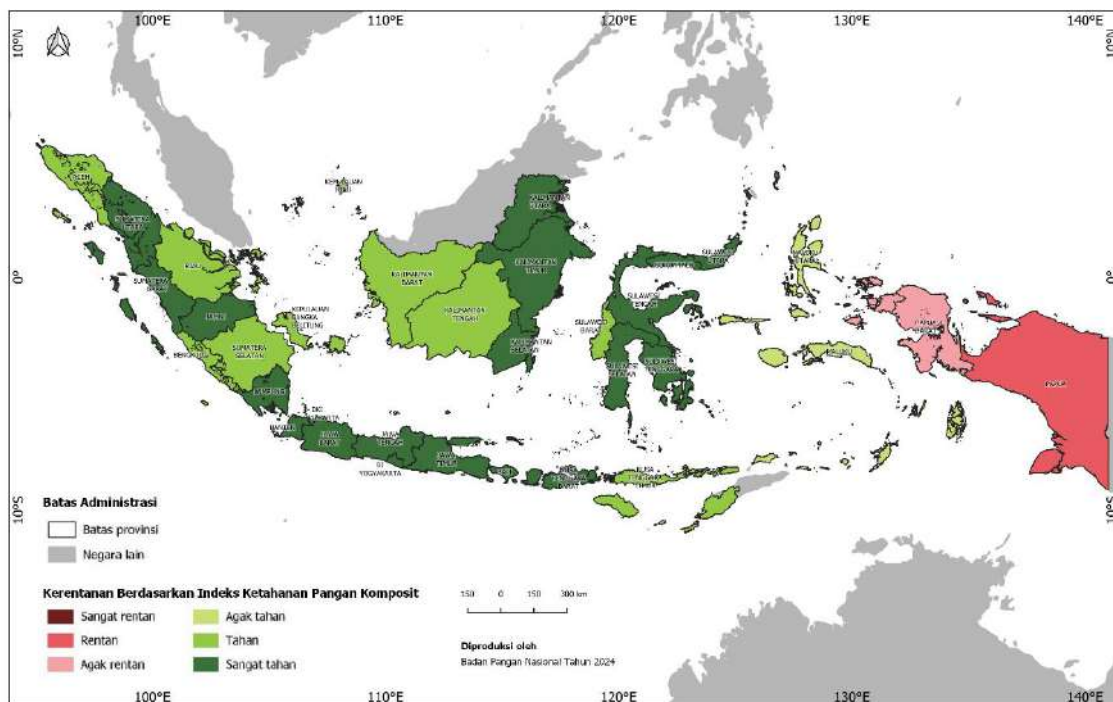


Gambar 4.1. Perubahan Skor Kabupaten/Kota antara IKP 2023 dan IKP 2024

Pada wilayah kabupaten, sebanyak 295 kabupaten (70,91%) mengalami peningkatan skor dan 121 kabupaten (29,09%) mengalami penurunan skor. Sedangkan untuk wilayah perkotaan, 74 kota (75,51%) mengalami peningkatan skor dan 24 kota (24,49%) mengalami penurunan skor.

INDEKS KETAHANAN PANGAN PROVINSI

Wilayah provinsi juga dikelompokkan ke dalam enam kelompok berdasarkan *cut off point* IKP provinsi. Pada IKP 2024, sebanyak 2 dari 34 provinsi atau 5,88% memiliki skor IKP yang rendah, yaitu Papua Barat (Prioritas 3) dan Papua (Prioritas 2). Sebaran IKP provinsi berdasarkan hasil pengelompokan disajikan dalam Gambar 4.2.



Gambar 4.2. Peta Indeks Ketahanan Pangan Provinsi 2024

Berdasarkan peringkat IKP Provinsi, lima provinsi dengan urutan skor terbaik adalah Bali (88,23), Jawa Tengah (85,34), DKI Jakarta (85,13), Sumatera Barat (84,32) dan DI Yogyakarta (84,15). Sedangkan lima provinsi dengan urutan skor terendah, yaitu Papua (40,21), Papua Barat (51,36), Maluku Utara (61,44), Maluku (62,68), dan Kepulauan Riau (66,29). Peringkat dan IKP provinsi secara lengkap dapat dilihat pada Tabel 4.3.

Tabel 4.3. Peringkat dan Indeks Ketahanan Pangan (IKP) Provinsi 2024

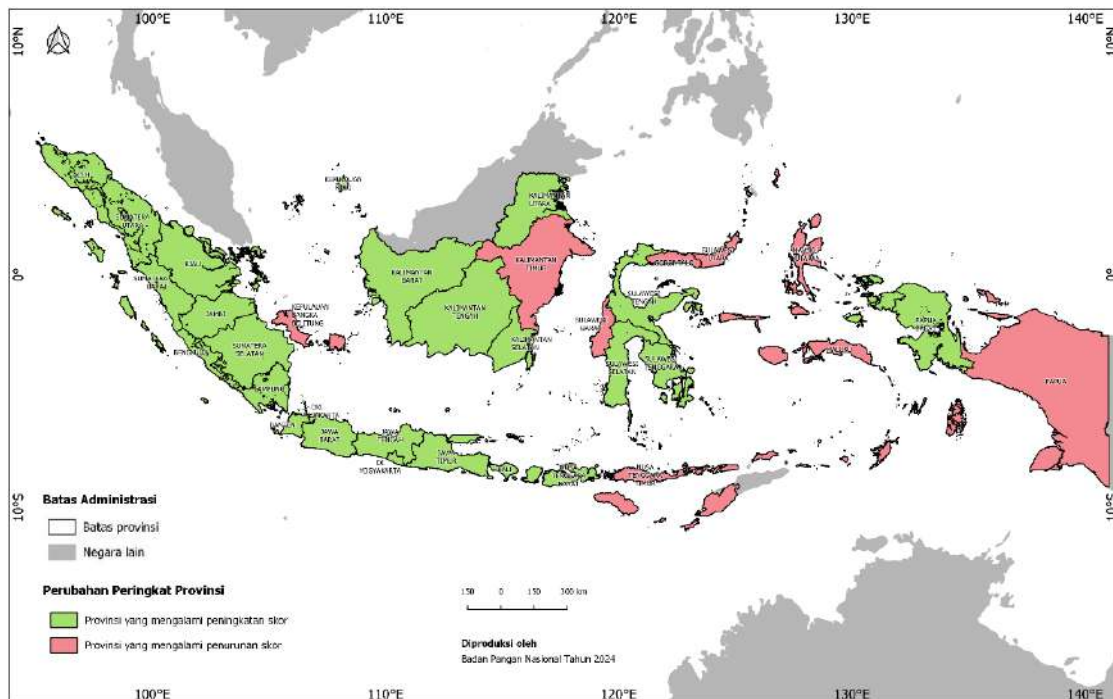
Peringkat	Provinsi	IKP	Peringkat	Provinsi	IKP
1	Bali	88,23	5	DI Yogyakarta	84,15
2	Jawa Tengah	85,34	6	Jawa Timur	83,86
3	DKI Jakarta	85,13	7	Sulawesi Selatan	83,82
4	Sumatera Barat	84,32	8	Jawa Barat	82,97

Peringkat	Provinsi	IKP
9	Kalimantan Selatan	82,95
10	Lampung	82,58
11	Gorontalo	81,47
12	Banten	79,25
13	Kalimantan Timur	78,61
14	Nusa Tenggara Barat	78,44
15	Sumatera Utara	77,49
16	Sulawesi Tengah	76,87
17	Sulawesi Tenggara	76,68
18	Sulawesi Utara	76,32
19	Kalimantan Utara	75,77
20	Jambi	74,94
21	Sumatera Selatan	74,07

Peringkat	Provinsi	IKP
22	Aceh	73,94
23	Kalimantan Barat	73,49
24	Bengkulu	73,39
25	Sulawesi Barat	71,99
26	Nusa Tenggara Timur	70,91
27	Riau	70,42
28	Kepulauan Bangka Belitung	70,21
29	Kalimantan Tengah	70,16
30	Kepulauan Riau	66,29
31	Maluku	62,68
32	Maluku Utara	61,44
33	Papua Barat	51,36
34	Papua	40,21

PERUBAHAN SKOR IKP PROVINSI

Perubahan skor provinsi juga dilihat dengan membandingkan kondisi 34 provinsi dari IKP 2023 dan IKP 2024. Sebanyak 25 provinsi (73,53%) mengalami peningkatan skor dan 9 provinsi (26,47%) mengalami penurunan skor. Perubahan skor setiap provinsi disajikan dalam Gambar 4.3.



Gambar 4.3. Perubahan Skor Provinsi antara IKP 2023 dan IKP 2024

KETAHANAN PANGAN DI DESA

Indikator Ketahanan Pangan di Desa



Ketersediaan Pangan di Desa



Keterjangkauan Pangan di Desa



Pemanfaatan Pangan di Desa

Kegiatan Ketahanan Pangan yang Dapat Dilakukan di Desa

Ketersediaan Pangan di Desa

1. Pengembangan Pertanian Keluarga
Pekarangan Pangan Lestari, Hidroponik, atau Bioponik
2. Peningkatan Ketersediaan dan Akses Benih dan Bibit Tanaman, Ternak, dan Ikan
3. Pelatihan Budidaya Pertanian, Perkebunan, Perhutanan, Peternakan dan/atau Perikanan
4. Pengembangan Sentra Pertanian, Perkebunan, Perhutanan, Peternakan dan/atau Perikanan Terpadu
5. Pengembangan dan Pengelolaan Lumbung Pangan Desa dan Pemeliharaan Infrastruktur Pendukung Lumbung Pangan Desa
6. Pengembangan Pakan Ternak Alternatif
7. Pembangunan Kandang Komunal
8. Pelatihan Pengelolaan Hasil Panen
9. Pemasangan atau Perawatan Karamba Bersama
10. Pelatihan dan Pengembangan Teknologi Tepat Guna untuk Usaha Pengelolaan Pangan Lokal
11. Pengembangan Diversifikasi Usaha Tani dan Perikanan Skala Desa
12. Penanaman Tumpang Sari Tanaman Pokok di Lahan Perkebunan



Keterjangkauan Pangan di Desa

1. Peningkatan, dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani
2. Pemberian Bantuan Bahan Pangan bagi Warga Miskin Rawan Pangan dan Gizi

Pemanfaatan Pangan di Desa

1. Sosialisasi dan Edukasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman
2. Peningkatan Keterampilan dalam Pengembangan Olahan Pangan Lokal
3. Pengembangan dan Diseminasi Teknologi Tepat Guna untuk Pengolahan Pangan Lokal
4. Edukasi tentang Makanan yang Bebas akan Cemaran Biologis, Kimia, dan Benda Lain
5. Advokasi terhadap Makanan yang Dikonsumsi oleh Warga Desa
6. Sosialisasi Keamanan Pangan terhadap Petani, Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Pelaku Usaha Pangan

Sumber:

Kepmendesa PDTT No.82 Tahun 2022 tentang Pedoman Ketahanan Pangan di Desa
Permendes PDT No.2 Tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025





BAB 5

KETERSEDIAAN

PANGAN

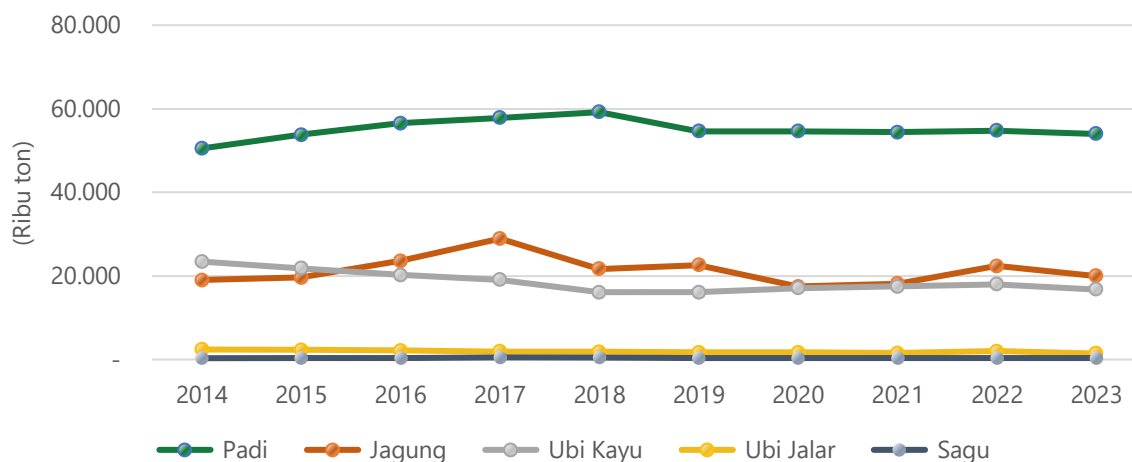


Ketahanan pangan akan tercapai apabila ketiga aspek menunjukkan kinerja yang baik. Pangan yang tersedia dapat dijangkau untuk dimanfaatkan. Implikasinya, aspek ketersediaan menjadi syarat cukup dan perlu untuk mencapai ketahanan pangan suatu wilayah.

Dalam penyusunan FSVA, aspek ketersediaan pangan diwakili oleh indikator rasio konsumsi normatif karbohidrat terhadap ketersediaan pangan yang didekati dari aspek produksi dan cadangan pangan pemerintah daerah kabupaten/kota. Berdasarkan definisi tersebut, data impor atau perdagangan antar wilayah tidak digunakan karena terbatasnya ketersediaan data sampai dengan level kabupaten. Selain itu, wilayah yang mengandalkan penyediaan pangan dari wilayah lain juga rentan terhadap gangguan/*shock* akibat perubahan harga, bencana alam maupun gangguan lain yang mempengaruhi distribusi bahan pangan. Maka dari itu pendekatan produksi domestik dipandang masih relevan untuk mewakili indikator aspek ketersediaan pangan. Apabila tersedia perdagangan pangan antar wilayah, maka penggunaannya dapat meningkatkan kualitas data ketersediaan pangan.

Analisis indikator rasio konsumsi normatif terhadap ketersediaan pangan diwakili oleh kelompok bahan pangan karbohidrat yang terdiri dari padi, jagung, ubi kayu, ubi jalar, dan sagu. Penggunaan sumber karbohidrat juga didasarkan pada fakta bahwa pangan sumber karbohidrat menyumbang 50% dari angka kecukupan konsumsi energi harian yang direkomendasikan sebesar 2.100 kkal/kapita/hari. Sumber pangan lain tidak dianalisis karena keterbatasan data hingga level kabupaten.

Data produksi padi, jagung, dan sagu selama sepuluh tahun terakhir (2014-2023) meningkat dengan pertumbuhan rata-rata 0,82%; 2,11%; dan 3,69%. Sedangkan produksi ubi kayu dan ubi jalar menunjukkan rata-rata penurunan 3,44% dan 4,47% (Gambar 5.1).



Gambar 5.1. Produksi Padi, Jagung, Ubi Kayu, Ubi Jalar dan Sagu Tahun 2014–2023

Provinsi-provinsi yang merupakan sentra produksi padi yaitu Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, Sumatera Selatan, Lampung, Sumatera Utara, Banten, Nusa Tenggara Barat, Sumatera Barat, dan Aceh yang mencatatkan produksi padi di atas 1 juta ton per tahun. Upaya pengembangan area padi di Indonesia Timur seperti Kabupaten Merauke diharapkan dapat berkontribusi terhadap peningkatan produksi padi nasional.

Pada tahun 2023, Provinsi Jawa Timur tercatat sebagai penghasil jagung terbesar. Selanjutnya disusul oleh Provinsi Jawa Tengah, Sumatera Utara, Nusa Tenggara Barat, Lampung, dan Sulawesi Selatan

dengan produksi diatas 1 juta ton. Sebagian besar produksi jagung digunakan untuk memenuhi kebutuhan pakan ternak. Hanya beberapa wilayah yang mengkonsumsi jagung sebagai salah satu sumber pangan karbohidrat seperti di Nusa Tenggara Timur dan Gorontalo.

Produksi ubi kayu didominasi oleh Provinsi Lampung dengan total produksi 7,2 juta ton pada tahun 2023. Provinsi lain dengan total produksi di atas 1 juta ton adalah Jawa Tengah sebesar 2,7 juta ton, Jawa Timur sebesar 1,5 juta ton, Jawa Barat sebesar 1,2 juta ton serta Sumatera Utara dan D.I. Yogyakarta sebesar 1,1 juta ton. Pemanfaatan ubi kayu di Indonesia digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi segar dan juga kebutuhan industri tapioka.

Produksi ubi jalar nasional tahun 2023 sebesar 1,4 juta ton, dengan produksi tertinggi dihasilkan oleh Provinsi Jawa Barat sebesar 0,4 juta ton. Produksi ubi jalar dimanfaatkan untuk konsumsi segar dan industri olahan makanan seperti keripik, makanan beku, pasta, tepung, saos, dan lain-lain.

Produksi sagu tersebar di 16 provinsi dengan total produksi sebesar 0,4 juta ton. Provinsi dengan produksi sagu terbesar yaitu Provinsi Riau yang menghasilkan 0,3 juta ton, disusul dengan Papua sebesar 69 ribu ton, Maluku sebesar 14 ribu ton, dan 13 provinsi lain dengan produksi sagu di bawah 10 ribu ton. Sebagian besar sagu dimanfaatkan sebagai konsumsi berbagai makanan, baik pengganti makanan pokok maupun sebagai bahan utama makanan tradisional. Sebaran produksi padi, jagung, ubi kayu, ubi jalar dan sagu tahun 2023 untuk setiap provinsi disajikan dalam Tabel 5.1.

Tabel 5.1
Produksi Padi, Jagung, Ubi Kayu dan Ubi Jalar Tahun 2023 (Ton)

Provinsi	Padi (GKG)	Jagung	Ubi Kayu	Ubi Jalar	Sagu
Aceh	1.404.235	89.771	36.087	7.207	1.650
Sumatera Utara	2.087.474	1.817.094	1.099.641	92.617	-
Sumatera Barat	1.482.469	669.898	131.981	130.296	665,57
Riau	205.973	932	57.786	3.378	286.376
Jambi	275.941	6.391	54.739	25.817	-
Sumatera Selatan	2.832.774	385.042	207.205	29.054	-
Bengkulu	286.684	68.206	25.730	24.234	-
Lampung	2.757.898	1.492.915	7.227.672	29.589	-
Kep. Bangka Belitung	66.469	151	48.315	2.062	-
Kep. Riau	324	14	16.007	2.202	1.487
DKI Jakarta	2.674	-	-	-	-
Jawa Barat	9.140.039	780.770	1.188.760	387.061	-
Jawa Tengah	9.084.108	2.941.466	2.662.480	109.194	-
DI Yogyakarta	534.114	294.278	1.072.518	3.474	-
Jawa Timur	9.710.661	6.487.343	1.452.965	333.953	-
Banten	1.686.483	19.435	54.238	11.916	-
Bali	673.581	63.445	76.147	18.942	-
NTB	1.538.537	1.732.880	33.019	6.086	-
NTT	766.810	354.216	422.902	36.908	-
Kalimantan Barat	700.291	89.615	150.490	18.186	1.174

Provinsi	Padi (GKG)	Jagung	Ubi Kayu	Ubi Jalar	Sagu
Kalimantan Tengah	330.781	34.471	48.167	5.220	-
Kalimantan Selatan	875.546	151.708	32.074	8.645	2.316
Kalimantan Timur	226.972	15.189	45.544	11.511	8
Kalimantan Utara	23.602	1.158	32.548	967	-
Sulawesi Utara	238.193	112.338	29.712	13.691	2.765
Sulawesi Tengah	821.367	98.724	27.785	14.988	722
Sulawesi Selatan	4.876.386	1.387.235	329.801	59.321	4.265
Sulawesi Tenggara	479.407	94.031	105.346	10.864	2.632
Gorontalo	251.432	714.132	2.870	474	-
Sulawesi Barat	291.459	39.361	21.564	7.116	541
Maluku	79.958	10.366	52.154	18.932	14.123
Maluku Utara	26.663	9.294	11.436	1.755	884
Papua Barat*	24.964	6.389	6.548	4.684	2.654
Papua*	196.723	17.394	-	-	69.770
Indonesia	53.980.993	19.985.653	16.764.227	1.430.341	392.031

Sumber:

1. Padi (BPS, 2023)
2. Jagung, ubi kayu, ubi jalar, sagu (Kementan, 2023)

Catatan:

* Produksi di Daerah Otonomi Baru (DOB) tergabung dalam provinsi induk

Penurunan produksi padi dan jagung pada tahun 2023 disebabkan oleh beberapa kendala, antara lain:

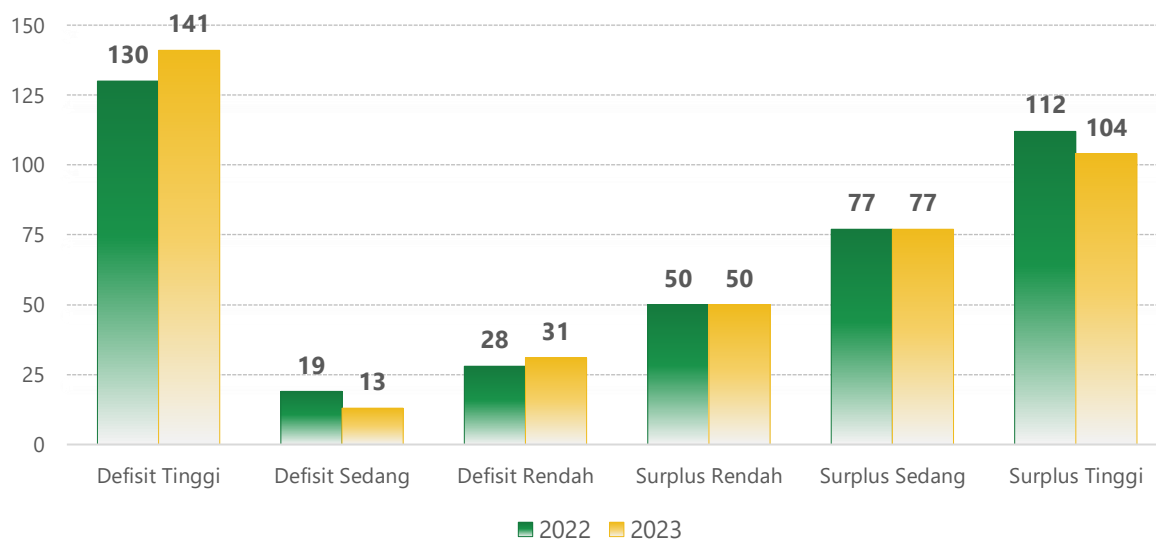
1. Curah hujan tahun 2023 lebih rendah dibanding tahun 2022 akibat adanya fenomena El-Nino yang berlangsung sejak pertengahan tahun 2023. Hal ini berdampak pada mundurnya jadwal tanam akibat kurangnya ketersediaan air, yang berimplikasi pada penurunan luas panen dan produksi;
2. Ketersediaan benih belum dapat memenuhi kebutuhan/permintaan sesuai jadwal tanam; dan
3. Khusus untuk komoditas jagung, penurunan produksi dan luas panen yang terjadi mulai tahun 2020, dikarenakan terjadi perubahan metode penghitungan pencapaian produksi. Sejak tahun 2020, metode penghitungan telah menggunakan data KSA dari BPS, sedangkan tahun sebelumnya menggunakan angka estimasi Kementerian Pertanian melalui Direktorat Jenderal Tanaman Pangan dengan BPS.

5.1. Rasio Konsumsi Normatif per Kapita terhadap Ketersediaan Bersih

Rasio konsumsi normatif per kapita terhadap produksi dihitung dengan cara membagi konsumsi normatif per kapita per hari (300 g) terhadap rata-rata ketersediaan bersih sereal, umbi-umbian utama, dan sagu per kapita per hari. Ketersediaan bersih sereal, umbi-umbian utama, dan sagu merupakan produksi yang tersedia untuk pangan, yaitu produksi total dikurangi dengan penggunaan untuk pakan, bibit dan komponen tercecer, dan telah memperhitungkan konversi yang berlaku untuk masing-masing komoditas pangan. Angka konversi yang digunakan dalam penghitungan ketersediaan bersih menggunakan angka konversi dalam Neraca Bahan Makanan Tahun 2021-2023. Cadangan Pangan

Pemerintah Daerah (CPPD) diperhitungkan untuk memberi gambaran ketersediaan pangan yang lebih komprehensif di setiap wilayah. Sedangkan bantuan pangan dari Cadangan Beras Pemerintah juga turut diperhitungkan sebagai bentuk pendekatan penghitungan ketersediaan pangan yang berasal dari impor beras.

Hasil analisis rasio konsumsi normatif per kapita terhadap produksi bersih serealida tahun 2023 menunjukkan bahwa sebanyak 55,53% kabupaten mengalami surplus dan 44,47% kabupaten mengalami defisit. Kabupaten yang mengalami defisit ketersediaan pangan tertinggi terdapat di Provinsi Papua (6,25%), Papua Barat (2,88%) dan Riau, Sumatera Utara, Kalimantan Tengah dan Sulawesi Tenggara masing-masing 2,16%. Defisit ketersediaan pangan tersebut antara lain disebabkan oleh ketidaksesuaian dan/atau kurangnya ketersediaan lahan untuk produksi serealida dan umbi-umbian, perluasan areal perkebunan, pertambangan, industri dan penambahan areal untuk pemukiman dan aktivitas ekonomi lainnya. Selain itu, sumber karbohidrat lain seperti sorgum, keladi/talas, dan pisang yang dikonsumsi penduduk di beberapa provinsi seperti Papua, Papua Barat, Riau, Maluku, Maluku Utara, dan NTT belum diikutsertakan dalam perhitungan FSVa karena keterbatasan ketersediaan data pada level kabupaten. Penyediaan data sumber karbohidrat lain selain komoditas beras, jagung, ubi kayu, ubi jalar dan sagu serta pangan lokal lain yang menjadi makanan pokok pendamping beras (seperti pisang di Maluku Utara) perlu dioptimalkan agar rasio konsumsi normatif terhadap ketersediaan pangan bagi wilayah-wilayah yang konsumsi sumber karbohidratnya lebih beragam dapat disampaikan dengan akurat. Disisi lain, diperlukan komitmen pemerintah daerah dalam proses pelaporan data produksi setiap wilayah ke dalam sistem pelaporan kementerian terkait, agar dapat memberikan gambaran produksi keadaan yang lebih akurat. Berikut sebaran kabupaten menurut kelompok rasio konsumsi normatif per kapita terhadap produksi bersih serealida tahun 2022 dan 2023 (Gambar 5.2).



Gambar 5.2. Sebaran Kabupaten Menurut Kelompok Rasio Konsumsi Normatif per Kapita terhadap Produksi Bersih Serealida

Kondisi surplus merupakan gambaran daerah-daerah dengan status prioritas 4-6 dan kondisi defisit merupakan gambaran dari prioritas 1-3 dalam aspek ketersediaan pangan. Jumlah kabupaten yang berada pada kelompok surplus menurun dari 239 kabupaten (57,45%) tahun 2022 menjadi 231 kabupaten (55,53%) tahun 2023. Sebanyak 20 kabupaten mengalami perubahan kelompok dari surplus

di tahun 2022 menjadi defisit di tahun 2023 yaitu Banjarnegara, Karangasem, Belu, Alor, Sikka, Ende, Nagekeo. Ketapang, Barito Utara, Minahasa, Minahasa Selatan, Minahasa Utara, Minahasa Tenggara, Bolaang Mongondow Timur, Morowali, Buol, Tojo Una-una, Mamuju Tengah, Nabire dan Pegunungan Bintang.

Perubahan status kelompok untuk wilayah-wilayah tersebut disebabkan adanya penurunan produksi dan peningkatan jumlah penduduk. Penurunan produksi terjadi akibat adanya El-Nino yang menyebabkan terjadinya kekeringan panjang yang pada akhirnya menyebabkan gagal panen (puso) serta pergeseran waktu tanam berikutnya. Selain itu, peningkatan jumlah penduduk akan berdampak pada ketersediaan pangan, karena meningkatnya jumlah penduduk akan mengurangi lahan yang akan digunakan untuk produksi pangan. Selain untuk pemukiman, terdapat juga alih fungsi lahan tanaman pangan menjadi jenis tanaman lain seperti tanaman hortikultura dan tanaman perkebunan yang memiliki nilai jual yang lebih tinggi atau menjadi lahan non pertanian seperti pabrik, perumahan, dan pertambangan.

5.2. Capaian Ketersediaan Pangan

Sektor pertanian merupakan penopang utama penyediaan pangan dalam negeri ditengah situasi global yang tidak menentu akibat dampak perubahan iklim, pemulihan ekonomi pasca Covid-19, tekanan geopolitik dunia, serta pembatasan distribusi dan tantangan perdagangan dunia. Pada tahun 2023, sektor pertanian masih memberi kontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Produk Domestik Bruto (PDB) pertanian tumbuh sebesar 0,18%, dan berkontribusi sebesar 9,25% dari PDB Nasional. Hal ini didorong oleh pertumbuhan subsektor peternakan sebesar 3,71% dan subsektor perkebunan sebesar 1,73% persen (BPS 2024; Kementan 2024).

Kementerian Pertanian telah melakukan upaya dalam rangka pencapaian kinerja peningkatan ketersediaan pangan strategis dalam negeri, diantaranya melalui komitmen pimpinan dalam pelaksanaan strategi, program kerja maupun kegiatan yang berhubungan dengan produksi pangan strategis. Selain itu, dalam rangka mencapai sasaran ini telah dikeluarkan kebijakan antara lain: (a) penggunaan *single data* sebagai acuan dalam perencanaan pembangunan pertanian; (b) penguatan penyuluh berbasis Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) di tingkat kecamatan; (c) pemberian jaminan ketersediaan bahan pangan pokok dan strategis pada saat hari besar keagamaan; dan (d) penguatan manajemen pembangunan pertanian melalui sinergitas dengan K/L terkait, Perguruan Tinggi, serta pemerintah daerah melalui Gubernur maupun Bupati/Walikota (Kementan 2024).

Peningkatan produksi pertanian ini didukung oleh penyediaan prasarana dan sarana pertanian yang sesuai kebutuhan, seperti ketersediaan air irigasi, luas baku lahan pertanian, serta optimalisasi pemanfaatan alat dan mesin pertanian. Secara umum, Kementerian Pertanian telah memfasilitasi 53,02% kebutuhan prasarana pertanian dari target yang telah ditentukan, yaitu sebesar 52,59%. Lebih rinci, tingkat pemenuhan prasarana pertanian tersebut terbagi dalam 1) tingkat pemenuhan ketersediaan lahan sebesar 64,92%, 2) tingkat pemenuhan pengairan lahan pertanian sebanyak 37,78%, dan 3) tingkat pemenuhan pembiayaan dan perlindungan usaha pertanian sebesar 69,65% yang terlihat dari jumlah pelaku usaha pertanian yang mendapatkan akses pembiayaan melalui kredit program dan fasilitasi pembiayaan, jumlah pelaku usaha pertanian yang mendapatkan akses permodalan dari *private sector*, jumlah luas lahan yang terlindungi asuransi pertanian, jumlah ternak yang terlindungi asuransi pertanian (Kementan 2024).

Keberhasilan sektor pertanian juga dapat dilihat dari Nilai Tukar Petani (NTP), yang merupakan pendekatan untuk melihat tingkat kesejahteraan petani. Sepanjang tahun 2023 NTP nasional juga menunjukkan tren yang meningkat. Rata-rata NTP tahun 2023 sebesar 112,46 atau terjadi peningkatan rata-rata sebesar 4,78 persen dibandingkan dengan nilai tahun 2022 yang rata-rata NTP nya sebesar 107,33 (Kementan 2024).

5.3. Tantangan Peningkatan Ketersediaan Pangan

Permasalahan dan tantangan yang dihadapi dalam penyediaan pangan yang berkualitas dan terjangkau di masa mendatang dipengaruhi oleh faktor:

(1) Pertumbuhan dan sebaran penduduk;

Pertumbuhan penduduk menjadi salah satu faktor yang berpengaruh dalam pemenuhan pangan dan kecukupan gizi. Dalam kurun waktu 2010- 2020, laju pertumbuhan penduduk Indonesia sebesar 1,25% per tahun, mengalami perlambatan 0,24% jika dibandingkan dengan laju pertumbuhan penduduk pada periode 2000-2010 (1,49%). Pada tahun 2023, jumlah penduduk Indonesia mencapai 278,70 juta jiwa dan diproyeksikan akan meningkat menjadi sekitar 328,93 juta jiwa pada tahun 2050 (BPS 2020). Peningkatan jumlah penduduk akan berbanding lurus dengan peningkatan permintaan pangan.

Selain pertumbuhan yang masih tinggi, sebaran penduduk yang tidak merata juga menjadi masalah dalam penyediaan pangan. Pada tahun 2015, persentase penduduk kota sebesar 53,30%. Angka tersebut meningkat pada tahun 2020 menjadi 56,70% dan diproyeksikan akan mencapai 66,60% pada tahun 2045 (BPS 2015). Penyediaan pangan di wilayah perkotaan akan meningkat seiring dengan meningkatnya penduduk perkotaan.

Peningkatan jumlah penduduk yang diikuti oleh peningkatan pendapatan dan proporsi kelompok usia produktif berbanding lurus dengan peningkatan permintaan pangan yang cenderung mengalami pergeseran preferensi. Pada umumnya, pergeseran preferensi masyarakat terhadap makanan akan meningkatkan standar kualitas pangan atau mengikuti suatu tren dengan mengonsumsi jenis pangan tertentu. Hal tersebut disebabkan oleh meningkatnya pengetahuan, dan informasi terutama pada kelas pendapatan menengah di perkotaan sehingga lebih peduli pada kesehatan dan gaya hidup (*lifestyle*).

(2) Permasalahan lahan pertanian;

Konversi lahan pertanian yang dimanfaatkan untuk sektor ekonomi lain masih terus berlangsung, terutama untuk sektor perumahan, industri, transportasi, dan pertambangan. Konversi lahan rata-rata mencapai 100 ribu ha/tahun, sementara laju cetak sawah hanya 60 ribu ha/tahun, sehingga terjadi defisit lahan sebesar 40 ribu ha/tahun. Sementara itu, penetapan lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B) dan pengaturan alih fungsi lahan pertanian pangan masih belum diimplementasikan dengan baik oleh sebagian besar pemerintah daerah. Dari 514 kabupaten/kota, baru 260 kabupaten/kota yang telah memiliki LP2B dalam Peraturan Daerah RTRW. Dari 7.463.948 ha Luas Baku Sawah yang telah ditetapkan, baru 5.292.962 ha yang ditetapkan sebagai LP2B, sedangkan sisanya seluas 2.170.986 ha belum ditetapkan sebagai LP2B yang berpotensi menimbulkan konversi lahan di masa depan.

Selain permasalahan konversi lahan, produktivitas lahan juga mengalami *levelling off* sebagai akibat akumulasi pemupukan secara terus menerus pada tiga dasawarsa terakhir. Hal tersebut berpengaruh terhadap kebutuhan input yang lebih untuk memperoleh tingkat produktivitas yang sama.

Kepemilikan lahan yang didominasi oleh usaha tani skala kecil (di bawah 0,5 ha) juga menjadi tantangan tersendiri. Kepemilikan lahan sawah yang sempit akan membatasi akses terhadap sumber teknologi, permodalan dan pasar. Berdasarkan hasil Sensus Pertanian 2023 Tahap I, jumlah petani gurem mencapai 17,25 juta orang atau 62,05% dari jumlah petani pengguna lahan, yang berarti sebagian besar petani menguasai lahan kurang dari 0,5 hektar. Dalam 10 tahun terakhir Rumah Tangga Usaha Petani (RTUP) skala kecil ini meningkat, pada tahun 2013 sebanyak 14,25 RTUP menjadi 16,89 juta RTP di tahun 2023, atau sebesar 60,84% dari total RTUP (BPS 2023).

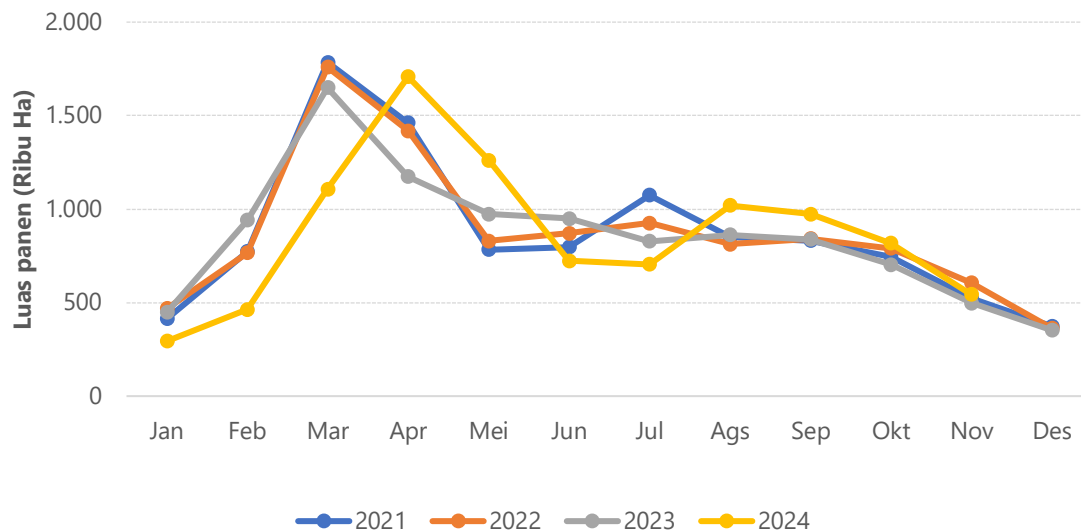
(3) Sumber Daya Manusia di bidang Pertanian;

Pertanian Indonesia juga dihadapkan pada persoalan sumber daya manusia yang “menua”. Hasil Sensus Pertanian 2023 Tahap I tahun 2023 juga menunjukkan bahwa kepala RTUP paling banyak berada pada rentang umur 45-54 tahun dengan jumlah 7,8 juta, disusul dengan rentang umur 55-64 tahun dengan jumlah 6,7 juta dan rentang umur 35-44 tahun dengan jumlah 6,2 juta. Selain itu, umumnya tingkat pendidikan petani rendah yang menyebabkan kemampuan dalam mengolah informasi dan mengadopsi teknologi relatif sangat terbatas. Terdapat 46,84% atau sebanyak 13,12 juta petani yang menggunakan teknologi digital yang mencakup penggunaan alsintan modern, internet/telepon pintar/teknologi informasi, drone, dan atau kecerdasan buatan. Pada umumnya, petani pengguna inovasi merupakan petani yang berskala kecil dan kurang berani menanggung risiko dalam mengadopsi inovasi serta teknologi pertanian. Secara usia penggunaan teknologi didominasi oleh petani berusia muda yang persentasenya relatif kecil yaitu sebesar 21,93%.

(4) Dampak perubahan iklim (DPI);

Perubahan iklim global disebabkan oleh adanya peningkatan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) akibat berbagai aktivitas yang mendorong peningkatan suhu bumi. Perubahan iklim ini akan berdampak terhadap berubahnya pola curah hujan dan semakin meningkatnya intensitas kejadian iklim ekstrim seperti El-Nino dan La-Nina. Hal tersebut mempengaruhi ketersediaan air, pergeseran pola tanam dan panen, potensi produksi, puso akibat banjir, kekeringan dan serangan OPT, serta kejadian bencana alam lain.

Pada tahun 2023, fenomena El-Nino menyebabkan kamarau yang lebih panjang dan mundurnya musim hujan. Akibatnya terjadi pergeseran pola tanam dan panen padi. Puncak panen yang biasanya terjadi pada bulan Maret, telah bergeser menjadi April akibat musim tanam yang terlambat. Selain menyebabkan perubahan musim tanam, El-Nino juga menyebabkan peningkatan terjadinya puso akibat kekeringan.



Gambar 5.3. Pola Panen Tahun 2021-2024

(5) Harga pangan;

Harga pangan dunia yang fluktuatif dengan kecenderungan meningkat akibat perubahan iklim yang semakin intens, tensi geopolitik, dan kompetisi penggunaan pangan energi. Adanya larangan ekspor beras non basmati dari India telah menyebabkan kenaikan harga beras dunia 15-25%. Perang antara Rusia dan Ukraina juga telah menyebabkan kenaikan harga gandum dunia, karena kedua negara tersebut merupakan negara pengekspor gandum, dan peperangan telah menyebabkan kerusakan pada lahan pertanian kedua negara tersebut. Peningkatan harga pangan dunia akan berdampak pada peningkatan harga pangan domestik, khususnya untuk komoditas impor.

(6) Tingginya *food loss* dan *food waste* (kehilangan pangan dan sisa makanan);

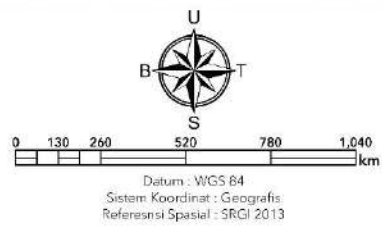
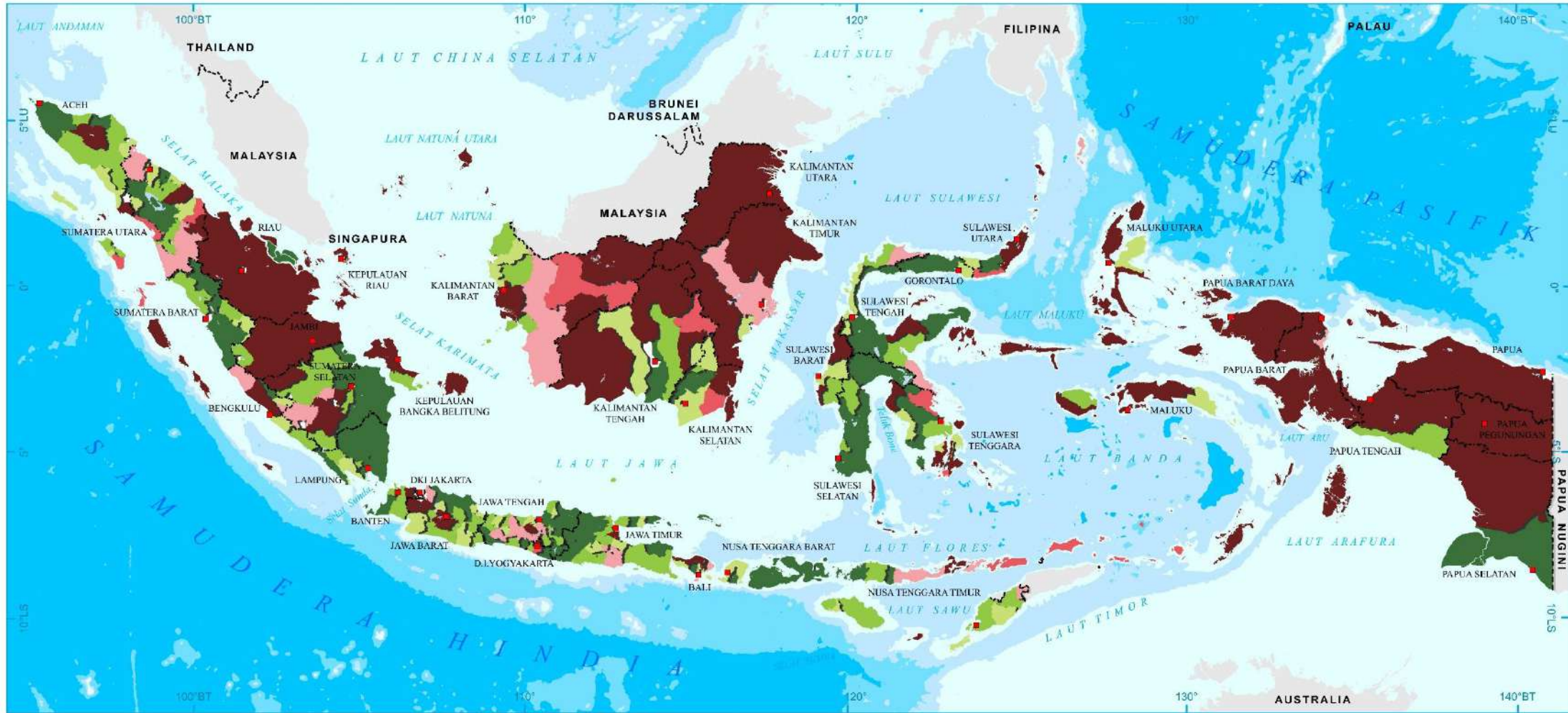
Tingginya *food loss* dan *food waste* (kehilangan pangan dan sisa makanan) akibat masih belum maksimalnya teknologi pasca panen dalam pencegahan kehilangan pangan, persoalan terkait agrolistik (infrastruktur jalan, fasilitas pendingin, kondisi geografis sebagai implikasi negara kepulauan dan luasnya wilayah), serta perilaku konsumsi yang tidak tepat dengan menyisakan makanan.

(7) Inovasi dan diseminasi teknologi;

Inovasi pangan harus mampu menyelesaikan berbagai masalah kuantitas dan kualitas pangan mulai dari aspek hulu hingga hilir untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Aspek hulu untuk menyediakan pangan secara fisik dengan meningkatkan produktivitas dan penganekaragaman pangan yang dihadapkan pada masalah percepatan populasi penduduk, pergeseran usaha pertanian ke lahan suboptimal akibat berkurangnya lahan subur, dampak perubahan iklim global, dan berkurangnya keanekaragaman sumber daya genetik pangan. Sedangkan masalah utama di aspek hilir adalah penurunan susut panen (*food loss*), sisa pangan (*food waste*), dan integritas pangan. Selain itu, diseminasi teknologi juga perlu dilakukan secara masif agar dapat dimanfaatkan oleh seluruh masyarakat.

Peta 5.1.

Peta Rasio Konsumsi Normatif per Kapita terhadap Produksi Bersih Pangan Tahun 2024



LEGENDA

- Batas Administrasi**
- Ibukota (Provinsi)
 - Batas Negara
 - Batas Provinsi
 - Danau

- Batimetri (meter)**
- 0 - <200
 - 200 - <500
 - 500 - <1000
 - 1000 - <2000
 - 2000 - <4000
 - 4000 - <6000
 - 6000 - <8000
 - >8000

- Rasio Konsumsi Normatif terhadap Produksi Bersih (NCPR)**
- Sangat Rentan
 - Rentan
 - Agak Rentan
 - Agak Tahan
 - Tahan
 - Sangat Tahan

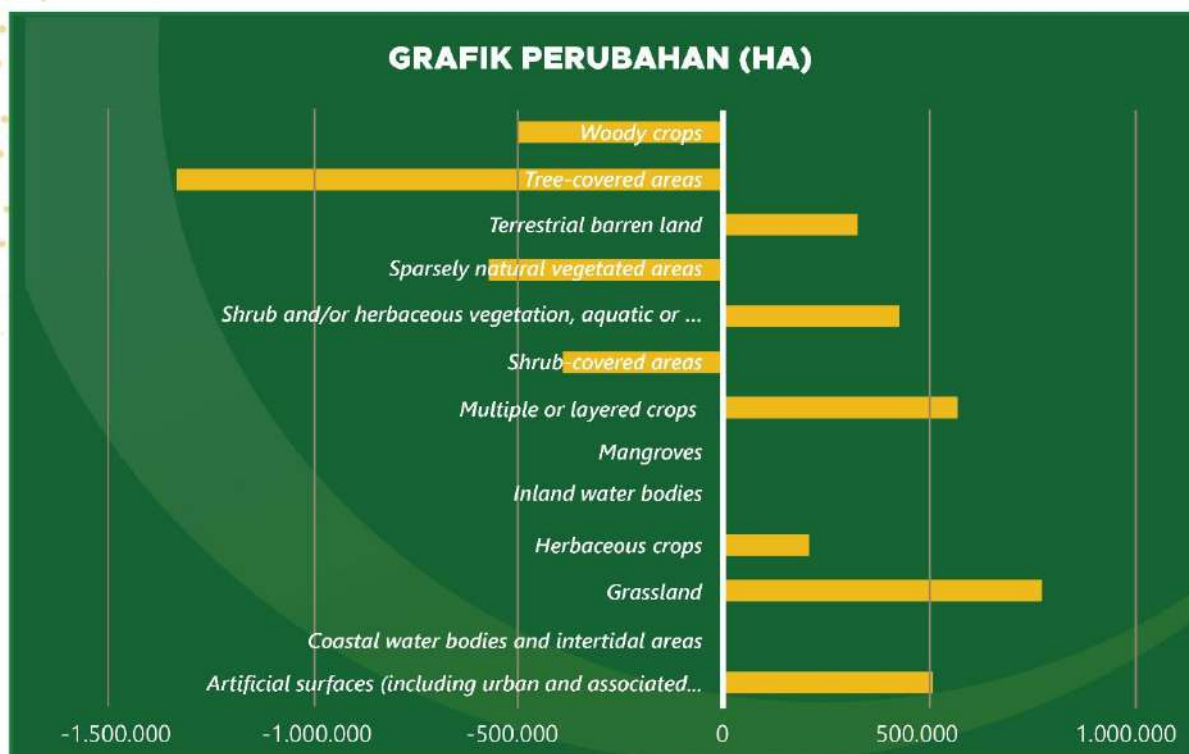
- Sumber Data :**
1. KSA Padi 2023, BPS
 2. Data produksi jagung, ubi kayu, ubi jalar, dan sagu 2023, Kementan
 3. Data CPPD dan Bantuan CPP 2023, Bapanas
 4. Peta Batas Wilayah RBI 2023, BIG
 5. Batimetri Indonesia
- Diproduksi Oleh :
Badan Pangan Nasional Tahun 2024



Peta Neraca Spasial Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup

Penyusunan Neraca SDA dan LH ini mengacu pada klasifikasi System of Environmental-Economic Accounting (SEEA). SEEA adalah sebuah kerangka kerja konseptual yang bertujuan untuk memahami interaksi antara ekonomi dengan lingkungan, serta untuk menggambarkan stok aset lingkungan dan perubahannya dari waktu ke waktu. Selanjutnya, konsep, definisi dan cakupan setiap variabel dalam penyusunan neraca SDA dan LH mengacu pada SEEA yang disesuaikan dengan kondisi di Indonesia. Penyusunan peta penutup lahan merupakan bentuk dukungan untuk menyusun neraca aset, yang nantinya akan dipublikasikan oleh BPS dalam Sistem Terintegrasi Neraca Lingkungan dan Ekonomi Indonesia (Sisnerling). Selain itu, pembaharuan ini juga ditujukan untuk memenuhi pelaporan kepada UN dalam "Forum of Experts in SEEA EEA" yang diselenggarakan setiap tahun.

Grafik Luas Perubahan Penutup Lahan Nasional (Tahun 2019 dan 2023) Sepuluh Terbesar dan Terkecil Perubahan Penutup Lahan Skala Nasional



Sumber: Badan Informasi Geospasial.

URGENSI PENYELAMATAN PANGAN UNTUK MENCEGAH DAN MENGURANGI FOOD LOSS AND WASTE

Secara Global
1,3 MILIAR TON*
Makanan Terbuang Setiap Tahun

Timbulan FLW Indonesia:
23-48 juta ton/tahun
setara **115-184 kg/kap/tahun**

*Setara dengan 1/3 Pangan yang diproduksi untuk dikonsumsi penduduk dunia (FAO, 2011)



POTENSI PEMANFAATAN

Jumlah orang yang dapat diberi makan setara **61-125 juta** orang
atau **29-47% populasi di Indonesia**

POTENSI KEHILANGAN EKONOMI

Kerugian Indonesia akibat FLW = **4-5%** PDB Indonesia
Rp **231-551** Triliun /tahun (pada tahun 2000-2019)

POTENSI LINGKUNGAN

1.702,9 Mt CO₂e
Total emisi timbulan mubazir pangan **2000-2019** (20 tahun)
Setara dengan **7,29%** emisi GRK Indonesia

POTENSI KEHILANGAN ZAT GIZI



Sumber: Bappenas, 2021

5 STRATEGI PENYELAMATAN SUSUT DAN SISA PANGAN

1

Strategi 1 - Pengembangan Kebijakan dan Regulasi

1. Penyusunan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK)
2. Penguatan Komitmen Anggaran

2

Strategi 2 - Peningkatan Kapasitas dan Edukasi

1. Pelatihan dan Penyuluhan
2. Kampanye Kesadaran Publik
3. Inklusi Kurikulum
4. Komunikasi dan Informasi
5. Fasilitasi Komunitas
6. Terwujudnya kesadaran dan Penguatan Komitmen

3

Strategi 3 - Peningkatan Koordinasi dan Kerja Sama

1. Pembentukan Tim Koordinasi
2. Forum dan Jejaring Komunikasi
3. Kolaborasi dengan dunia usaha, akademisi, elemen Masyarakat, dan internasional

4

Strategi 4 - Pengembangan Teknologi dan Infrastruktur

1. Inovasi Teknologi
2. Modernisasi Infrastruktur
3. Adopsi Sistem Informasi
4. Pelatihan Teknis

5

Strategi 5 - Penerapan Sistem Insentif dan Disinsentif

1. Insentif pajak dan non pajak
2. Subsidi dan Hibah
3. Penghargaan dan Pengakuan
4. Penalti dan Sanksi
5. Program Sertifikasi

Sumber: Bappenas, 2024





BAB 6

KETERJANGKAUAN

PANGAN



Salah satu tujuan utama dari penyelenggaraan pangan adalah untuk mempermudah atau meningkatkan keterjangkauan pangan bagi masyarakat, terutama kelompok yang rentan terhadap kerawanan pangan. Keterjangkauan pangan merujuk pada kemampuan rumah tangga untuk mendapatkan pangan yang cukup, baik melalui produksi sendiri, cadangan, pembelian, barter, hadiah, atau bantuan, termasuk program-program intervensi sosial dari pemerintah.

Keterjangkauan pangan dipengaruhi oleh faktor fisik, ekonomi, dan sosial. Meskipun pangan tersedia secara cukup di suatu wilayah, akses fisik mungkin terbatas bagi rumah tangga tertentu, misalnya karena lokasi yang terpencil atau infrastruktur yang kurang memadai. Perkembangan infrastruktur, terutama dalam hal transportasi dan teknologi informasi, telah membantu memperbaiki akses fisik, tetapi di beberapa wilayah terpencil, tantangan ini tetap signifikan.

Secara ekonomi, daya beli masyarakat masih menjadi isu utama. Inflasi pangan dan kenaikan harga barang non-pangan, semakin menekan kemampuan rumah tangga untuk mengakses pangan yang memadai. Ketersediaan lapangan kerja, terutama di sektor informal, menjadi semakin penting dalam memengaruhi daya beli rumah tangga.

Faktor sosial yang memengaruhi keterjangkauan pangan meliputi preferensi budaya terhadap jenis makanan, tingkat pendidikan, serta pengetahuan masyarakat tentang gizi yang seimbang. Namun, konflik sosial dan dampak perubahan iklim juga tetap menjadi faktor risiko yang membatasi akses di beberapa wilayah.

Dalam konteks FSVA, pendekatan untuk memperkirakan keterjangkauan pangan rumah tangga tetap dilakukan melalui proksi dengan indikator-indikator yang lebih dinamis dan relevan, yaitu: (i) Persentase rumah tangga tanpa akses listrik; (ii) Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan; dan (iii) Persentase rumah tangga dengan pengeluaran pangan lebih dari 65% terhadap total pengeluaran.

6.1. Akses terhadap Listrik

Listrik merupakan salah satu infrastruktur dasar yang harus dipenuhi oleh pemerintah, dan hingga kini upaya peningkatan rasio elektrifikasi terus dilakukan di seluruh wilayah Indonesia, terutama di kawasan timur yang masih memiliki kesenjangan akses. Keberadaan infrastruktur ketenagalistrikan tidak hanya menyediakan akses terhadap energi, tetapi juga membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat setempat, meningkatkan akses terhadap pekerjaan, serta mendukung berbagai aktivitas ekonomi. Hal ini berkontribusi langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, ketersediaan tenaga listrik menjadi salah satu indikator penting kesejahteraan wilayah dan rumah tangga, yang berdampak pada berbagai sektor, termasuk ketahanan pangan (DKP dan WFP 2015).

Perkembangan rumah tangga tanpa akses listrik selama lima tahun terakhir cenderung menurun, yang menunjukkan bahwa upaya pemerintah untuk meningkatkan rasio elektrifikasi berjalan cukup baik. Data persentase rumah tangga tanpa akses listrik di Indonesia pada tahun 2023 sedikit meningkat menjadi 0,63% dibandingkan tahun sebelumnya yang berada di angka 0,61%. Meski demikian, rumah tangga dengan akses listrik tetap mencapai angka yang tinggi, yaitu 99,37% pada tahun 2023.

Namun, beberapa daerah di wilayah timur Indonesia masih memiliki persentase rumah tangga tanpa akses listrik yang tinggi, yaitu Provinsi Papua sebesar 22,57%, Nusa Tenggara Timur sebesar 4,96%, dan Papua Barat sebesar 4,50%. Data terkait persentase rumah tangga tanpa akses listrik per provinsi selama periode 2019–2023 dapat dilihat pada Tabel 6.1.

Tabel 6.1.
Persentase Rumah Tangga Tanpa Akses Listrik per Provinsi 2019–2023

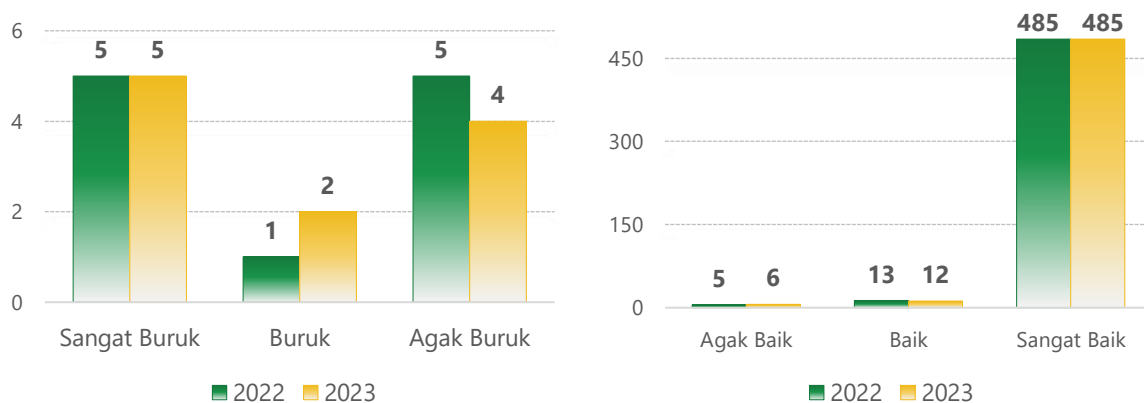
Provinsi	2019	2020	2021	2022	2023
Aceh	0,45	0,35	0,13	0,16	0,14
Sumatera Utara	1,63	1,28	0,84	0,51	0,48
Sumatera Barat	1,20	0,95	1,14	0,48	0,47
Riau	2,35	1,17	1,68	0,87	0,75
Jambi	1,15	1,26	0,97	0,57	0,56
Sumatera Selatan	0,90	1,01	1,02	0,44	0,29
Bengkulu	1,21	1,02	0,56	0,39	0,31
Lampung	0,36	0,32	0,35	0,23	0,23
Kep. Bangka Belitung	0,29	0,36	0,25	0,15	0,07
Kep. Riau	0,36	0,31	0,29	0,24	0,21
DKI Jakarta	0	0	0	0,09	0,02
Jawa Barat	0,04	0,06	0,07	0,02	0,02
Jawa Tengah	0,07	0,05	0,04	0,02	0,01
DI Yogyakarta	0,18	0,09	0	0,04	0,00
Jawa Timur	0,11	0,05	0,07	0,02	0,02
Banten	0,14	0,18	0,05	0,20	0,21
Bali	0,13	0,13	0,09	0,01	0,10
NTB	0,23	0,19	0,14	0,06	0,12
NTT	14,02	13,25	7,57	5,13	4,96
Kalimantan Barat	5,23	4,35	3,49	2,98	2,02
Kalimantan Tengah	2,10	1,68	1,25	1,19	1,09
Kalimantan Selatan	0,42	0,32	0,24	0,26	0,08
Kalimantan Timur	0,54	0,48	0,18	0,24	0,12
Kalimantan Utara	0,28	0,40	1,30	0,68	0,54
Sulawesi Utara	0,45	0,28	0,24	0,30	0,25
Sulawesi Tengah	3,66	2,99	2,15	1,15	1,01
Sulawesi Selatan	0,82	0,59	0,59	0,36	0,34
Sulawesi Tenggara	1,28	0,88	0,57	0,30	0,22
Gorontalo	1,20	0,97	0,74	0,85	0,74
Sulawesi Barat	1,97	1,34	0,86	0,68	0,58
Maluku	4,84	4,79	3,85	3,64	3,56
Maluku Utara	4,48	2,86	3,30	2,76	2,68
Papua Barat	5,64	5,05	4,20	4,51	4,50
Papua	27,63	26,17	20,88	20,04	22,57
Indonesia	1,15	1,02	0,79	0,61	0,63

Sumber: SUSENAS 2020-2024, BPS

Apabila dilihat pada data tingkat kabupaten, terdapat lima kabupaten di Provinsi Papua yang memiliki akses terhadap listrik yang sangat terbatas karena lebih dari 50% rumah tangga tidak memiliki akses terhadap listrik. Kabupaten dengan rumah tangga tanpa akses listrik paling tinggi di Provinsi Papua adalah Kabupaten Pegunungan Bintang (70,03%), Intan Jaya (69,89%), Dogiyai (58,86%), Puncak Jaya (57,88%), dan Asmat (51,30%). Kondisi tersebut dapat terjadi karena kurangnya jaringan dan instalasi yang dibutuhkan untuk mengakses listrik. Di beberapa wilayah peningkatan rumah tangga tanpa akses listrik disebabkan oleh (1) naiknya tarif listrik per KWH dari produsen, (2) naiknya bahan bakar yang digunakan untuk mesin pembangkit listrik, (3) terjadi kelangkaan suku cadang untuk kebutuhan mesin pembangkit listrik yang berimplikasi terhadap kenaikan harga suku cadang mesin pembangkit listrik. Sementara untuk wilayah perkotaan, rata-rata akses terhadap listrik sudah sangat baik yang ditunjukkan oleh rata-rata persentase rumah tangga tanpa akses listrik hanya sebesar 0,06%.

Apabila dibandingkan dengan kondisi tahun 2022, secara nasional akses listrik rumah tangga tidak mengalami perubahan yang signifikan. Pada tahun 2023 terdapat 212 kabupaten/kota yang 100% rumah tangganya telah memiliki akses listrik. Jumlah ini meningkat sebesar 17,13% dari tahun 2022. Jumlah kabupaten/kota dengan akses listrik yang sangat baik tetap sama, yaitu sebanyak 485 kabupaten/kota pada tahun 2022 dan 2023. Kabupaten/kota dengan akses listrik yang baik mengalami penurunan dari 13 kabupaten/kota pada tahun 2022 menjadi 12 kabupaten/kota pada tahun 2023. Meskipun secara umum angka akses terhadap listrik menunjukkan perbaikan, terdapat peningkatan jumlah rumah tangga tanpa akses listrik di kelompok "buruk".

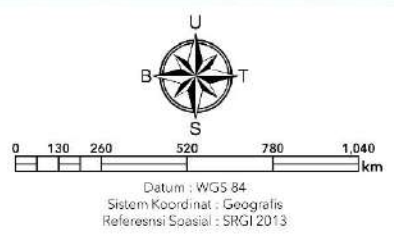
Pada tahun 2023, tercatat ada 2 kabupaten/kota dengan kategori "buruk," naik dari 1 pada tahun 2022, sementara kabupaten/kota dengan kategori "agak buruk" menurun dari 5 menjadi 4 pada tahun 2023. Gambar 6.1 menyajikan sebaran kabupaten/kota menurut kelompok rumah tangga tanpa akses listrik, yang menunjukkan bahwa meskipun sebagian besar wilayah memiliki akses yang sangat baik, tetapi terdapat tantangan di beberapa daerah.



Gambar 6.1. Sebaran Kabupaten/Kota Menurut Kelompok Rumah Tangga Tanpa Akses Listrik

Peta 6.1.

Peta Persentase Rumah Tangga Tanpa Akses Listrik Tahun 2024



LEGENDA

- Batas Administrasi**
- Ibukota Provinsi
 - - - Batas Negara
 - - - Batas Provinsi
 - ☪ Danau
- Batimetri (meter)**
- 0 - <200
 - 200 - <500
 - 500 - <1000
 - 1000 - <2000
 - 2000 - <4000
 - 4000 - <6000
 - 6000 - <8000
 - >8000
- Persentase Rumah Tangga Tanpa Akses Listrik**
- Sangat Rentan
 - Rentan
 - Agak Rentan
 - Agak Tahan
 - Tahan
 - Sangat Tahan

Sumber Data :
1. SUSENAS 2023, BPS
2. Peta Batas Wilayah RBI 2023, BIG
3. Batimetri Indonesia

Diproduksi Oleh :
Badan Pangan Nasional Tahun 2024

6.2. Kemiskinan

Kerentanan pangan, terutama dari sisi akses ekonomi, sangat erat kaitannya dengan rendahnya daya beli yang disebabkan oleh kemiskinan. Kemiskinan membatasi kemampuan rumah tangga dalam memperoleh pangan yang beragam dan bergizi, memaksa mereka bergantung pada pilihan pangan yang lebih murah, tetapi sering kali rendah kandungan nutrisinya. Rumah tangga miskin cenderung mengandalkan sumber karbohidrat murah, seperti beras dan pangan berbahan dasar terigu, yang mengurangi akses terhadap makanan bernutrisi lebih lengkap seperti protein, sayuran, dan buah-buahan.

Untuk mengatasi kondisi ini, diperlukan intervensi yang lebih kuat, baik melalui peningkatan daya beli masyarakat maupun peningkatan akses terhadap program bantuan pangan. Program-program seperti Bantuan Pangan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) bagi Penerima Bantuan Beras (PBB) dan Keluarga Risiko Stunting (KRS), Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT), Program Keluarga Harapan (PKH), dan bantuan sosial lain memainkan peran penting dalam memastikan keberagaman dan kecukupan gizi bagi kelompok yang rentan. Dengan memperkuat akses terhadap pangan yang bergizi, pemerintah berupaya mengurangi kerentanan gizi dan meningkatkan ketahanan pangan di tingkat rumah tangga.

Secara global, standar kemiskinan mengacu pada ambang batas *Purchasing Power Parity* (PPP) yang ditetapkan oleh Bank Dunia, di mana seseorang yang hidup dengan pengeluaran di bawah US\$ 2,15 per hari dikategorikan sebagai penduduk miskin ekstrem. Di Indonesia, Badan Pusat Statistik (BPS) menetapkan garis kemiskinan untuk tahun 2023 sebesar Rp569.299 per kapita per bulan di perkotaan dan Rp525.050 per kapita per bulan di pedesaan. Angka ini mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya, mencerminkan adanya kenaikan biaya kebutuhan dasar yang disebabkan oleh inflasi dan kenaikan harga pangan. Garis kemiskinan ini menjadi salah satu indikator penting dalam mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat, terutama dalam mengidentifikasi kelompok yang paling rentan terhadap kemiskinan.

Tren penurunan kemiskinan di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan hubungan erat dengan pertumbuhan ekonomi yang relatif stabil. Pada tahun 2023, ekonomi Indonesia tumbuh sebesar 5,05% (yoy), sedikit lebih rendah dibandingkan dengan pertumbuhan pada tahun 2022 yang mencapai 5,31%. Pemulihan ekonomi ini didorong oleh peningkatan mobilitas masyarakat, daya beli yang terjaga, serta kebijakan moneter yang efektif dalam mengendalikan inflasi. Meskipun ekonomi Indonesia terus mengalami pemulihan, tantangan eksternal seperti ketidakpastian ekonomi global dan kenaikan harga komoditas pangan masih memengaruhi kinerja ekonomi.

Pada Maret 2023, jumlah penduduk miskin di Indonesia tercatat sebanyak 25,90 juta orang. Dari jumlah ini, sekitar 14,16 juta jiwa tinggal di daerah pedesaan, sementara 11,74 juta jiwa tinggal di perkotaan. Meskipun proporsi penduduk miskin menurun di kedua wilayah, kemiskinan di daerah pedesaan tetap lebih tinggi (12,22%) dibandingkan di perkotaan (7,29%). Hal ini menunjukkan bahwa kemiskinan di pedesaan masih menjadi tantangan serius yang memerlukan perhatian khusus, terutama dalam kebijakan pembangunan yang berfokus pada wilayah pedesaan.

Di tingkat provinsi, hampir seluruh provinsi di Indonesia mengalami penurunan jumlah penduduk miskin. Namun, terdapat 16 provinsi dengan persentase penduduk miskin di atas angka kemiskinan nasional. Papua menjadi provinsi dengan tingkat kemiskinan tertinggi (26,03%), diikuti oleh Papua Barat (20,49%) dan Nusa Tenggara Timur (19,96%). Di sisi lain, provinsi dengan persentase penduduk miskin

terendah adalah Bali (4,25%), Kalimantan Selatan (4,29%), dan DKI Jakarta (4,44%). Ketimpangan antarwilayah ini mengindikasikan perlunya strategi yang lebih terfokus pada daerah-daerah yang memiliki tingkat kemiskinan tinggi, terutama di wilayah timur Indonesia.

Saat ini, pemerintah Indonesia menerapkan dua kerangka kebijakan utama dalam upaya pengentasan kemiskinan, yaitu kebijakan makro dan mikro. Pada tataran makro, pemerintah berupaya menjaga stabilitas inflasi, menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, membuka lapangan kerja yang produktif, menjaga iklim investasi, serta meningkatkan produktivitas di sektor pertanian. Selain itu, pengembangan infrastruktur di wilayah tertinggal menjadi prioritas untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang merata di seluruh daerah.

Sementara itu, dalam kerangka mikro, kebijakan pengentasan kemiskinan difokuskan pada dua strategi utama: (1) penyempurnaan kebijakan bantuan sosial yang bertujuan untuk menurunkan beban pengeluaran rumah tangga miskin, dan (2) peningkatan pendapatan kelompok miskin melalui program-program ekonomi produktif. Program ini mencakup pelatihan keterampilan, akses permodalan, serta inisiatif-inisiatif masyarakat yang terbukti efektif dalam meningkatkan kesejahteraan sosial ekonomi. Pemerintah juga mendukung pendanaan bagi usaha-usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sebagai salah satu strategi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif.

Pengentasan kemiskinan dan perbaikan akses pangan di Indonesia membutuhkan pendekatan yang menyeluruh, mencakup kebijakan makro dan mikro yang terintegrasi. Pertumbuhan ekonomi yang inklusif, stabilitas harga, serta program bantuan sosial yang tepat sasaran merupakan kunci utama dalam mengurangi kerentanan pangan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Meskipun kemajuan telah dicapai, ketimpangan antarwilayah dan tantangan global memerlukan kebijakan yang lebih adaptif dan berkelanjutan, terutama di daerah dengan tingkat kemiskinan tinggi. Dalam jangka menengah, kombinasi dari berbagai kebijakan dan program diharapkan dapat mendorong kelompok rentan untuk naik ke level ekonomi yang lebih stabil dan mandiri.

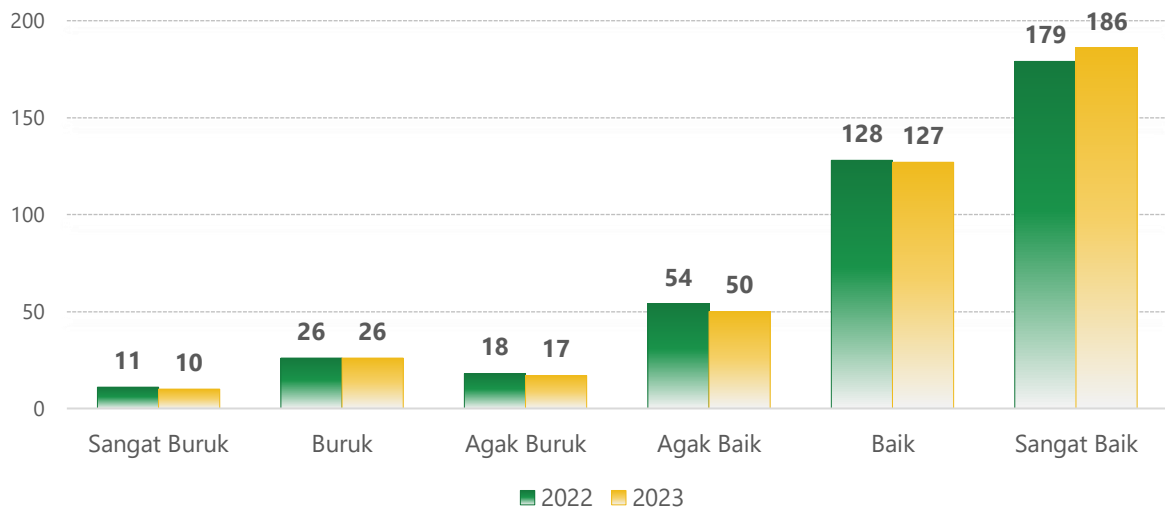
Tabel 6.2.
Persentase Penduduk Hidup di Bawah Garis Kemiskinan per Provinsi Tahun 2019–2023

Provinsi	2019	2020	2021	2022	2023
Aceh	15,32	14,99	15,33	14,64	14,45
Sumatera Utara	8,83	8,75	9,01	8,42	8,15
Sumatera Barat	6,42	6,28	6,63	5,92	5,95
Riau	7,08	6,82	7,12	6,78	6,68
Jambi	7,60	7,58	8,09	7,62	7,58
Sumatera Selatan	12,71	12,66	12,84	11,90	11,78
Bengkulu	15,23	15,03	15,22	14,62	14,04
Lampung	12,62	12,34	12,62	11,57	11,11
Kep. Bangka Belitung	4,62	4,53	4,90	4,45	4,52
Kep. Riau	5,90	5,92	6,12	6,24	5,69
DKI Jakarta	3,47	4,53	4,72	4,69	4,44
Jawa Barat	6,91	7,88	8,40	8,06	7,62
Jawa Tengah	10,80	11,41	11,79	10,93	10,77
DI Yogyakarta	11,70	12,28	12,80	11,34	11,04

Provinsi	2019	2020	2021	2022	2023
Jawa Timur	10,37	11,09	11,40	10,38	10,35
Banten	5,09	5,92	6,66	6,16	6,17
Bali	3,79	3,78	4,53	4,57	4,25
NTB	14,56	13,97	14,14	13,68	13,85
NTT	21,09	20,9	20,99	20,05	19,96
Kalimantan Barat	7,49	7,17	7,15	6,73	6,71
Kalimantan Tengah	4,98	4,82	5,16	5,28	5,11
Kalimantan Selatan	4,55	4,38	4,83	4,49	4,29
Kalimantan Timur	5,94	6,10	6,54	6,31	6,11
Kalimantan Utara	6,63	6,80	7,36	6,77	6,45
Sulawesi Utara	7,66	7,62	7,77	7,28	7,38
Sulawesi Tengah	13,48	12,92	13,00	12,33	12,41
Sulawesi Selatan	8,69	8,72	8,78	8,63	8,70
Sulawesi Tenggara	11,24	11,00	11,66	11,17	11,43
Gorontalo	15,52	15,22	15,61	15,42	15,15
Sulawesi Barat	11,02	10,87	11,29	11,75	11,49
Maluku	17,69	17,44	17,87	15,97	16,42
Maluku Utara	6,77	6,78	6,89	6,23	6,46
Papua Barat	22,17	21,37	21,84	21,33	20,49
Papua	27,53	26,64	26,86	26,56	26,03
Indonesia	9,41	9,78	10,14	9,54	9,36

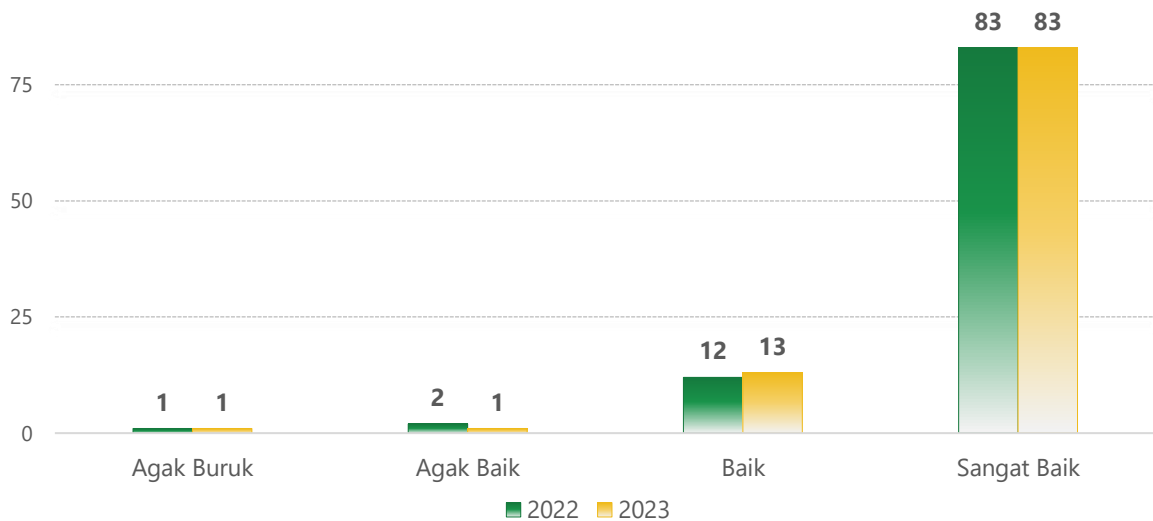
Sumber: SUSENAS 2020-2024, BPS

Pada tingkat kabupaten, jumlah kabupaten dengan tingkat kemiskinan >20% (kategori agak buruk, buruk, dan sangat buruk) pada tahun 2023 cenderung menurun apabila dibandingkan tahun 2022, dari 55 kabupaten menjadi 53 kabupaten (Gambar 6.2). Pada tahun 2023, kabupaten dengan tingkat kemiskinan di atas 35 persen atau masuk kategori sangat buruk terdapat di sepuluh kabupaten di Papua, yaitu Intan Jaya (40,01%), Deiyai (38,66%), Nduga (37,09%), Supiori (36,99%), Lanny Jaya (36,94%), Puncak (36,44%), Yahukimo (36,08%), Puncak Jaya (35,60%), Mamberamo Tengah (35,42%), dan Paniai (35,39%). Sementara itu kabupaten dengan persentase penduduk miskin terendah pada tahun 2023 terdapat di Kabupaten Badung (Provinsi Bali) dengan persentase penduduk miskin sebesar 2,30% dan disusul oleh Kabupaten Banjar (Provinsi Kalimantan Selatan) sebesar 2,44%.



Gambar 6.2. Sebaran Kabupaten Menurut Kelompok Penduduk Miskin

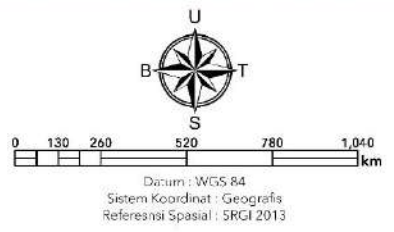
Pada wilayah perkotaan secara umum kondisi kemiskinan relatif lebih baik dibandingkan dengan wilayah kabupaten yang dicirikan dengan tidak ada kota yang masuk dalam kategori sangat buruk dan buruk (Gambar 6.3). Hanya satu kota yang termasuk kategori agak buruk, yaitu Kota Tual (20,68%), Provinsi Maluku.



Gambar 6.3. Sebaran Kota Menurut Kelompok Penduduk Miskin

Peta 6.2.

Peta Persentase Penduduk Hidup di Bawah Garis Kemiskinan Tahun 2024



LEGENDA

- Batas Administrasi**
- Ibukota Provinsi
 - Batas Negara
 - Batas Provinsi
 - Darilau

- Batimetri (meter)**
- 0 - <200
 - 200 - <500
 - 500 - <1000
 - 1000 - <2000
 - 2000 - <4000
 - 4000 - <6000
 - 6000 - <8000
 - >8000

- Persentase Penduduk Hidup dibawah Garis Kemiskinan**
- Sangat Rentan
 - Rentan
 - Agak Rentan
 - Agak Tahan
 - Tahan
 - Sangat Tahan

Sumber Data :
1. SUSENAS 2023, BPS
2. Peta Batas Wilayah RBI 2023, BIG
3. Batimetri Indonesia

Diproduksi Oleh :
Badan Pangan Nasional Tahun 2024

6.3. Pangsa Pengeluaran Pangan

Persentase pengeluaran untuk pangan sering digunakan sebagai salah satu indikator utama dalam mengukur ketahanan pangan rumah tangga. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Rashidi *et al.* (2021), kesejahteraan rumah tangga memiliki hubungan yang langsung dan signifikan terhadap ketahanan pangan. Pada tingkat makro, Deaton dan Muellbauer (1980) menyatakan bahwa semakin tinggi kesejahteraan suatu masyarakat atau negara, maka semakin kecil porsi pengeluaran penduduknya untuk pangan, dan sebaliknya, semakin rendah kesejahteraan masyarakat, porsi pengeluaran untuk pangan cenderung meningkat.

Pemikiran ini juga sejalan dengan Hukum Engel, yang menyatakan bahwa semakin tinggi pendapatan suatu rumah tangga, maka persentase pengeluaran untuk konsumsi pangan akan menurun. Dengan demikian, persentase pengeluaran untuk pangan dapat menjadi proksi yang baik untuk pendapatan permanen serta indikator penting untuk mengukur malnutrisi kronis dalam jangka panjang, seperti yang dinyatakan oleh Shan (2003).

Lebih lanjut, pangsa pengeluaran untuk pangan menjadi indikator signifikan dalam ketahanan pangan karena semakin besar porsi pengeluaran yang diarahkan untuk pangan, semakin rentan kondisi ketahanan pangan suatu rumah tangga (Azwar, 2004). Berdasarkan kajian BKP dan WFP (2010), apabila lebih dari 65% dari total pengeluaran rumah tangga digunakan untuk pangan, maka distribusi pengeluaran tersebut dianggap tidak sehat dan rentan, mencerminkan ketahanan pangan yang lemah.

Berdasarkan Susenas 2023, 23,48% rumah tangga di Indonesia memiliki pengeluaran pangan lebih dari 65% terhadap total pengeluaran. Provinsi Nusa Tenggara Barat menjadi provinsi dengan persentase tertinggi, yaitu 46,26% diikuti Papua 39,44% dan Aceh sebesar 34,72% (Tabel 6.3). Tingginya persentase rumah tangga dengan proporsi pengeluaran pangan lebih dari 65% dapat mengindikasikan rata-rata pendapatan rumah tangga yang rendah atau harga pangan yang relatif tinggi, sehingga secara umum menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat di ketiga provinsi tersebut masih tergolong rendah. Oleh karena itu, diperlukan upaya-upaya penciptaan lapangan kerja dan usaha produktif, meningkatkan keahlian dan keterampilan tenaga kerja, dan meningkatkan investasi melalui kemitraan dengan dunia usaha untuk memajukan perekonomian daerah dan peningkatan pendapatan rumah tangga/masyarakat di daerah.

Apabila dibandingkan dengan tahun 2022, terdapat penurunan persentase rumah tangga dengan pangsa pengeluaran pangan lebih dari 65% sebesar 2,71%. Tiga provinsi dengan penurunan persentase rumah tangga dengan pangsa pengeluaran pangan lebih dari 65% dibandingkan tahun 2022 adalah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebesar 6,98%, Sulawesi Utara sebesar 6,54% dan Jambi sebesar 6,5%. Namun demikian, terdapat tiga provinsi yang menunjukkan peningkatan persentase rumah tangga dengan pangsa pengeluaran pangan lebih dari 65% dibandingkan tahun 2022. Provinsi Gorontalo menjadi provinsi dengan peningkatan persentase tertinggi, yaitu sebesar 7,84%, diikuti Provinsi Aceh sebesar 0,49% dan DKI Jakarta 0,32%.

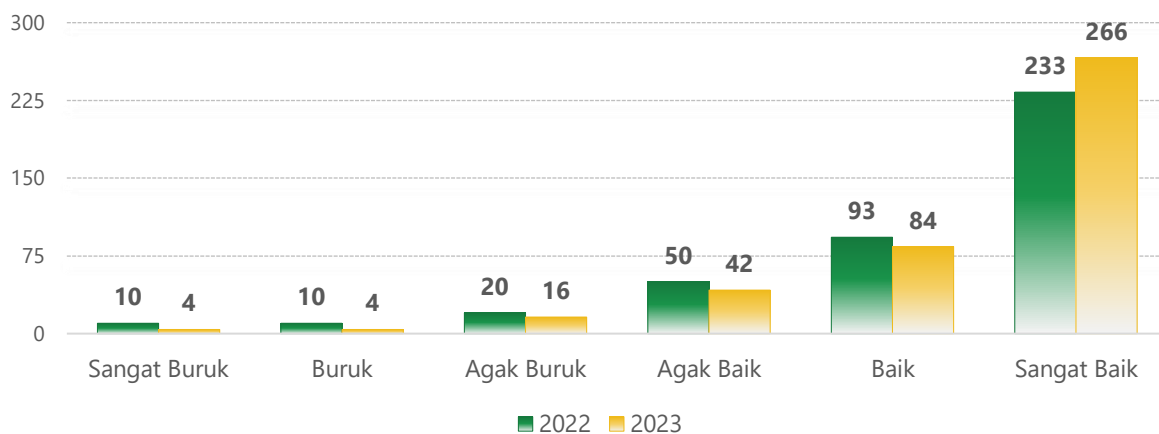
Tabel 6.3.**Persentase Rumah Tangga dengan Pangsa Pengeluaran Pangan >65% Tahun 2019-2023**

Provinsi	2019	2020	2021	2022	2023
Aceh	41,27	36,06	38,90	34,23	34,72
Sumatera Utara	34,80	28,49	29,56	31,76	30,43
Sumatera Barat	30,56	28,63	25,77	29,28	24,39
Riau	22,25	18,56	18,81	20,85	19,18
Jambi	32,12	27,14	23,23	26,67	20,17
Sumatera Selatan	26,65	27,20	26,27	28,85	27,82
Bengkulu	26,42	27,54	24,55	24,94	23,50
Lampung	28,50	26,30	25,23	24,99	22,74
Kepulauan Bangka Belitung	16,22	15,11	15,18	19,48	12,50
Kepulauan Riau	7,44	8,39	7,13	7,44	5,59
DKI Jakarta	16,60	16,51	11,38	8,42	8,74
Jawa Barat	36,65	31,30	30,73	27,97	27,38
Jawa Tengah	26,49	22,55	23,12	24,55	21,47
DI Yogyakarta	20,24	21,45	19,20	16,48	10,49
Jawa Timur	30,68	28,21	29,42	31,23	26,00
Banten	31,33	26,02	22,61	24,96	18,62
Bali	13,15	17,43	10,87	8,69	5,86
NTB	27,88	24,99	26,52	50,76	46,26
NTT	54,91	46,12	41,54	33,26	29,71
Kalimantan Barat	27,39	21,55	19,95	25,24	20,44
Kalimantan Tengah	23,00	20,48	19,55	22,67	20,83
Kalimantan Selatan	25,11	23,54	20,16	21,29	21,04
Kalimantan Timur	9,51	7,80	7,39	6,86	6,57
Kalimantan Utara	15,04	11,76	9,17	9,95	9,52
Sulawesi Utara	25,32	21,14	27,69	37,31	30,77
Sulawesi Tengah	27,45	23,01	16,55	19,41	17,98
Sulawesi Selatan	18,25	27,24	22,45	20,41	18,53
Sulawesi Tenggara	13,84	27,59	24,04	19,27	16,31
Gorontalo	12,35	12,19	10,66	26,77	34,61
Sulawesi Barat	39,31	29,32	24,87	25,19	23,15
Maluku	23,26	13,77	11,26	15,47	11,07
Maluku Utara	18,97	12,26	10,58	15,41	12,91
Papua Barat	19,17	19,94	15,67	16,95	11,43
Papua	34,74	31,24	37,17	45,65	39,44
Indonesia	29,09	26,04	25,32	26,19	23,48

Sumber: SUSENAS 2019-2023, BPS

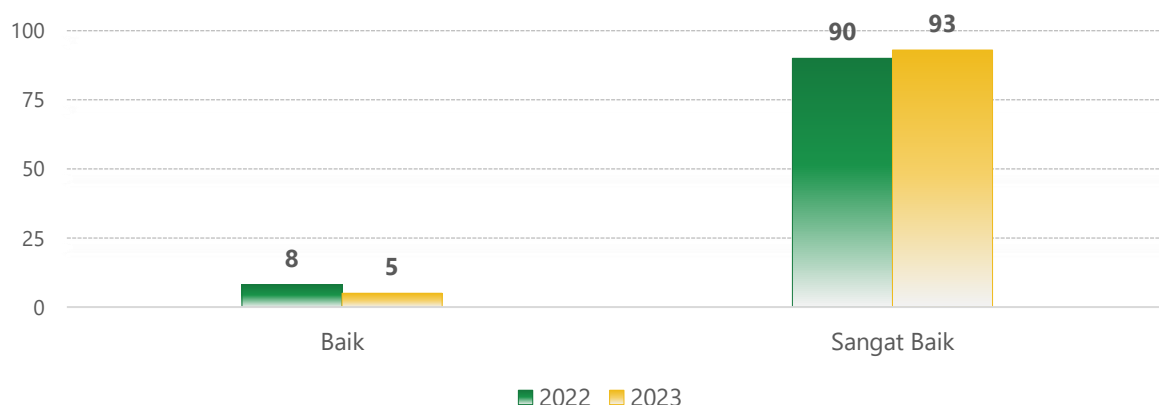
Pada tingkat kabupaten, sebanyak empat kabupaten yang tersebar di Provinsi Papua masuk dalam kategori sangat buruk yaitu, Kabupaten Puncak (93,04%), Lanny Jaya (91,50%), Mamberamo Tengah (90,22%), dan Tolikara (80,25%), kondisi tersebut dicirikan dengan lebih dari 70 persen rumah tangga yang ada di wilayah tersebut memiliki proporsi pengeluaran untuk pangan lebih dari 65 persen terhadap total pengeluaran.

Sementara itu, kabupaten yang dikategorikan sangat baik (memiliki persentase rumah tangga kurang dari 30 persen untuk proporsi pengeluaran pangan lebih dari 65 persen terhadap pengeluaran total) tersebar di 266 kabupaten pada tahun 2023, meningkat sebanyak 33 kabupaten atau 14,16% dibandingkan tahun 2022 (Gambar 6.4).



Gambar 6.4. Sebaran Kabupaten Menurut Kelompok Rumah Tangga dengan Pangsa Pengeluaran Pangan >65%

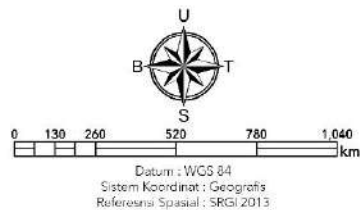
Pada tingkat kota, tidak ada kota yang memiliki lebih dari 40% rumah tangga dengan proporsi pengeluaran pangan lebih dari 65%. Kabupaten Gianyar (Provinsi Bali) menjadi kabupaten terbaik dari sisi pengeluaran pangan, yaitu hanya 1,25% rumah tangga yang memiliki proporsi pengeluaran pangan lebih dari 65 persen terhadap pengeluaran total. Selanjutnya diikuti oleh Kota Salatiga (1,32%) dan Kota Tangerang Selatan (1,43%). Pada tahun 2022 dan 2023, seluruh kota di Indonesia sudah berada dalam kategori baik dan sangat baik dalam pangsa pengeluaran pangan (Gambar 6.5).



Gambar 6.5. Sebaran Kota Menurut Kelompok Rumah Tangga dengan Pangsa Pengeluaran Pangan >65%

Peta 6.3.

Peta Persentase Rumah Tangga dengan Proporsi Pengeluaran untuk Pangan Lebih dari 65% terhadap Total Pengeluaran Tahun 2024



LEGENDA

- Batas Administrasi**
- Ibukota Provinsi
 - Batas Negara
 - Batas Provinsi
 - Danau



Sumber Data :
 1. SUSENAS 2023, BPS
 2. Peta Batas Wilayah RBI 2023, BIG
 3. Batimetri Indonesia

Diproduksi Oleh :
 Badan Pangan Nasional Tahun 2024

6.4. Tantangan Peningkatan Akses Pangan

Akses terhadap pangan sangat bergantung pada fluktuasi harga pangan. Ketika harga pangan meningkat, daya beli masyarakat menurun, sehingga mengurangi aksesibilitas terhadap kebutuhan pangan. Menurut laporan FAO (2023), Indeks Harga Pangan FAO pada Desember 2023 tercatat di angka 118,5 poin, yang menurun 1,5% dibandingkan dengan November dan 10,1% lebih rendah dibandingkan Desember 2022. Secara keseluruhan, sepanjang tahun 2023, indeks ini rata-rata tercatat 13,7% lebih rendah daripada tahun sebelumnya. Beberapa komoditas mengalami perubahan harga yang signifikan. Harga sereal mengalami peningkatan, sementara harga minyak nabati menunjukkan penurunan. Harga gula mengalami penurunan yang signifikan akibat produksi yang melimpah di Brasil, sementara harga produk susu naik didorong oleh peningkatan permintaan di Eropa Barat. Perubahan harga-harga ini menggambarkan dinamika yang kompleks dalam pasar pangan global, yang dapat memengaruhi ketahanan pangan di berbagai negara.

Dari sisi rantai pasok pangan, akses terhadap pangan erat kaitannya dengan struktur rantai pasokan komoditas. Di Indonesia, rantai pasokan beras yang panjang sering kali menyebabkan lonjakan harga di tingkat konsumen. Semakin panjang dan kompleks rantai pasok tersebut, semakin tinggi biaya yang harus dibayar oleh konsumen akhir. Seiring dengan kemajuan teknologi, peran digitalisasi dan logistik modern menjadi semakin penting dalam memotong rantai pasokan ini, sehingga distribusi menjadi lebih efisien dan mengurangi ketergantungan pada perantara. Inovasi seperti *platform e-commerce* di sektor pertanian dan aplikasi pemantauan harga telah mulai diterapkan, yang tidak hanya mempercepat distribusi tetapi juga membantu menurunkan biaya dan memastikan petani mendapatkan harga yang lebih adil.

Untuk menjaga ketahanan pangan masyarakat, terutama bagi mereka yang terdampak oleh pemutusan hubungan kerja, pemerintah Indonesia telah melanjutkan sejumlah program sosial pada tahun 2023. Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) tetap disalurkan kepada 18,8 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dengan besaran Rp200.000 per bulan, sementara Program Keluarga Harapan (PKH) terus diberikan kepada 10 juta KPM. Badan Pangan Nasional juga melakukan beberapa upaya melalui:

- a. Bantuan Pangan CPP berupa beras sejumlah 10 kg diberikan kepada 22,253 juta penerima bantuan beras (PBB) selama 9 bulan di 38 provinsi, 514 kabupaten/kota,
- b. Bantuan pangan CPP berupa 1 kg daging ayam dan berupa 10 telur ayam diberikan kepada 1,4 Juta keluarga risiko stunting (KRS) selama 9 bulan di 7 provinsi,
- c. Intervensi pengendalian kerawanan pangan diberikan kepada 98.600 KK pada tahun 2023 di 8 provinsi, 22 kabupaten/kota yang merupakan daerah rentan rawan pangan prioritas 2 atau 3 dan/atau gizi dengan *prevalence of undernourishment* (PoU) di atas median nasional.

Selain program-program ini, pemerintah juga memperkenalkan Program Pahlawan Ekonomi Nusantara (PENA), yang bertujuan memberdayakan keluarga penerima manfaat dengan memberi modal usaha, sehingga mereka dapat menjadi lebih mandiri.

Secara umum, ada beberapa tantangan dalam memastikan ketahanan pangan bagi masyarakat Indonesia. Pertama, pentingnya meningkatkan pendapatan individu melalui pengembangan kapasitas agar dapat bersaing di pasar tenaga kerja. Kedua, memperlancar rantai pasok dan distribusi pangan hingga ke daerah-daerah 3T (terdepan, tertinggal, dan terluar), yang sering kali menghadapi kendala distribusi. Ketiga, menjaga stabilitas harga pangan sepanjang waktu melalui kebijakan harga yang seimbang antara kepentingan konsumen dan produsen, seperti intervensi pembelian pada saat panen

raya dan operasi pasar ketika harga melonjak. Keempat, pemerintah harus terus memastikan bahwa bantuan pangan tersalurkan secara efektif kepada masyarakat berpendapatan rendah dan yang terdampak oleh bencana alam maupun sosial. Melalui berbagai upaya tersebut, diharapkan ketahanan pangan dapat tetap terjaga, dan akses terhadap pangan dapat diperluas, terutama bagi kelompok masyarakat yang paling rentan.

PREVALENCE OF UNDERNOURISHMENT (PoU)



“Pangan merupakan kebutuhan dasar utama bagi manusia yang harus dipenuhi setiap saat. Hak untuk memperoleh pangan merupakan salah satu hak asasi manusia, sebagaimana tersebut dalam Pasal 27 UUD 1945 maupun dalam Deklarasi Roma (1996). Undang-Undang nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan, menyebutkan ketahanan pangan didefinisikan sebagai kondisi terpenuhinya Pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. Sebagai kebutuhan dasar dan salah satu hak asasi manusia, pangan mempunyai arti dan peran yang sangat penting bagi kehidupan suatu bangsa.

Prevalence of Undernourishment (PoU) adalah estimasi proporsi dari suatu populasi tertentu, dimana konsumsi energi biasanya sehari-hari dari makanan tidak cukup untuk memenuhi tingkat energi yang dibutuhkan untuk hidup normal, aktif dan sehat, yang dinyatakan dalam bentuk persentase. PoU merupakan indikator global dalam SDGs target 2.1, artinya indikator ini dapat digunakan secara global untuk membandingkan kerawanan pangan antar wilayah. Kerawanan pangan yang diukur dari ketidakcukupan pangan di Indonesia pada 2023 sebesar 8,53 persen. Artinya ada sebanyak 8,53 persen penduduk Indonesia dengan konsumsi yang tidak cukup energi untuk hidup secara sehat dan beraktivitas secara normal.

Trend PoU tahun 2018 sampai 2023 cenderung naik setiap tahunnya. Hal tersebut menjadi perhatian pemerintah karena kerawanan pangan ditargetkan menurun setiap tahun, hingga 2024 ditetapkan target penurunan kerawanan pangan nasional hingga menjadi 5 persen (lihat pada grafik di bawah).



Sumber: Badan Pusat Statistik.

BANTUAN PANGAN

Sejak berdiri pada tanggal 29 Juli 2021, Badan Pangan Nasional telah melaksanakan serangkaian program dan kegiatan untuk mendukung pengentasan kemiskinan dan mengakhiri kelaparan melalui pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran bantuan pangan untuk masyarakat berpendapatan rendah dan terdampak bencana sebagaimana tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2021 tentang Badan Pangan Nasional pada Pasal 15 huruf (c). Bantuan Pangan yang diberikan adalah Pangan Pokok dan Pangan lain yang diberikan untuk mengatasi Masalah Pangan dan Krisis Pangan, serta meningkatkan akses Pangan bagi masyarakat miskin dan/atau rawan Pangan dan Gizi; sesuai amanat Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan pada Pasal 1 angka 27.

Sejalan dengan upaya Pemerintah untuk menangani permasalahan kerawanan pangan dan gizi yang kompleks, maka Badan Pangan Nasional menyalurkan 2 (dua) jenis bantuan pangan yang berasal dari Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) dan di luar CPP yang telah dilaksanakan sejak tahun 2023 berupa.



Bantuan pangan CPP berupa beras sejumlah 10 kg diberikan kepada 22,253 juta penerima bantuan beras (PBB) selama 9 bulan di 38 provinsi, 514 kabupaten/kota yang ditentukan berdasarkan Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) dari Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.



Bantuan pangan CPP berupa 1 kg daging ayam dan berupa 10 telur ayam diberikan kepada 1,4 Juta keluarga risiko stunting (KRS) selama 9 bulan di 7 provinsi, yaitu Sumatera Utara, Banten, Jawa Barat, Jawa Timur, Sulawesi Barat, Jawa Tengah, dan Nusa Tenggara Timur yang ditentukan berdasarkan data Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN).



Bantuan pangan di luar CPP berupa 1 kaleng kornet daging sapi, 2 kaleng sarden ikan, 500 gram bihun jagung, 500 gram kacang hijau, 1 liter minyak goreng, dan 250 gram garam beryodium diberikan sekali sebagai stimulus kepada 98.600 KK pada tahun 2023 dan 45.000 KK pada tahun 2024 di 8 provinsi, 20 kabupaten/kota yang merupakan daerah rentan rawan pangan prioritas 2 atau 3 dan/atau gizi dengan *prevalence of undernourishment* (PoU) di atas median nasional.

Tujuan dari penyaluran bantuan pangan adalah mengurangi beban pengeluaran untuk pangan bagi masyarakat rawan pangan dan gizi serta mengentaskan daerah rentan rawan pangan dan menguatkan daerah tahan pangan. Oleh karena itu, sasarannya pun berupa keluarga rentan rawan pangan pada kelompok pengeluaran 10%-40% terbawah (desil 1-4) untuk CPP beras dan desil 1 untuk bantuan pangan di luar CPP, serta keluarga rentan rawan gizi untuk CPP daging ayam dan telur, sehingga akan berdampak dan mendukung pengentasan kemiskinan dan mengakhiri kelaparan yang sejalan dengan pencapaian tujuan Pembangunan berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals* (SDGs), yaitu SDG-1 dan SDG-2.





BAB 7

PEMANFAATAN

PANGAN



Pemanfaatan pangan umumnya dipahami sebagai cara tubuh manusia untuk memanfaatkan berbagai komponen gizi yang diperoleh dari makanan, yang pada akhirnya menentukan status gizi individu. Asupan gizi beragam seimbang sesuai kecukupan kebutuhan tubuh untuk aktif dan produktif diperoleh dari pola makan yang baik, penyiapan makanan yang baik, keragaman diet/makanan, distribusi makanan antar anggota keluarga dalam rumah tangga, ketersediaan air bersih, tingkat kebersihan dan kesehatan tubuh, dan lain-lain.

Hasil dari interaksi antara makanan yang dikonsumsi, metabolisme zat gizi makanan oleh tubuh dan lingkungan hidup di sekitarnya menentukan gambaran status gizi seseorang. Status gizi mempengaruhi kekebalan tubuh, ketahanan/kerentanan terhadap penyakit, serta pertumbuhan dan perkembangan fisik dan mental. Masalah gizi, terutama pada ibu/wanita saat ini, dapat berdampak pada kualitas sumber daya manusia pada generasi berikutnya. Dalam jangka panjang kekurangan gizi dapat mengakibatkan hilangnya potensi generasi muda yang cerdas dan berkualitas (*lost generation*) karena tidak produktif dan tidak mampu bersaing di masa depan. Terpenuhinya kebutuhan gizi akan menurunkan terjadinya kesakitan, kecacatan, dan kematian, sehingga meningkatkan kualitas kesehatan individu. Aspek pemanfaatan pangan pada FSVA didekati dari lima indikator, yaitu: (i) tenaga kesehatan; (ii) akses air bersih; (iii) lama sekolah perempuan; (iv) balita stunting; dan (v) angka harapan hidup.

7.1. Kecukupan Tenaga Kesehatan

Ketersediaan tenaga kesehatan (dokter umum, dokter spesialis, dokter gigi, bidan, tenaga kesehatan masyarakat, tenaga gizi, tenaga keterampilan fisik, dan tenaga keteknisian medis) yang cukup di suatu wilayah akan memberi pelayanan kesehatan yang optimal kepada masyarakat yang pada gilirannya dapat menekan penyakit-penyakit infeksi yang berdampak pada masalah gizi, sekaligus mengkampanyekan pola hidup bersih dan sehat (PHBS). Sosialisasi dan edukasi terkait dengan gizi dan perilaku hidup sehat juga menjadi tugas pelayanan tenaga kesehatan. Kesehatan masyarakat yang baik akan menunjang fungsi pemanfaatan pangan yang baik. Oleh karena itu, pembangunan dan peningkatan kualitas sektor kesehatan harus terus diupayakan untuk meningkatkan status kesehatan setiap individu.

Tabel 7.1.
Rasio Jumlah Penduduk per Tenaga Kesehatan Terhadap Kepadatan Penduduk 2019–2023

Provinsi	2019	2020	2021	2022	2023
Aceh	2,20	1,49	1,36	1,20	1,19
Sumatera Utara	1,65	1,39	1,22	1,18	1,18
Sumatera Barat	2,30	1,98	1,74	1,62	1,60
Riau	4,75	4,24	3,39	3,33	3,28
Jambi	3,66	3,03	2,85	2,74	2,72
Sumatera Selatan	3,15	2,87	2,56	2,30	2,28
Bengkulu	2,16	1,92	1,81	1,72	1,74
Lampung	1,59	1,44	1,26	1,22	1,22
Bangka Belitung	2,69	2,67	2,42	2,37	2,42
Kepulauan Riau	1,15	1,01	0,84	0,81	0,78

Provinsi	2019	2020	2021	2022	2023
DKI Jakarta	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
Jawa Barat	0,48	0,35	0,29	0,29	0,29
Jawa Tengah	0,37	0,34	0,30	0,30	0,30
DI Yogyakarta	0,20	0,19	0,16	0,16	0,17
Jawa Timur	0,51	0,46	0,37	0,37	0,37
Banten	0,46	0,37	0,28	0,25	0,26
Bali	0,33	0,27	0,23	0,22	0,22
NTB	1,41	1,06	1,00	0,84	0,82
NTT	3,32	2,44	1,72	1,50	1,46
Kalimantan Barat	11,19	9,10	7,47	6,98	6,93
Kalimantan Tengah	14,17	12,42	11,01	10,45	10,17
Kalimantan Selatan	2,65	2,42	2,12	1,95	1,94
Kalimantan Timur	10,79	8,52	6,52	6,46	6,42
Kalimantan Utara	21,91	18,82	16,74	15,00	14,77
Sulawesi Utara	1,41	1,07	0,93	0,90	0,86
Sulawesi Tengah	4,62	4,01	3,63	3,36	3,29
Sulawesi Selatan	1,68	1,25	1,06	0,82	0,81
Sulawesi Tenggara	3,11	2,64	2,33	1,73	1,69
Gorontalo	2,36	2,15	1,87	1,76	1,66
Sulawesi Barat	4,93	2,43	2,21	1,91	1,95
Maluku	6,54	5,05	4,40	3,63	3,57
Maluku Utara	6,67	5,36	4,44	3,57	3,42
Papua Barat*	21,70	17,98	13,61	11,41	10,99
Papua**	34,53	28,23	21,42	18,28	17,79
Indonesia	2,60	2,18	1,84	1,70	1,71

Sumber: Profil Kesehatan Indonesia 2023 (Kemenkes 2024)

*data akumulasi Daerah Otonomi Baru (Papua Barat dan Papua Barat Daya)

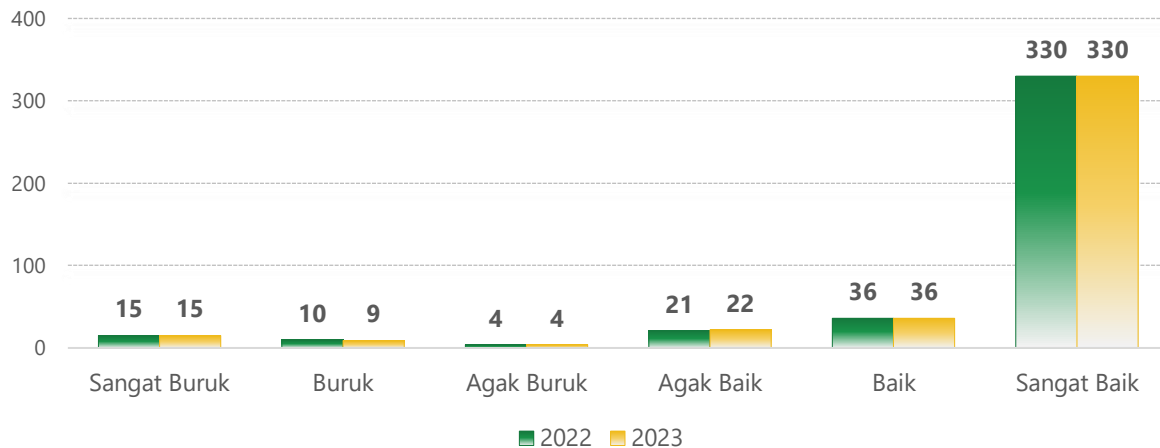
**data akumulasi Daerah Otonomi Baru (Papua, Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan)

Rasio antara jumlah penduduk per tenaga kesehatan terhadap kepadatan penduduk meningkat dari 1,70 pada tahun 2022 menjadi 1,71 pada tahun 2023 yang artinya rata-rata 1 orang tenaga kesehatan di Indonesia bekerja melayani penduduk di wilayah seluas 1,70 km² menjadi 1,71 km².

Rasio antara jumlah penduduk per tenaga kesehatan terhadap kepadatan penduduk tertinggi dimiliki oleh Provinsi Papua dengan nilai sebesar 17,79, yang artinya masing-masing tenaga kesehatan melayani penduduk di wilayah seluas 17,79 km², sedangkan rasio terendah dimiliki oleh Provinsi DKI Jakarta dengan nilai sebesar 0,01, dimana masing-masing tenaga kesehatannya melayani penduduk di wilayah seluas 0,01 km². Namun demikian, telah terjadi perbaikan rasio tenaga kesehatan yang signifikan di Provinsi Papua dari 18,28 pada tahun 2022 menjadi 17,79 pada tahun 2023.

Pada tingkat kabupaten, rasio antara jumlah penduduk per tenaga kesehatan terhadap kepadatan penduduk tingkat kabupaten pada seluruh kategori cenderung sama dengan tahun 2022. Jumlah kabupaten yang masuk dalam kelompok rentan, yaitu prioritas 1-3 sebanyak 28 kabupaten yang tersebar di Pulau Kalimantan dan Papua. Perbaikan terjadi pada kategori agak buruk atau prioritas 2

yang mana pada tahun 2022 sebanyak 10 kabupaten menjadi 9 kabupaten. Pada kategori kelompok tahan, yaitu prioritas 4-6 terjadi perbaikan pada kategori agak baik atau prioritas 4 yang pada tahun 2022 sebanyak 21 kabupaten menjadi 22 kabupaten. Fluktuasi kategori pada indikator rasio antara jumlah penduduk per tenaga kesehatan terhadap kepadatan penduduk tingkat kabupaten dapat dilihat pada Gambar 7.1 di bawah ini.



Gambar 7.1. Sebaran Kabupaten Menurut Kelompok Rasio Jumlah Penduduk per Tenaga Kesehatan terhadap Tingkat Kepadatan Penduduk

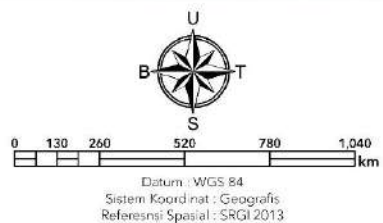
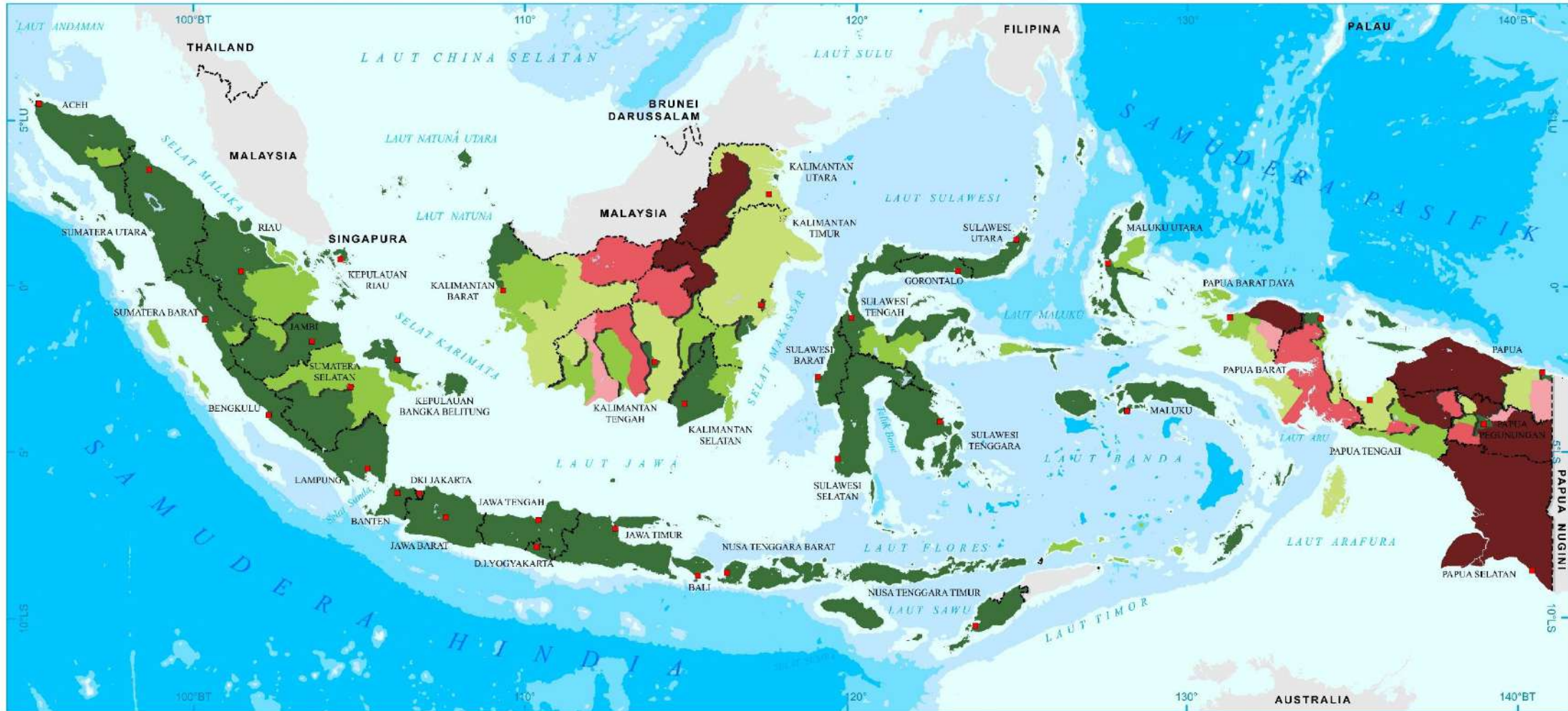
Untuk daerah perkotaan, seluruh kota masuk ke dalam kategori sangat baik atau berada pada prioritas 6. Hal ini mengartikan bahwa tenaga kesehatan di perkotaan sudah terpenuhi yang terlihat pada Tabel 7.2.

Tabel 7.2. Sebaran Kota Menurut Kelompok Rasio Jumlah Penduduk per Tenaga Kesehatan terhadap Tingkat Kepadatan Penduduk

Kelompok	Tahun 2022		Tahun 2023	
	Jumlah kota	Persentase	Jumlah kota	Persentase
Sangat buruk	0	0	0	0
Buruk	0	0	0	0
Agak buruk	0	0	0	0
Agak baik	0	0	0	0
Baik	0	0	0	0
Sangat baik	98	100	98	100

Peta 7.1.

Peta Rasio Jumlah Penduduk per Tenaga Kesehatan terhadap Kepadatan Penduduk Tahun 2024



LEGENDA

- Batas Administrasi**
- Ibukota Provinsi
 - Batas Negara
 - Batas Provinsi
 - Danau

- Batimetri (meter)**
- 0 - <200
 - 200 - <500
 - 500 - <1000
 - 1000 - <2000
 - 2000 - <4000
 - 4000 - <6000
 - 6000 - <8000
 - >8000

- Rasio Penduduk per Tenaga Kesehatan per Tingkat Kepadatan**
- Sangat Rentan
 - Rentan
 - Agak Rentan
 - Agak Tahan
 - Tahan
 - Sangat Tahan

Sumber Data :
 1. Data tenaga kesehatan Indonesia 2023, Kemenkes
 2. Peta Batas Wilayah RBI 2023, BIG
 3. Batimetri Indonesia

Diproduksi Oleh :
 Badan Pangan Nasional Tahun 2024



7.2. Akses ke Air Bersih

Akses air bersih memiliki peran penting dalam sanitasi dan kebersihan. Air yang tidak bersih dapat menimbulkan penyakit dan menurunkan kemampuan tubuh dalam menyerap zat gizi dan pada akhirnya mempengaruhi status gizi seseorang. Tidak hanya mempengaruhi kesehatan fisik, akses air bersih juga memiliki konsekuensi ekonomi yang serius. Akses air bersih yang tidak memadai mengharuskan peningkatan pangsa pengeluaran untuk air bersih. Ketika individu dan rumah tangga tidak memiliki cukup air yang bersih untuk memasak, mengairi tanaman, atau memberi minum ternak, maka akan mempengaruhi strategi penghidupan ekonomi rumah tangga (Young *et al.* 2021).

Di samping itu, hubungan antara akses air dan ketahanan pangan telah dikonseptualisasikan melalui tiga jalur yang berbeda (WFP 2017):

- Kurangnya akses air bersih untuk keperluan rumah tangga merupakan penyebab utama penyakit yang berhubungan dengan air (misal diare) yang mendorong terjadinya malnutrisi akibat ketidakmampuan penyerapan zat gizi.
- Kurangnya akses terhadap air yang diperlukan untuk tujuan produktif seperti peternakan, irigasi, dan tujuan produktif lain akan mengurangi peluang untuk memproduksi pangan dan/atau menghasilkan pendapatan.
- Kurangnya sumber air terdekat yang memadai mengakibatkan lamanya waktu untuk mendapatkan akses terhadap air, sehingga mengurangi waktu yang tersedia untuk kegiatan produktif lainnya.

Secara nasional pada tahun 2023 sebanyak 76,97% rumah tangga memiliki akses yang memadai terhadap air bersih, yaitu air minum yang berasal dari air ledeng/PAM, pompa air, sumur atau mata air yang terlindung dan air hujan (termasuk air kemasan) dengan memperhatikan jarak ke jamban minimal 10 meter. Secara nasional, terjadi penurunan persentase rumah tangga yang tidak memiliki akses yang memadai terhadap air bersih hampir di seluruh provinsi (Tabel 7.3).

Provinsi dengan akses air bersih yang buruk adalah Papua dan Kalimantan Barat, dimana lebih dari 50% rumah tangga di wilayah tersebut tidak dapat mengakses air bersih secara memadai. Pencemaran sumber daya air di Kalimantan Barat disebabkan oleh isu Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) yang masih marak di sejumlah kabupaten. PETI menyebabkan air sungai menjadi keruh dan tidak dapat digunakan untuk mandi dan mencuci serta untuk air baku minuman (PRCF Indonesia, 2023). Selain itu, kebiasaan masyarakat dalam menggunakan air sungai dan air hujan yang tidak diolah dalam kebutuhan sehari-hari, rendahnya minat untuk terhubung ke perusahaan air minum milik pemerintah (PDAM), dan terbatasnya pasokan air minum dari PDAM adalah beberapa tantangan di sektor air yang dihadapi oleh

Provinsi Kalimantan (USAID Indonesia, 2023). Namun demikian, jika dibandingkan dengan tahun 2022, Provinsi Papua telah mengalami perbaikan akses air bersih dari 64,23% menjadi 59,17%.

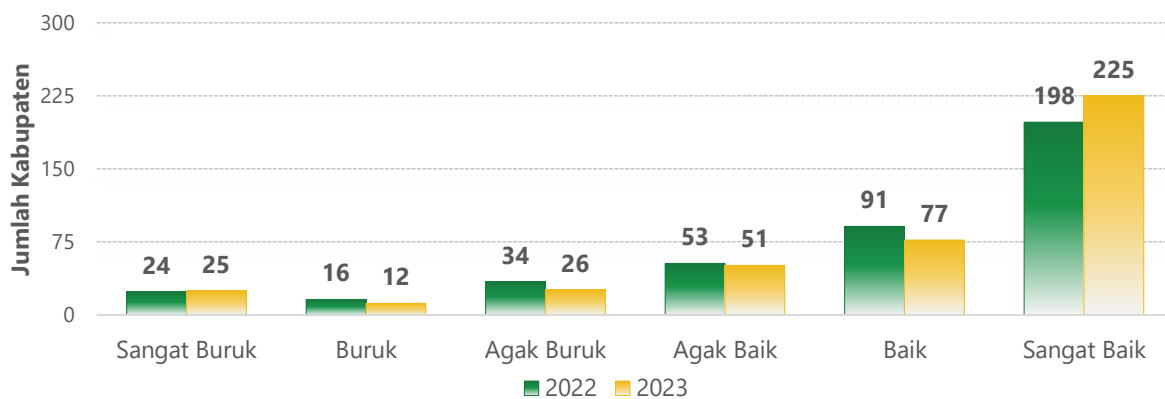
Tabel 7.3.
Persentase Rumah Tangga Tanpa Akses ke Air Bersih 2019–2023

Provinsi	2019	2020	2021	2022	2023
Aceh	29,30	28,21	28,52	28,26	26,83
Sumatera Utara	26,14	27,34	27,73	28,98	27,73
Sumatera Barat	26,91	22,38	23,05	23,47	21,32
Riau	30,44	28,32	28,44	29,85	27,30
Jambi	37,06	36,33	36,03	32,72	32,53
Sumatera Selatan	36,74	35,33	33,30	34,30	32,46
Bengkulu	50,48	47,74	46,85	44,99	43,58
Lampung	40,35	37,39	34,14	34,50	32,11
Bangka Belitung	15,91	16,81	16,94	16,00	14,18
Kepulauan Riau	8,47	8,50	8,01	7,33	7,73
DKI Jakarta	11,56	7,20	5,51	9,33	6,08
Jawa Barat	27,62	24,56	22,58	24,31	22,06
Jawa Tengah	21,14	19,36	19,83	20,67	19,11
DI Yogyakarta	24,70	20,07	25,48	23,21	23,65
Jawa Timur	23,90	21,97	21,38	22,40	19,44
Banten	26,32	27,48	25,37	25,63	23,89
Bali	11,33	11,56	12,93	13,80	12,89
NTB	25,31	25,64	23,36	27,29	24,99
NTT	34,52	34,87	35,25	35,27	33,70
Kalimantan Barat	62,63	62,78	60,44	60,42	59,51
Kalimantan Tengah	30,82	28,86	29,93	30,34	28,06
Kalimantan Selatan	27,95	26,25	22,30	23,38	21,38
Kalimantan Timur	6,23	6,59	7,37	5,58	5,47
Kalimantan Utara	19,42	18,37	19,96	20,61	17,78
Sulawesi Utara	18,28	20,18	20,27	19,78	17,65
Sulawesi Tengah	25,33	24,62	23,19	28,99	25,79
Sulawesi Selatan	20,68	22,92	22,18	21,50	18,82
Sulawesi Tenggara	20,68	15,98	15,85	16,58	15,23
Gorontalo	17,67	15,17	15,34	12,14	11,27
Sulawesi Barat	36,45	36,30	29,67	30,68	28,87
Maluku	26,83	26,41	25,73	26,87	26,34
Maluku Utara	35,18	33,37	29,24	33,11	31,78
Papua Barat	29,82	31,63	34,25	38,64	38,36
Papua	60,95	60,90	62,06	64,23	59,17
Indonesia	26,35	24,76	24,02	25,05	23,03

Sumber: Susenas 2019 – 2023, BPS

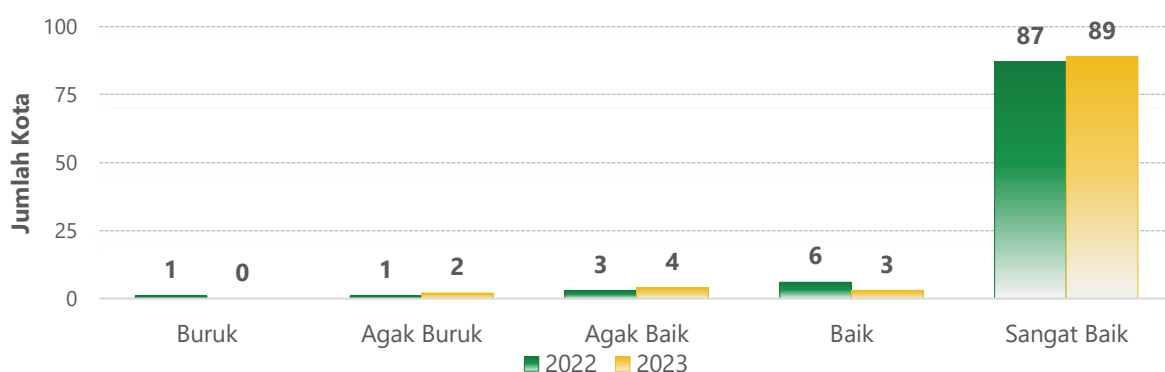
Pada tingkat kabupaten atau kota, pengelompokan dibagi menjadi dua bagian, yaitu kelompok rentan dan tahan. Kelompok rentan berisikan kabupaten atau kota dengan kategori sangat buruk, buruk, dan agak buruk yang tergambarkan dalam prioritas 1-3, sedangkan kelompok tahan berisikan kabupaten atau kota dengan kategori agak baik, baik, dan sangat baik yang tergambarkan dalam prioritas 4-6.

Jumlah kabupaten pada kelompok rentan mengalami penurunan dari 74 kabupaten menjadi 63 kabupaten. Jumlah total kabupaten pada kelompok tahan mengalami peningkatan dari 342 kabupaten menjadi 353 kabupaten. Sebaran kabupaten pada kelompok rentan yang mengalami perbaikan akses air bersih antara lain Ogan Komering Ulu Selatan (Provinsi Sumatera Selatan); Way Kanan (Provinsi Lampung); Ketapang dan Melawi (Provinsi Kalimantan Barat); Murung Raya (Provinsi Kalimantan Tengah); Kepulauan Siau Tagulandang Biaro (Provinsi Sulawesi Utara); Tana Toraja (Provinsi Sulawesi Selatan); Buton Selatan (Provinsi Sulawesi Tenggara); Seram Bagian Barat (Provinsi Maluku); Kepulauan Sula (Provinsi Maluku Utara); Puncak (Provinsi Papua); serta Raja Ampat dan Tambrauw (Provinsi Papua Barat). Sebaran kategori rumah tangga tanpa akses ke air bersih wilayah kabupaten berada pada Gambar 7.2.



Gambar 7.2. Sebaran Kabupaten Menurut Kelompok Rumah Tangga Tanpa Akses ke Air Bersih

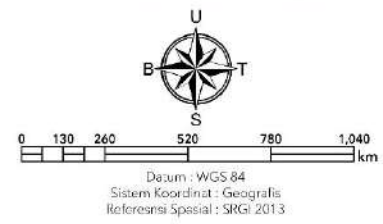
Terjadi peningkatan akses air bersih di wilayah perkotaan. Hal ini ditunjukkan oleh tidak adanya kota yang masuk kategori buruk dan terjadi peningkatan pada kategori sangat baik (Gambar 7.3). Kota yang mengalami perbaikan antara lain Kota Yogyakarta (Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta), Kota Blitar (Provinsi Jawa Timur), dan Kota Pontianak (Provinsi Kalimantan Barat).



Gambar 7.3 Sebaran Kota Menurut Kelompok Rumah Tangga Tanpa Akses ke Air Bersih

Peta 7.2.

Peta Persentase Rumah Tangga Tanpa Akses ke Air Bersih Tahun 2024



LEGENDA

- Batas Administrasi**
- Ibukota Provinsi
 - Batas Negara
 - - - Batas Provinsi
 - Danau

- Batimetri (meter)**
- 0 - <200
 - 200 - <500
 - 500 - <1000
 - 1000 - <2000
 - 2000 - <4000
 - 4000 - <6000
 - 6000 - <8000
 - >8000

Persentase Rumah Tangga Tanpa Akses ke Air Bersih

- Sangat Rentan
- Rentan
- Agak Rentan
- Agak Tahan
- Tahan
- Sangat Tahan

Sumber Data :
1. SUSENAS 2023, BPS
2. Peta Batas Wilayah RBI 2023, BIG
3. Batimetri Indonesia

Diproduksi Oleh :
Badan Pangan Nasional tahun 2024



7.3. Lama Sekolah Perempuan Berusia di Atas 15 Tahun

Studi di berbagai negara menunjukkan bahwa tingkat pendidikan dan pengetahuan perempuan terutama ibu dan pengasuh anak tentang gizi berkorelasi kuat dengan status gizi anaknya (Abuya *et al.* 2012). Glewwe (2009) mengidentifikasi 3 kemungkinan mekanisme hubungan antara tingkat pendidikan ibu dan status gizi serta kesehatan, yaitu: (1) pendidikan formal secara langsung akan mentransfer pengetahuan terkait kesehatan kepada calon ibu; (2) kemampuan membaca dan berhitung yang diperoleh perempuan di sekolah akan meningkatkan kemampuan mereka mengenali penyakit dan mencari pengobatan yang tepat untuk anak-anak mereka. Selain itu kemampuan membaca yang baik akan memudahkan mereka mengikuti instruksi medis untuk penanganan kesehatan dan menerapkannya; dan (3) lamanya sekolah perempuan meningkatkan penerimaan mereka terhadap pengobatan modern. Perempuan yang bersekolah juga memiliki kemungkinan besar untuk mendapatkan pekerjaan dengan gaji tinggi, menikah dengan pria yang memiliki pendidikan dan gaji tinggi maupun tinggal di lingkungan yang lebih baik, sehingga mempengaruhi status kesehatan anak-anak mereka (Abuya *et al.* 2012).

Salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat pendidikan dan pengetahuan ibu di Indonesia adalah dengan melihat durasi pendidikan formal yang dijalani oleh penduduk perempuan berusia 15 tahun ke atas. Tabel 7.4 menunjukkan rata-rata lama sekolah perempuan di atas 15 tahun di setiap provinsi. Semakin lama durasi sekolah maka tingkat pendidikan dan pengetahuan ibu diasumsikan semakin baik. Rata-rata lama sekolah tertinggi terdapat di Provinsi DKI Jakarta, yaitu 11,29 tahun diikuti oleh Kepulauan Riau (10,60 tahun), dan Maluku (10,44 tahun).

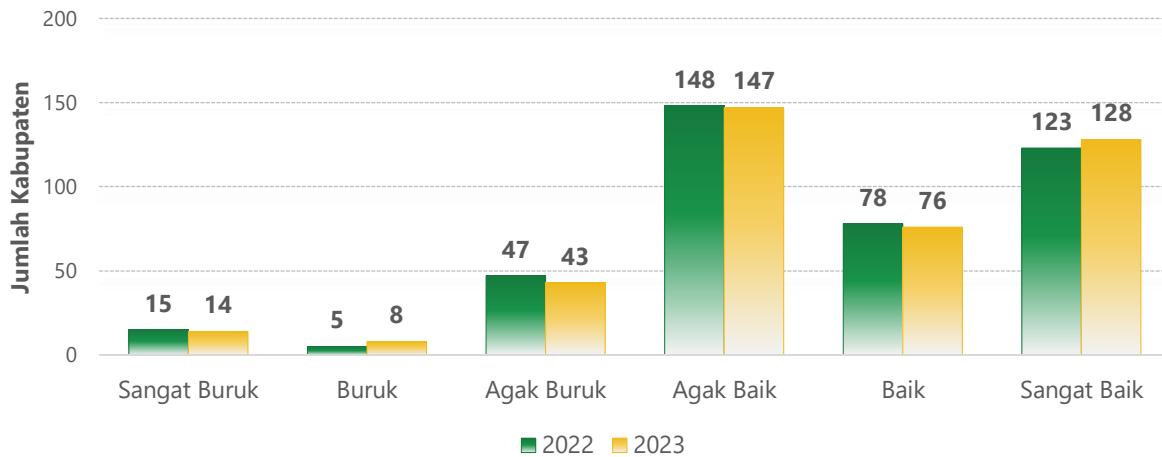
Rata-rata lama sekolah perempuan terpendek terdapat di Provinsi Papua, yaitu 6,89 tahun, diikuti Nusa Tenggara Barat (7,99 tahun), dan Kalimantan Barat (8,01 tahun). Secara umum, terdapat 12 provinsi yang rata-rata lama sekolah perempuan usia di atas 15 tahun di bawah rata-rata nasional sebesar 8,94 tahun. Rata-rata nasional sebesar 8,94 tahun masih belum mencapai target pemerintah yang mencanangkan wajib belajar selama 12 tahun yang terdiri dari pendidikan sekolah dasar selama enam tahun dan pendidikan sekolah menengah selama enam tahun.

Tabel 7.4.
Rata-rata Lama Sekolah Perempuan Berusia di Atas 15 Tahun 2019–2023

Provinsi	2019	2020	2021	2022	2023
Aceh	9,44	9,64	9,69	9,71	9,87
Sumatera Utara	9,59	9,73	9,73	9,89	10,00
Sumatera Barat	9,29	9,40	9,46	9,69	9,77
Riau	9,21	9,35	9,43	9,49	9,58
Jambi	8,56	8,76	8,80	8,91	9,03
Sumatera Selatan	8,41	8,48	8,58	8,73	8,83
Bengkulu	8,89	9,01	9,09	9,14	9,24
Lampung	8,11	8,32	8,35	8,42	8,53
Bangka Belitung	8,15	8,23	8,44	8,47	8,63
Kepulauan Riau	10,03	10,20	10,36	10,45	10,60
DKI Jakarta	10,86	10,93	10,95	11,10	11,29
Jawa Barat	8,47	8,65	8,75	8,95	8,98
Jawa Tengah	7,62	7,86	7,96	8,11	8,14
DI Yogyakarta	9,45	9,68	9,80	9,87	9,95
Jawa Timur	7,66	7,92	8,03	8,19	8,22
Banten	8,73	8,91	8,96	9,24	9,32
Bali	8,52	8,72	8,90	9,29	9,26
NTB	7,42	7,52	7,56	7,92	7,99
NTT	7,76	7,91	7,97	8,17	8,18
Kalimantan Barat	7,46	7,54	7,65	7,92	8,01
Kalimantan Tengah	8,58	8,75	8,80	8,90	8,99
Kalimantan Selatan	8,23	8,42	8,43	8,69	8,72
Kalimantan Timur	9,59	9,67	9,79	10,05	10,09
Kalimantan Utara	8,99	9,01	9,14	9,39	9,48
Sulawesi Utara	9,73	9,82	9,87	10,03	10,10
Sulawesi Tengah	8,86	8,98	9,03	9,14	9,20
Sulawesi Selatan	8,57	8,74	8,79	9,05	9,05
Sulawesi Tenggara	8,99	9,20	9,26	9,46	9,50
Gorontalo	8,45	8,60	8,68	8,84	8,88
Sulawesi Barat	8,09	8,18	8,21	8,35	8,39
Maluku	10,01	10,17	10,18	10,39	10,44
Maluku Utara	9,07	9,15	9,22	9,45	9,48
Papua Barat	9,58	9,70	9,68	9,92	9,98
Papua	6,17	6,26	6,43	6,85	6,89
Indonesia	8,43	8,62	8,70	8,89	8,94

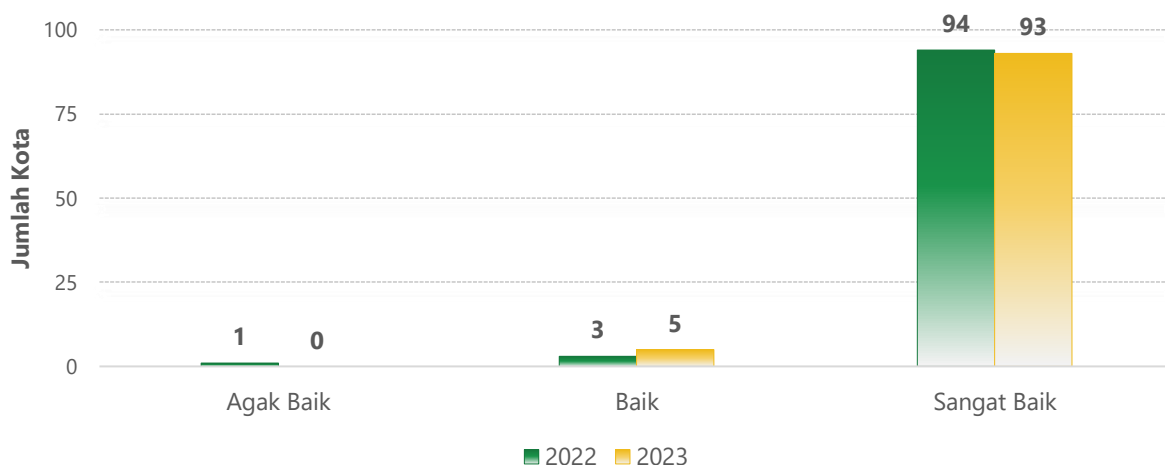
Sumber: Susenas 2019 – 2023, BPS

Pada tingkat kabupaten, jumlah kabupaten pada kategori sangat buruk, buruk, dan agak buruk mengalami penurunan dari 67 kabupaten menjadi 65 kabupaten. Jumlah kabupaten pada kategori agak baik, baik, sangat baik mengalami peningkatan dari 349 kabupaten menjadi 351 kabupaten. Sebaran kategori lama sekolah perempuan berusia di atas 15 tahun untuk wilayah kabupaten terdapat pada Gambar 7.4.



Gambar 7.4. Sebaran Kabupaten Menurut Kelompok Lama Sekolah Perempuan Berusia di Atas 15 Tahun

Sementara untuk wilayah perkotaan, seluruhnya telah memiliki rata-rata lama sekolah perempuan lebih dari 7,5 tahun, dimana seluruh kota telah masuk pada kelompok tahan atau prioritas 4-6. Sebaran indikator lama sekolah perempuan berusia di atas 15 tahun untuk wilayah perkotaan seperti pada Gambar 7.5.



Gambar 7.5. Sebaran Kota Menurut Kelompok Lama Sekolah Perempuan Berusia di Atas 15 Tahun

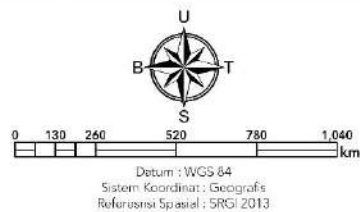
Peta 7.3.

Peta Rata-Rata Lama Sekolah Perempuan Berusia di Atas 15 Tahun Tahun 2024



BADAN PANGAN NASIONAL

NATIONAL FOOD AGENCY (NFA)



LEGENDA

- Batas Administrasi**
- Ibukota Provinsi
 - - - Batas Negara
 - - - Batas Provinsi
 - ☪ Danau

- Batimetri (meter)**
- 0 - <200
 - 200 - <500
 - 500 - <1000
 - 1000 - <2000
 - 2000 - <4000
 - 4000 - <6000
 - 6000 - <8000
 - >8000

- Rata-rata Lama Sekolah Perempuan Usia > 15 Tahun**
- Sangat Rentan
 - Rentan
 - Agak Rentan
 - Agak Tahan
 - Tahan
 - Sangat Tahan

Sumber Data :
1. SUSENAS 2023, BPS
2. Peta Batas Wilayah RBI 2023, BIG
3. Batimetri Indonesia

Diproduksi Oleh :
Badan Pangan Nasional Tahun 2024

7.4. Balita Stunting

Status gizi dipengaruhi oleh penyebab langsung dan tidak langsung. Status ketahanan pangan keluarga merupakan salah satu faktor penyebab tidak langsung yang mempengaruhi status gizi anak, selain pola asuh dan akses terhadap fasilitas kesehatan dan air bersih. Sedangkan pola konsumsi makanan dan penyakit infeksi yang diderita berpengaruh langsung terhadap status gizi anak. Setiap faktor penyebab baik langsung ataupun tidak langsung akan saling mempengaruhi dan berinteraksi satu dengan lainnya. Sebagai contoh, anak yang konsumsi pangannya kurang baik maka daya tahan tubuhnya akan lemah, sehingga akan lebih mudah terserang infeksi yang pada akhirnya berpengaruh terhadap status gizinya. Seorang anak dengan konsumsi pangan yang baikpun tidak serta merta memiliki status gizi yang baik. Apabila anak tersebut sering menderita penyakit infeksi, maka situasi kesehatannya tersebut akan berpengaruh terhadap penyerapan zat gizi oleh tubuh yang berpengaruh terhadap status gizinya.

Status gizi balita diukur menggunakan 3 indikator, yaitu prevalensi stunting (tinggi badan menurut umur), *underweight* (berat badan menurut umur) dan *wasting* (berat badan menurut tinggi badan).

1. Pendek atau *stunting*: rasio tinggi badan menurut umur -TB/U- di bawah -2 standar deviasi dari *mean* referensi populasi WHO 2005, yang menggambarkan kurang gizi yang terjadi secara terus-menerus, dalam jangka panjang dan kronis.
2. Gizi kurang dan buruk atau *underweight*: rasio berat badan menurut umur -BB/U- di bawah -2 standar deviasi dari *mean* referensi populasi WHO 2005, yang menggambarkan kurang gizi.
3. Kurus atau *wasting*: rasio berat badan menurut tinggi badan -BB/TB- di bawah -2 standar deviasi dari *mean* referensi populasi WHO 2005, yang menggambarkan kurang gizi yang terjadi secara akut atau baru terjadi.

WHO mengklasifikasikan masalah gizi sebagai masalah kesehatan berdasarkan prevalensi *underweight*, *stunting* dan *wasting* dalam populasi seperti pada Tabel 7.5.

Tabel 7.5.
Klasifikasi WHO untuk *Underweight*, *Stunting*, dan *Wasting* dalam Populasi

Klasifikasi	<i>Underweight</i>	<i>Stunting</i>	<i>Wasting</i>
Rendah	<10%	<20%	<5%
Sedang	10-19%	20-29%	5-9%
Tinggi	20-29%	30-39%	10-14%
Sangat Tinggi	≥30%	≥40%	≥15%

Sumber: WHO 2000

Secara nasional, Indonesia masih menghadapi tiga masalah gizi yang perlu menjadi perhatian dalam pembangunan pangan, yaitu masalah kekurangan gizi pada anak usia balita (*underweight*), fenomena anak pendek (*stunting*), dan masalah kelebihan gizi, yaitu *overweight* dan obesitas pada kelompok usia di atas 18 tahun. Tidak hanya masalah gizi makro, masalah kekurangan zat gizi mikro seperti kekurangan vitamin dan mineral yang menjadi penyebab masalah anemia pada ibu hamil, kekurangan vitamin A, kekurangan mineral Iodium, juga masih menjadi beban gizi yang harus segera ditangani.

Prevalensi balita pendek (*stunting*) di Indonesia tercatat sebesar 21,50% pada tahun 2023, menurun 0,1% dari tahun 2022. Namun demikian, WHO menetapkan batasan masalah gizi *stunting* tidak lebih

dari 20%, menyebabkan Indonesia masih termasuk dalam negara yang memiliki masalah stunting tinggi yang disebabkan oleh multi-faktorial dan bersifat antargenerasi.

Sebuah studi FAO (2018), mereview penelitian-penelitian yang mengevaluasi hubungan antara kerawanan pangan dan malnutrisi, menemukan bahwa kerawanan pangan dapat mempengaruhi status gizi dengan lima jalur konsumsi pangan yang tidak adekuat dalam jangka waktu yang lama, gizi buruk ibu dan anak, praktik pemberian makan, kondisi mental pengasuh, dan fungsi sistem imun. Lima jalur konsumsi pangan yang tidak adekuat tersebut:

- a) kuantitas dan kualitas asupan makanan yang tidak adekuat. Rumah tangga yang rawan pangan lebih mungkin memiliki anak-anak yang mengalami asupan gizi yang lebih rendah;
- b) gizi perinatal mempengaruhi kesehatan dan kesejahteraan semua kelompok usia. Kerawanan pangan ibu selama kehamilan dapat menyebabkan kesehatan janin yang buruk. Peningkatan ketahanan pangan melalui perlindungan sosial akan mengurangi kejadian kelahiran bayi Berat Badan Lahir Rendah (BBLR);
- c) asupan gizi yang tidak memadai selama di dalam kandungan dan 1000 hari pertama kelahiran dapat menghambat tumbuh kembang anak hingga menjadi stunting. Oleh karena itu, praktik pemberian makan yang baik sejak inisiasi menyusui dan pemberian makanan pendamping ASI yang memadai hingga usia dua tahun penting dilakukan untuk memastikan pertumbuhan dan perkembangan anak yang normal;
- d) kerawanan pangan memicu stres pada orang tua atau pengasuh yang akan berujung pada praktik pengasuhan yang tidak baik, salah satu bentuknya pemberian ASI tidak optimal. Studi menemukan bahwa depresi pada ibu memiliki efek negatif pada pertumbuhan anak usia dini, terutama tinggi badan sesuai usia; dan
- e) kerawanan pangan menyebabkan fungsi sistem kekebalan tubuh terganggu, sehingga anak berada dalam siklus infeksi dan kekurangan gizi akibat defisiensi imun.

Secara teknis kesehatan, anak stunting adalah salah satu bentuk output dari kurang gizi kronis yang disebabkan oleh asupan gizi yang kurang dalam waktu cukup lama, yaitu sejak 1000 hari pertama kehidupan. Janin dalam kandungan membutuhkan asupan gizi yang cukup melalui ibunya. Oleh karena itu, tingkat kesejahteraan ibu hamil dan menyusui menjadi sangat krusial karena menentukan kualitas bayi yang dilahirkan dan tumbuh kembang di dua tahun pertama kehidupannya.

Tabel 7.6.
Prevalensi Balita *Stunting* per Provinsi Tahun 2019–2023

Provinsi	2019 ^a	2020 ^b	2021 ^c	2022 ^d	2023 ^e
Aceh	34,2	33,0	33,2	31,2	29,4
Sumatera Utara	30,1	28,7	25,8	21,1	18,9
Sumatera Barat	27,5	26,7	23,3	25,2	23,6
Riau	24,0	22,4	22,3	17,0	13,6
Jambi	21,0	19,6	22,4	18,0	13,5
Sumatera Selatan	29,0	28,7	24,8	18,6	20,3
Bengkulu	26,9	25,4	22,1	19,8	20,2
Lampung	26,3	24,4	18,5	15,2	14,9
Kep. Bangka Belitung	19,9	20,9	18,6	18,5	20,6

Provinsi	2019 ^a	2020 ^b	2021 ^c	2022 ^d	2023 ^e
Kep. Riau	16,8	13,7	17,6	15,4	16,8
DKI Jakarta	20,0	19,2	16,8	14,8	17,6
Jawa Barat	26,2	25,6	24,5	20,2	21,7
Jawa Tengah	27,7	26,9	20,9	20,8	20,7
DI Yogyakarta	21,0	19,9	17,3	16,4	18,0
Jawa Timur	26,9	25,6	23,5	19,2	17,7
Banten	24,1	21,8	24,5	20,0	24,0
Bali	14,4	13,7	10,9	8,0	7,2
NTB	37,9	38,2	31,4	32,7	24,6
NTT	43,8	43,0	37,8	35,3	37,9
Kalimantan Barat	31,5	30,9	29,8	27,8	20,6
Kalimantan Tengah	32,3	30,5	27,4	26,9	23,5
Kalimantan Selatan	31,8	30,9	30,0	24,6	24,7
Kalimantan Timur	28,1	27,5	22,8	23,9	22,9
Kalimantan Utara	26,3	25,8	27,5	22,1	17,4
Sulawesi Utara	21,2	29,3	21,6	20,5	21,3
Sulawesi Tengah	31,3	29,7	29,7	28,2	27,2
Sulawesi Selatan	30,6	19,7	27,4	27,2	27,4
Sulawesi Tenggara	31,4	29,8	30,2	27,7	30,0
Gorontalo	34,9	32,7	29,0	23,8	26,9
Sulawesi Barat	40,4	40,4	33,8	35,0	30,3
Maluku	30,4	27,9	28,7	26,1	28,4
Maluku Utara	29,1	27,2	27,5	26,1	23,7
Papua Barat	24,6	28,1	26,2	30,0	
Papua	29,4	23,4	29,5	34,6	
Indonesia	27,6	26,9	24,4	21,6	21,5

Sumber :

- Hasil Survei Status Gizi Balita 2019
- Proyeksi Metode SAE
- Hasil Studi Status Gizi Indonesia 2021 (Kemenkes 2022)
- Hasil Studi Status Gizi Indonesia 2022 (Kemenkes 2023)
- Hasil Survei Kesehatan Indonesia 2023 (Kemenkes 2024)

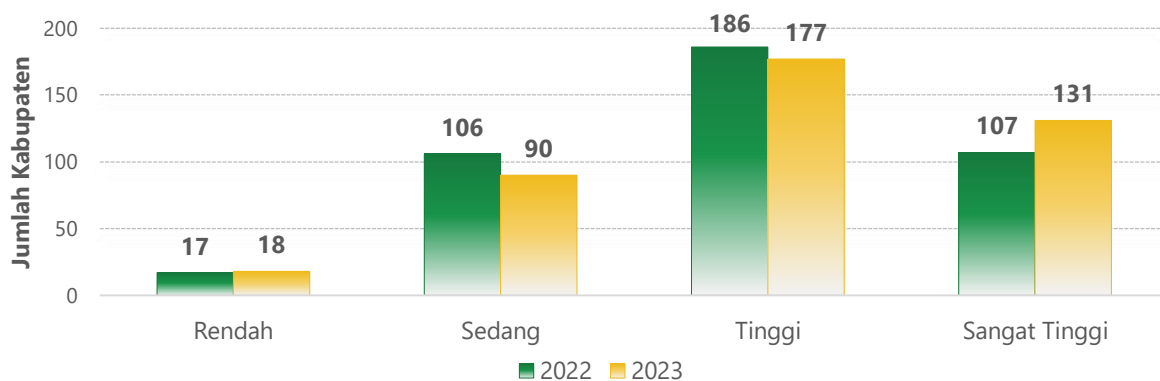
catatan:

Tahun 2023 Provinsi Papua mengalami pemekaran menjadi Provinsi Papua, Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan; sedangkan Provinsi Papua Barat mengalami pemekaran menjadi Provinsi Papua Barat dan Papua Barat Daya. Prevalensi Balita stunting Provinsi Papua 28,6%; Papua Selatan 25,0%; Papua Tengah 39,4%; Papua Pegunungan 37,3%; Papua Barat 24,8%; dan Papua Barat Daya 31,0%)

Tahun 2023, terdapat 10 provinsi yang masuk dalam klasifikasi rendah (<20%) menurut WHO, yaitu Bali, Jambi, Riau, Lampung, Kepulauan Riau, Kalimantan Utara, DKI Jakarta, Jawa Timur, DI Yogyakarta, dan Sumatera Utara. Provinsi Bali merupakan provinsi dengan persentase balita stunting terkecil, yaitu 7,2%. Upaya yang dilakukan Pemerintah Provinsi Bali untuk menekan prevalensi stunting dengan menguatkan kelembagaan dan Tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat Provinsi sampai dengan tingkat desa.

Secara umum, provinsi di Indonesia mengalami penurunan prevalensi balita *stunting* selama periode 2019-2023. Provinsi dengan penurunan persentase balita *stunting* tertinggi adalah Provinsi Nusa Tenggara Barat, yaitu 8,1%. Sementara itu, provinsi dengan peningkatan persentase balita *stunting* tertinggi adalah Provinsi Banten, yaitu 4,0% dibandingkan tahun 2022.

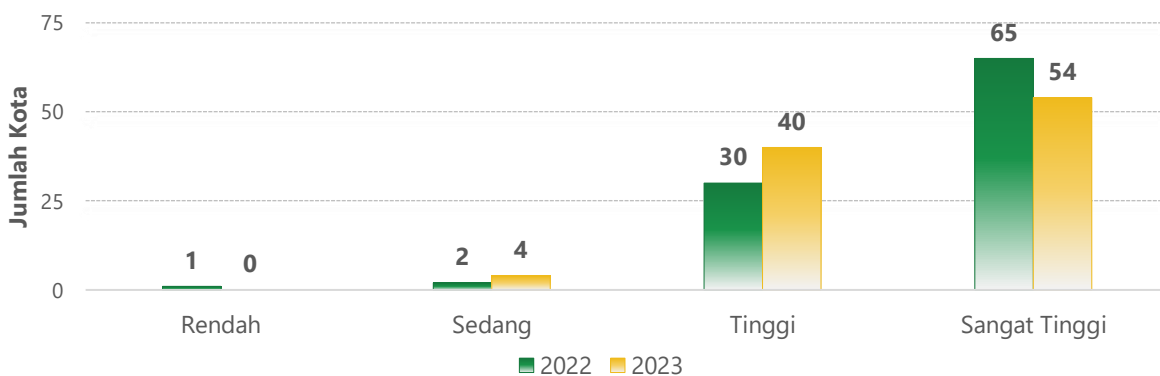
Pada tingkat kabupaten, jumlah kabupaten pada kelompok sangat tinggi dan tinggi berdasarkan prevalensi *stunting* sebanyak 108 kabupaten (25,96%), sedangkan 74,04% sisanya berada pada kelompok sedang dan rendah (Gambar 7.6). Kelompok rentan berisikan kabupaten atau kota dengan kategori sangat tinggi dan tinggi, sedangkan kelompok tahan berisikan kabupaten atau kota dengan kategori sedang dan rendah yang tergambarkan dalam prioritas 3-4.



Gambar 7.6. Sebaran Kabupaten Menurut Kelompok Persentase Balita *Stunting*

Berdasarkan Gambar 7.6 secara umum kabupaten mengalami perbaikan prevalensi balita *stunting* yang ditunjukkan oleh berkurangnya jumlah kabupaten yang masuk kategori tinggi, dari 106 menjadi 90 kabupaten, dan meningkatnya jumlah kabupaten yang masuk kategori rendah dari 107 kabupaten menjadi 131 kabupaten. Peningkatan jumlah kabupaten kategori rendah salah satunya disebabkan oleh pergeseran kabupaten yang masuk kategori sedang menjadi kategori rendah.

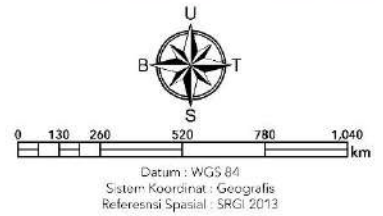
Pada tahun 2023 tidak terdapat kota yang masuk dalam kategori sangat tinggi. Berbeda dengan wilayah kabupaten, pada perkotaan terjadi penurunan jumlah kota pada kategori rendah dari 65 menjadi 54 kota. Sementara itu, jumlah kota pada kategori sedang mengalami peningkatan dari 30 menjadi 40 kota. Penanganan balita *stunting* di daerah perkotaan perlu mendapat perhatian karena terdapat kecenderungan mengalami peningkatan persentase balita *stunting*.



Gambar 7.7. Sebaran Kota Menurut Kelompok Persentase Balita *Stunting*

Peta 7.4.

Peta Persentase Balita dengan Tinggi Badan di Bawah Standar (Stunting) Tahun 2024



LEGENDA

- Batas Administrasi
- Ibukota Provinsi
- - - Batas Negara
- - - Batas Provinsi
- ☪ Danau

- Batimetri (meter)
- 0 - <200
- 200 - <500
- 500 - <1000
- 1000 - <2000
- 2000 - <4000
- 4000 - <6000
- 6000 - <8000
- >8000

- Persentase Balita dengan Tinggi Badan di Bawah Standar (Stunting)
- Rentan
- Agak Rentan
- Agak Tahan
- Tahan

Sumber Data :
1. SKI 2023, Kemenkes
2. Peta Batas Wilayah RI: 2023, BIG
3. Batimetri Indonesia

Diproduksi Oleh :
Badan Pangan Nasional Tahun 2024

7.5. Angka Harapan Hidup

Angka harapan hidup merupakan salah satu dampak dari status kesehatan di suatu wilayah. Meningkatnya angka harapan hidup menandakan adanya perbaikan kualitas konsumsi dan kesehatan ibu hamil, status kesehatan secara fisik dan psikis masyarakat pada umumnya, termasuk peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan. Angka harapan hidup pada saat lahir diartikan sebagai perkiraan lama hidup rata-rata bayi baru lahir dengan asumsi tidak ada perubahan pada pola mortalitas sepanjang hidupnya.

Tabel 7.7 menyajikan informasi angka harapan hidup di tiap provinsi tahun 2019-2023. Rata-rata angka harapan hidup di Indonesia telah mencapai 72,13 tahun. Angka ini mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2022, yaitu 71,85 tahun. Provinsi yang memiliki angka harapan hidup tertinggi adalah Provinsi DI Yogyakarta, yaitu 75,12 tahun. Terdapat sembilan provinsi yang memiliki angka harapan hidup yang lebih besar dari angka nasional, yaitu Provinsi Riau, Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi Kalimantan Utara, Provinsi Bali, Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Kalimantan Timur, dan Provinsi DI Yogyakarta.

Tabel 7.7.
Angka Harapan Hidup Per Provinsi Tahun 2019-2023 (tahun)

Provinsi	2019	2020	2021	2022	2023
Aceh	69,87	69,93	69,96	70,18	70,34
Sumatera Utara	68,95	69,10	69,23	69,61	69,98
Sumatera Barat	69,31	69,47	69,59	69,90	70,19
Riau	71,48	71,60	71,67	71,95	72,24
Jambi	71,06	71,16	71,22	71,50	71,77
Sumatera Selatan	69,65	69,88	69,98	70,32	70,66
Bengkulu	69,21	69,35	69,42	69,69	69,92
Lampung	70,51	70,65	70,73	70,99	71,25
Kep. Bangka Belitung	70,50	70,64	70,73	70,98	71,23
Kep. Riau	69,80	69,96	70,12	70,50	70,91
DKI Jakarta	72,79	72,91	73,01	73,32	73,65
Jawa Barat	72,85	73,04	73,23	73,52	73,80
Jawa Tengah	74,23	74,37	74,47	74,57	74,69
DI Yogyakarta	74,92	74,99	75,04	75,08	75,12
Jawa Timur	71,18	71,30	71,38	71,74	72,11
Banten	69,84	69,96	70,02	70,39	70,77
Bali	71,99	72,13	72,24	72,60	72,98
NTB	66,28	66,51	66,69	67,07	67,47
NTT	66,85	67,01	67,15	67,47	67,77
Kalimantan Barat	70,56	70,69	70,76	71,02	71,32
Kalimantan Tengah	69,69	69,74	69,79	70,04	70,27
Kalimantan Selatan	68,49	68,66	68,83	69,13	69,42
Kalimantan Timur	74,22	74,33	74,61	74,62	74,72
Kalimantan Utara	72,54	72,59	72,65	72,67	72,69

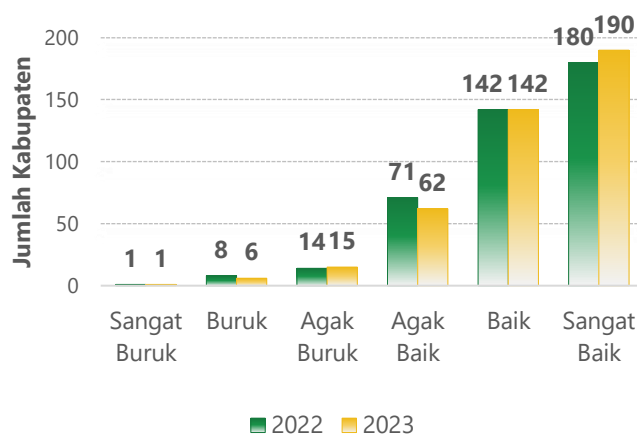
Provinsi	2019	2020	2021	2022	2023
Sulawesi Utara	71,58	71,69	71,76	72,08	72,40
Sulawesi Tengah	68,23	68,69	68,83	68,93	69,17
Sulawesi Selatan	70,43	70,57	70,66	70,97	71,22
Sulawesi Tenggara	70,97	71,22	71,27	71,37	71,47
Gorontalo	67,93	68,07	68,19	68,51	68,83
Sulawesi Barat	64,82	65,06	65,25	65,63	66,01
Maluku	65,82	65,98	66,09	66,45	66,78
Maluku Utara	68,18	68,33	68,45	68,79	69,11
Papua Barat	65,90	66,02	66,14	66,46	66,79
Papua	65,65	65,79	65,93	66,23	66,44
Indonesia	71,34	71,47	71,57	71,85	72,13

Sumber: Susenas 2019 – 2023, BPS [Metode Baru] Umur Harapan Hidup Saat Lahir

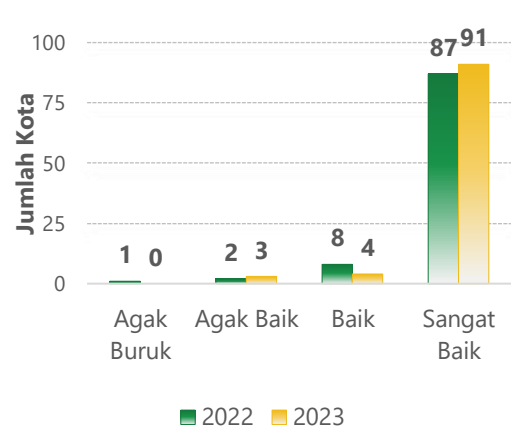
Angka harapan hidup dibagi dalam enam kelompok. Kelompok sangat buruk apabila angka harapan hidupnya kurang dari atau sama dengan 58 tahun dan kelompok sangat baik apabila usia mencapai lebih dari 70 tahun. Sebaran kelompok angka harapan hidup wilayah kabupaten dan kota disajikan dalam Gambar 7.8 dan Gambar 7.9.

Sebanyak 190 kabupaten (45,67%) memiliki angka harapan hidup yang masuk dalam kelompok sangat baik (prioritas 6). Jumlah ini meningkat sebanyak sepuluh kabupaten dibandingkan tahun 2022. Dari 416 kabupaten, terdapat 19 kabupaten mengalami peningkatan status.

Pada tahun 2023, status angka harapan hidup wilayah kota mengalami perbaikan yang ditunjukkan oleh peningkatan jumlah kota yang masuk kategori sangat baik dari 87 kota menjadi 91 kota.



Gambar 7.8. Sebaran Kabupaten Menurut Kelompok Angka Harapan Hidup



Gambar 7.9. Sebaran Kota Menurut Kelompok Angka Harapan Hidup

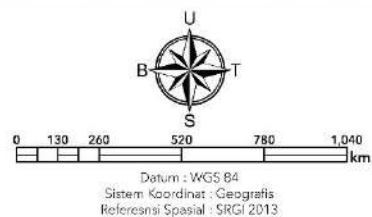
Peta 7.5.

Peta Angka Harapan Hidup Tahun 2024



BADAN PANGAN NASIONAL

NATIONAL FOOD AGENCY (NFA)



LEGENDA

- Batas Administrasi**
- Ibukota Provinsi
 - Batas Negara
 - Batas Provinsi
 - Danau

- Batimetri (meter)**
- 0 - <200
 - 200 - <500
 - 500 - <1000
 - 1000 - <2000
 - 2000 - <4000
 - 4000 - <6000
 - 6000 - <8000
 - >8000

- Angka Harapan Hidup Pada Saat Lahir**
- Sangat Rentan
 - Rentan
 - Agak Rentan
 - Agak Tahan
 - Tahan
 - Sangat Tahan

Sumber Data :
1. Data UIH 2023, BPS
2. Peta Batas Wilayah RBI 2023, BIG
3. Batimetri Indonesia

Diproduksi Oleh :
Badan Pangan Nasional Tahun 2024

7.6. Tantangan Peningkatan Pemanfaatan Pangan

Tantangan yang dihadapi untuk peningkatan aspek pemanfaatan pangan adalah perilaku konsumsi yang menyebabkan pola konsumsi belum sesuai kaidah Pola Pangan Harapan (PPH), ketergantungan terhadap sumber pangan tertentu terutama beras dan terigu, serta *food waste* yang masih tinggi. Konsumsi energi tahun 2023 sebesar 2.088 kkal/kap/hari, mengalami peningkatan dibanding tahun 2022 sebesar 2.079 kkal/kap/hari. Namun angka ini kurang dari angka energi yang direkomendasikan dari WNPG XI Tahun 2018 dan Peraturan Menteri Kesehatan No 28 Tahun 2019 Tentang Angka Kecukupan Gizi yang Dianjurkan untuk Masyarakat Indonesia, yaitu 2100 kkal/kap/hari. Selain itu, perkembangan konsumsi protein tahun 2023 sebesar 62,3 gram/kap/hari, mengalami peningkatan dibanding tahun 2022 (62,1 gram/kap/hari), yang terdiri dari 39,95 gram protein/kap/hari asal pangan nabati (64,10%) dan 22,38 gram protein asal pangan hewani (35,90%). Angka konsumsi protein total ini telah melebihi rekomendasi angka protein dari WNPG XI Tahun 2018 dan Peraturan Menteri Kesehatan No 28 Tahun 2019 Tentang Angka Kecukupan Gizi yang Dianjurkan untuk Masyarakat Indonesia, yaitu 57 gram protein/kap/hari.

Selain kecukupan konsumsi energi dan protein, pemenuhan konsumsi pangan juga perlu memperhatikan keberagaman jenis dan jumlah pangan sesuai dengan PPH ideal. Skor PPH tahun 2023 mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2022, yaitu dari 92,9 di tahun 2022 menjadi 94,1 pada tahun 2023 (dengan AKE 2.100 kkal/kap/hari). Skor ini melebihi target RPJMN 2020-2024 untuk tahun 2023, yaitu 94,0 (Badan Pangan Nasional, 2024). Hal yang masih perlu dievaluasi adalah kualitas konsumsi pangan masyarakat, dimana tahun 2023 konsumsi energi dari beberapa kelompok pangan masih lebih tinggi atau lebih rendah daripada konsumsi ideal.

Ketergantungan terhadap jenis pangan tertentu akan berdampak pada tingginya biaya yang harus dikeluarkan negara untuk menjaga agar pangan tersebut selalu tersedia. Anomali iklim dan restriksi perdagangan antar negara/wilayah dapat memperberat upaya-upaya yang harus dilakukan. Sementara itu, Indonesia memiliki beragam pangan lokal yang dapat menjadi alternatif sumber karbohidrat dan telah biasa dikonsumsi oleh masyarakat namun semakin menurun jumlah konsumsinya. Diversifikasi konsumsi pangan untuk mencapai PPH menjadi tantangan tersendiri dalam upaya peningkatan pemanfaatan pangan. Diperlukan upaya-upaya yang masif dan melibatkan multisektor agar kepedulian dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya konsumsi pangan yang beragam dilakukan oleh masyarakat.

Tingkat konsumsi energi dan protein serta skor PPH disajikan dalam Tabel 7.8. Selama periode 2018-2023, perkembangan pola konsumsi pangan pokok (sumber karbohidrat) masih didominasi oleh kelompok padi-padian, terutama beras dan terigu, sedangkan kontribusi umbi-umbian masih rendah. Akan tetapi, kontribusi energi yang berasal dari konsumsi kelompok padi-padian (beras, jagung, dan terigu) pada tahun 2023 mengalami peningkatan dibanding tahun 2022, yaitu dari 56,6 persen menjadi sebesar 56,7 persen (dengan AKE 2.100 kkal/kap/hari). Tingkat konsumsi energi padi-padian tersebut telah masih melebihi komposisi anjuran sebesar 50 persen. Di samping itu, konsumsi beras per kapita tahun 2023 mengalami sedikit peningkatan dibanding tahun 2022, yaitu dari 256,2 gram/kap/hari (93,5 kg/kap/tahun) menjadi 257,0 gram/kap/hari (93,8 kg/kap/tahun). Sama dengan konsumsi beras, konsumsi terigu tahun 2023 juga mengalami peningkatan dibanding tahun 2022, yaitu dari 44,7 gram/kap/hari (16,3 kg/kap/tahun) menjadi 46,3 gram/kap/hari (16,9 kg/kap/tahun). Konsumsi terigu kembali terulang seperti tahun 2021. Selain itu, konsumsi jagung tahun 2023 juga mengalami peningkatan dibanding tahun 2022, yaitu dari 3,8 gram/kap/hari (1,4 kg/kap/tahun) menjadi 3,9 gram/kap/hari (1,4 kg/kap/tahun) (Badan Pangan Nasional, 2024).

Tabel 7.8.**Konsumsi Energi dan Protein serta Skor PPH Tahun 2019-2023**

Uraian	Konsumsi Energi dan Protein per Kapita per Hari					Rekomendasi WNPG XI, 2018
	2019	2020	2021	2022	2023	
Energi (kkal)	2.138	2.112	2.143	2.079	2.088	2.100
Protein (gram)	62,87	62,05	62,33	62,21	62,33	57
• Nabati	41,81	40,77	40,81	39,65	39,95	
• Hewani	21,05	21,29	21,52	22,56	22,38	
Skor PPH	87,90	86,30	87,20	92,90	94,10	

Sumber: Susenas BPS, diolah Badan Pangan Nasional 2024

Kondisi konsumsi pada tahun 2023 secara kuantitas dan kualitas terjadi peningkatan, baik dari konsumsi energi dan konsumsi protein serta skor PPH. Menurut Direktorat Penganekaragaman Konsumsi Pangan Badan Pangan Nasional (2024), peningkatan tersebut didukung oleh hal-hal berikut.

- a. Peningkatan kuantitas energi terjadi pada kelompok padi-padian (naik 3 kkal/kap/hari), umbi-umbian (naik 1 kkal/kap/hari), pangan hewani (naik 1 kkal/kap/hari), minyak dan lemak (naik 3 kkal/kap/hari), kacang-kacangan (naik 1 kkal/kap/hari), sayur dan buah (naik 5 kkal/kap/hari) serta bumbu minuman dan bumbu-bumbuan (2 kkal/kap/hari). Sementara itu, kelompok pangan yang mengalami penurunan adalah gula (turun 5 kkal/kap/hari). Untuk kelompok buah/biji berminyak tidak mengalami peningkatan maupun penurunan.
- b. Peningkatan konsumsi protein asal pangan hewani (naik 0,37 gram protein/kap/hari) dan protein asal pangan nabati (naik 0,30 gram protein/kap/hari). Peningkatan konsumsi protein asal pangan hewani terjadi karena adanya peningkatan konsumsi daging ruminansia (naik 0,16 gram protein/kap/hari) dan daging unggas (naik 0,14 gram protein/kap/hari), sedangkan peningkatan konsumsi protein asal pangan nabati terjadi pada kelompok padi-padian (naik 0,41 gram protein/kap/hari) dan kacang-kacangan (0,10 gram protein/kap/hari) yang berasal dari kacang kedelai.

Tantangan lain terkait pemanfaatan pangan adalah unsur keamanan pangan yang merupakan salah satu aspek penting dalam upaya memperkuat ketahanan pangan nasional. Sesuai amanat UU Pangan dan PP Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan, pangan yang diedarkan harus memenuhi persyaratan keamanan pangan. Oleh karena itu, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib melakukan penyelenggaraan penjaminan keamanan pangan bagi masyarakat di setiap rantai Pangan secara terpadu sebagaimana tertuang dalam Pasal 68 (1) UU Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Upaya untuk menghasilkan pangan yang aman, semua orang yang menangani pangan harus memperhatikan keamanan pangan pada setiap rantai pangan mulai dari budidaya, panen, dan pengolahan.

Upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kualitas pemanfaatan pangan diantaranya dengan cara berikut.

- a. Meningkatkan kesadaran (*awareness*) masyarakat, terutama ibu rumah tangga tentang arti penting pola konsumsi pangan B2SA bagi tubuh agar dapat hidup sehat, aktif, dan produktif.
- b. Meningkatkan akses rumah tangga dan/atau perseorangan atas pangan B2SA secara fisik (pendapatan, stabilisasi harga) dan ekonomi (tersedianya pasar/toko pangan yang mudah dan dapat dijangkau).
- c. Meningkatkan kualitas lingkungan sekitar dan sanitasi yang lebih baik.



POLA PANGAN HARAPAN

Pola Pangan Harapan (PPH) merupakan susunan beragam pangan berdasarkan proporsi keseimbangan energi dari sembilan kelompok pangan dengan mempertimbangkan segi daya terima, ketersediaan pangan, ekonomi, budaya dan agama.



SKOR PPH

PPH merupakan instrumen sederhana untuk menilai situasi konsumsi pangan penduduk, baik jumlah maupun komposisi pangan menurut jenis pangan yang dinyatakan dalam skor PPH, dengan skor maksimal 100 (seratus).

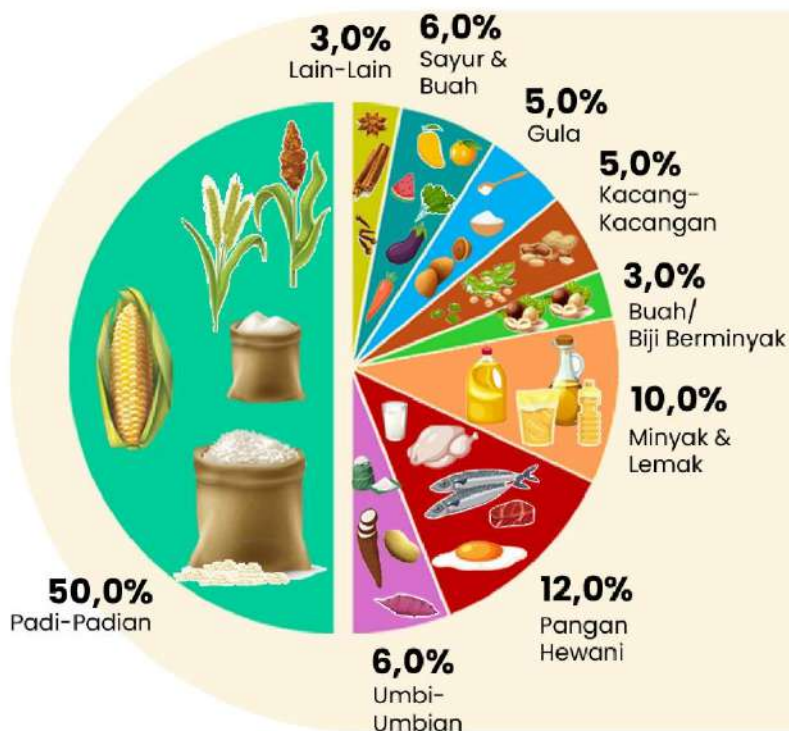


KEGUNAAN SKOR PPH

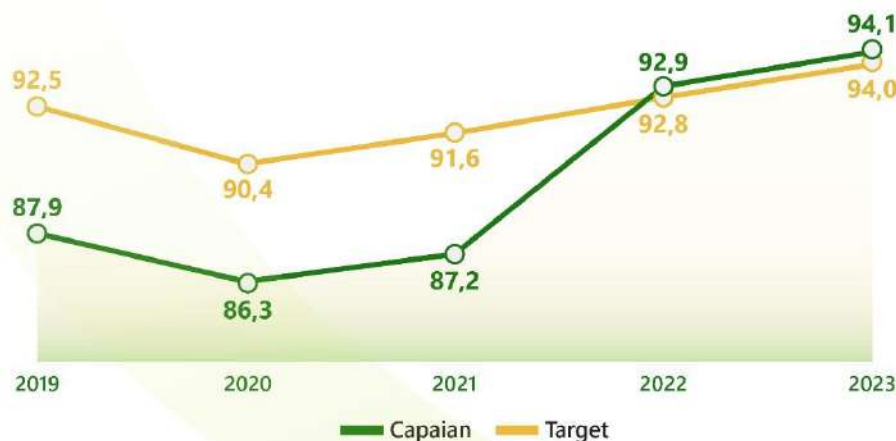
- Evaluasi situasi dan kebijakan konsumsi pangan
- Perencanaan konsumsi, penyediaan, dan produksi pangan
- Penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan di bidang pangan

KOMPOSISI PPH

- Komposisi PPH terdiri dari 9 kelompok pangan.
- Setiap kelompok pangan diberi bobot yang didasarkan pada fungsi pangan dalam triguna makanan:
 - Sumber karbohidrat/zat tenaga
 - Sumber protein/zat pembangun
 - Sumber vitamin dan mineral/zat pengatur



PERKEMBANGAN SKOR PPH 2019-2023



Selama 5 tahun terakhir, skor PPH baru mencapai target RPJMN pada 2 tahun terakhir, tahun 2022 dengan capaian 92,9 (target 92,8) dan tahun 2023 dengan capaian 94,1 (target 94,0)





BAB 8

SUMBER DAYA ALAM DAN KETANGGUHAN TERHADAP BENCANA



Indonesia merupakan salah satu negara megadiversitas sebagaimana hasil studi *United Nations Environmental Protection* (UNEP). Sebagai salah satu negara megadiversitas Indonesia memiliki sumber-sumber pangan yang sangat banyak. Hasil studi Kementerian Lingkungan Hidup (2007) menunjukkan bahwa Indonesia memiliki 100 spesies tanaman biji-bijian, umbi-umbian, sagu, penghasil tepung dan gula (sumber karbohidrat); 100 spesies tanaman kacang-kacangan sumber protein dan lemak; 389 spesies buah-buahan; 250 spesies sayur-sayuran; 450 spesies buah-buahan; 70 spesies bumbu dan rempah-rempah; 40 spesies tanaman bahan minuman; 940 spesies tanaman obat tradisional.

Sebagai negara yang mempunyai kekayaan sumber daya dan keragaman hayati yang relatif besar, Indonesia mempunyai peluang yang cukup besar untuk mewujudkan kemandirian pangan serta ketahanan pangan dan gizi secara berkelanjutan. Keragaman sumber daya yang dimiliki, membuat masing-masing daerah mempunyai keunggulan komparatif dan kompetitif dalam memproduksi bahan pangan tertentu berbasis potensi dan kearifan lokal.

Indonesia juga dihadapkan pada permasalahan akibat letak geografis yang berpotensi menyebabkan terjadinya bencana. Sebagai negara kepulauan yang terletak pada pertemuan lempeng tektonik yaitu lempeng Benua Asia, Benua Australia, Samudera Hindia, dan Samudera Pasifik, Indonesia sangat rawan akan bencana alam seperti letusan gunung berapi, gempa bumi, tsunami, banjir dan tanah longsor.

Selain itu, Indonesia juga rawan terhadap bencana hidrometeorologi karena berada di garis ekuator atau khatulistiwa, sehingga sangat dipengaruhi El Nino dan La Nina. El Nino membuat suatu daerah memiliki suhu panas yang jauh lebih tinggi dari daerah lain yang menyebabkan musim kemarau berkepanjangan hingga kebakaran hutan. Sebaliknya La Nina membuat konsentrasi hujan yang sangat tinggi.

Adanya dampak perubahan iklim akibat pemanasan global juga menjadi permasalahan dalam penyediaan pangan di Indonesia. Pertanian merupakan salah satu sektor yang sangat rentan terhadap perubahan iklim. Fluktuasi suhu dan kelembaban udara yang semakin meningkat yang mampu menstimulasi pertumbuhan dan perkembangan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) yang akan berdampak pada produksi pangan. Perubahan iklim juga berimplikasi terhadap munculnya ras, strain, biotipe, genome baru dari hama dan penyakit yang mempengaruhi tanaman, ternak dan manusia serta menimbulkan risiko baru terhadap ketahanan pangan.

Tiga faktor utama yang dianalisis dalam FSVA 2024 yang akan mempengaruhi kerawanan pangan transien, yaitu: i) bencana alam yang terjadi; ii) parameter klimatologi; dan iii) estimasi kehilangan produksi padi dan jagung akibat banjir, kekeringan dan OPT.

8.1. Bencana Alam

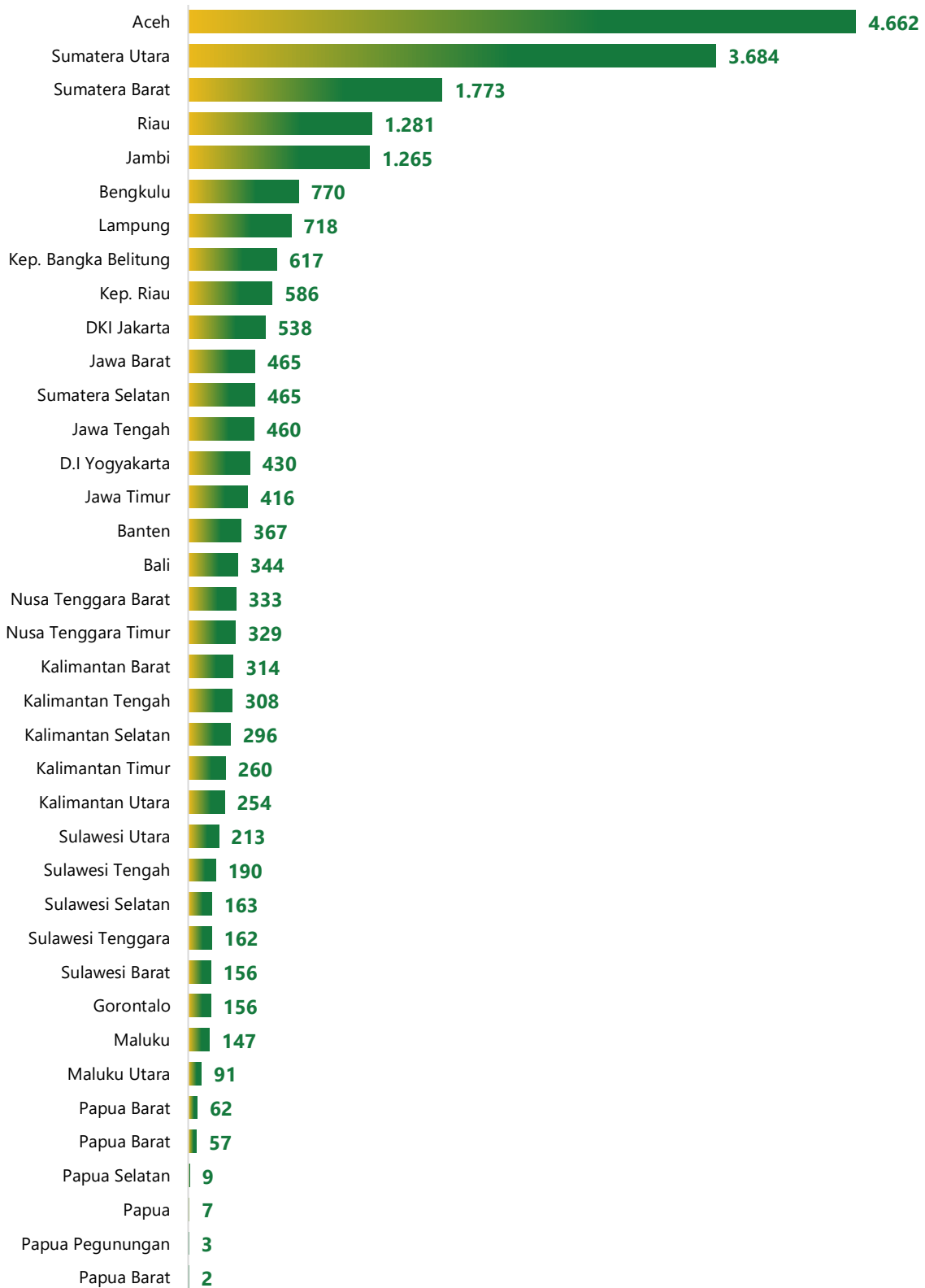
Sebagai salah satu negara yang paling rawan terhadap bencana di dunia, bencana alam merupakan faktor utama kerawanan pangan transien di Indonesia. Berdasarkan penelitian dari *Center for Research on the Epidemiology of Disasters* (CRED), terdapat sebelas negara yang paling sering mengalami bencana alam pada tahun 2023 (Tabel 8.1). Bencana yang sering terjadi, yaitu banjir (164), badai (139), gempa bumi (32), dan tanah longsor (24).

Tabel 8.1.
Negara yang Mengalami Bencana Alam Terbanyak 2023

Negara	Jumlah Kejadian Utama
Amerika Serikat	25
Cina	17
India	17
Brazil	16
Filipina	15
Indonesia	15
Pakistan	13
Turkiye	8
Francis	7
Itali	7
Republik Demokratik Kongo	7

Sumber: Centre for Research on the Epidemiology of Disasters 2024

Menurut *Center for Research on the Epidemiology of Disasters (CRED) 2023*, Indonesia termasuk sepuluh besar negara dengan bencana alam terbanyak. Berdasarkan data dari BNPB, terjadi 22.812 bencana alam selama periode tahun 2019-2023 yang telah menyebabkan 2.765 orang meninggal dunia (Tabel 8.2). Data ini mencatat seluruh jenis kejadian bencana yang meliputi banjir, tanah longsor, cuaca ekstrem, angin puting beliung, kekeringan, kebakaran hutan dan lahan, gempa bumi, tsunami, gempa bumi dan tsunami, dan letusan gunung api. Pada periode tahun 2019-2023, kejadian bencana alam yang paling sering terjadi adalah banjir, cuaca ekstrem, tanah longsor, dan kebakaran hutan dan lahan. Bencana alam banjir, gempa bumi dan tanah longsor merupakan kejadian bencana yang paling fatal yang menyebabkan 2.478 orang meninggal. Bencana alam juga berdampak pada rusaknya berbagai fasilitas umum. Kejadian bencana alam yang terjadi di Indonesia tahun 2019 sampai 2023 paling sering terjadi di Aceh, yaitu sebanyak 4.662 kejadian, kemudian diikuti oleh Sumatera Utara sebanyak 3.684 kejadian, Sumatera Barat sebanyak 1.773, Riau sebanyak 1.281 kejadian dan Jambi sebanyak 1.265 kejadian.



Gambar 8.1. Sebaran Bencana Alam per Provinsi 2019 – 2023

Tabel 8.2.
Bencana Alam yang Terjadi di Indonesia dan Kerusakannya 2019-2023

Bencana	Jumlah Kejadian	Korban					Kerusakan								
		Meninggal	Hilang	Terluka	Menderita	Mengungsi	Rumah			Fasilitas					
							Rusak Berat	Rusak Sedang	Rusak Ringan	Terendam	Pendidikan	Kesehatan	Peribadatan	Umum	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
1. Banjir	6.883	1.039	236	8.282	22.315.096	2.081.999	25.962	20.708	132.171	3.864.752	2.564	612	2.574	1.666	
2. Tanah Longsor	4.316	615	47	1.387	129.392	34.052	3.163	3.471	5.931	0	150	20	142	204	
3. Gelombang Pasang dan Abrasi															
4. Cuaca Ekstrem	6.049	162	6	946	289.323	20.233	11.393	17.906	71.933	24.979	526	60	426	59	
5. Kekeringan	1.179	23	0	104	10.033.499	810	1.342	2.030	8.523	0	81	13	55	32	
6. Kebakaran Hutan Dan Lahan	4.225	15	0	16	74.788	452	12	0	11	0	0	0	0	0	
7. Gempa Bumi	138	824	11	21.862	130.991	616.467	32.649	37.372	65.119	0	2.193	312	1.700	57	
8. Tsunami															
9. Erupsi Gunung Api	20	87	10	886	8.498	34.694	942	0	85	0	0	0	0	14	
10. Gempa Bumi Dan Tsunami															
11. Letusan Gunung Api															
Jumlah	22.810	2.765	310	33.483	32.981.587	2.788.707	75.463	81.487	283.773	3.889.731	5.514	1.017	4.897	2.032	

Sumber: BNPB

8.2. Variabilitas Iklim dan Parameter Klimatologi

Perubahan Iklim

Organisasi meteorologi sedunia atau *World Meteorological Organization* (WMO) mendefinisikan perubahan iklim merupakan perubahan keadaan iklim yang dapat diidentifikasi melalui perubahan rata-rata dan/atau variabilitas sifat-sifatnya dan berlangsung dalam jangka waktu lama, biasanya berpuluh-puluh tahun atau lebih. Perubahan iklim disebabkan oleh faktor antropogenik atau aktivitas manusia yang menyebabkan peningkatan Gas Rumah Kaca (GRK) di atmosfer. Faktor antropogenik penyebab perubahan iklim diantaranya dapat mencakup: (1) pembakaran bahan bakar fosil; (2) penggundulan hutan; (3) penggunaan lahan dan perubahan penggunaan lahan; (4) pengelolaan peternakan; (5) pemupukan; (6) pengelolaan limbah; dan (7) proses industri.

Laporan terbaru *Intergovernmental Panel on Climate Change* (IPCC) 2023 menunjukkan bahwa suhu global telah meningkat secara signifikan akibat perubahan iklim yang dipicu oleh meningkatnya GRK dan suhu permukaan bumi yang terus mengalami kenaikan. Di tahun 2023, fenomena El Niño memberikan pengaruh besar terhadap suhu global, mengarah pada peningkatan suhu lebih tinggi dari biasanya, yang menyebabkan hampir seluruh permukaan bumi (95,5%) mengalami suhu lebih tinggi dari rata-rata antara 1951-1980. Peningkatan suhu ini sangat terasa di beberapa wilayah, seperti Asia, Amerika Selatan, dan Samudra Atlantik Utara. Suhu rata-rata daratan global pada 2023 meningkat sekitar 2,1°C sejak 1850-1900, dua kali lebih cepat dibandingkan suhu lautan yang meningkat 1,1°C. Fenomena pemanasan yang lebih cepat di daerah Arktik, yang terjadi sekitar empat kali lebih cepat dari rata-rata global, juga terus berlanjut, meskipun 2023 tidak mencatatkan rekor suhu tertinggi di kawasan tersebut.

Menurut IPCC dalam *Special Report 2*, menjelaskan bahwa sistem pangan berada di bawah suatu tekanan yang disebabkan oleh perubahan iklim, dan faktor non-iklim (misalnya pertumbuhan populasi dan pendapatan, permintaan produk pertanian). Tekanan iklim dan non-iklim ini berdampak terhadap empat pilar ketahanan pangan (ketersediaan, akses, pemanfaatan, dan stabilitas). Fenomena perubahan iklim telah mempengaruhi ketahanan pangan karena peningkatan tren suhu udara yang semakin panas (*global warming*), perubahan pola curah hujan, dan frekuensi kejadian cuaca dan iklim ekstrem yang lebih sering terjadi. Ketahanan pangan diproyeksikan akan semakin terpengaruh oleh perubahan iklim di masa depan. Meningkatnya kejadian ekstrem semakin meningkatkan risiko gangguan terhadap sistem pangan. Namun berkat adanya teknologi dan ilmu pengetahuan yang modern diharapkan dapat menghasilkan banyak cara untuk dapat dioptimalkan dan ditingkatkan untuk memajukan praktek adaptasi perubahan iklim di seluruh sistem pangan.

BMKG melakukan pengamatan secara kontinu konsentrasi GRK dan suhu udara di Indonesia. Kedua parameter iklim tersebut merupakan indikator terjadinya perubahan iklim. Berdasarkan data observasi BMKG tahun 1981- 2023, tren suhu rata-rata tahunan di Indonesia bervariasi di setiap wilayah dan rata-rata cenderung meningkat sebesar 0,67°C dalam 30 tahun. Bila dibandingkan dengan dengan suhu udara rata-rata normal periode 1991-2020, anomali suhu udara rata-rata tahun 2023 lebih panas sebesar 0,5°C dengan suhu udara rata-rata Indonesia tahun 2023 sebesar 27,2°C. Anomali suhu udara tertinggi terjadi di Palembang sebesar 1.23°C, sedangkan terendah terjadi di Samarinda sebesar -0.45°C.

Perubahan iklim di Indonesia berdampak besar pada sektor pangan, terutama melalui perubahan pola curah hujan dan suhu. Ketidakteraturan curah hujan, baik dalam bentuk kekeringan atau hujan ekstrem, mengganggu musim tanam dan hasil pertanian. Peningkatan suhu global juga mempengaruhi tanaman yang sensitif terhadap suhu tinggi, seperti padi dan kopi, serta memperburuk ketersediaan air untuk

irigasi. Selain itu, bencana alam yang lebih sering terjadi akibat perubahan iklim, seperti banjir dan tanah longsor, dapat merusak lahan pertanian dan infrastruktur, memperburuk ketahanan pangan.

Dampak perubahan iklim terhadap ketahanan pangan Indonesia juga mencakup ancaman terhadap keanekaragaman hayati yang penting untuk sistem pertanian yang berkelanjutan. Penyusutan varietas tanaman lokal yang dapat beradaptasi dengan kondisi ekstrem meningkatkan kerentanannya terhadap perubahan iklim. Oleh karena itu, strategi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim yang efektif sangat penting untuk memastikan ketahanan pangan jangka panjang di Indonesia.

Variabilitas Iklim

Indonesia memiliki pola iklim yang bervariasi akibat letak geografisnya. Beberapa fenomena dinamika atmosfer dunia sangat mempengaruhi pola dan intensitas cuaca dan iklim di Indonesia, seperti fenomena *El Nino/La Nina* dan *Dipole Mode*. Selain itu juga dipengaruhi oleh fenomena regional, seperti sirkulasi monsoon Asia-Australia, Daerah Pertemuan Angin Antar Tropis atau *Inter Tropical Convergence Zone* (ITCZ) yang merupakan daerah pertumbuhan awan, serta suhu permukaan laut sekitar wilayah Indonesia. Kondisi topografi wilayah Indonesia yang bergunung, lembah dan berpantai juga menambah keragaman kondisi iklim di wilayah Indonesia dalam ruang dan waktu.

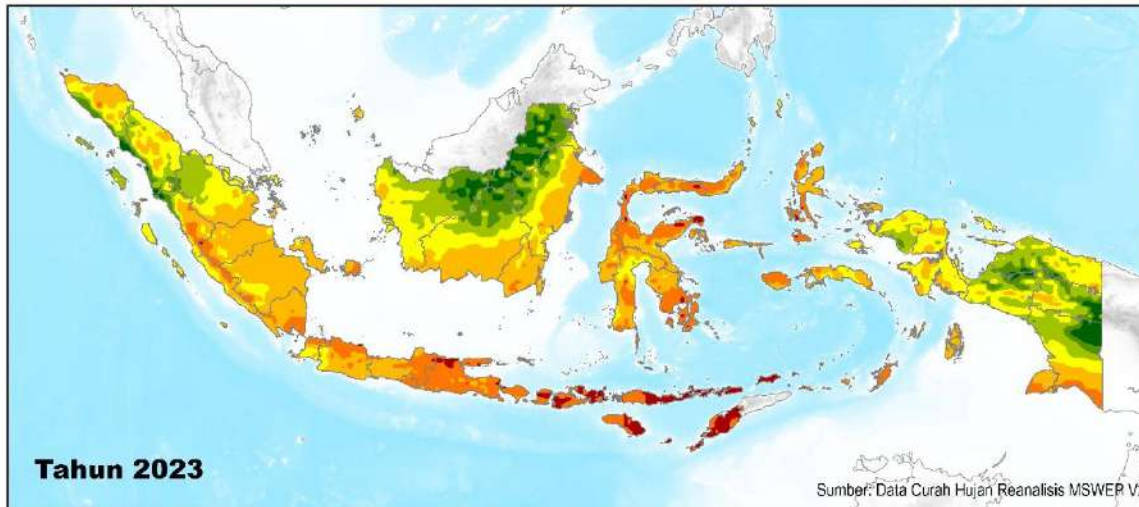
Parameter iklim utama yang menjadi perhatian di wilayah Indonesia adalah suhu udara dan hujan. Variabilitas suhu udara dan hujan mempunyai peranan penting dalam mempengaruhi berbagai kegiatan ekonomi, seperti pertanian, perkebunan dan perikanan. Perubahan suhu udara dan ketersediaan curah hujan dalam kurun waktu musiman sangat mempengaruhi produktivitas dari aktivitas-aktivitas ekonomi tersebut.

Berdasarkan data observasi BMKG tahun 1981-2022, secara keseluruhan Indonesia memiliki tren positif pada tren suhu tahunan rata-rata dengan besaran yang bervariasi. Perubahan suhu udara juga dapat dianalisis dari fenomena anomali suhu. Anomali suhu udara tahunan adalah perbandingan antara suhu udara pada tahun tertentu terhadap suhu udara rata-rata tahunan selama 30 tahun (periode normal tahun 1991-2020). Berdasarkan data dari 116 stasiun pengamatan BMKG, suhu udara rata-rata periode 1991-2020 di Indonesia sebesar 26,7 °C dan suhu udara rata-rata tahun 2023 sebesar 27,2 °C, sehingga anomali suhu udara rata-rata tahun 2023 sebesar 0,5 °C.

Tahun 2023 hampir sebagian besar curah hujan di Indonesia menunjukkan kondisi normal dibandingkan kondisi curah hujan rata-rata normal Indonesia periode 1991-2020 (Gambar 8.2 dan Gambar 8.3). Sebagian besar wilayah Indonesia pada tahun 2023 memiliki sifat hujan normal, jika dibandingkan dengan curah hujan normal periode 1991-2020 (Gambar 8.4).

Menurut BMKG, pada tahun 2023, Indonesia umumnya menerima curah hujan tahunan berkisar antara 500 hingga 4.500 mm. Pulau Sumatera, Kalimantan, dan Papua menunjukkan kisaran curah hujan tahunan antara 1.500 hingga 3.000 mm. Curah hujan tahunan tertinggi tercatat di wilayah Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Aceh yaitu sebesar 5.534 mm/tahun. Sementara itu, pulau-pulau seperti Jawa, Bali, NTB, NTT, dan Maluku menunjukkan variasi curah hujan tahunan berkisar antara 500 hingga 2.500 mm. Wilayah-wilayah dengan curah hujan tahunan rendah, yaitu kurang dari 1.500 mm/tahun antara lain sebagian Lampung, sebagian Banten, sebagian Jawa Barat, sebagian Jawa Tengah, sebagian besar Jawa Timur, Bali, NTB, NTT, sebagian Sulawesi dan Maluku Utara. Curah hujan tahunan terendah tercatat di wilayah Kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur yaitu sebesar 689 mm/tahun.

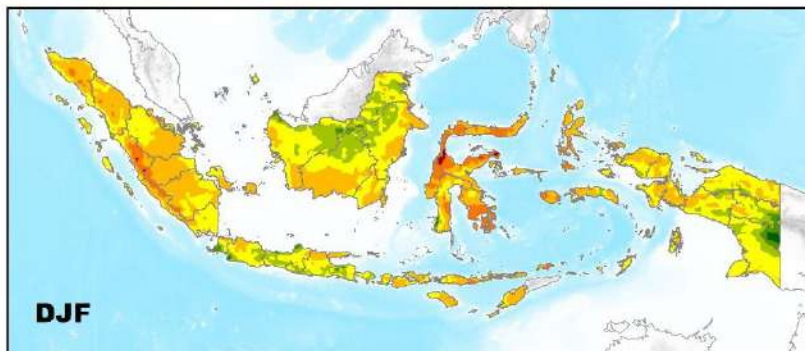
Gambar 8.2. Curah Hujan Indonesia Tahun 2023



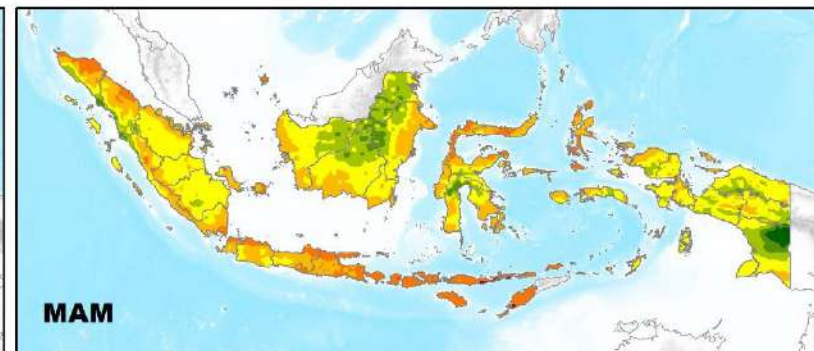
Tahun 2023

Sumber: Data Curah Hujan Reanalisis MSWEP V2

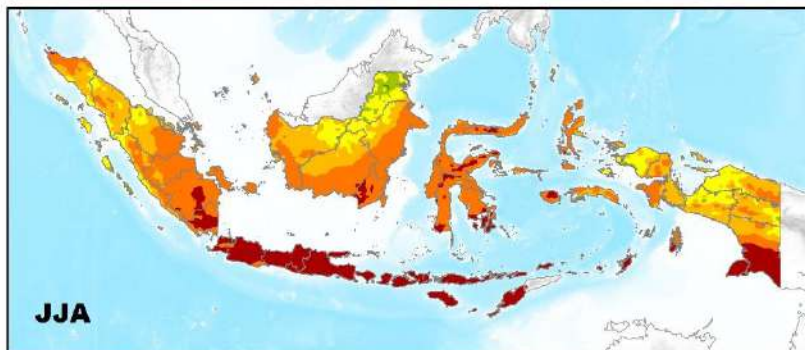
Keterangan Curah Hujan Tahunan : (dalam mm)	Keterangan Curah Hujan Musiman : (dalam mm)
< 1,000	< 200
1,000 - 1,500	200 - 400
1,500 - 2,000	400 - 600
2,000 - 2,500	600 - 800
2,500 - 3,000	800 - 1,000
3,000 - 3,500	1,000 - 1,200
> 3,500	> 1,200



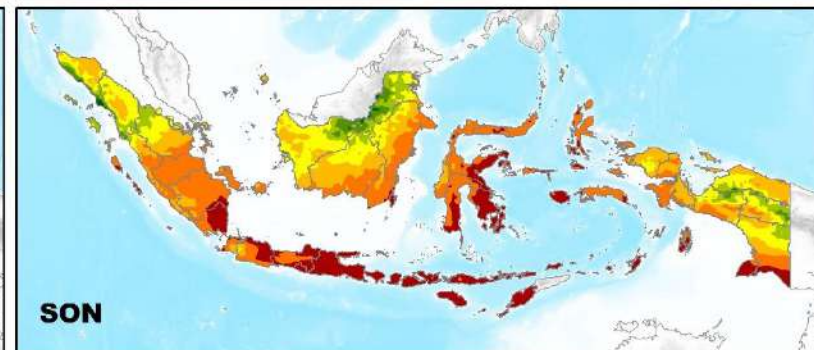
DJF



MAM



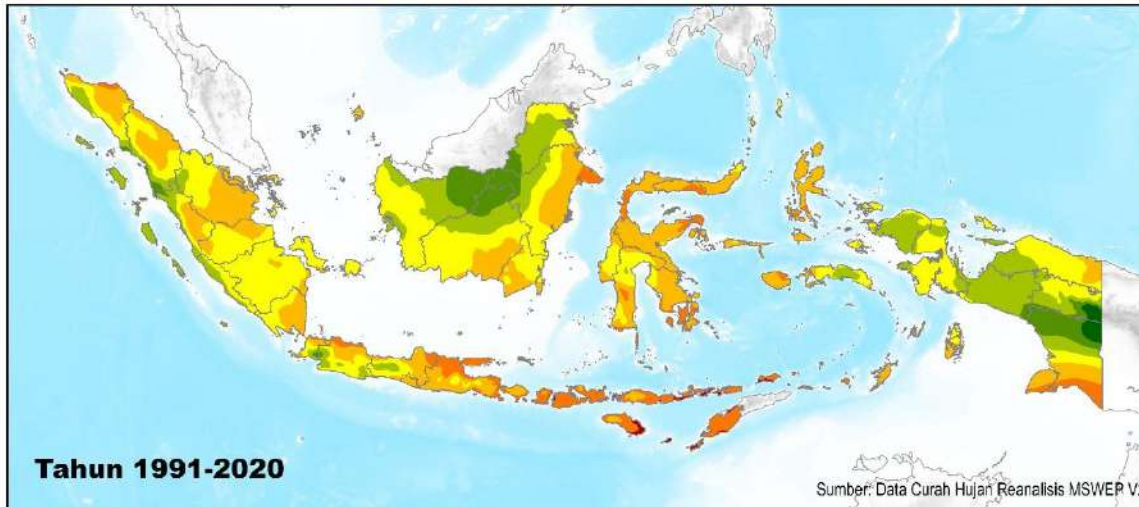
JJA



SON

Gambar 8.3.

Curah Hujan Rata-Rata Normal Indonesia 1991-2020



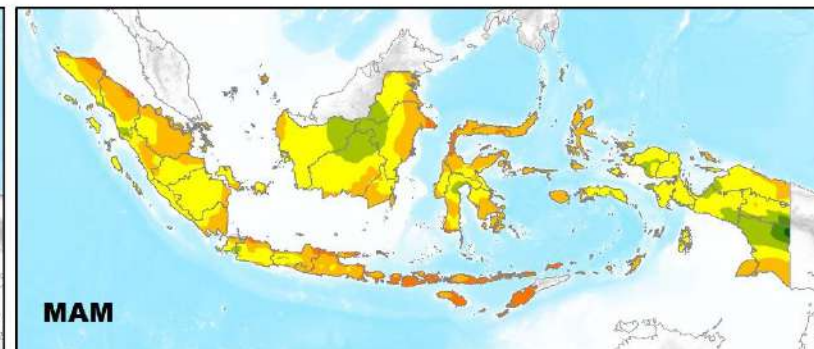
Tahun 1991-2020

Sumber: Data Curah Hujan Reanalisis MSWEP V2

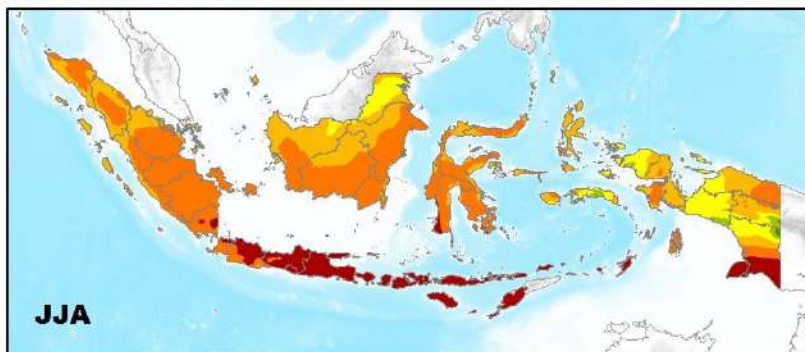
Keterangan Curah Hujan Tahunan : (dalam mm)	Keterangan Curah Hujan Musiman : (dalam mm)
< 1,000	< 200
1,000 - 1,500	200 - 400
1,500 - 2,000	400 - 600
2,000 - 2,500	600 - 800
2,500 - 3,000	800 - 1,000
3,000 - 3,500	1,000 - 1,200
> 3,500	> 1,200



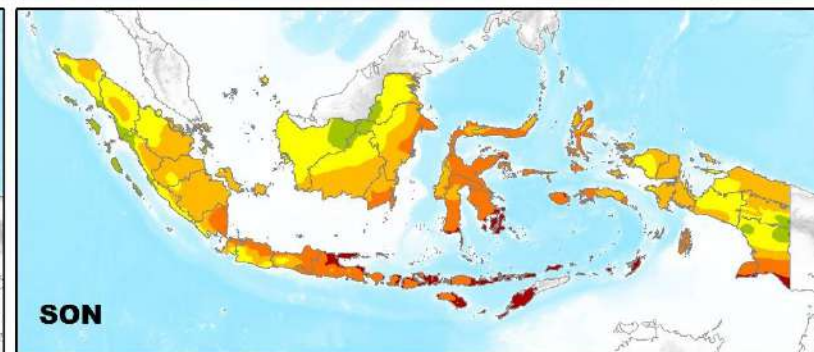
DJF



MAM



JJA



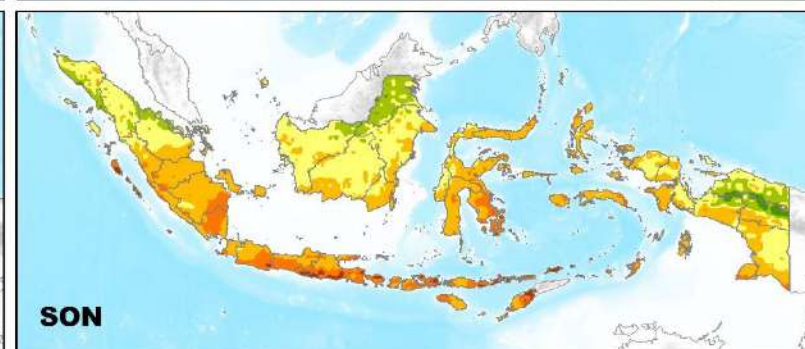
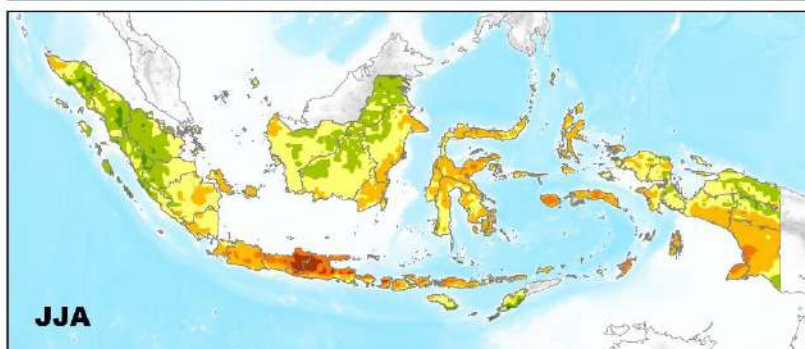
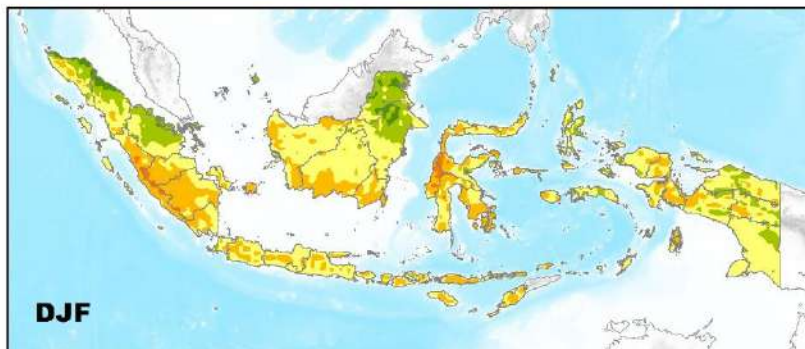
SON

Gambar 8.4.

Sifat Hujan Indonesia Tahun 2023 terhadap Curah Hujan Normal 1991-2020



KETERANGAN	
0 - 30	BAWAH NORMAL
30 - 50	
50 - 85	
85 - 115	NORMAL
115 - 150	ATAS NORMAL
150 - 200	
>200	



Prakiraan Musim Hujan 2023/2024

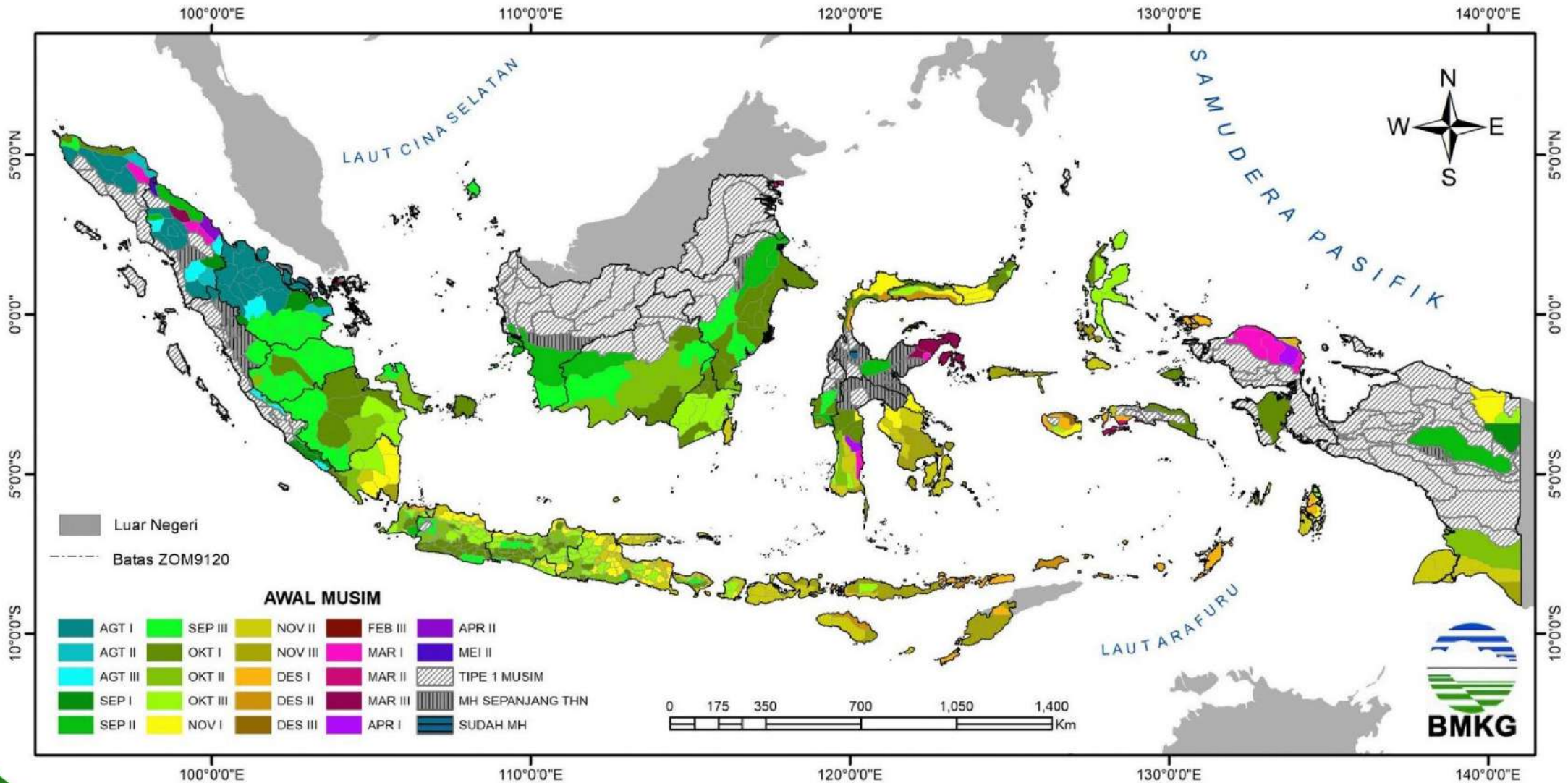
Berdasarkan hasil analisis data rata-rata 30 tahun terakhir (1991-2020), pada tahun 2022 BMKG melakukan pemutakhiran zonasi musim sebelumnya dengan Zonasi Musim baru (ZOM9120) telah dilakukan oleh BMKG sejak Tahun 2022 menggunakan data rata-rata curah hujan tahunan periode tahun 1991-2020 (normal terbaru). Berdasarkan pengelompokan pola distribusi curah hujan rata-rata bulanan di seluruh wilayah Indonesia, maka secara klimatologis wilayah Indonesia dikategorikan ke dalam beberapa tipe zona musim, yaitu: Monsunal (1, 2), Ekuatorial (1, 2, 4) dan Lokal (1, 2, 4, 5).

Berdasarkan hasil pengolahan dan analisis data periode 30 tahun (1991 – 2020), wilayah Indonesia terdiri atas 699 ZOM (487 tipe monsunial, 178 tipe ekuatorial, dan 34 tipe lokal), yaitu Sumatera terbagi menjadi 156 ZOM (53 tipe monsunial dan 103 tipe ekuatorial), Jawa 193 ZOM tipe monsunial, Bali 20 tipe monsunial, NTB 27 tipe monsunial, NTT 28 tipe monsunial, Kalimantan 67 ZOM (62 tipe monsunial, 5 tipe ekuatorial), Sulawesi 104 ZOM (55 tipe monsunial, 34 tipe ekuatorial, dan 15 tipe lokal), Maluku 40 ZOM (12 tipe monsunial, 21 tipe ekuatorial, dan 7 tipe lokal), Papua 64 ZOM (37 tipe monsunial, 15 tipe ekuatorial, dan 12 tipe lokal).

Prakiraan musim hujan 2023/2024 di Indonesia menunjukkan bahwa sebagian besar wilayah diperkirakan mengalami awal musim hujan 2023/2024 pada bulan Oktober hingga Desember 2023 yaitu sebanyak 477 ZOM (68,24%) dari 699 ZOM. Jika dibandingkan terhadap normal awal musim hujan, awal musim hujan 2023/2024 di sebagian besar wilayah Indonesia yaitu sebanyak 446 ZOM (63,81%) diperkirakan mundur, sedangkan wilayah lainnya diperkirakan sama dengan normalnya yaitu sebanyak 56 ZOM (8,01%) dan maju terhadap normalnya yaitu sebanyak 22 ZOM (3,15%). Sifat hujan selama musim hujan 2023/2024, di sebagian besar daerah diperkirakan mengalami sifat hujan Normal yaitu sebanyak 566 ZOM (80,97%). Wilayah lainnya diperkirakan mengalami sifat hujan Bawah Normal sebanyak 64 ZOM (9,16%) dan sifat hujan Atas Normal yaitu sebanyak 69 ZOM (9,87%). Prakiraan Sifat Hujan selama Musim Hujan 2023/2024 diilustrasikan dalam Peta Sifat Hujan.

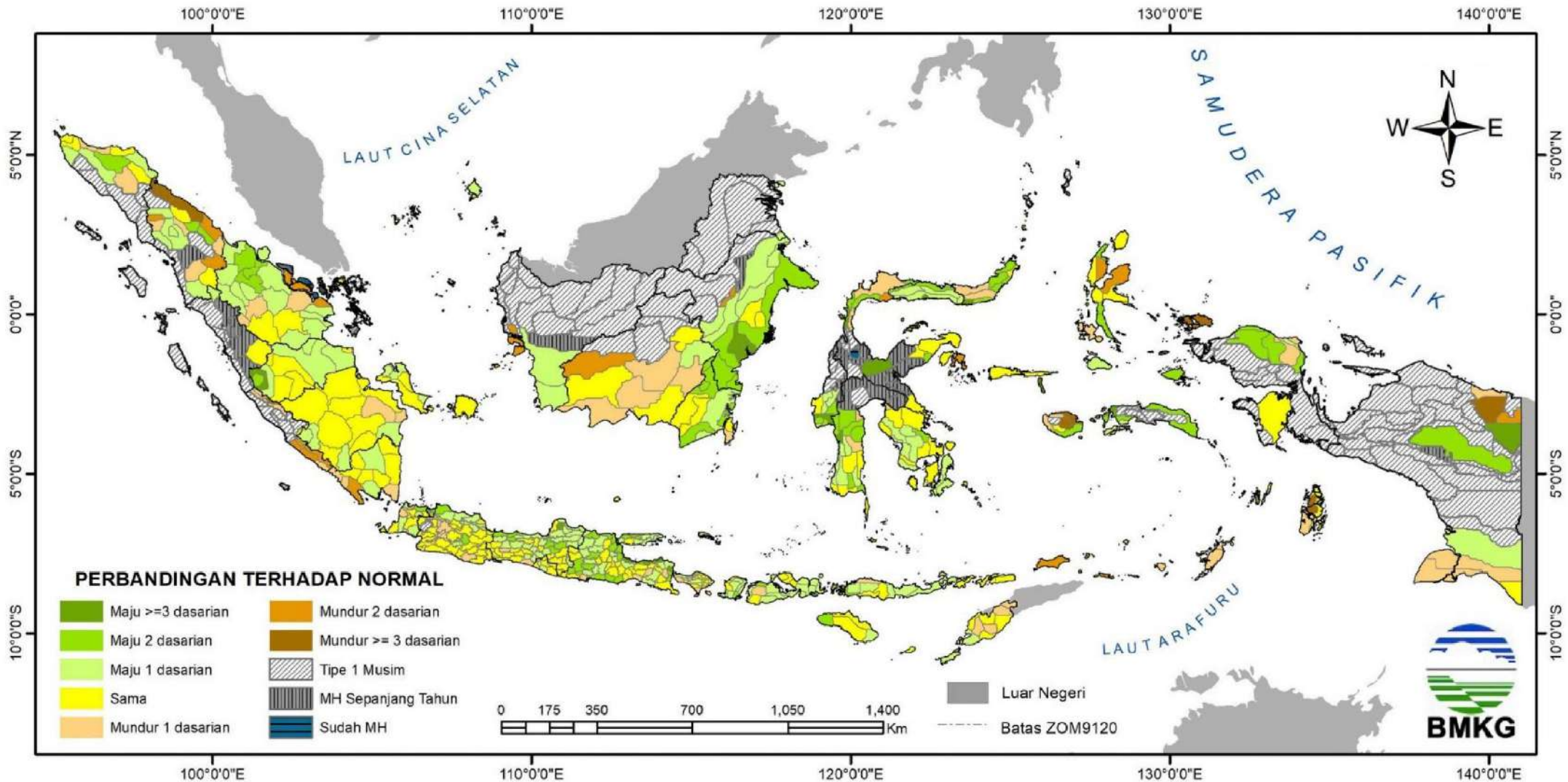
Puncak Musim Hujan 2023/2024 di sebagian besar wilayah Indonesia diperkirakan terjadi pada bulan Januari dan Februari 2024 sebanyak 385 ZOM (55,08%). Jika dibandingkan terhadap normal puncak musim hujan, Puncak Musim Hujan 2023/2024 di sebagian besar daerah diperkirakan sama dengan normalnya yaitu sebanyak 351 ZOM (50,21%), sedangkan wilayah lainnya diperkirakan mundur terhadap normal yaitu sebanyak 203 ZOM (29,04%) dan maju terhadap normal yaitu sebanyak 145 ZOM (20,74%). Durasi Musim Hujan 2023/2024 di sebagian besar wilayah diperkirakan terjadi selama 10 hingga 24 dasarian yaitu sebanyak 430 ZOM (61,52%). Jika dibandingkan terhadap normal durasi musim hujan, durasi Musim Hujan 2023/2024 di sebagian besar daerah Indonesia diperkirakan lebih pendek terhadap normal yaitu sebanyak 439 ZOM (62,80%), sedangkan wilayah lainnya diperkirakan lebih panjang terhadap normalnya yaitu sebanyak 91 ZOM (13,01%) dan diperkirakan sama dengan normalnya yaitu sebanyak 44 ZOM (6,29%).

Gambar 8.5.
Prakiraan Awal Musim Hujan Tahun 2024/2025



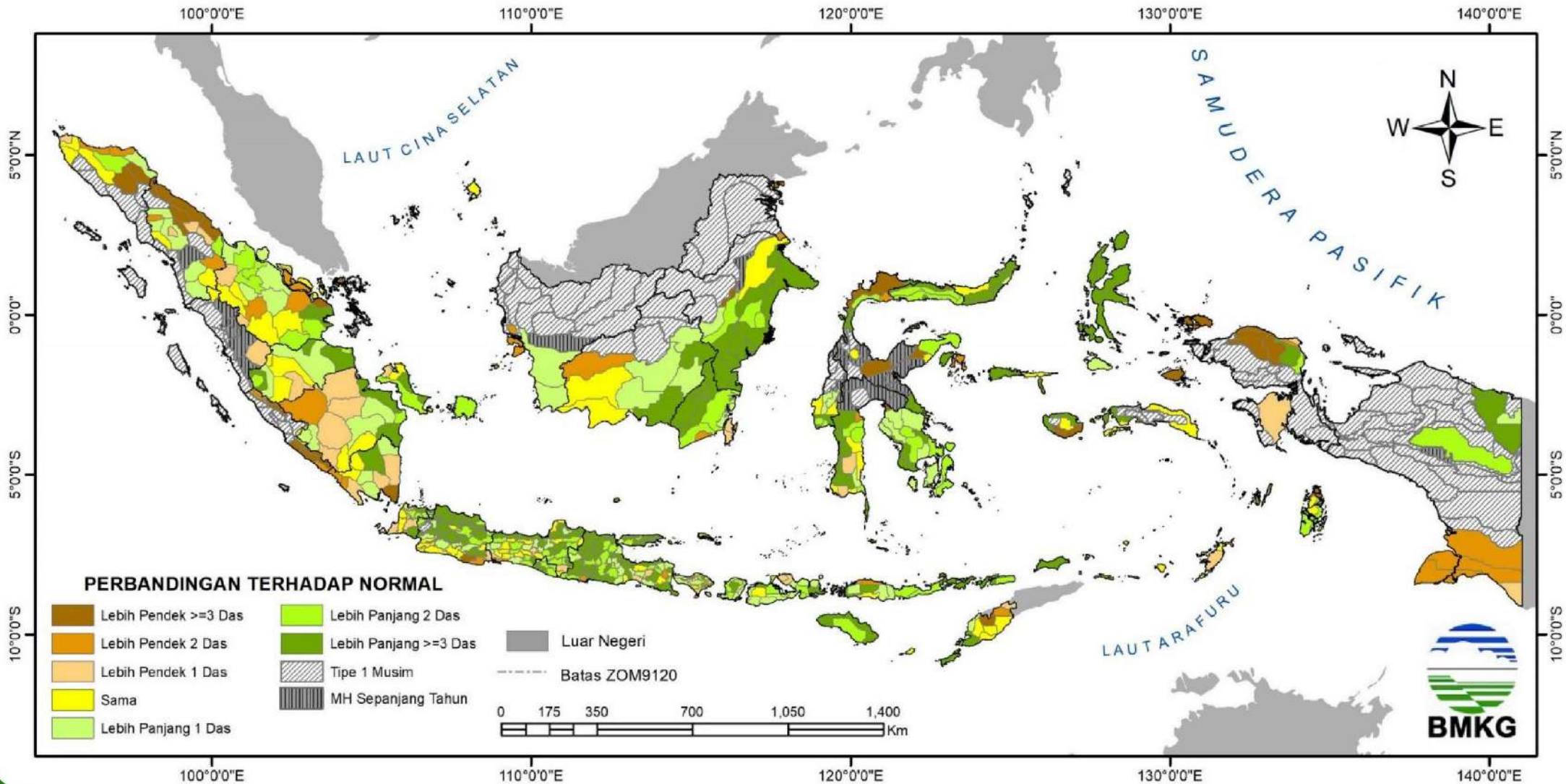
Gambar 8.6.

Perbandingan Prakiraan Awal Musim Hujan Tahun 2024/2025 terhadap Normal (1991-2020)



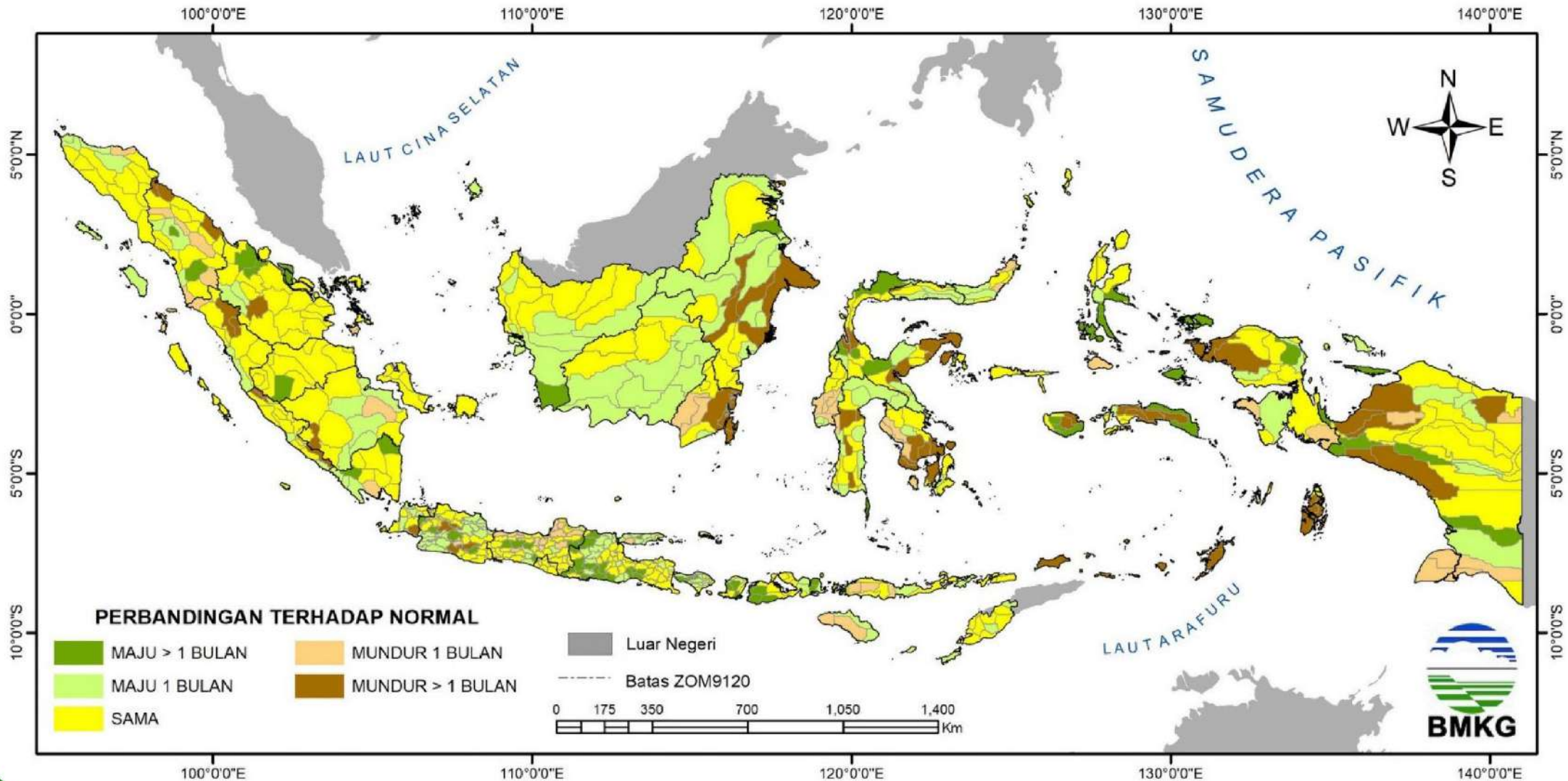
Gambar 8.7.

Perbandingan Prakiraan Durasi Musim Hujan Tahun 2024/2025 terhadap Normal (1991-2020)



Gambar 8.8.

Perbandingan Prakiraan Puncak Musim Hujan Tahun 2024/2025 terhadap Normal (1991-2020)



8.3. Kehilangan Produksi Akibat Kekeringan, Banjir dan OPT

Produksi dan produktivitas tanaman pangan sangat dipengaruhi oleh kondisi iklim dan cuaca. Daerah yang rusak didefinisikan sebagai suatu daerah yang produksi pangannya menurun akibat bencana alam (banjir, kekeringan) dan/atau penularan hama oleh OPT. Kehilangan produksi pada statistik Indonesia dikategorikan sebagai kehilangan total (puso) dan terdampak (ketika kehilangan kurang dari 50%). Tabel 8.3 menunjukkan proporsi kerusakan tanaman padi dan jagung terhadap luas area tanaman padi dan jagung yang disebabkan oleh banjir, kekeringan dan OPT di setiap provinsi pada periode 2019-2023. Secara nasional, kerusakan tanaman padi dan jagung relatif rendah selama periode tersebut (1% kebawah dari total luas tanam setiap tahun). Pada tahun 2023, kerusakan tanaman padi tercatat paling tinggi selama periode ini yaitu sebesar 1,01%. Kerusakan areal tanaman padi tahun 2023 lebih besar dibandingkan tahun 2022 (0,43%), tahun 2021 (0,91%), tahun 2020 (0,61%), dan tahun 2019 (0,59%). Pada tahun 2023, tingkat kerusakan terparah tanaman padi ditemukan di Kepulauan Riau (9,21%), Sulawesi Tenggara (3,92%), Sulawesi Selatan (3,27%), dan Kalimantan Timur (3,01%). Kerusakan tanaman jagung pada tahun 2023 (0,47%) lebih tinggi dari tahun 2022 (0,34%) akan tetapi masih lebih rendah daripada tahun 2021 (0,57%) dan tahun 2020 (0,86%). Pada tahun 2023, tingkat kerusakan terparah tanaman jagung terjadi di Aceh (5,87%), Gorontalo (5,85%), Riau (0,67%), Jambi (2,59%), dan Sulawesi Tengah (1,30%).

Tabel 8.3.

Perbandingan Area Puso Padi dan Jagung Akibat Banjir, Kekeringan dan Organisme Pengganggu Tanaman 2019 – 2023

No.	Provinsi	Padi					Jagung				
		2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
1	Aceh	0,13	1,29	0,63	3,73	2,48	0,04	1,29	0,43	4,52	5,87
2	Sumatera Utara	0,09	0,25	0,63	0,73	0,53	0,02	0,98	0,20	0,25	0,60
3	Sumatera Barat	0,08	0,04	0,04	0,08	0,13	0,09	0,03	0,02	0,05	0,09
4	Riau	1,62	1,33	3,39	3,61	1,26	0,11	4,40	3,25	0,67	0,00
5	Jambi	2,08	1,21	1,51	1,67	1,02	1,26	3,03	1,83	0,65	2,59
6	Sumatera Selatan	0,71	0,52	0,19	0,57	0,29	0,01	0,31	0,12	0,01	0,05
7	Bengkulu	0,28	0,28	0,00	0,06	0,38	0,75	1,38	1,73	0,17	0,00
8	Lampung	0,81	0,23	1,07	0,49	0,80	0,09	0,43	0,11	0,02	0,63
9	Kepulauan Bangka Belitung	0,87	5,62	11,44	0,02	0,32	0,00	5,59	7,63	0,00	0,00
10	Kepulauan Riau*	0,00	4,10	17,69	0,00	9,21	0,00	3,19	2,62	0,00	0,00
11	DKI Jakarta	0,00	0,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Jawa Barat	1,76	0,33	0,79	0,07	1,72	0,13	0,17	0,56	0,00	0,03
13	Jawa Tengah	1,83	0,25	0,56	0,44	1,13	0,03	0,34	0,08	0,20	0,01
14	DI Yogyakarta	3,32	0,05	0,07	0,09	0,03	0,00	0,00	0,00	0,32	0,01
15	Jawa Timur	0,68	0,12	0,31	0,15	0,15	0,05	0,27	0,25	0,61	0,04
16	Banten	2,50	0,34	0,14	0,27	0,75	0,14	2,50	2,05	0,00	1,06
17	Bali	0,08	0,18	0,27	0,03	0,54	0,00	0,11	0,01	0,00	0,03
18	Nusa Tenggara Barat	1,18	0,15	0,16	0,03	0,16	0,09	0,33	0,05	0,00	0,02
19	Nusa Tenggara Timur	0,98	1,20	3,52	0,13	0,07	0,05	3,38	4,57	0,06	0,02
20	Kalimantan Barat	0,02	0,12	0,45	0,24	0,25	0,02	0,19	0,27	0,01	0,04
21	Kalimantan Tengah	0,29	0,27	0,72	3,09	0,65	0,03	0,77	0,80	0,12	0,00

No.	Provinsi	Padi					Jagung				
		2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
22	Kalimantan Selatan	0,05	1,00	4,42	0,61	1,01	0,01	0,08	0,35	0,04	0,00
23	Kalimantan Timur	1,00	1,59	2,43	0,19	3,01	0,00	0,85	1,46	0,05	0,03
24	Kalimantan Utara	0,00	0,10	0,79	0,00	0,36	0,00	0,25	0,36	0,00	0,00
25	Sulawesi Utara	0,03	0,34	0,29	0,01	0,03	0,00	0,63	0,05	0,00	0,00
26	Sulawesi Tengah	0,52	0,51	0,27	0,16	0,22	1,44	1,57	0,25	0,15	1,30
27	Sulawesi Selatan	3,03	0,78	2,20	0,42	3,27	0,71	0,71	1,20	0,80	0,62
28	Sulawesi Tenggara	6,99	0,89	2,35	0,23	3,92	4,99	7,24	1,78	0,00	0,05
29	Gorontalo	1,62	0,69	0,49	0,10	0,26	0,58	1,00	0,00	0,35	5,85
30	Sulawesi Barat	0,01	0,06	0,40	0,07	0,37	0,21	0,93	0,40	0,41	0,72
31	Maluku	0,00	3,20	3,44	0,01	0,02	0,00	16,29	8,87	0,00	0,00
32	Maluku Utara	0,03	124,84	0,00	0,00	0,00	0,00	8,10	3,45	0,00	0,00
33	Papua Barat	0,58	1,59	0,94	0,00	1,38	0,00	4,38	0,37	0,00	0,26
34	Papua	0,00	0,11	0,75	0,07	0,00	0,00	0,81	1,28	0,16	0,00
Jumlah		0,59	0,61	0,91	0,43	1,08	0,24	0,86	0,57	0,34	0,47

Sumber: Kementerian Pertanian 2023

* Provinsi yang mempunyai tingkat kerusakan sangat kecil sehingga dapat diabaikan

” KETERSEDIAAN PANGAN BERKELANJUTAN: Mengoptimalkan Sumber Daya Pangan Lokal

Setiap orang membutuhkan pangan yang cukup untuk dapat hidup sehat aktif dan produktif. Dengan jumlah penduduk yang terus bertambah, permintaan pangan akan bertambah sehingga pangan yang disediakan juga bertambah. Tidaklah mungkin hanya mengandalkan beras, karena luas sawah terus berkurang; perubahan iklim yang berlangsung dengan intensitas semakin tinggi dan berdampak semakin nyata pada produksi pangan; dan tensi geopolitik yang terus berlangsung di berbagai belahan dunia mengganggu kelancaran rantai pasok pangan global.

Saatnya kita menggiatkan kembali menanam pangan lokal yang sangat adaptif terhadap perubahan iklim. Menanam tanaman yang lebih beragam membantu dalam pengelolaan air yang lebih efisien terutama di daerah risiko kekeringan. Oleh karena itu, pengembangan pangan lokal berbasis potensi spesifik lokasi adalah suatu keniscayaan. Beragam pangan lokal yang diproduksi, diolah menjadi aneka produk makanan dan siap dikonsumsi oleh masyarakat termasuk anak usia dini sampai generasi Z.

Bersamaan dengan upaya peningkatan produksi, sosialisasi dan promosi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengonsumsi pangan beragam bergizi seimbang dan aman (B2SA) berbasis potensi sumber daya lokal perlu terus menerus dilakukan. Upaya ini dilakukan perlu sinergis dengan pengembangan usaha pangan oleh UMKM setempat. Untuk itu, kerja sama antar K/L, pemda, dunia usaha, dan masyarakat mutlak diperlukan. Upaya ini sebagai implementasi dari Perpres No.81 Tahun 2024 tentang Percepatan Penganeekaragaman Pangan Berbasis Potensi Sumber Daya Lokal.

Pangan lokal tidak dimaknai sebagai pangan sumber karbohidrat saja, namun juga jenis pangan lainnya sumber protein, lemak, dan zat gizi mikro, sesuai dengan potensi dan kearifan lokal. Indonesia mempunyai sumber daya pangan lokal lengkap, yang harus dikelola secara berkelanjutan, seperti ditunjukkan dalam Gambar berikut:





BAB 9

REKOMENDASI KEBIJAKAN





Hasil analisis komposit ketahanan pangan terhadap 514 kabupaten/kota menggambarkan posisi ketahanan pangan sebagai berikut:

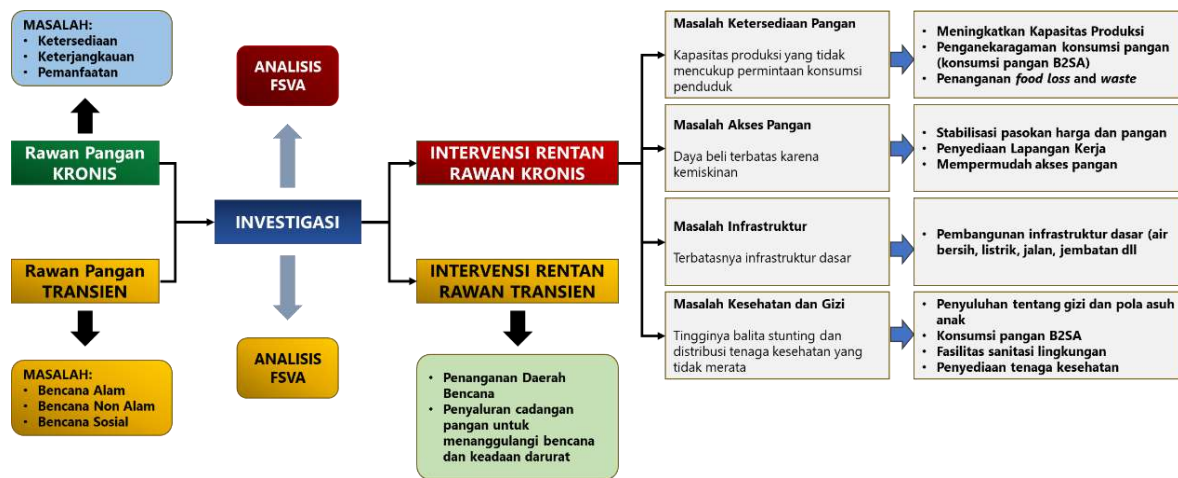
- 21 kabupaten (5,05%) pada Prioritas 1;
- 17 kabupaten (4,09%) dan satu kota (1,02%) pada Prioritas 2;
- 23 kabupaten (5,53%) pada Prioritas 3;
- 39 kabupaten (9,38%) dan dua kota (2,04%) pada Prioritas 4;
- 71 kabupaten (17,07%) dan lima kota (5,10%) pada Prioritas 5; dan
- 245 kabupaten (58,89%) dan 90 kota (91,84%) pada Prioritas 6.

Total kabupaten/kota yang masuk ke dalam Prioritas 1-3 (rentan terhadap kerawanan pangan) berjumlah 62 (12%). Hasil analisis juga menunjukkan bahwa wilayah Indonesia Timur dan daerah kepulauan memiliki tingkat kerentanan pangan yang lebih tinggi dibandingkan wilayah Indonesia Barat dan daerah bukan kepulauan. Selain itu daerah rentan rawan pangan juga beririsan dengan daerah 3TP (terdepan, terluar, tertinggal dan perbatasan).

Intervensi penanganan kerawanan pangan didasarkan pada faktor yang menjadi penyebab kerentanan pangan. Jika permasalahan disebabkan oleh faktor ketersediaan, maka perlu upaya-upaya peningkatan ketersediaan pangan, baik melalui peningkatan produksi, penguatan cadangan pangan, maupun perbaikan pada sistem perdagangan antar wilayah serta kerjasama antardaerah. Permasalahan pada akses ekonomi/daya beli yang rendah dapat diatasi dengan perbaikan sistem logistik pangan, stabilisasi pasokan dan harga pangan, penyediaan lapangan kerja, pengembangan usaha mikro kecil dan menengah, serta jaring pengaman sosial. Keterbatasan infrastruktur dapat diatasi dengan pembangunan dan peningkatan fasilitas penunjang seperti jaringan listrik, jalan, jembatan, pelabuhan, dan gudang untuk penyimpanan stok pangan serta penyempurnaan sistem logistik dan distribusi pangan.

Masalah kesehatan dan gizi diatasi dengan penyediaan air bersih, penyuluhan tentang gizi, sosialisasi pentingnya pola konsumsi pangan B2SA, gizi dan pola asuh anak, pembangunan dan pemeliharaan sanitasi lingkungan, peningkatan partisipasi pendidikan perempuan, serta pemerataan tenaga kesehatan. Sementara itu, penanganan kerentanan pangan transien yang disebabkan bencana alam, bencana non-alam dan bencana sosial dapat dilakukan melalui intervensi penyaluran cadangan pangan pemerintah dan masyarakat dan/atau program pasca bencana untuk meningkatkan ketersediaan

pangan rumah tangga. Kerangka pengentasan daerah rentan rawan pangan secara detail disajikan pada Gambar 9.1.



Gambar 9.1. Kerangka Pengentasan Daerah Rentan Rawan Pangan

9.1. Rekomendasi Pengentasan Kabupaten Rentan Rawan Pangan

Prioritas lokasi pengentasan kerentanan pangan di wilayah kabupaten berdasarkan hasil analisis direkomendasikan pada:

- Kabupaten yang terletak di wilayah Indonesia Timur dengan daerah rentan rawan pangan terbesar,
- Kabupaten di kepulauan yang menghadapi kendala akses fisik terhadap sumber pangan,
- Kabupaten yang menghadapi masalah ketersediaan pangan, rendahnya daya beli, serta status gizi balita,
- Kabupaten yang masuk wilayah 3TP (terdepan, terluar, tertinggal dan perbatasan).

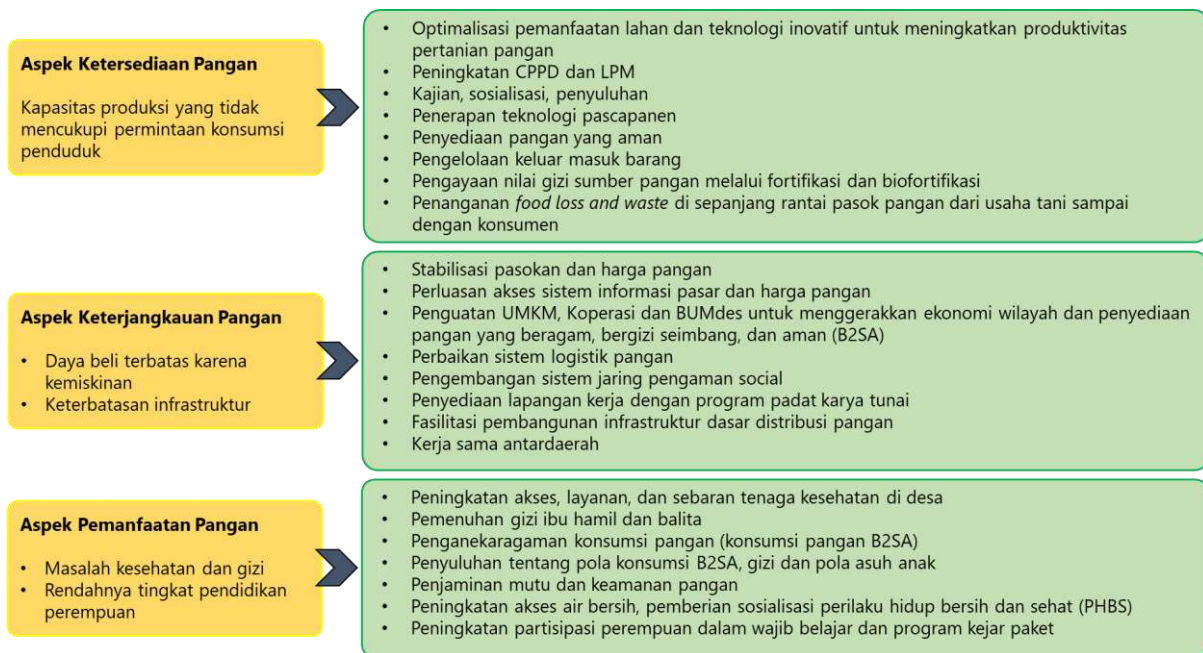
Kabupaten yang berada dalam kelompok rentan rawan pangan Prioritas 1-3 (61 kabupaten) diindikasikan beberapa hal yaitu:

- tingginya rasio konsumsi pangan per kapita terhadap ketersediaan bersih pangan per kapita,
- tingginya prevalensi balita stunting,
- tingginya persentase penduduk hidup di bawah garis kemiskinan, dan
- tingginya rumah tangga tanpa akses air bersih

Program-program peningkatan ketahanan pangan dan pengentasan kerentanan pangan wilayah kabupaten rentan rawan pangan diarahkan pada kegiatan:

- Peningkatan penyediaan pangan dengan mendorong produksi pangan yang aman dan sesuai dengan potensi biodiversitas pangan serta kearifan lokal di masing-masing wilayah, mengoptimalkan pemanfaatan lahan untuk meningkatkan indeks pertanaman, dan menerapkan teknologi inovatif spesifik lokasi untuk meningkatkan produktivitas usaha pertanian pangan;
- Peningkatan penyediaan pangan melalui pengembangan cadangan pangan pemerintah daerah (CPPD provinsi, kabupaten, desa) dan penguatan lumbung pangan masyarakat; terutama pada

- kabupaten di wilayah kepulauan yang sering mengalami gangguan akses pangan dan wilayah yang bukan sentra produksi pangan;
- c. Pengelolaan keluar masuk barang untuk menjamin ketersediaan pangan yang cukup bagi penduduk;
 - d. Penanganan *food loss and waste* di sepanjang rantai pasok pangan; dari panen di tingkat usahatani sampai dengan konsumsi di tingkat rumah tangga (*from farm to table*);
 - e. Kajian dan diseminasi hasil penelitian untuk peningkatan ketersediaan pangan;
 - f. Stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP), sehingga pangan terjangkau bagi seluruh masyarakat melalui pemerataan ketersediaan pangan antar waktu antar wilayah termasuk daerah rentan rawan pangan dan penerapan kebijakan harga pangan dengan memperhatikan kepentingan produsen dan konsumen;
 - g. Perluasan akses terhadap sistem informasi pasar dan harga pangan di seluruh wilayah Indonesia;
 - h. Perbaikan sistem logistik pangan untuk menjamin pemerataan pangan yang aman dan terjangkau termasuk fasilitasi distribusi pangan untuk meningkatkan kelancaran perdagangan antarwilayah;
 - i. Pemanfaatan kerja sama antardaerah untuk memenuhi kebutuhan pangan dan peningkatan ekonomi;
 - j. Peningkatan kegiatan ekonomi wilayah untuk menciptakan lapangan kerja produktif dan produktivitas kerja yang tinggi;
 - k. Fasilitasi pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), koperasi dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) untuk menggerakkan ekonomi wilayah dan meningkatkan penyediaan pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman (B2SA);
 - l. Penyaluran bantuan sosial (tunai dan/atau pangan) bagi kelompok masyarakat berpendapatan rendah dan terdampak bencana (alam dan sosial). Jenis bantuan pangan yang disalurkan untuk memenuhi gizi masyarakat dengan memperhatikan bahan pangan lokal;
 - m. Pembangunan infrastruktur dasar (terutama berupa jalan usahatani, irigasi, listrik, jaringan internet) untuk meningkatkan aktivitas ekonomi wilayah;
 - n. Pemerataan pembangunan fasilitas, peningkatan layanan, dan penyediaan tenaga kesehatan;
 - o. Penurunan prevalensi balita stunting dan peningkatan gizi masyarakat melalui intervensi gizi spesifik (1.000 Hari Pertama Kehidupan) dan sensitif (peningkatan akses pangan, layanan kesehatan, dan peningkatan pendapatan keluarga);
 - p. Peningkatan akses terhadap air bersih dengan pembangunan fasilitas dan layanan air bersih disertai sosialisasi dan penyuluhan tentang perilaku hidup bersih dan sehat serta sanitasi dan higienitas lingkungan;
 - q. Peningkatan pemenuhan konsumsi pangan B2SA; dan
 - r. Peningkatan partisipasi perempuan dalam program wajib belajar dan program kejar paket/pendidikan kesetaraan melalui penyuluhan, fasilitasi dan dukungan anggaran pendidikan.
- Upaya-upaya untuk meningkatkan ketahanan pangan secara umum ditekankan pada penyebab utama kerentanan pangan di kabupaten seperti digambarkan pada Gambar 9.2.



Gambar 9.2. Kerangka Intervensi Peningkatan Ketahanan Pangan Wilayah Kabupaten

9.2. Rekomendasi Pengentasan Kota Rentan Rawan Pangan

Hasil analisis komposit ketahanan pangan dari 98 kota menunjukkan bahwa kota rentan rawan pangan Prioritas 1-3 berjumlah satu kota, sedangkan kota tahan pangan Prioritas 4-6 berjumlah 97 kota. Kota-kota yang berada pada Prioritas 1 – 3 diindikasikan beberapa hal yaitu:

- tingginya prevalensi balita *stunting*,
- tingginya rumah tangga tanpa akses air bersih, dan
- tingginya persentase penduduk hidup di bawah garis kemiskinan.

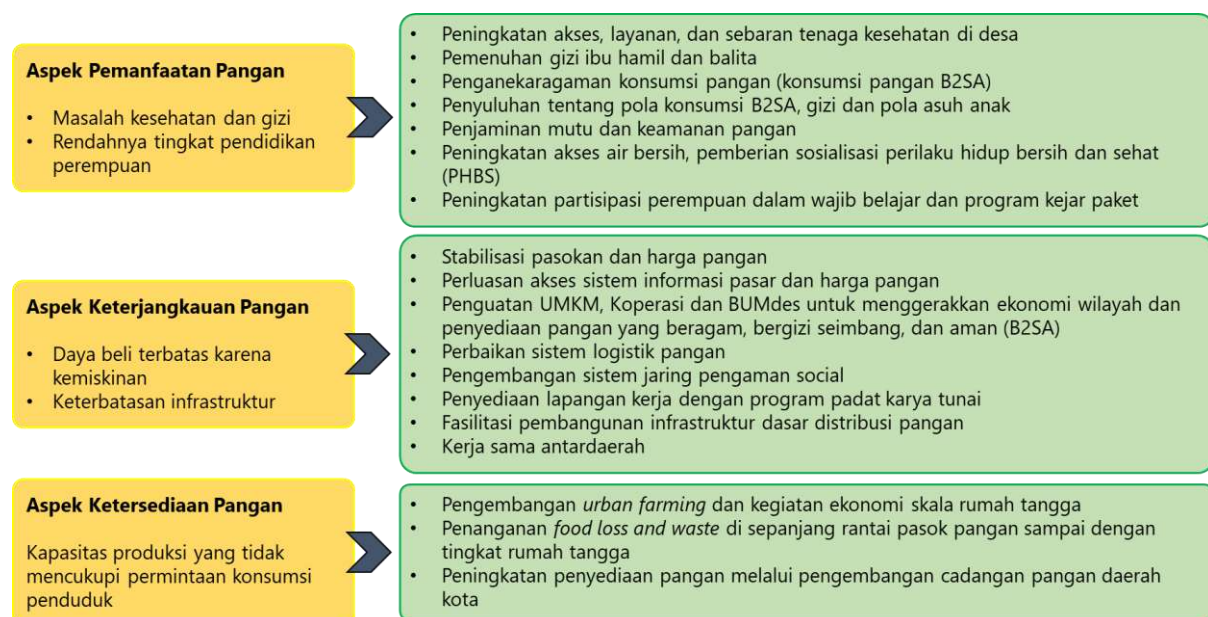
Oleh karena itu, program-program pengentasan kerentanan pangan di daerah perkotaan diarahkan pada kegiatan:

- Penurunan prevalensi balita *stunting* dan peningkatan gizi masyarakat melalui intervensi gizi spesifik (1.000 Hari Pertama Kehidupan) dan sensitif (peningkatan akses pangan, layanan kesehatan, dan peningkatan pendapatan keluarga),
- Peningkatan akses terhadap air bersih dengan pembangunan fasilitas dan layanan air bersih disertai sosialisasi dan penyuluhan tentang perilaku hidup bersih dan sehat serta sanitasi dan higienitas lingkungan,
- Peningkatan pemenuhan konsumsi pangan B2SA,
- Peningkatan partisipasi perempuan dalam program wajib belajar dan program kejar paket/pendidikan kesetaraan melalui penyuluhan, fasilitasi dan dukungan anggaran pendidikan,
- Pemerataan pembangunan fasilitas, peningkatan layanan, dan penyediaan tenaga kesehatan,
- Stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP), sehingga pangan terjangkau bagi seluruh masyarakat melalui pemerataan ketersediaan pangan antar waktu antar wilayah termasuk daerah rentan rawan

pangan dan penerapan kebijakan harga pangan dengan memperhatikan kepentingan produsen dan konsumen,

- g. Perluasan akses terhadap sistem informasi pasar dan harga pangan di seluruh wilayah Indonesia,
- h. Perbaikan sistem logistik pangan untuk menjamin pemerataan pangan yang aman dan terjangkau termasuk fasilitasi distribusi pangan untuk meningkatkan kelancaran perdagangan antarwilayah,
- i. Pemanfaatan kerja sama antardaerah untuk memenuhi kebutuhan pangan dan peningkatan ekonomi,
- j. Peningkatan kegiatan ekonomi wilayah untuk menciptakan lapangan kerja produktif dan produktivitas kerja yang tinggi,
- k. Fasilitasi pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), koperasi dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) untuk menggerakkan ekonomi wilayah dan meningkatkan penyediaan pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman (B2SA),
- l. Penyaluran bantuan sosial (tunai dan/atau pangan) bagi kelompok masyarakat berpendapatan rendah dan terdampak bencana (alam dan sosial). Jenis bantuan pangan yang disalurkan untuk memenuhi gizi masyarakat dengan memperhatikan bahan pangan lokal,
- m. Peningkatan penyediaan pangan melalui pengembangan cadangan pangan daerah kota,
- n. Penurunan *food loss* di sepanjang rantai pasok pangan and *food waste* dengan meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat, terutama ibu rumah tangga tentang pentingnya mengurangi/menghilangkan pemborosan pangan, dan
- o. Pengembangan *urban farming* dan kegiatan ekonomi skala rumah tangga.

Upaya-upaya untuk meningkatkan ketahanan pangan secara umum ditekankan pada penyebab utama kerentanan pangan di perkotaan seperti digambarkan pada Gambar 9.3.



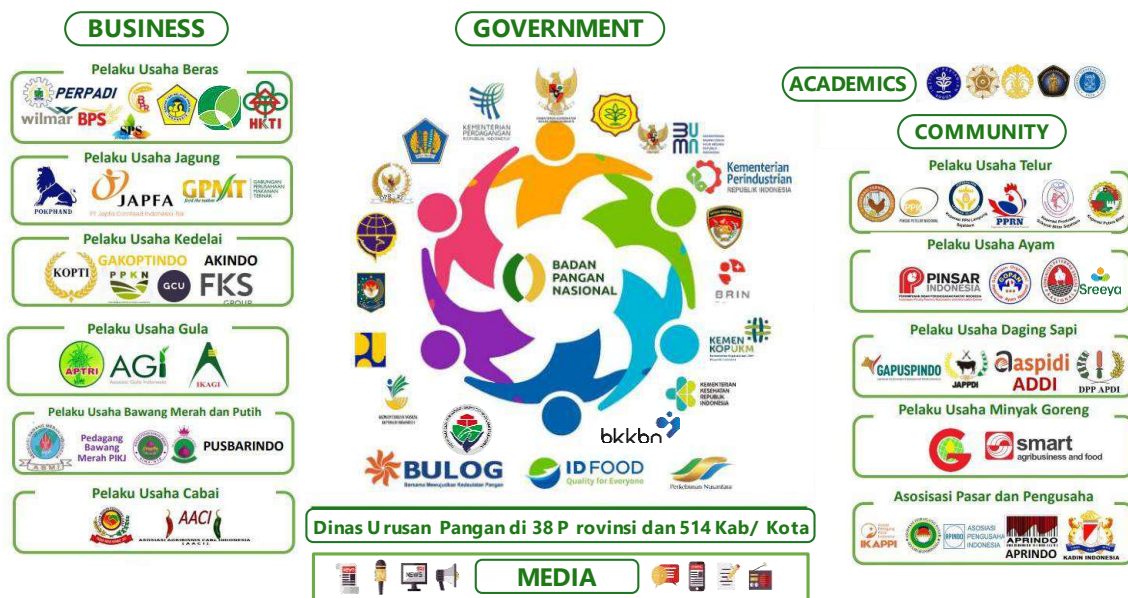
Gambar 9.3. Kerangka Intervensi Peningkatan Ketahanan Pangan Wilayah Kota

9.3. Sinergi dan Kerja Sama Lintas Program dan Lintas Sektor

Sinergi Lintas Sektor dan Koordinasi Pusat-Daerah sangat diperlukan untuk membangun sistem pangan berkelanjutan. Sinergi dan kolaborasi dalam konsep Penta-Helix perlu diaktualisasikan dalam implementasi program dan kegiatan ketahanan pangan yang direkomendasikan.

Kerjasama antarbidang dan antarpihak dari unsur *Academic, Business, Community, Government, dan Media* (ABCGM) akan mampu mengoptimalkan dukungan dalam mengatasi keterbatasan sumberdaya alam, sumber dana dan sumberdaya manusia dalam menangani kerawanan pangan dan mencapai target SDGs, terutama tujuan 1 (Tanpa Kemiskinan) dan tujuan 2 (Tanpa Kelaparan).

Oleh karena itu, diperlukan komitmen dan konsistensi semua pihak dalam mendukung ketahanan pangan, termasuk melalui penguatan regulasi ketahanan pangan, dukungan anggaran yang berkelanjutan, kelembagaan pangan yang kuat, peningkatan kualitas sumberdaya manusia, dan penerapan teknologi dan program inovatif untuk menangani kerawanan pangan.



Gambar 9.4. Sinergi dan Kolaborasi untuk Pangan Nasional Bersama Sektor Pentahelix ABGCM

Pemerintah daerah diharapkan menindaklanjuti upaya-upaya pengentasan daerah rentan rawan pangan dengan melibatkan partisipasi aktif swasta/BUMN, akademisi, dan seluruh komponen masyarakat. Upaya-upaya tersebut dilakukan agar program pengentasan daerah rentan rawan pangan dapat dilakukan secara masif dan terarah sampai tingkat administrasi terendah. Sinergi ini diharapkan akan meningkatkan efisiensi anggaran dan tenaga kerja serta mempercepat pencapaian tujuan akhir program.



BAB 10

PENUTUP





FSVA menyediakan informasi untuk pelaksanaan program yang lebih bersifat preventif, yaitu memberikan indikasi awal bahwa di daerah-daerah (lokus) tertentu bisa saja terjadi kerawanan pangan apabila tidak segera dilakukan tindakan-tindakan yang relevan dan sistematis untuk pencegahan dan penanganannya. Penyusunan FSVA tidak mungkin terwujud tanpa dukungan semua *stakeholder* di level kabupaten/kota, provinsi, dan nasional dalam penyediaan data dan informasi yang dibutuhkan. Tanpa adanya kontribusi dari semua pemangku kepentingan, termasuk dari daerah, maka tidak akan dapat dihasilkan data dan informasi situasi ketahanan dan kerentanan pangan.

Akurasi peta juga terus ditingkatkan dengan mendetailkan pemetaan sampai tingkat desa, agar permasalahan dan tantangan yang menyebabkan terjadinya masalah pangan, kemiskinan dan stunting dapat dilakukan intervensi program/kegiatan secara lebih tepat sasaran, efektif, dan efisien. Tidak hanya itu, dengan FSVA, pemantauan dini dapat lebih ditingkatkan agar kejadian rawan pangan dapat segera diidentifikasi. Kolaborasi pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota dengan seluruh *stakeholders* menjadi kunci untuk penanganan wilayah rentan rawan pangan.

Hasil penyusunan FSVA **jangan berhenti di atas *paper* saja**, kita harus berani *take action*, *take decision* dan *take the risk* untuk bisa mewujudkan ketahanan pangan nasional. Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota diharapkan dapat berkolaborasi dengan seluruh *stakeholders*, BUMN, serta BUMD Pangan di masing-masing wilayah dalam melaksanakan kegiatan. Kolaborasi dan sinergi kegiatan merupakan kunci dalam penanganan wilayah rentan rawan pangan.

Update dan *upgrade* metodologi merupakan kebutuhan rutin yang terus dilakukan untuk menjamin tetap terjaganya kualitas hasil analisis dan layanan yang mudah, cepat, tepat dan akurat. Badan Pangan Nasional bersama dengan lintas sektor baik di pusat maupun di daerah tengah melakukan pemutakhiran metodologi yang akan diterapkan di tahun 2025. Pemutakhiran ini dilakukan untuk memotret kondisi ketahanan pangan wilayah yang lebih akurat.



DAFTAR PUSTAKA

- Abuya, B.A., James Ciera and Elizabeth Kimani-Murage. 2012. Effect of mother's education on child's nutritional status in the slums of Nairobi. *BMC Pediatrics* 12:80.
- Azwar A. 2004. Aspek Kesehatan dan Gizi dalam Ketahanan Pangan. Dalam Prosiding Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi VIII: Ketahanan Pangan dan Gizi di Era Otonomi Daerah dan Globalisasi. Jakarta: BPS, Departemen Kesehatan, Badan POM, Bappenas, Departemen Pertanian dan Ristek.
- [Bappenas] Badan Pangan Nasional. 2023. Neraca Bahan Makanan 2021-2023. Jakarta: Bappenas.
- [Bappenas] Badan Pangan Nasional. 2024. Situasi Konsumsi Pangan Nasional Tahun 2023. Jakarta: Bappenas.
- [Bappenas] Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. 2020. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020 - 2024. <https://www.bappenas.go.id>.
- [BKP dan WFP] Badan Ketahanan Pangan dan World Food Programme. 2010. Percontohan Monitoring Sistem Ketahanan Pangan dan Gizi (SKPG Plus). Jakarta : BKP dan WFP.
- [BMKG] Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika. 2024. Prakiraan Musim Hujan 2024/2025 di Indonesia. Jakarta: BMKG
- [BMKG] Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika. 2023. Prakiraan Musim Kemarau 2023 di Indonesia. Jakarta: BMKG
- [BNPb] Badan Nasional Penanggulangan Bencana. 2023. Data Informasi Bencana Indonesia.. <https://www.dibi.bnpb.go.id/> (Diakses pada 25 Oktober 2024)
- [BPS] Badan Pusat Statistik. 2015. Proyeksi Penduduk Indonesia 2015-2045 Hasil SUPAS 2015. Jakarta: BPS.
- [BPS] Badan Pusat Statistik. 2023. Hasil Pencacahan Lengkap Sensus Pertanian 2023 - Tahap I. Jakarta: BPS.
- [BPS] Badan Pusat Statistik. 2023. Profil Kemiskinan di Indonesia Maret 2023. Jakarta: BPS.
- [BPS] Badan Pusat Statistik. 2024. Luas Panen dan Produksi Padi di Indonesia 2023. Jakarta: BPS.
- [BPS] Badan Pusat Statistik. 2023. Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2023: Statistik Kesejahteraan Rakyat. Jakarta: BPS.
- [BPS] Badan Pusat Statistik. 2024. [Seri 2010] Distribusi PDB Menurut Lapangan Usaha Seri 2010 Atas Dasar Harga Berlaku (Persen). <https://www.bps.go.id/id/>. [Diakses pada 6 November 2024]
- [BPS] Badan Pusat Statistik. 2024. Laju Pertumbuhan Triwulanan terhadap Triwulan yang Sama Tahun Sebelumnya (y-on-y). <https://www.bps.go.id/id/>. [Diakses pada 6 November 2024]
- [CRED] Centre for Research on the Epidemiology of Disaster. 2024. 2023 Disaster in Numbers. Belgium: Centre for Research on the Epidemiology of Disasters (CRED), Institute Health and Society UCLouvain
- Deaton A., and J. Muellbauer. 1980. *Economics and Consumer Behavior*. London: Cambridge University Press
- [DKP dan WFP] Dewan Ketahanan Pangan dan World Food Programme. 2015. Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Indonesia 2015. Jakarta (ID): DKP dan WFP

- FAO. 2018. A Review of studies examining the link between food insecurity and malnutrition.
- Glewwe (2009): Pendidikan ibu terhadap kesejahteraan balita.
- Goodridge P. 2007. Method explained index number, economic and labour. *Market Review*. 1(3): 54-57.
- [Kemenkes] Kementerian Kesehatan. 2022. Profil Kesehatan Indonesia 2022. Jakarta: Kemenkes
- [Kementan] Kementerian Pertanian. 2024. Data Luas Puso Padi dan Jagung 2019-2023. Jakarta: Kementerian Pertanian
- [Kemenkes] Kementerian Kesehatan. 2023. Profil Kesehatan Indonesia 2022. Jakarta: Kementerian Kesehatan
- [Kemenkes] Kementerian Kesehatan. 2024. Survei Kesehatan Indonesia 2023 dalam Angka. Jakarta: Kementerian Kesehatan
- [KLH] Kementerian Lingkungan Hidup. 2007. Status Lingkungan Hidup Indonesia 2006. Jakarta: KLH
- [Kementan] Kementerian Pertanian. 2024. Data Produksi Tanaman Pangan. Jakarta: Kementan
- [Kementan] Kementerian Pertanian. 2024. Laporan Kinerja Kementerian Pertanian 2023. Jakarta: Kementan
- LIPI. 2018. Rumusan Rekomendasi Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi XI 2018. Jakarta: LIPI Press
- PRCF Indonesia. 2023. Pencemaran air dan tanah persoalan lingkungan hidup di Indonesia. <https://prcfindonesia.org/pencemaran-air-dan-tanah-persoalan-lingkungan-hidup-di-kalimantan-barat/>
- Rashidi, Khadijeh & Pakravan-Charvadeh, Mohammad & Rahimian, Mehdi & Gholamrezai, Saeed. (2021). Is there a linkage between household welfare and income inequality, and food security to achieve sustainable development goals?. *Journal of Cleaner Production*. 326. 1-10. 10.1016/j.jclepro.2021.129390.
- Shan DE and Stifel D. 2003. Exploring alternative measures of welfare in the absence of expenditure data. *Review of Income and Wealth Series*. 49(4):463-489
- USAID Indonesia. 2023. Meningkatkan akses air minum dan sanitasi di Kalimantan Barat. https://iuwashtangguh.or.id/wp-content/uploads/2023/05/USAID-IUWASH-Tanggung Fact-Sheet-Regional_WK_20230113_ID.pdf
- WFP. 2017. Water for Food Security: Lessons learned from a review of water-related interventions.
- [WHH] Welthungerhilfe, Concern Worldwide, dan [IFHV] Institute for International Law of Peace and Armed Conflict . 2024. *2024 Global Hunger Index: How Gender Justice Can Advance Climate Resilience and Zero Hunger*. Bonn/Berlin: WHH; Dublin: Concern Worldwide; Bochum: IFHV
- [WHO] World Health Organization. 2000. *Classification of Severity of Malnutrition in a Community for Children Under 5 Years of Age from 'The Management of Nutrition in Major Emergencies'*. Geneva: WHO
- Young SL, Fronggillo EA, Jamaluddine Z, Melgar-Quinonez H, Perez-Escamilla, Ringler C, Rosinger AY. 2021. Perspective: The Importance of Water Security for Ensuring Food Security, Good Nutrition, and Well Being. *Adv Nutr*. 12(4): 1058-1073. doi: 10.1093/advances/nmab003



Lampiran



Keterangan Indikator

- 1. NCPR** : Rasio konsumsi normatif per kapita terhadap produksi bersih beras, jagung, ubi jalar, dan ubi kayu, serta stok beras pemerintah daerah
- 2. POV** : Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan
- 3. FOOD** : Persentase rumah tangga dengan proporsi pengeluaran untuk pangan >65 persen terhadap total pengeluaran
- 4. ELEC** : Persentase rumah tangga tanpa akses listrik
- 5. WATER** : Persentase rumah tangga tanpa akses ke air bersih
- 6. LIFE** : Angka harapan hidup pada saat lahir
- 7. HEALTH** : Rasio jumlah penduduk per tenaga kesehatan terhadap tingkat kepadatan penduduk
- 8. SCHOOL** : Rata-rata lama sekolah perempuan di atas 15 tahun
- 9. STUNTING** : Persentase balita dengan tinggi badan di bawah standar (stunting)

Kelompok IKP	Keterangan
1	Sangat Rentan
2	Rentan
3	Agak Rentan
4	Agak Tahan
5	Tahan
6	Sangat Tahan

Lampiran 1.

Data Indikator Individu Wilayah Kabupaten

NO.	PROVINSI/ KABUPATEN	NCPR	POV	FOOD	ELEC	WATER	LIFE	HEALTH	SCHOOL	STUNTING
ACEH										
1	Simeulue	0,75	17,92	31,27	0,13	17,76	65,61	1,68	9,91	30,70
2	Aceh Singkil	5,00	19,15	50,07	0,00	40,31	67,78	1,74	9,02	34,10
3	Aceh Selatan	0,84	12,10	37,42	0,00	34,05	64,81	2,22	8,50	40,20
4	Aceh Tenggara	0,51	12,45	46,16	0,00	44,19	68,65	2,20	10,13	32,90
5	Aceh Timur	0,72	13,39	31,97	0,45	38,66	69,07	1,68	8,99	29,70
6	Aceh Tengah	2,67	14,38	20,61	0,08	26,30	69,18	2,16	10,04	23,60
7	Aceh Barat	0,67	17,86	31,65	0,00	23,36	68,34	1,46	10,27	33,40
8	Aceh Besar	0,48	13,38	26,96	0,43	10,06	70,14	1,38	10,87	30,10
9	Pidie	0,36	18,78	48,18	0,09	31,46	67,29	0,70	9,29	29,50
10	Bireuen	0,58	12,12	38,91	0,01	27,66	71,66	0,46	9,67	32,90
11	Aceh Utara	0,47	16,64	50,54	0,01	37,08	69,15	0,56	9,37	25,20
12	Aceh Barat Daya	0,53	15,43	39,09	0,00	24,17	65,48	1,70	9,20	27,90
13	Gayo Lues	0,66	18,82	44,75	0,18	20,48	65,92	6,33	8,39	15,40
14	Aceh Tamiang	0,82	12,51	26,54	0,00	14,56	70,04	1,27	9,58	35,90
15	Nagan Raya	0,75	17,25	48,43	0,13	24,00	69,60	2,19	9,14	31,60
16	Aceh Jaya	0,33	12,42	40,90	0,14	26,92	67,55	4,54	8,98	34,00
17	Bener Meriah	5,00	18,31	25,33	1,26	61,03	69,64	1,15	10,30	32,20
18	Pidie Jaya	0,35	18,40	42,27	0,09	32,95	70,60	0,46	9,85	29,40

NO.	PROVINSI/ KABUPATEN	NCPR	POV	FOOD	ELEC	WATER	LIFE	HEALTH	SCHOOL	STUNTING
SUMATERA UTARA										
19	Nias	0,65	15,10	39,03	9,77	64,15	70,34	0,87	7,06	20,30
20	Mandailing Natal	1,06	8,86	60,34	1,10	55,14	63,47	3,08	9,37	20,70
21	Tapanuli Selatan	0,57	7,01	43,05	0,67	55,31	65,56	3,22	9,57	15,60
22	Tapanuli Tengah	1,36	11,50	41,75	0,64	35,19	67,90	1,42	8,96	23,80
23	Tapanuli Utara	0,30	8,54	62,27	0,33	51,69	69,57	2,22	10,19	27,40
24	Toba Samosir	0,28	8,04	48,87	0,35	25,69	71,24	2,06	10,50	28,00
25	Labuhan Batu	1,42	7,99	29,25	0,09	41,36	70,77	1,39	9,69	20,20
26	Asahan	1,91	8,21	27,78	0,11	24,26	69,09	1,82	9,18	11,00
27	Simalungun	0,56	7,87	37,82	0,11	41,91	72,20	1,78	9,78	17,70
28	Dairi	0,34	7,47	33,79	0,38	36,67	70,11	2,02	10,08	32,60
29	Karo	0,25	7,98	56,83	0,00	41,28	72,28	1,51	10,28	24,70
30	Deli Serdang	0,86	3,44	22,82	0,17	14,42	72,31	0,51	10,41	33,80
31	Langkat	1,01	9,23	38,49	0,54	26,92	69,64	1,85	8,97	16,90
32	Nias Selatan	1,25	16,39	52,00	6,06	63,23	69,58	1,20	6,99	31,80
33	Humbang Hasundutan	0,34	8,69	40,70	0,33	49,20	70,27	3,18	9,93	18,40
34	Pakpak Bharat	0,81	7,54	34,69	0,58	56,82	66,89	3,57	9,90	28,90
35	Samosir	0,35	11,66	40,87	0,25	47,18	72,24	2,85	9,20	22,40
36	Serdang Bedagai	0,21	7,44	32,93	0,00	33,30	69,59	1,51	9,14	14,40
37	Batu Bara	0,97	11,38	26,25	0,02	35,54	67,88	0,72	9,13	17,70
38	Padang Lawas Utara	1,14	8,79	47,34	0,00	42,52	67,82	3,26	9,74	21,80
39	Padang Lawas	1,19	7,89	38,96	0,44	39,91	67,71	2,67	9,86	17,70

NO.	PROVINSI/ KABUPATEN	NCPR	POV	FOOD	ELEC	WATER	LIFE	HEALTH	SCHOOL	STUNTING
40	Labuhan Batu Selatan	5,00	8,06	21,61	0,20	24,70	69,54	2,79	9,32	16,00
41	Labuhan Batu Utara	0,93	9,08	34,98	0,11	37,52	70,25	2,18	9,28	9,60
42	Nias Utara	0,58	21,79	40,43	6,50	46,34	70,24	1,41	7,01	20,30
43	Nias Barat	0,97	22,81	17,80	6,32	85,31	69,96	0,69	7,19	28,90
SUMATERA BARAT										
44	Kepulauan Mentawai	2,94	13,72	37,25	10,40	72,89	65,10	8,11	7,85	33,70
45	Pesisir Selatan	0,40	7,34	26,99	0,31	15,76	71,52	2,78	9,13	27,00
46	Solok	0,35	7,13	37,82	0,35	32,61	69,56	3,29	8,57	25,40
47	Sijunjung	0,65	5,88	23,02	0,86	27,30	67,02	3,62	9,23	28,50
48	Tanah Datar	0,32	4,16	26,496	0,27	15,74	70,84	1,37	9,56	18,50
49	Padang Pariaman	0,51	6,34	28,73	0,32	23,54	69,70	0,92	8,86	19,40
50	Agam	0,52	6,60	32,01	0,64	20,57	73,23	1,95	9,63	20,10
51	Limapuluh Koto	0,41	6,80	30,94	0,05	33,84	70,30	3,12	8,37	28,60
52	Pasaman	0,31	6,80	33,30	0,50	33,26	68,29	2,69	8,37	29,40
53	Solok Selatan	0,40	6,45	25,51	0,35	26,75	68,71	6,80	9,36	14,70
54	Dharmas Raya	0,95	5,56	11,88	0,17	26,93	72,24	2,33	9,23	17,70
55	Pasaman Barat	0,61	6,92	33,27	0,24	34,36	68,53	2,10	9,69	29,70
RIAU										
56	Kuantan Sengingi	2,16	8,07	16,05	0,70	28,94	69,13	4,29	9,01	23,00
57	Indragiri Hulu	5,00	6,06	15,17	1,01	16,34	70,69	5,19	8,61	12,70
58	Indragiri Hilir	1,55	5,64	34,72	4,18	73,12	68,62	5,86	7,77	18,80
59	Pelalawan	3,25	8,15	20,69	0,52	13,63	72,00	7,97	9,07	10,10

NO.	PROVINSI/ KABUPATEN	NCPR	POV	FOOD	ELEC	WATER	LIFE	HEALTH	SCHOOL	STUNTING
60	Siak	2,80	5,23	14,74	0,00	9,90	71,64	4,77	10,01	10,40
61	Kampar	5,00	7,04	21,64	0,00	24,67	71,42	4,21	9,44	7,60
62	Rokan Hulu	5,00	9,72	23,88	0,64	15,70	70,84	4,42	9,26	15,90
63	Bengkalis	3,61	6,31	24,31	0,18	36,88	71,79	4,00	9,51	17,90
64	Rokan Hilir	3,06	7,07	19,09	0,13	37,28	70,99	3,59	8,89	16,60
65	Kepulauan Meranti	0,09	22,98	18,34	1,90	89,58	68,41	5,21	8,47	19,60
JAMBI										
66	Kerinci	0,50	7,54	32,30	3,27	32,30	70,55	3,39	8,25	8,70
67	Merangin	1,73	8,90	13,90	0,09	50,04	71,75	3,48	8,61	14,90
68	Sarolangun	3,10	8,54	19,54	0,56	49,63	69,70	4,47	8,20	4,80
69	Batang Hari	2,33	9,45	17,35	0,73	28,95	71,22	4,41	8,42	10,10
70	Muaro Jambi	3,49	4,43	28,18	0,09	29,18	71,84	3,41	9,09	12,00
71	Tanjung Jabung Timur	1,64	10,85	32,40	0,81	49,09	66,98	4,79	8,15	23,70
72	Tanjung Jabung Barat	2,12	9,79	24,72	0,71	53,10	68,67	4,23	8,59	14,10
73	Tebo	2,66	6,46	20,20	0,29	28,31	70,49	5,11	8,40	22,70
74	Bungo	2,49	5,29	20,12	0,31	26,74	68,43	2,66	8,53	13,70
SUMATERA SELATAN										
75	Ogan Komering Ulu	2,19	11,46	24,62	0,00	27,60	68,85	1,75	9,40	15,70
76	Ogan Komering Ilir	0,27	13,15	36,91	0,00	31,03	69,31	6,17	7,51	32,50
77	Muara Enim	1,59	10,93	16,02	0,18	30,27	69,72	2,57	8,12	25,90
78	Lahat	1,09	15,00	31,54	0,00	40,77	66,87	1,94	8,73	7,80
79	Musi Rawas	0,53	14,13	36,99	0,12	39,52	68,95	3,73	7,85	21,90

NO.	PROVINSI/ KABUPATEN	NCPR	POV	FOOD	ELEC	WATER	LIFE	HEALTH	SCHOOL	STUNTING
80	Musi Banyuasin	0,71	14,90	28,89	0,55	28,89	69,51	6,17	8,14	16,50
81	Banyuasin	0,17	9,58	40,25	0,00	55,26	69,76	5,17	7,60	20,40
82	Ogan Komering Ulu Selatan	0,67	10,36	46,29	3,64	49,77	67,88	2,53	8,40	23,00
83	Ogan Komering Ulu Timur	0,17	9,99	21,23	0,00	37,40	69,78	1,46	8,40	9,30
84	Ogan Ilir	0,68	13,28	40,91	0,02	28,50	66,33	1,34	8,35	22,90
85	Empat Lawang	1,12	11,80	36,44	0,32	71,69	65,73	2,38	7,83	32,60
86	Penukal Abab Lematang Ilir	1,14	10,91	16,06	0,00	31,52	68,96	1,98	7,53	15,40
87	Musi Rawas Utara	2,66	18,26	37,47	0,81	44,73	66,37	6,83	7,70	33,10
BENGKULU										
88	Bengkulu Selatan	0,53	17,51	26,54	0,34	59,02	68,40	1,05	9,53	24,00
89	Rejang Lebong	0,99	14,79	28,28	0,80	55,84	69,22	1,16	9,31	28,60
90	Bengkulu Utara	1,56	11,29	30,41	0,00	43,03	68,77	3,15	8,22	21,60
91	Kaur	0,72	17,83	32,75	0,73	46,75	67,27	3,87	8,25	14,30
92	Seluma	0,84	18,00	30,72	0,67	57,84	68,35	2,06	8,20	26,00
93	Mukomuko	1,24	10,76	10,28	0,13	36,02	67,30	4,18	8,87	27,10
94	Lebong	0,37	11,15	46,67	0,02	44,85	63,93	3,00	8,49	15,70
95	Kepahiang	1,22	14,12	22,28	0,16	55,68	68,46	0,95	8,41	22,10
96	Bengkulu Tengah	2,89	9,40	27,25	0,31	60,54	68,52	1,55	7,57	23,20
LAMPUNG										
97	Lampung Barat	0,71	11,17	27,03	1,14	52,76	68,13	1,90	8,57	24,60
98	Tanggamus	0,77	10,52	30,01	0,15	53,84	69,23	2,13	7,35	17,10
99	Lampung Selatan	0,39	12,79	30,47	0,00	20,90	69,97	0,92	8,07	10,30

NO.	PROVINSI/ KABUPATEN	NCPR	POV	FOOD	ELEC	WATER	LIFE	HEALTH	SCHOOL	STUNTING
100	Lampung Timur	0,17	13,80	18,51	0,00	30,49	71,25	2,07	8,34	14,20
101	Lampung Tengah	0,12	10,65	26,20	0,99	31,53	70,29	1,41	8,00	16,70
102	Lampung Utara	0,13	17,17	33,08	0,17	60,90	69,83	1,23	8,55	23,50
103	Way Kanan	0,46	11,02	27,68	0,00	44,87	69,91	2,51	7,83	22,70
104	Tulang Bawang	0,11	8,04	18,29	0,00	22,06	70,42	2,34	7,89	9,80
105	Pesawaran	0,45	12,89	26,78	0,00	43,85	69,74	0,94	8,21	10,00
106	Pringsewu	0,53	9,14	20,91	0,00	11,49	71,05	0,37	8,56	15,80
107	Mesuji	0,14	6,73	13,60	0,00	22,71	68,75	3,02	7,20	5,00
108	Tulang Bawang Barat	0,17	7,25	17,73	0,00	55,59	70,42	1,35	8,05	10,50
109	Pesisir Barat	0,49	13,49	18,66	0,46	59,30	64,29	4,24	8,75	16,10
KEP. BANGKA BELITUNG										
110	Bangka	2,90	4,32	15,55	0,20	11,86	71,60	1,69	8,79	23,20
111	Belitung	5,00	6,46	6,72	0,14	8,85	71,54	2,66	9,16	20,80
112	Bangka Barat	5,00	2,71	11,70	0,00	20,73	70,43	3,40	7,87	20,60
113	Bangka Tengah	5,00	5,29	20,67	0,00	14,30	72,11	2,89	7,48	18,20
114	Bangka Selatan	0,62	3,11	19,12	0,00	23,99	68,98	5,04	7,49	20,70
115	Belitung Timur	5,00	6,73	7,72	0,14	14,77	72,59	3,85	9,09	17,30
KEP. RIAU										
116	Karimun	5,00	5,95	6,85	0,00	12,19	72,01	0,84	9,20	17,90
117	Bintan	5,00	5,90	12,83	0,00	20,42	71,09	1,26	9,82	21,60
118	Natuna	5,00	5,25	14,69	0,00	8,26	66,22	2,67	9,28	16,10
119	Lingga	5,00	11,26	17,80	2,77	23,63	63,50	3,31	7,92	20,50

NO.	PROVINSI/ KABUPATEN	NCPR	POV	FOOD	ELEC	WATER	LIFE	HEALTH	SCHOOL	STUNTING
120	Kepulauan Anambas	5,00	6,95	6,00	0,16	45,37	68,10	1,16	8,25	15,20
DKI JAKARTA										
121	Kep. Seribu	5,00	13,13	35,09	0,00	1,54	69,61	0,05	9,01	18,60
JAWA BARAT										
122	Bogor	2,63	7,27	33,47	0,00	31,89	71,92	0,29	8,67	27,60
123	Sukabumi	0,80	7,01	35,75	0,05	44,67	71,83	0,87	7,62	27,00
124	Cianjur	0,67	10,22	42,96	0,09	32,56	70,79	0,84	7,13	11,40
125	Bandung	1,53	6,40	21,67	0,00	22,97	74,27	0,31	9,28	29,20
126	Garut	0,51	9,77	45,40	0,00	46,60	72,07	0,63	8,04	24,10
127	Tasikmalaya	0,80	10,28	44,27	0,16	35,61	70,19	0,98	8,24	20,70
128	Ciamis	0,69	7,42	40,35	0,00	21,45	72,57	0,64	8,32	25,40
129	Kuningan	0,67	12,12	38,36	0,00	29,18	74,29	0,39	7,94	23,40
130	Cirebon	0,82	11,20	32,93	0,00	15,84	72,76	0,18	7,97	22,90
131	Majalengka	0,41	11,21	33,66	0,00	26,26	71,05	0,43	7,74	24,10
132	Sumedang	0,53	9,36	29,68	0,00	17,60	73,19	0,61	8,89	14,40
133	Indramayu	0,24	12,13	41,69	0,24	6,41	72,46	0,57	7,09	18,40
134	Subang	0,29	9,52	28,03	0,00	27,91	73,24	0,65	7,67	18,70
135	Purwakarta	0,94	8,46	35,21	0,00	29,17	71,74	0,30	8,04	24,00
136	Karawang	0,41	7,87	19,78	0,00	11,45	72,90	0,27	8,13	17,10
137	Bekasi	1,18	4,93	14,15	0,00	6,36	74,30	0,13	9,79	23,20
138	Bandung Barat	1,77	10,52	33,07	0,00	24,46	73,10	0,48	8,16	25,10
139	Pangandaran	0,56	8,98	32,89	0,00	22,31	72,17	0,98	8,16	23,90

NO.	PROVINSI/ KABUPATEN	NCPR	POV	FOOD	ELEC	WATER	LIFE	HEALTH	SCHOOL	STUNTING
JAWA TENGAH										
140	Cilacap	0,45	10,99	26,68	0,00	27,64	74,25	0,54	7,46	18,50
141	Banyumas	1,02	12,53	18,84	0,00	30,51	73,98	0,22	8,04	20,90
142	Purbalingga	0,98	14,99	29,60	0,12	28,37	73,37	0,30	7,65	26,00
143	Banjarnegara	1,18	14,90	23,91	0,00	23,50	74,47	0,51	7,15	19,90
144	Kebumen	0,59	16,34	19,60	0,00	33,23	73,83	0,33	7,74	21,90
145	Purworejo	0,48	11,33	20,55	0,00	23,10	75,21	0,49	8,34	20,60
146	Wonosobo	1,10	15,58	26,03	0,00	20,14	72,17	0,59	7,07	29,20
147	Magelang	1,22	10,96	18,81	0,04	26,04	74,20	0,48	7,80	25,80
148	Boyolali	0,52	9,81	15,19	0,00	19,18	76,23	0,37	7,98	21,50
149	Klaten	0,60	12,28	14,88	0,00	28,11	77,07	0,17	9,08	24,50
150	Sukoharjo	0,48	7,58	7,87	0,00	17,61	77,86	0,12	9,91	24,30
151	Wonogiri	0,19	10,94	19,37	0,00	21,08	76,56	0,72	7,66	19,50
152	Karanganyar	0,57	9,79	14,36	0,00	12,04	77,72	0,32	9,05	22,20
153	Sragen	0,27	12,87	22,25	0,00	8,69	75,97	0,29	7,83	18,40
154	Grobogan	0,29	11,72	38,45	0,00	9,41	75,04	0,53	7,35	20,20
155	Blora	0,27	11,49	25,34	0,00	8,14	74,71	0,84	7,36	21,20
156	Rembang	0,41	14,17	31,67	0,00	7,08	74,77	0,51	7,86	19,50
157	Pati	0,27	9,31	19,76	0,00	9,89	76,39	0,38	7,96	18,50
158	Kudus	0,89	7,24	11,96	0,00	16,34	76,86	0,13	9,32	15,70
159	Jejara	0,68	6,61	23,72	0,00	23,56	76,04	0,36	8,39	18,90
160	Demak	0,38	12,01	25,22	0,00	4,64	75,60	0,38	8,47	9,50

NO.	PROVINSI/ KABUPATEN	NCPR	POV	FOOD	ELEC	WATER	LIFE	HEALTH	SCHOOL	STUNTING
161	Semarang	1,02	7,17	16,64	0,00	21,70	75,95	0,38	8,46	18,80
162	Temanggung	1,97	9,26	21,07	0,00	12,34	75,77	0,43	7,87	25,10
163	Kendal	0,84	9,39	18,38	0,00	19,24	74,58	0,35	7,96	22,40
164	Batang	0,74	8,92	19,60	0,00	20,88	74,85	0,46	7,38	24,70
165	Pekalongan	1,02	9,67	25,69	0,00	26,99	73,87	0,41	7,70	28,60
166	Pemalang	0,68	15,03	36,26	0,00	21,40	73,85	0,40	6,84	15,30
167	Tegal	0,83	7,30	27,80	0,00	18,31	72,00	0,27	7,55	21,50
168	Brebes	0,74	15,78	27,01	0,11	25,43	69,96	0,43	6,68	21,60
D.I YOGYAKARTA										
169	Kulon Progo	0,60	15,64	12,58	0,00	18,44	75,29	0,33	9,17	21,20
170	Bantul	1,32	11,96	7,94	0,00	18,85	73,94	0,15	9,97	20,50
171	Gunung Kidul	0,16	15,60	16,79	0,00	41,29	74,24	0,78	7,32	22,20
172	Sleman	1,54	7,52	9,18	0,00	17,85	75,08	0,07	11,10	12,40
JAWA TIMUR										
173	Pacitan	0,49	13,65	23,25	0,12	28,82	72,86	1,04	7,95	20,90
174	Ponorogo	0,28	9,53	15,69	0,00	17,71	73,55	0,49	7,63	16,10
175	Trenggalek	0,62	10,63	26,13	0,00	36,23	74,64	0,68	7,80	15,80
176	Tulungagung	0,56	6,53	18,24	0,00	25,05	74,91	0,29	8,72	21,50
177	Blitar	0,64	8,69	19,47	0,00	18,29	74,34	0,71	7,95	20,30
178	Kediri	0,95	10,72	28,60	0,00	31,55	73,27	0,46	8,37	16,80
179	Malang	1,06	9,45	27,48	0,00	28,02	73,26	0,53	7,97	19,50
180	Lumajang	0,55	8,93	43,77	0,14	33,64	70,96	0,62	7,36	29,90

NO.	PROVINSI/ KABUPATEN	NCPR	POV	FOOD	ELEC	WATER	LIFE	HEALTH	SCHOOL	STUNTING
181	Jember	0,62	9,51	36,98	0,02	32,29	70,03	0,58	6,66	29,70
182	Banyuwangi	0,63	7,34	17,06	0,00	17,57	71,38	0,92	7,82	21,90
183	Bondowoso	0,42	13,34	39,66	0,00	35,14	67,60	0,69	6,40	17,00
184	Situbondo	0,46	11,90	43,88	0,00	36,32	69,94	0,79	6,90	4,10
185	Probolinggo	0,67	17,19	33,96	0,00	34,59	68,12	0,71	6,49	35,40
186	Pasuruan	0,82	9,24	41,04	0,00	20,80	70,81	0,42	7,56	27,90
187	Sidoarjo	1,95	5,00	5,86	0,00	12,26	74,69	0,09	10,82	8,40
188	Mojokerto	0,52	9,80	33,45	0,03	11,52	73,25	0,30	9,09	16,20
189	Jombang	0,57	9,15	28,37	0,00	16,41	73,22	0,29	8,65	18,00
190	Nganjuk	0,40	10,89	27,56	0,00	26,30	72,28	0,52	8,27	17,10
191	Madiun	0,30	11,04	26,33	0,07	20,54	72,28	0,65	7,81	16,50
192	Magetan	0,35	9,80	19,18	0,00	17,53	73,29	0,38	8,48	19,20
193	Ngawi	0,18	14,40	30,59	0,00	11,10	73,20	0,56	7,81	14,00
194	Bojonegoro	0,29	12,18	25,62	0,00	10,93	72,57	0,67	7,44	14,10
195	Tuban	0,29	14,91	36,15	0,00	7,08	72,36	0,79	7,46	17,80
196	Lamongan	0,27	12,42	19,16	0,00	4,97	73,22	0,40	8,29	9,40
197	Gresik	0,52	10,96	11,86	0,00	0,79	73,30	0,27	10,20	15,40
198	Bangkalan	0,70	19,35	46,62	0,00	34,55	70,79	0,49	6,04	10,20
199	Sampang	0,47	21,76	40,16	0,00	11,31	68,64	0,55	5,46	14,10
200	Pamekasan	0,88	13,85	39,30	0,00	10,80	68,31	0,32	7,28	25,10
201	Sumenep	0,41	18,70	48,08	0,25	21,19	72,47	0,66	5,70	16,70

NO.	PROVINSI/ KABUPATEN	N CPR	POV	FOOD	ELEC	WATER	LIFE	HEALTH	SCHOOL	STUNTING
BANTEN										
202	Pandeglang	0,49	9,27	30,55	0,00	53,73	65,58	1,14	7,26	28,60
203	Lebak	0,64	8,68	47,81	1,45	58,52	68,13	1,01	6,95	35,50
204	Tangerang	2,07	6,93	17,09	0,22	13,62	70,65	0,11	9,16	26,40
205	Serang	0,69	4,85	27,42	0,00	27,36	65,60	0,50	8,14	23,90
BALI										
206	Jembrana	0,92	4,96	11,73	0,00	18,29	73,20	0,77	8,40	8,70
207	Tabanan	0,50	4,70	2,27	0,00	15,09	74,48	0,35	9,00	6,30
208	Badung	1,01	2,30	1,49	0,00	7,11	75,88	0,09	10,88	4,90
209	Gianyar	0,79	4,47	1,25	0,00	5,08	74,52	0,13	9,66	6,30
210	Klungkung	0,96	5,61	9,29	0,00	13,91	72,28	0,21	8,09	4,90
211	Bangli	1,87	5,28	15,30	0,00	37,96	71,33	0,34	7,67	10,20
212	Karangasem	1,02	6,56	4,99	0,53	24,50	71,25	0,60	6,22	6,40
213	Buleleng	1,50	5,85	11,69	0,24	16,00	72,70	0,55	7,35	6,20
NUSA TENGGARA BARAT										
214	Lombok Barat	0,84	13,67	55,25	0,00	28,81	68,08	0,52	7,24	19,90
215	Lombok Tengah	0,48	12,93	47,99	0,06	22,48	67,12	0,37	6,97	17,60
216	Lombok Timur	0,80	15,63	52,77	0,34	35,08	66,95	0,35	7,59	27,60
217	Sumbawa	0,19	13,91	25,20	0,00	7,04	68,54	2,41	8,83	25,70
218	Dompu	0,22	12,62	44,04	0,21	37,61	67,76	1,26	9,07	12,40
219	Bima	0,24	14,39	54,15	0,14	25,58	67,27	1,41	8,83	36,70
220	Sumbawa Barat	0,29	12,95	34,31	0,00	9,76	69,20	1,83	8,88	10,50

NO.	PROVINSI/ KABUPATEN	NCPR	POV	FOOD	ELEC	WATER	LIFE	HEALTH	SCHOOL	STUNTING
221	Lombok Utara	0,81	25,80	51,81	0,00	37,84	68,17	0,87	6,36	33,50
NUSA TENGGARA TIMUR										
222	Sumba Barat	0,75	27,17	15,92	12,97	26,10	67,57	0,89	7,33	42,50
223	Sumba Timur	0,58	28,08	22,23	3,08	43,49	65,82	4,48	8,11	26,30
224	Kupang	0,70	21,78	39,81	6,77	35,11	65,64	3,69	7,85	38,40
225	Timor Tengah Selatan	0,99	25,18	36,21	9,06	32,28	66,89	2,37	7,49	50,10
226	Timor Tengah Utara	0,73	21,85	33,79	2,28	24,02	67,61	1,63	8,48	42,70
227	Belu	1,08	14,30	22,30	3,45	36,62	65,63	0,96	7,65	48,10
228	Alor	1,26	19,97	39,29	1,94	55,04	62,35	1,87	8,26	39,30
229	Lembata	1,00	24,78	25,43	1,68	37,63	67,87	1,47	7,68	35,10
230	Flores Timur	2,11	11,77	25,80	1,52	27,31	65,96	1,05	7,91	37,20
231	Sikka	1,02	12,56	22,76	5,40	20,42	68,30	0,90	7,32	33,30
232	Ende	1,21	22,86	23,22	0,38	21,14	66,12	1,11	8,51	27,50
233	Ngada	0,46	12,06	22,77	4,25	24,86	68,71	1,45	9,01	21,30
234	Manggarai	0,70	19,69	36,41	2,69	17,70	67,63	0,59	7,83	36,80
235	Rote Ndao	0,77	27,05	23,89	1,36	26,04	65,60	1,62	8,03	39,80
236	Manggarai Barat	0,39	16,82	20,85	3,06	32,38	68,00	1,91	8,20	36,20
237	Sumba Tengah	0,51	31,78	30,67	13,09	57,42	68,87	2,89	7,40	39,50
238	Sumba Barat Daya	0,59	27,48	58,64	19,70	63,65	68,99	1,14	6,95	44,30
239	Nagekeo	1,04	12,33	23,37	1,01	43,78	67,91	1,56	8,29	24,90
240	Manggarai Timur	0,62	25,06	56,80	10,11	48,86	68,49	1,22	8,22	43,70
241	Sabu Raijua	1,74	28,37	44,80	5,35	53,35	61,06	0,92	7,47	36,90

NO.	PROVINSI/ KABUPATEN	NCPR	POV	FOOD	ELEC	WATER	LIFE	HEALTH	SCHOOL	STUNTING
242	Malaka	0,65	14,42	32,25	4,67	43,40	65,67	0,90	7,42	47,70
KALIMANTAN BARAT										
243	Sambas	0,64	7,08	28,22	0,19	92,51	69,76	3,67	6,71	30,80
244	Bengkayang	0,82	6,28	17,73	2,75	40,03	74,20	4,09	8,15	32,70
245	Landak	0,61	9,97	33,52	5,47	54,82	73,77	7,32	7,60	31,00
246	Mempawah	0,90	5,21	24,36	0,00	81,54	71,74	2,55	7,70	27,20
247	Sanggau	1,24	4,79	16,64	1,52	43,57	71,77	9,04	7,70	22,10
248	Ketapang	1,07	9,25	18,44	2,37	45,82	71,45	12,71	8,05	22,86
249	Sintang	1,47	8,18	18,86	5,32	38,35	72,41	12,07	7,89	24,80
250	Kapuas Hulu	1,72	8,16	26,33	3,10	41,91	72,88	22,35	8,16	16,70
251	Sekadau	1,26	5,90	35,61	4,31	67,93	72,74	7,16	7,18	12,20
252	Melawi	3,42	11,12	34,36	6,43	46,91	73,32	10,67	7,63	35,30
253	Kayong Utara	0,61	9,13	17,39	0,72	60,21	69,22	7,70	6,58	22,90
254	Kubu Raya	1,73	4,23	16,21	0,00	85,45	71,26	5,49	7,50	25,40
KALIMANTAN TENGAH										
255	Kotawaringin Barat	5,00	4,18	7,02	0,02	13,52	71,28	8,01	8,94	17,90
256	Kotawaringin Timur	2,21	5,69	16,31	0,31	26,11	70,39	8,45	7,92	35,50
257	Kapuas	0,54	5,21	29,56	0,41	36,50	69,23	11,12	8,50	16,20
258	Barito Selatan	2,96	4,72	35,87	0,24	34,12	67,75	6,39	9,40	23,90
259	Barito Utara	1,41	5,35	24,59	3,01	19,30	71,68	9,96	8,95	15,30
260	Sukamara	4,52	3,96	14,82	1,99	23,05	72,03	8,22	8,51	29,10
261	Lamandau	5,00	3,12	15,26	5,36	24,79	69,84	12,59	8,63	13,20

NO.	PROVINSI/ KABUPATEN	NCPR	POV	FOOD	ELEC	WATER	LIFE	HEALTH	SCHOOL	STUNTING
262	Seruyan	3,23	7,12	23,48	2,22	30,94	69,63	18,29	7,78	25,80
263	Katingan	0,77	4,99	30,33	3,23	34,52	66,43	21,48	9,25	34,00
264	Pulang Pisau	0,28	4,58	30,84	0,00	44,92	68,60	14,03	8,58	24,00
265	Gunung Mas	5,00	5,47	24,12	0,26	43,53	70,96	10,31	9,48	12,90
266	Barito Timur	1,00	6,63	17,84	0,05	33,78	68,91	4,63	9,96	21,70
267	Murung Raya	5,00	6,44	33,75	4,61	49,56	69,94	23,69	8,38	21,00
KALIMANTAN SELATAN										
268	Tanah Laut	0,85	3,73	24,16	0,00	28,97	70,11	2,79	8,09	41,70
269	Kota Baru	2,18	4,32	20,48	0,00	22,59	69,77	8,06	7,66	20,10
270	Banjar	0,89	2,44	21,36	0,10	28,92	68,01	2,01	8,18	30,10
271	Barito Kuala	0,29	4,60	38,49	0,43	35,70	66,80	2,63	7,90	15,90
272	Tapin	0,32	3,19	22,17	0,18	24,05	71,16	2,40	8,13	14,40
273	Hulu Sungai Selatan	0,47	4,01	24,06	0,11	30,53	66,90	1,31	8,19	25,40
274	Hulu Sungai Tengah	0,42	5,84	43,54	0,08	40,01	66,86	1,25	8,46	13,00
275	Hulu Sungai Utara	0,51	6,25	15,28	0,00	27,66	64,97	0,95	8,06	36,00
276	Tabalong	0,76	5,77	19,86	0,10	20,34	71,28	3,12	9,21	18,10
277	Tanah Bumbu	1,36	4,12	17,12	0,00	11,33	70,94	2,95	8,53	25,10
278	Balangan	1,00	5,22	15,66	0,18	12,79	68,40	2,35	8,36	33,40
KALIMANTAN TIMUR										
279	Paser	1,68	9,11	16,65	0,00	16,49	72,99	7,27	9,35	22,40
280	Kutai Barat	4,66	9,72	12,58	0,06	21,44	73,19	10,26	8,90	22,00
281	Kutai Kertanegara	1,08	7,61	9,85	0,03	2,51	72,75	10,69	9,15	17,60

NO.	PROVINSI/ KABUPATEN	NCPR	POV	FOOD	ELEC	WATER	LIFE	HEALTH	SCHOOL	STUNTING
282	Kutai Timur	4,78	9,06	6,75	0,66	12,48	73,57	13,67	9,40	29,00
283	Berau	1,90	5,54	4,81	0,00	6,56	72,41	14,55	9,54	23,00
284	Penajam Paser Utara	0,76	6,97	7,13	0,28	4,31	71,83	3,81	8,65	24,60
285	Mahakam Ulu	5,00	11,38	22,33	1,04	12,76	72,46	47,25	9,10	22,59
KALIMANTAN UTARA										
286	Malinau	2,10	6,54	10,47	3,65	27,49	71,51	42,89	9,22	20,50
287	Bulungan	2,19	8,99	9,75	0,00	18,80	72,78	13,78	9,06	22,60
288	Tana Tidung	5,00	4,62	10,31	3,24	16,79	71,53	10,43	8,66	15,10
289	Nunukan	1,67	5,53	14,95	0,00	30,10	71,42	13,26	8,53	15,80
SULAWESI UTARA										
290	Bolaang Mongondow	0,34	7,37	33,54	0,00	28,53	70,07	3,02	8,81	24,80
291	Minahasa	1,71	6,87	24,85	0,00	20,89	71,82	0,71	10,61	23,10
292	Kepulauan Sangihe	4,20	11,01	32,81	1,79	27,43	70,78	0,65	9,23	19,00
293	Kepulauan Talaud	1,07	8,46	49,20	0,13	29,79	70,91	1,41	10,01	19,30
294	Minahasa Selatan	2,26	8,89	41,07	0,00	21,34	70,71	2,02	9,76	26,40
295	Minahasa Utara	2,20	6,65	35,63	0,32	10,85	71,99	0,78	10,49	10,90
296	Bolaang Mongondow Utara	0,75	7,90	37,95	0,21	26,84	68,33	2,91	8,92	27,80
297	Kep. Siau Tagulandang Biaro	5,00	8,76	28,25	3,20	49,95	71,59	0,44	9,68	24,90
298	Minahasa Tenggara	1,88	11,84	47,24	0,21	13,73	70,86	1,40	9,18	15,00
299	Bolaang Mongondow Selatan	1,42	12,04	42,53	0,28	27,48	64,95	3,16	8,65	33,00
300	Bolaang Mongondow Timur	1,84	5,80	31,36	0,28	23,24	68,51	1,14	8,61	28,40

NO.	PROVINSI/ KABUPATEN	NCPR	POV	FOOD	ELEC	WATER	LIFE	HEALTH	SCHOOL	STUNTING
SULAWESI TENGAH										
301	Banggai Kepulauan	3,01	12,90	26,64	2,19	14,24	66,87	2,79	8,79	27,70
302	Banggai	0,36	6,94	15,85	0,28	30,04	71,02	3,99	8,83	29,10
303	Morowali	1,04	12,31	11,55	0,00	14,99	69,37	2,97	8,86	26,00
304	Poso	0,44	15,16	16,07	0,20	15,74	71,33	5,38	9,53	26,50
305	Donggala	0,86	16,25	24,07	3,42	39,70	67,86	4,74	8,20	34,10
306	Toli-Toli	0,72	12,85	8,90	1,44	31,23	66,78	2,60	8,87	29,00
307	Buol	1,09	13,36	15,92	0,59	17,55	69,73	4,27	9,58	30,00
308	Parigi Moutong	0,32	14,91	21,50	0,83	30,86	64,62	3,29	8,34	28,50
309	Tojo Una-Una	1,77	16,74	22,58	2,08	13,32	66,41	4,41	8,93	21,30
310	Sigi	0,46	12,83	22,59	0,49	43,58	70,35	4,20	9,39	26,40
311	Banggai Laut	5,00	14,15	26,33	4,72	25,14	66,08	0,96	8,61	25,60
312	Morowali Utara	0,63	12,85	21,62	0,37	26,66	69,97	8,65	8,88	24,70
SULAWESI SELATAN										
313	Selayar	2,11	12,27	37,76	0,12	14,34	69,04	0,77	8,62	31,30
314	Bulukumba	0,34	7,22	26,79	1,76	22,48	68,84	0,51	8,38	33,70
315	Bantaeng	0,44	9,18	27,72	0,00	12,43	71,11	0,28	7,53	15,80
316	Jeneponto	0,41	13,06	25,78	0,27	11,07	66,99	0,39	7,75	36,30
317	Takalar	0,41	8,29	20,56	0,00	10,38	67,90	0,27	8,00	35,40
318	Gowa	0,32	7,42	18,94	0,00	20,29	70,89	0,74	8,84	21,10
319	Sinjai	0,44	8,55	25,60	0,45	22,62	67,92	0,48	8,19	33,50
320	Maros	0,37	9,65	17,05	0,14	21,50	69,45	0,74	8,15	34,70

NO.	PROVINSI/ KABUPATEN	NCPR	POV	FOOD	ELEC	WATER	LIFE	HEALTH	SCHOOL	STUNTING
321	Pangkajene dan Kepulauan	0,56	13,40	13,98	1,87	24,18	67,36	0,40	8,87	30,00
322	Barru	0,30	8,46	19,92	0,40	19,02	69,55	0,99	8,91	22,10
323	Bone	0,16	10,53	5,79	0,65	22,10	67,85	1,26	7,85	26,00
324	Soppeng	0,14	7,48	13,73	0,50	22,95	70,50	0,86	8,58	24,00
325	Wajo	0,11	6,73	18,54	0,01	20,04	68,10	1,47	7,98	27,40
326	Sidenreng Rappang	0,12	5,14	19,71	0,00	24,51	70,74	0,99	8,43	26,40
327	Pinrang	0,17	8,90	28,67	0,26	22,62	70,49	0,91	8,82	17,60
328	Enrekang	0,70	12,69	26,02	0,25	26,74	71,34	1,23	8,96	34,90
329	Luwu	0,23	12,71	27,34	0,28	34,16	71,00	1,23	9,19	32,10
330	Tana Toraja	0,74	12,48	33,12	0,29	48,81	73,99	1,49	8,63	36,90
331	Luwu Utara	0,26	12,66	17,99	0,05	20,67	69,36	4,12	8,52	15,50
332	Luwu Timur	0,25	6,93	15,97	0,12	20,83	71,19	3,09	8,83	26,00
333	Toraja Utara	0,58	12,12	35,69	0,71	40,06	73,83	0,84	9,03	28,70
SULAWESI TENGGARA										
334	Buton	1,85	13,77	26,83	0,23	17,89	68,56	1,64	8,81	37,20
335	Muna	2,03	14,07	20,23	0,34	27,59	70,56	0,83	8,24	29,20
336	Konawe	0,32	13,02	12,43	0,00	17,39	70,44	2,07	9,64	27,80
337	Kolaka	0,80	11,80	21,10	0,00	17,27	71,42	1,94	9,82	23,80
338	Konawe Selatan	0,64	11,26	15,02	0,01	10,60	71,02	3,16	8,71	33,60
339	Bombana	0,41	10,73	24,82	0,28	5,66	69,34	3,27	8,39	30,40
340	Wakatobi	3,54	14,81	14,16	0,42	30,22	70,72	0,50	8,62	31,90
341	Kolaka Utara	2,82	13,57	20,19	0,06	9,23	70,47	2,58	9,22	31,80

NO.	PROVINSI/ KABUPATEN	NCPR	POV	FOOD	ELEC	WATER	LIFE	HEALTH	SCHOOL	STUNTING
342	Buton Utara	0,97	14,06	13,11	0,67	11,93	71,02	2,36	8,94	33,90
343	Konawe Utara	1,36	13,48	14,75	0,13	12,53	69,68	4,72	9,54	24,70
344	Kolaka Timur	0,27	14,04	14,02	0,13	19,30	73,01	4,62	8,83	31,30
345	Konawe Kepulauan	5,00	15,90	14,47	0,00	21,11	68,52	1,80	9,33	31,30
346	Muna Barat	0,83	14,03	17,12	3,42	34,15	70,46	1,15	8,58	24,40
347	Buton Tengah	2,81	15,43	12,79	0,12	10,97	67,90	1,07	6,88	36,80
348	Buton Selatan	1,27	14,76	29,53	0,24	48,86	67,86	0,56	7,89	37,10
GORONTALO										
349	Boalemo	0,24	18,38	47,86	1,18	16,23	69,92	1,97	8,21	16,00
350	Gorontalo	0,43	17,48	33,79	1,45	16,35	68,09	1,06	8,63	34,70
351	Pohuwato	0,26	17,64	46,06	0,09	3,40	64,95	4,97	8,28	18,40
352	Bone Bolango	0,80	15,51	33,85	0,42	11,21	69,24	1,84	8,91	27,10
353	Gorontalo Utara	0,31	17,03	50,67	0,60	13,44	66,67	2,24	7,85	30,50
SULAWESI BARAT										
354	Majene	2,92	14,54	26,36	0,05	9,18	62,56	0,77	9,66	30,50
355	Polewali Mandar	0,52	16,08	32,06	0,30	30,23	63,20	0,90	8,01	28,10
356	Mamasa	0,58	14,31	25,18	0,94	70,51	71,45	2,49	8,58	37,60
357	Mamuju	0,81	7,57	12,87	1,09	24,96	68,66	2,25	8,31	32,80
358	Pasangkayu	5,00	4,79	21,29	0,43	17,14	67,33	4,10	8,51	27,90
359	Mamuju Tengah	1,56	7,32	11,42	0,83	20,96	69,37	2,99	7,88	27,90
MALUKU										
360	Kepulauan Tanimbar	5,00	24,47	8,86	1,18	24,47	63,99	4,93	10,35	25,10

NO.	PROVINSI/ KABUPATEN	NCPR	POV	FOOD	ELEC	WATER	LIFE	HEALTH	SCHOOL	STUNTING
361	Maluku Tenggara	5,00	21,79	6,00	1,14	32,96	65,78	1,27	9,74	34,00
362	Maluku Tengah	1,90	17,84	13,99	1,56	22,59	67,04	4,12	10,13	29,40
363	Buru	0,60	16,53	12,45	0,65	28,66	67,03	4,57	9,34	20,30
364	Kepulauan Aru	5,00	24,21	15,84	34,10	30,55	63,57	11,36	9,43	40,60
365	Seram Bagian Barat	2,30	22,39	19,90	2,66	45,87	62,61	4,36	9,78	31,40
366	Seram Bagian Timur	0,88	21,08	12,56	9,09	39,59	60,46	4,38	8,88	27,50
367	Maluku Barat Daya	1,31	28,78	21,31	4,16	39,73	63,39	5,56	9,31	29,90
368	Buru Selatan	4,35	15,28	20,34	6,53	36,60	66,96	4,08	8,92	35,50
MALUKU UTARA										
369	Halmahera Barat	5,00	8,74	7,39	3,44	42,60	66,91	3,39	8,65	26,10
370	Halmahera Tengah	5,00	11,44	4,21	0,19	35,58	65,06	3,12	9,48	29,50
371	Kepulauan Sula	5,00	8,17	17,48	1,63	47,20	63,94	4,27	9,34	18,80
372	Halmahera Selatan	5,00	5,68	19,72	6,55	38,45	66,50	4,27	8,41	30,40
373	Halmahera Utara	4,36	4,62	12,71	0,13	27,66	70,11	2,80	8,87	24,30
374	Halmahera Timur	0,84	12,47	16,77	0,91	36,14	69,90	8,88	8,88	19,00
375	Pulau Morotai	4,27	5,38	23,90	0,00	33,98	68,10	4,00	7,90	11,70
376	Pulau Taliabu	5,00	7,31	21,22	20,79	45,08	62,79	5,23	8,62	30,60
PAPUA BARAT										
377	Fak-Fak	5,00	21,38	9,95	2,65	50,37	69,02	10,15	10,77	30,50
378	Kaimana	5,00	14,57	19,07	12,83	43,79	65,62	24,48	9,86	25,70
379	Teluk Wondama	5,00	28,90	23,42	13,69	72,04	60,86	10,80	8,44	19,70
380	Teluk Bintuni	5,00	28,24	18,33	4,55	42,97	61,76	24,62	9,90	19,60

NO.	PROVINSI/ KABUPATEN	NCPR	POV	FOOD	ELEC	WATER	LIFE	HEALTH	SCHOOL	STUNTING
381	Manokwari	1,71	18,73	7,11	0,00	43,21	69,55	2,07	9,64	24,18
382	Sorong Selatan	5,00	18,11	20,70	20,76	79,81	67,01	10,30	8,23	31,30
383	Sorong	4,05	26,88	9,48	0,62	52,18	66,89	6,37	9,07	27,30
384	Raja Ampat	3,64	16,76	22,53	5,98	49,35	65,41	9,53	8,55	30,90
385	Tambrauw	3,42	31,23	29,51	5,81	47,00	61,14	56,66	8,33	31,80
386	Maybrat	5,00	30,28	4,43	0,24	61,00	65,82	15,17	9,98	37,87
387	Manokwari Selatan	1,01	27,80	11,84	3,60	18,33	68,09	5,89	8,48	20,40
388	Pegunungan Arfak	5,00	32,29	23,13	35,55	58,55	67,71	20,75	6,35	34,70
PAPUA										
389	Merauke	0,24	10,01	11,18	6,21	23,56	67,60	32,29	10,06	23,80
390	Jayawijaya	5,00	34,71	37,14	9,85	77,16	60,50	3,68	6,19	33,20
391	Jayapura	2,48	11,45	29,35	2,77	38,66	67,78	13,14	9,99	26,90
392	Nabire	2,64	23,35	11,85	4,12	21,23	68,73	10,20	10,45	22,20
393	Kepulauan Yapen	5,00	25,89	20,37	18,90	27,44	69,63	3,34	9,16	39,90
394	Biak Numfor	5,00	23,53	8,70	0,06	39,30	68,74	1,82	10,17	33,70
395	Paniai	5,00	35,39	58,08	40,36	99,01	67,22	7,96	3,97	49,59
396	Puncak Jaya	5,00	35,60	31,47	57,88	88,21	65,90	29,20	4,51	42,67
397	Mimika	0,74	13,55	8,46	7,21	20,61	72,83	9,57	9,96	24,70
398	Boven Digoel	5,00	19,80	22,29	11,35	39,30	60,97	35,64	9,16	31,40
399	Mappi	4,62	25,72	39,80	20,82	81,80	65,90	45,27	6,96	28,60
400	Asmat	2,16	24,36	42,02	51,30	83,74	59,19	40,28	6,30	21,26
401	Yahukimo	5,00	36,08	62,73	49,73	66,40	66,42	45,09	4,13	33,99

NO.	PROVINSI/ KABUPATEN	NCPR	POV	FOOD	ELEC	WATER	LIFE	HEALTH	SCHOOL	STUNTING
402	Pegunungan Bintang	5,00	29,79	47,68	70,03	79,27	64,99	39,40	3,51	32,71
403	Tolikara	5,00	31,57	80,25	9,58	97,09	66,33	10,42	2,38	51,64
404	Sarmi	2,71	13,21	27,48	5,58	40,22	67,07	37,92	10,03	26,50
405	Keerom	3,05	15,68	22,70	6,70	75,39	67,24	18,50	8,41	34,40
406	Waropen	3,74	29,16	22,18	12,17	59,99	66,92	35,11	8,86	26,20
407	Supiori	5,00	36,99	58,02	25,66	63,52	66,66	1,64	9,27	37,70
408	Mamberamo Raya	5,00	29,63	55,64	6,95	98,98	58,54	86,82	8,59	40,00
409	Nduga	5,00	37,09	59,71	38,00	98,15	55,72	26,28	4,64	42,44
410	Lanny Jaya	5,00	36,94	91,50	21,30	99,62	66,51	8,67	4,28	39,50
411	Mamberamo Tengah	5,00	35,42	90,22	14,40	99,00	64,14	32,55	5,00	33,00
412	Yalimo	5,00	30,97	21,48	38,06	50,98	65,95	17,30	6,78	25,75
413	Puncak	5,00	36,44	93,04	19,10	21,79	66,40	53,48	1,43	36,38
414	Dogiyai	4,48	29,20	49,11	58,86	66,66	66,39	12,95	4,30	51,11
415	Intan Jaya	5,00	40,01	61,16	69,89	92,00	66,12	60,62	1,28	65,04
416	Deiyai	5,00	38,66	52,50	27,85	92,00	65,93	20,93	2,23	50,20

Lampiran 2.

Data Indikator Individu Wilayah Kota

NO.	PROVINSI/ KOTA	POV	FOOD	ELEC	WATER	LIFE	HEALTH	SCHOOL	STUNTING
ACEH									
1	Kota Banda Aceh	7,04	5,10	0,00	0,11	72,02	0,01	12,74	21,70
2	Kota Sabang	14,59	12,81	0,69	3,95	70,98	0,20	10,94	25,60
3	Kota Langsa	10,53	14,84	0,00	6,24	69,78	0,17	11,27	25,60
4	Kota Lhokseumawe	10,73	19,78	0,00	1,81	72,06	0,08	11,31	20,70
5	Kota Subulussalam	16,41	26,01	0,00	55,11	64,41	1,40	8,78	29,60
SUMATERA UTARA									
6	Kota Sibolga	11,42	28,67	0,00	4,27	70,18	0,01	10,45	10,60
7	Kota Tanjung Balai	12,21	39,45	0,00	1,10	64,28	0,07	10,13	5,70
8	Kota Pematang Siantar	7,24	18,07	0,00	8,31	74,75	0,04	11,56	7,70
9	Kota Tebing Tinggi	9,49	13,91	0,00	28,45	71,63	0,04	10,88	10,40
10	Kota Medan	8,00	8,42	0,01	2,92	73,93	0,02	11,59	5,80
11	Kota Binjai	4,79	18,26	0,00	5,42	73,13	0,05	11,07	19,40
12	Kota Padang Sidempuan	6,85	25,93	0,29	37,86	70,20	0,14	11,11	26,10
13	Kota Gunungsitoli	14,78	15,08	0,67	20,47	72,09	0,25	8,52	18,90
SUMATERA BARAT									
14	Kota Padang	4,17	7,42	0,00	4,19	74,16	0,10	11,60	24,20
15	Kota Solok	3,05	11,90	0,00	2,11	74,39	0,05	11,27	16,30
16	Kota Sawah Lunto	2,27	13,74	0,17	6,49	70,69	0,44	10,45	19,50

NO.	PROVINSI/ KOTA	POV	FOOD	ELEC	WATER	LIFE	HEALTH	SCHOOL	STUNTING
17	Kota Padang Panjang	5,24	10,21	0,45	12,33	73,23	0,05	12,23	15,80
18	Kota Bukittinggi	4,11	10,18	0,00	2,64	75,13	0,02	11,77	20,10
19	Kota Payakumbuh	5,44	16,04	0,00	3,37	74,43	0,09	11,25	19,80
20	Kota Pariaman	4,20	26,37	0,00	14,32	70,95	0,07	10,93	17,70
RIAU									
21	Kota Pekanbaru	3,16	7,97	0,00	7,83	73,02	0,08	11,82	8,70
22	Kota Dumai	3,21	10,64	0,79	13,10	71,67	1,18	10,35	14,90
JAMBI									
23	Kota Jambi	8,24	7,96	0,00	9,34	73,29	0,04	11,34	13,50
24	Kota Sungai Penuh	3,00	12,43	0,00	8,00	72,86	0,32	10,04	4,10
SUMATERA SELATAN									
25	Kota Palembang	10,22	12,57	0,00	2,15	71,99	0,04	11,09	18,90
26	Kota Prabumulih	11,23	13,30	0,01	40,09	71,27	0,24	10,31	15,40
27	Kota Pagar Alam	8,88	34,69	0,56	41,12	67,70	0,87	9,68	23,30
28	Kota Lubuklinggau	12,65	18,81	0,00	33,15	70,25	0,26	9,51	17,50
BENGKULU									
29	Kota Bengkulu	14,71	4,54	0,05	12,26	70,74	0,05	11,90	6,70
LAMPUNG									
30	Kota Bandar Lampung	7,77	9,23	0,00	8,71	71,91	0,03	10,94	13,40
31	Kota Metro	7,28	7,19	0,00	9,50	72,12	0,04	10,80	7,10
KEP. BANGKA BELITUNG									
32	Kota Pangkal Pinang	4,27	3,48	0,00	7,03	73,96	0,07	10,39	20,70

NO.	PROVINSI/ KOTA	POV	FOOD	ELEC	WATER	LIFE	HEALTH	SCHOOL	STUNTING
KEP. RIAU									
33	Kota Batam	5,02	3,53	0,13	2,72	73,94	0,20	11,12	16,10
34	Kota Tanjung Pinang	7,95	3,94	0,00	12,38	72,85	0,10	10,90	15,20
DKI JAKARTA									
35	Kota Jakarta Selatan	3,10	4,01	0,00	13,99	74,78	0,01	11,63	16,60
36	Kota Jakarta Timur	4,20	8,73	0,00	8,10	75,12	0,01	11,77	16,80
37	Kota Jakarta Pusat	4,68	12,33	0,00	2,40	74,81	0,00	11,33	19,10
38	Kota Jakarta Barat	4,09	5,08	0,00	2,09	74,16	0,01	10,94	17,10
39	Kota Jakarta Utara	6,78	17,17	0,12	0,86	73,59	0,02	10,65	19,80
JAWA BARAT									
40	Kota Bogor	6,67	13,52	0,00	9,88	74,45	0,02	10,36	18,20
41	Kota Sukabumi	7,50	21,17	0,00	12,32	73,11	0,02	10,26	26,90
42	Kota Bandung	3,96	7,99	0,00	4,68	75,04	0,01	10,91	16,30
43	Kota Cirebon	9,16	16,56	0,01	3,34	73,08	0,01	10,35	19,90
44	Kota Bekasi	4,10	4,65	0,00	7,14	75,79	0,02	11,69	10,30
45	Kota Depok	2,38	3,82	0,00	19,52	75,23	0,03	11,42	14,30
46	Kota Cimahi	4,66	12,33	0,00	6,98	74,80	0,01	11,12	24,50
47	Kota Tasikmalaya	11,53	34,72	0,00	16,47	72,92	0,06	9,64	27,10
48	Kota Banjar	6,14	27,88	0,00	9,82	71,80	0,12	8,77	23,60
JAWA TENGAH									
49	Kota Magelang	6,11	10,67	0,00	6,68	77,22	0,01	11,08	15,40
50	Kota Surakarta	8,44	9,82	0,00	10,65	77,63	0,01	10,91	16,00

NO.	PROVINSI/ KOTA	POV	FOOD	ELEC	WATER	LIFE	HEALTH	SCHOOL	STUNTING
51	Kota Salatiga	4,66	1,32	0,00	10,74	77,93	0,03	11,30	16,90
52	Kota Semarang	4,23	5,43	0,00	4,00	77,90	0,03	10,57	15,70
53	Kota Pekalongan	6,81	16,15	0,00	21,88	74,60	0,03	9,53	28,20
54	Kota Tegal	7,68	8,62	0,00	1,64	74,77	0,02	9,90	22,30
D.I YOGYAKARTA									
55	Kota Yogyakarta	6,49	7,32	0,00	26,33	74,91	0,01	12,14	16,80
JAWA TIMUR									
56	Kota Kediri	7,15	6,55	0,00	40,23	74,67	0,02	10,77	18,60
57	Kota Blitar	7,30	7,68	0,00	27,37	74,66	0,03	10,87	17,70
58	Kota Malang	4,26	3,56	0,00	11,17	74,13	0,02	11,19	17,30
59	Kota Probolinggo	6,48	1,91	0,00	8,81	70,99	0,05	9,60	31,80
60	Kota Pasuruan	6,60	20,68	0,00	8,66	72,31	0,04	9,73	11,70
61	Kota Mojokerto	5,77	4,97	0,00	9,94	74,10	0,01	11,32	11,00
62	Kota Madiun	4,74	5,71	0,00	1,25	73,44	0,02	11,53	12,80
63	Kota Surabaya	4,65	7,30	0,00	0,00	74,75	0,02	10,71	1,60
64	Kota Batu	3,31	8,16	0,00	20,60	73,29	0,19	10,05	23,10
BANTEN									
65	Kota Tangerang	5,89	5,58	0,00	7,38	72,24	0,02	10,76	17,60
66	Kota Cilegon	3,98	7,45	0,00	11,17	67,39	0,08	10,32	22,00
67	Kota Serang	6,20	27,38	0,00	25,44	68,98	0,10	8,72	22,30
68	Kota Tangerang Selatan	2,57	1,43	0,00	20,29	73,11	0,02	11,44	9,20

NO.	PROVINSI/ KOTA	POV	FOOD	ELEC	WATER	LIFE	HEALTH	SCHOOL	STUNTING
BALI									
69	Kota Denpasar	2,68	2,00	0,00	0,49	75,69	0,01	11,37	10,80
NUSA TENGGARA BARAT									
70	Kota Mataram	8,62	28,65	0,00	6,16	72,55	0,01	9,45	25,60
71	Kota Bima	8,67	29,57	0,00	16,57	71,19	0,19	10,82	31,80
NUSA TENGGARA TIMUR									
72	Kota Kupang	8,61	3,27	0,03	21,61	70,52	0,05	11,36	29,90
KALIMANTAN BARAT									
73	Kota Pontianak	4,45	6,60	0,00	57,92	73,87	0,03	10,34	16,70
74	Kota Singkawang	4,70	7,58	0,07	47,34	72,81	0,30	8,50	20,10
KALIMANTAN TENGAH									
75	Kota Palangka Raya	3,44	8,28	0,00	8,72	73,70	1,13	11,69	28,00
KALIMANTAN SELATAN									
76	Kota Banjarmasin	4,63	11,39	0,00	0,01	71,89	0,02	10,05	26,50
77	Kota Banjar Baru	3,92	7,25	0,00	13,93	72,62	0,18	11,05	12,40
KALIMANTAN TIMUR									
78	Kota Balikpapan	2,31	2,89	0,00	2,06	74,89	0,13	10,67	21,60
79	Kota Samarinda	4,81	2,22	0,00	0,89	74,68	0,16	11,41	24,40
80	Kota Bontang	4,11	4,02	0,23	0,01	74,67	0,13	11,12	27,40
KALIMANTAN UTARA									
81	Kota Tarakan	6,10	4,34	0,00	3,61	74,08	0,17	10,57	14,80

NO.	PROVINSI/ KOTA	POV	FOOD	ELEC	WATER	LIFE	HEALTH	SCHOOL	STUNTING
SULAWESI UTARA									
82	Kota Manado	5,79	14,92	0,00	2,91	72,50	0,03	11,25	21,80
83	Kota Bitung	6,56	32,91	0,01	4,42	71,68	0,29	10,11	19,50
84	Kota Tomohon	5,60	34,71	0,00	19,78	72,84	0,19	11,24	10,50
85	Kota Kotamobago	5,03	23,29	0,00	17,60	71,34	0,11	10,08	20,50
SULAWESI TENGAH									
86	Kota Palu	6,56	10,97	0,00	13,53	71,45	0,10	11,43	22,10
SULAWESI SELATAN									
87	Kota Makassar	5,07	7,66	0,00	2,39	72,60	0,01	11,33	25,60
88	Kota Pare-Pare	5,34	8,34	0,63	6,50	71,78	0,07	10,82	26,70
89	Kota Palopo	7,69	16,23	0,04	3,66	71,39	0,14	11,29	25,50
SULAWESI TENGGARA									
90	Kota Kendari	4,59	11,06	0,00	3,79	74,07	0,08	12,08	25,70
91	Kota Bau-Bau	7,53	5,94	0,09	5,69	71,51	0,24	11,10	29,70
GORONTALO									
92	Kota Gorontalo	5,64	9,89	0,00	3,53	73,25	0,04	10,58	23,60
MALUKU									
93	Kota Ambon	5,25	2,14	0,12	13,20	71,37	0,09	12,05	20,70
94	Kota Tual	20,68	5,29	0,63	12,48	66,65	0,35	10,70	32,00
MALUKU UTARA									
95	Kota Ternate	3,39	5,25	0,00	6,54	71,70	0,12	11,74	21,10
96	Kota Tidore Kepulauan	6,35	7,71	0,00	37,75	70,10	1,44	10,17	21,30

NO.	PROVINSI/ KOTA	POV	FOOD	ELEC	WATER	LIFE	HEALTH	SCHOOL	STUNTING
PAPUA BARAT									
97	Kota Sorong	14,41	4,77	0,00	5,16	71,92	0,17	11,63	31,00
PAPUA									
98	Kota Jayapura	10,50	4,53	0,00	9,55	71,07	0,35	11,68	21,30

Lampiran 3.

Situasi Indikator Individu dan Ketahanan Pangan Komposit Wilayah Kabupaten

NO.	PROVINSI/ KABUPATEN	NCPR	POV	FOOD	ELEC	WATER	LIFE	HEALTH	SCHOOL	STUNTING	KOMPOSIT
ACEH											
1	Simeulue	4	4	5	6	6	4	6	6	2	6
2	Aceh Singkil	1	4	3	6	4	5	6	6	2	2
3	Aceh Selatan	4	5	5	6	5	4	6	4	1	5
4	Aceh Tenggara	5	5	4	6	4	5	6	6	2	6
5	Aceh Timur	5	5	5	6	5	5	6	5	3	6
6	Aceh Tengah	1	5	6	6	6	5	6	6	3	5
7	Aceh Barat	5	4	5	6	6	5	6	6	2	6
8	Aceh Besar	6	5	6	6	6	6	6	6	2	6
9	Pidie	6	4	4	6	5	5	6	6	3	6
10	Bireuen	5	5	5	6	6	6	6	6	2	6
11	Aceh Utara	6	4	3	6	5	5	6	6	3	6
12	Aceh Barat Daya	5	4	5	6	6	4	6	6	3	6
13	Gayo Lues	5	4	4	6	6	4	5	4	4	6
14	Aceh Tamiang	4	5	6	6	6	6	6	6	2	6
15	Nagan Raya	5	4	4	6	6	5	6	6	2	6
16	Aceh Jaya	6	5	4	6	6	5	6	5	2	6
17	Bener Meriah	1	4	6	6	2	5	6	6	2	2
18	Pidie Jaya	6	4	4	6	5	6	6	6	3	6

NO.	PROVINSI/ KABUPATEN	NCPR	POV	FOOD	ELEC	WATER	LIFE	HEALTH	SCHOOL	STUNTING	KOMPOSIT
SUMATERA UTARA											
19	Nias	5	4	5	6	2	6	6	3	3	5
20	Mandailing Natal	3	6	2	6	3	3	6	6	3	5
21	Tapanuli Selatan	5	6	4	6	3	4	6	6	4	6
22	Tapanuli Tengah	2	5	4	6	5	5	6	5	3	5
23	Tapanuli Utara	6	6	2	6	3	5	6	6	3	6
24	Toba Samosir	6	6	4	6	6	6	6	6	3	6
25	Labuhan Batu	2	6	6	6	4	6	6	6	3	6
26	Asahan	1	6	6	6	6	5	6	6	4	6
27	Simalungun	5	6	5	6	4	6	6	6	4	6
28	Dairi	6	6	5	6	5	6	6	6	2	6
29	Karo	6	6	3	6	4	6	6	6	3	6
30	Deli Serdang	4	6	6	6	6	6	6	6	2	6
31	Langkat	3	6	5	6	6	5	6	5	4	6
32	Nias Selatan	2	4	3	6	2	5	6	3	2	4
33	Humbang Hasundutan	6	6	4	6	4	6	6	6	4	6
34	Pakpak Bharat	4	6	5	6	3	4	6	6	3	5
35	Samosir	6	5	4	6	4	6	6	6	3	6
36	Serdang Bedagai	6	6	5	6	5	5	6	6	4	6
37	Batu Bara	4	5	6	6	5	5	6	6	4	6
38	Padang Lawas Utara	3	6	4	6	4	5	6	6	3	5
39	Padang Lawas	3	6	5	6	5	5	6	6	4	6

NO.	PROVINSI/ KABUPATEN	NCPR	POV	FOOD	ELEC	WATER	LIFE	HEALTH	SCHOOL	STUNTING	KOMPOSIT
40	Labuhan Batu Selatan	1	6	6	6	6	5	6	6	4	3
41	Labuhan Batu Utara	4	6	5	6	5	6	6	6	4	6
42	Nias Utara	5	3	4	6	4	6	6	3	3	5
43	Nias Barat	4	3	6	6	1	5	6	3	3	4
SUMATERA BARAT											
44	Kepulauan Mentawai	1	5	5	5	1	4	5	4	2	3
45	Pesisir Selatan	6	6	6	6	6	6	6	6	3	6
46	Solok	6	6	5	6	5	5	6	5	3	6
47	Sijunjung	5	6	6	6	6	5	6	6	3	6
48	Tanah Datar	6	6	6	6	6	6	6	6	4	6
49	Padang Pariaman	5	6	6	6	6	5	6	5	4	6
50	Agam	5	6	5	6	6	6	6	6	3	6
51	Limapuluh Koto	6	6	5	6	5	6	6	4	3	6
52	Pasaman	6	6	5	6	5	5	6	4	3	6
53	Solok Selatan	6	6	6	6	6	5	5	6	4	6
54	Dharmas Raya	4	6	6	6	6	6	6	6	4	6
55	Pasaman Barat	5	6	5	6	5	5	6	6	3	6
RIAU											
56	Kuantan Sengingi	1	6	6	6	6	5	6	6	3	5
57	Indragiri Hulu	1	6	6	6	6	6	5	5	4	4
58	Indragiri Hilir	1	6	5	6	1	5	5	4	4	5
59	Pelalawan	1	6	6	6	6	6	5	6	4	5

NO.	PROVINSI/ KABUPATEN	NCPR	POV	FOOD	ELEC	WATER	LIFE	HEALTH	SCHOOL	STUNTING	KOMPOSIT
60	Siak	1	6	6	6	6	6	6	6	4	6
61	Kampar	1	6	6	6	6	6	6	6	4	4
62	Rokan Hulu	1	6	6	6	6	6	6	6	4	3
63	Bengkalis	1	6	6	6	5	6	6	6	4	4
64	Rokan Hilir	1	6	6	6	5	6	6	5	4	5
65	Kepulauan Meranti	6	3	6	6	1	5	5	4	4	5
JAMBI											
66	Kerinci	5	6	5	6	5	6	6	4	4	6
67	Merangin	1	6	6	6	3	6	6	5	4	5
68	Sarolangun	1	6	6	6	4	5	6	4	4	4
69	Batang Hari	1	6	6	6	6	6	6	4	4	5
70	Muaro Jambi	1	6	6	6	6	6	6	6	4	5
71	Tanjung Jabung Timur	1	5	5	6	4	4	6	4	3	5
72	Tanjung Jabung Barat	1	6	6	6	3	5	6	5	4	5
73	Tebo	1	6	6	6	6	6	5	4	3	5
74	Bungo	1	6	6	6	6	5	6	5	4	5
SUMATERA SELATAN											
75	Ogan Komering Ulu	1	5	6	6	6	5	6	6	4	5
76	Ogan Komering Ilir	6	5	5	6	5	5	5	4	2	6
77	Muara Enim	1	5	6	6	5	5	6	4	3	5
78	Lahat	3	4	5	6	4	4	6	5	4	5
79	Musi Rawas	5	5	5	6	5	5	6	4	3	6

NO.	PROVINSI/ KABUPATEN	NCPR	POV	FOOD	ELEC	WATER	LIFE	HEALTH	SCHOOL	STUNTING	KOMPOSIT
80	Musi Banyuasin	5	5	6	6	6	5	5	4	4	6
81	Banyuasin	6	6	4	6	3	5	5	4	3	6
82	Ogan Komering Ulu Selatan	5	5	4	6	4	5	6	4	3	5
83	Ogan Komering Ulu Timur	6	6	6	6	5	5	6	4	4	6
84	Ogan Ilir	5	5	4	6	6	4	6	4	3	6
85	Empat Lawang	3	5	5	6	1	4	6	4	2	4
86	Penukal Abab Lematang Ilir	3	5	6	6	5	5	6	4	4	6
87	Musi Rawas Utara	1	4	5	6	4	4	5	4	2	3
BENGKULU											
88	Bengkulu Selatan	5	4	6	6	3	5	6	6	3	5
89	Rejang Lebong	4	5	6	6	3	5	6	6	3	5
90	Bengkulu Utara	1	5	5	6	4	5	6	4	3	5
91	Kaur	5	4	5	6	4	5	6	4	4	5
92	Seluma	4	4	5	6	3	5	6	4	3	5
93	Mukomuko	3	5	6	6	5	5	6	5	3	6
94	Lebong	6	5	4	6	4	3	6	4	4	6
95	Kepahiang	3	5	6	6	3	5	6	4	3	5
96	Bengkulu Tengah	1	6	6	6	2	5	6	4	3	4
LAMPUNG											
97	Lampung Barat	5	5	6	6	3	5	6	5	3	6
98	Tanggamus	4	5	5	6	3	5	6	3	4	6
99	Lampung Selatan	6	5	5	6	6	5	6	4	4	6

NO.	PROVINSI/ KABUPATEN	NCPR	POV	FOOD	ELEC	WATER	LIFE	HEALTH	SCHOOL	STUNTING	KOMPOSIT
100	Lampung Timur	6	5	6	6	5	6	6	4	4	6
101	Lampung Tengah	6	5	6	6	5	6	6	4	4	6
102	Lampung Utara	6	4	5	6	2	5	6	5	3	6
103	Way Kanan	6	5	6	6	4	5	6	4	3	6
104	Tulang Bawang	6	6	6	6	6	6	6	4	4	6
105	Pesawaran	6	5	6	6	4	5	6	4	4	6
106	Pringsewu	5	6	6	6	6	6	6	5	4	6
107	Mesuji	6	6	6	6	6	5	6	3	4	6
108	Tulang Bawang Barat	6	6	6	6	3	6	6	4	4	6
109	Pesisir Barat	6	5	6	6	3	4	6	5	4	6
KEP. BANGKA BELITUNG											
110	Bangka	1	6	6	6	6	6	6	5	3	5
111	Belitung	1	6	6	6	6	6	6	6	3	4
112	Bangka Barat	1	6	6	6	6	6	6	4	3	4
113	Bangka Tengah	1	6	6	6	6	6	6	3	4	4
114	Bangka Selatan	5	6	6	6	6	5	5	3	3	6
115	Belitung Timur	1	6	6	6	6	6	6	6	4	4
KEP. RIAU											
116	Karimun	1	6	6	6	6	6	6	6	4	4
117	Bintan	1	6	6	6	6	6	6	6	3	4
118	Natuna	1	6	6	6	6	4	6	6	4	4
119	Lingga	1	5	6	6	6	3	6	4	3	3

NO.	PROVINSI/ KABUPATEN	NCPR	POV	FOOD	ELEC	WATER	LIFE	HEALTH	SCHOOL	STUNTING	KOMPOSIT
120	Kepulauan Anambas	1	6	6	6	4	5	6	4	4	3
DKI JAKARTA											
121	Kep. Seribu	1	5	5	6	6	5	6	6	4	3
JAWA BARAT											
122	Bogor	1	6	5	6	5	6	6	5	3	5
123	Sukabumi	4	6	5	6	4	6	6	4	3	6
124	Cianjur	5	5	4	6	5	6	6	3	4	6
125	Bandung	1	6	6	6	6	6	6	6	3	6
126	Garut	5	6	4	6	4	6	6	4	3	6
127	Tasikmalaya	4	5	4	6	5	6	6	4	3	6
128	Ciamis	5	6	4	6	6	6	6	4	3	6
129	Kuningan	5	5	5	6	6	6	6	4	3	6
130	Cirebon	4	5	5	6	6	6	6	4	3	6
131	Majalengka	6	5	5	6	6	6	6	4	3	6
132	Sumedang	5	6	6	6	6	6	6	5	4	6
133	Indramayu	6	5	4	6	6	6	6	3	4	6
134	Subang	6	6	6	6	6	6	6	4	4	6
135	Purwakarta	4	6	5	6	6	6	6	4	3	6
136	Karawang	6	6	6	6	6	6	6	4	4	6
137	Bekasi	3	6	6	6	6	6	6	6	3	6
138	Bandung Barat	1	5	5	6	6	6	6	4	3	6
139	Pangandaran	5	6	5	6	6	6	6	4	3	6

NO.	PROVINSI/ KABUPATEN	NCPR	POV	FOOD	ELEC	WATER	LIFE	HEALTH	SCHOOL	STUNTING	KOMPOSIT
JAWA TENGAH											
140	Cilacap	6	5	6	6	6	6	6	3	4	6
141	Banyumas	3	5	6	6	5	6	6	4	3	6
142	Purbalingga	4	5	6	6	6	6	6	4	3	6
143	Banjarnegara	3	5	6	6	6	6	6	3	4	6
144	Kebumen	5	4	6	6	5	6	6	4	3	6
145	Purworejo	6	5	6	6	6	6	6	4	3	6
146	Wonosobo	3	4	6	6	6	6	6	3	3	6
147	Magelang	3	5	6	6	6	6	6	4	3	6
148	Boyolali	5	6	6	6	6	6	6	4	3	6
149	Klaten	5	5	6	6	6	6	6	6	3	6
150	Sukoharjo	6	6	6	6	6	6	6	6	3	6
151	Wonogiri	6	5	6	6	6	6	6	4	4	6
152	Karanganyar	5	6	6	6	6	6	6	6	3	6
153	Sragen	6	5	6	6	6	6	6	4	4	6
154	Grobogan	6	5	5	6	6	6	6	3	3	6
155	Blora	6	5	6	6	6	6	6	3	3	6
156	Rembang	6	5	5	6	6	6	6	4	4	6
157	Pati	6	6	6	6	6	6	6	4	4	6
158	Kudus	4	6	6	6	6	6	6	6	4	6
159	Jepara	5	6	6	6	6	6	6	4	4	6
160	Demak	6	5	6	6	6	6	6	4	4	6

NO.	PROVINSI/ KABUPATEN	NCPR	POV	FOOD	ELEC	WATER	LIFE	HEALTH	SCHOOL	STUNTING	KOMPOSIT
161	Semarang	3	6	6	6	6	6	6	4	4	6
162	Temanggung	1	6	6	6	6	6	6	4	3	6
163	Kendal	4	6	6	6	6	6	6	4	3	6
164	Batang	5	6	6	6	6	6	6	3	3	6
165	Pekalongan	3	6	6	6	6	6	6	4	3	6
166	Pemalang	5	4	5	6	6	6	6	3	4	6
167	Tegal	4	6	6	6	6	6	6	4	3	6
168	Brebes	5	4	6	6	6	5	6	3	3	6
D.I YOGYAKARTA											
169	Kulon Progo	5	4	6	6	6	6	6	6	3	6
170	Bantul	2	5	6	6	6	6	6	6	3	6
171	Gunung Kidul	6	4	6	6	4	6	6	3	3	6
172	Sleman	1	6	6	6	6	6	6	6	4	6
JAWA TIMUR											
173	Pacitan	6	5	6	6	6	6	6	4	3	6
174	Ponorogo	6	6	6	6	6	6	6	4	4	6
175	Trenggalek	5	5	6	6	5	6	6	4	4	6
176	Tulungagung	5	6	6	6	6	6	6	5	3	6
177	Blitar	5	6	6	6	6	6	6	4	3	6
178	Kediri	4	5	6	6	5	6	6	4	4	6
179	Malang	3	6	6	6	6	6	6	4	4	6
180	Lumajang	5	6	4	6	5	6	6	3	3	6

NO.	PROVINSI/ KABUPATEN	NCPR	POV	FOOD	ELEC	WATER	LIFE	HEALTH	SCHOOL	STUNTING	KOMPOSIT
181	Jember	5	6	5	6	5	6	6	3	3	6
182	Banyuwangi	5	6	6	6	6	6	6	4	3	6
183	Bondowoso	6	5	5	6	5	5	6	2	4	6
184	Situbondo	6	5	4	6	5	5	6	3	4	6
185	Probolinggo	5	4	5	6	5	5	6	2	2	5
186	Pasuruan	4	6	4	6	6	6	6	4	3	6
187	Sidoarjo	1	6	6	6	6	6	6	6	4	6
188	Mojokerto	5	6	5	6	6	6	6	6	4	6
189	Jombang	5	6	6	6	6	6	6	5	4	6
190	Nganjuk	6	5	6	6	6	6	6	4	4	6
191	Madiun	6	5	6	6	6	6	6	4	4	6
192	Magetan	6	6	6	6	6	6	6	4	4	6
193	Ngawi	6	5	5	6	6	6	6	4	4	6
194	Bojonegoro	6	5	6	6	6	6	6	3	4	6
195	Tuban	6	5	5	6	6	6	6	3	4	6
196	Lamongan	6	5	6	6	6	6	6	4	4	6
197	Gresik	5	5	6	6	6	6	6	6	4	6
198	Bangkalan	5	4	4	6	5	6	6	2	4	6
199	Sampang	6	3	4	6	6	5	6	1	4	6
200	Pamekasan	4	5	5	6	6	5	6	3	3	6
201	Sumenep	6	4	4	6	6	6	6	1	4	6

NO.	PROVINSI/ KABUPATEN	NCPR	POV	FOOD	ELEC	WATER	LIFE	HEALTH	SCHOOL	STUNTING	KOMPOSIT
BANTEN											
202	Pandeglang	6	6	5	6	3	4	6	3	3	5
203	Lebak	5	6	4	6	3	5	6	3	2	5
204	Tangerang	1	6	6	6	6	6	6	6	3	6
205	Serang	5	6	6	6	6	4	6	4	3	6
BALI											
206	Jembrana	4	6	6	6	6	6	6	4	4	6
207	Tabanan	6	6	6	6	6	6	6	6	4	6
208	Badung	3	6	6	6	6	6	6	6	4	6
209	Gianyar	4	6	6	6	6	6	6	6	4	6
210	Klungkung	4	6	6	6	6	6	6	4	4	6
211	Bangli	1	6	6	6	5	6	6	4	4	6
212	Karangasem	3	6	6	6	6	6	6	2	4	6
213	Buleleng	1	6	6	6	6	6	6	3	4	6
NUSA TENGGARA BARAT											
214	Lombok Barat	4	5	3	6	6	5	6	3	4	6
215	Lombok Tengah	6	5	4	6	6	5	6	3	4	6
216	Lombok Timur	4	4	3	6	5	4	6	4	3	5
217	Sumbawa	6	5	6	6	6	5	6	5	3	6
218	Dompu	6	5	4	6	5	5	6	6	4	6
219	Bima	6	5	3	6	6	5	6	5	2	6
220	Sumbawa Barat	6	5	5	6	6	5	6	5	4	6

NO.	PROVINSI/ KABUPATEN	NCPR	POV	FOOD	ELEC	WATER	LIFE	HEALTH	SCHOOL	STUNTING	KOMPOSIT
221	Lombok Utara	4	2	3	6	5	5	6	2	2	5
NUSA TENGGARA TIMUR											
222	Sumba Barat	4	2	6	5	6	5	6	3	1	5
223	Sumba Timur	5	2	6	6	4	4	6	4	3	5
224	Kupang	5	3	5	6	5	4	6	4	2	5
225	Timor Tengah Selatan	4	2	5	6	5	4	6	3	1	4
226	Timor Tengah Utara	5	3	5	6	6	5	6	4	1	5
227	Belu	3	5	6	6	5	4	6	4	1	5
228	Alor	2	4	5	6	3	3	6	4	2	4
229	Lembata	3	3	6	6	5	5	6	4	2	5
230	Flores Timur	1	5	6	6	6	4	6	4	2	5
231	Sikka	3	5	6	6	6	5	6	3	2	6
232	Ende	3	3	6	6	6	4	6	5	3	5
233	Ngada	6	5	6	6	6	5	6	6	3	6
234	Manggarai	5	4	5	6	6	5	6	4	2	6
235	Rote Ndao	4	2	6	6	6	4	6	4	2	5
236	Manggarai Barat	6	4	6	6	5	5	6	4	2	6
237	Sumba Tengah	5	2	5	5	3	5	6	3	2	4
238	Sumba Barat Daya	5	2	3	5	2	5	6	3	1	4
239	Nagekeo	3	5	6	6	4	5	6	4	3	5
240	Manggarai Timur	5	2	3	5	4	5	6	4	1	4
241	Sabu Raijua	1	2	4	6	3	3	6	3	2	3

NO.	PROVINSI/ KABUPATEN	NCPR	POV	FOOD	ELEC	WATER	LIFE	HEALTH	SCHOOL	STUNTING	KOMPOSIT
242	Malaka	5	5	5	6	4	4	6	3	1	5
KALIMANTAN BARAT											
243	Sambas	5	6	6	6	1	5	6	3	2	5
244	Bengkayang	4	6	6	6	4	6	6	4	2	6
245	Landak	5	6	5	6	3	6	5	4	2	6
246	Mempawah	4	6	6	6	1	6	6	4	3	5
247	Sanggau	3	6	6	6	4	6	5	4	3	6
248	Ketapang	3	6	6	6	4	6	4	4	3	6
249	Sintang	2	6	6	6	5	6	4	4	3	6
250	Kapuas Hulu	1	6	6	6	4	6	2	4	4	5
251	Sekadau	2	6	5	6	2	6	5	3	4	5
252	Melawi	1	5	5	6	4	6	4	4	2	3
253	Kayong Utara	5	6	6	6	2	5	5	3	3	6
254	Kubu Raya	1	6	6	6	1	6	5	4	3	5
KALIMANTAN TENGAH											
255	Kotawaringin Barat	1	6	6	6	6	6	5	5	4	4
256	Kotawaringin Timur	1	6	6	6	6	6	5	4	2	5
257	Kapuas	5	6	6	6	5	5	4	4	4	6
258	Barito Selatan	1	6	5	6	5	5	5	6	3	4
259	Barito Utara	2	6	6	6	6	6	5	5	4	6
260	Sukamara	1	6	6	6	6	6	5	5	3	4
261	Lamandau	1	6	6	6	6	5	4	5	4	3

NO.	PROVINSI/ KABUPATEN	NCPR	POV	FOOD	ELEC	WATER	LIFE	HEALTH	SCHOOL	STUNTING	KOMPOSIT
262	Seruyan	1	6	6	6	5	5	3	4	3	4
263	Katingan	4	6	5	6	5	4	2	6	2	6
264	Pulang Pisau	6	6	5	6	4	5	4	5	3	6
265	Gunung Mas	1	6	6	6	4	6	4	6	4	3
266	Barito Timur	4	6	6	6	5	5	6	6	3	6
267	Murung Raya	1	6	5	6	4	5	2	4	3	2
KALIMANTAN SELATAN											
268	Tanah Laut	4	6	6	6	6	6	6	4	1	6
269	Kota Baru	1	6	6	6	6	5	5	4	3	5
270	Banjar	4	6	6	6	6	5	6	4	2	6
271	Barito Kuala	6	6	5	6	5	4	6	4	4	6
272	Tapin	6	6	6	6	6	6	6	4	4	6
273	Hulu Sungai Selatan	6	6	6	6	5	4	6	4	3	6
274	Hulu Sungai Tengah	6	6	4	6	4	4	6	4	4	6
275	Hulu Sungai Utara	5	6	6	6	6	4	6	4	2	6
276	Tabalong	4	6	6	6	6	6	6	6	4	6
277	Tanah Bumbu	2	6	6	6	6	6	6	5	3	6
278	Balangan	4	6	6	6	6	5	6	4	2	6
KALIMANTAN TIMUR											
279	Paser	1	6	6	6	6	6	5	6	3	6
280	Kutai Barat	1	6	6	6	6	6	4	5	3	4
281	Kutai Kertanegara	3	6	6	6	6	6	4	6	4	6

NO.	PROVINSI/ KABUPATEN	NCPR	POV	FOOD	ELEC	WATER	LIFE	HEALTH	SCHOOL	STUNTING	KOMPOSIT
282	Kutai Timur	1	6	6	6	6	6	4	6	3	4
283	Berau	1	6	6	6	6	6	4	6	3	6
284	Penajam Paser Utara	4	6	6	6	6	6	6	5	3	6
285	Mahakam Ulu	1	5	6	6	6	6	1	6	3	3
KALIMANTAN UTARA											
286	Malinau	1	6	6	6	6	6	1	6	3	5
287	Bulungan	1	6	6	6	6	6	4	6	3	6
288	Tana Tidung	1	6	6	6	6	6	4	5	4	4
289	Nunukan	1	6	6	6	5	6	4	5	4	6
SULAWESI UTARA											
290	Bolaang Mongondow	6	6	5	6	6	6	6	5	3	6
291	Minahasa	1	6	6	6	6	6	6	6	3	6
292	Kepulauan Sangihe	1	5	5	6	6	6	6	6	4	4
293	Kepulauan Talaud	3	6	4	6	6	6	6	6	4	6
294	Minahasa Selatan	1	6	4	6	6	6	6	6	3	5
295	Minahasa Utara	1	6	5	6	6	6	6	6	4	6
296	Bolaang Mongondow Utara	4	6	5	6	6	5	6	5	3	6
297	Kep. Siau Tagulandang Biaro	1	6	6	6	4	6	6	6	3	3
298	Minahasa Tenggara	1	5	4	6	6	6	6	6	4	6
299	Bolaang Mongondow Selatan	2	5	4	6	6	4	6	5	2	5
300	Bolaang Mongondow Timur	1	6	5	6	6	5	6	5	3	5

NO.	PROVINSI/ KABUPATEN	NCPR	POV	FOOD	ELEC	WATER	LIFE	HEALTH	SCHOOL	STUNTING	KOMPOSIT
SULAWESI TENGAH											
301	Banggai Kepulauan	1	5	6	6	6	4	6	5	3	4
302	Banggai	6	6	6	6	5	6	6	5	3	6
303	Morowali	3	5	6	6	6	5	6	5	3	6
304	Poso	6	4	6	6	6	6	5	6	3	6
305	Donggala	4	4	6	6	5	5	6	4	2	5
306	Toli-Toli	5	5	6	6	5	4	6	5	3	6
307	Buol	3	5	6	6	6	5	6	6	2	6
308	Parigi Moutong	6	5	6	6	5	4	6	4	3	6
309	Tojo Una-Una	1	4	6	6	6	4	6	5	3	5
310	Sigi	6	5	6	6	4	6	6	6	3	6
311	Banggai Laut	1	5	6	6	6	4	6	5	3	3
312	Morowali Utara	5	5	6	6	6	5	5	5	3	6
SULAWESI SELATAN											
313	Selayar	1	5	5	6	6	5	6	5	2	5
314	Bulukumba	6	6	6	6	6	5	6	4	2	6
315	Bantaeng	6	6	6	6	6	6	6	4	4	6
316	Jeneponto	6	5	6	6	6	4	6	4	2	6
317	Takalar	6	6	6	6	6	5	6	4	2	6
318	Gowa	6	6	6	6	6	6	6	5	3	6
319	Sinjai	6	6	6	6	6	5	6	4	2	6
320	Maros	6	6	6	6	6	5	6	4	2	6

NO.	PROVINSI/ KABUPATEN	NCPR	POV	FOOD	ELEC	WATER	LIFE	HEALTH	SCHOOL	STUNTING	KOMPOSIT
321	Pangkajene dan Kepulauan	5	5	6	6	6	5	6	5	2	6
322	Barru	6	6	6	6	6	5	6	5	3	6
323	Bone	6	5	6	6	6	5	6	4	3	6
324	Soppeng	6	6	6	6	6	6	6	5	3	6
325	Wajo	6	6	6	6	6	5	6	4	3	6
326	Sidenreng Rappang	6	6	6	6	6	6	6	4	3	6
327	Pinrang	6	6	6	6	6	6	6	5	4	6
328	Enrekang	5	5	6	6	6	6	6	5	2	6
329	Luwu	6	5	6	6	5	6	6	6	2	6
330	Tana Toraja	5	5	5	6	4	6	6	5	2	6
331	Luwu Utara	6	5	6	6	6	5	6	5	4	6
332	Luwu Timur	6	6	6	6	6	6	6	5	3	6
333	Toraja Utara	5	5	5	6	4	6	6	6	3	6
SULAWESI TENGGARA											
334	Buton	1	5	6	6	6	5	6	5	2	5
335	Muna	1	5	6	6	6	6	6	4	3	5
336	Konawe	6	5	6	6	6	6	6	6	3	6
337	Kolaka	4	5	6	6	6	6	6	6	3	6
338	Konawe Selatan	5	5	6	6	6	6	6	5	2	6
339	Bombana	6	5	6	6	6	5	6	4	2	6
340	Wakatobi	1	5	6	6	5	6	6	5	2	4
341	Kolaka Utara	1	5	6	6	6	6	6	6	2	5

NO.	PROVINSI/ KABUPATEN	NCPR	POV	FOOD	ELEC	WATER	LIFE	HEALTH	SCHOOL	STUNTING	KOMPOSIT
342	Buton Utara	4	5	6	6	6	6	6	5	2	6
343	Konawe Utara	2	5	6	6	6	5	6	6	3	6
344	Kolaka Timur	6	5	6	6	6	6	6	5	2	6
345	Konawe Kepulauan	1	4	6	6	6	5	6	6	2	3
346	Muna Barat	4	5	6	6	5	6	6	5	3	6
347	Buton Tengah	1	4	6	6	6	5	6	3	2	4
348	Buton Selatan	2	5	6	6	4	5	6	4	2	5
GORONTALO											
349	Boalemo	6	4	4	6	6	5	6	4	4	6
350	Gorontalo	6	4	5	6	6	5	6	5	2	6
351	Pohuwato	6	4	4	6	6	4	6	4	4	6
352	Bone Bolango	4	4	5	6	6	5	6	5	3	6
353	Gorontalo Utara	6	4	3	6	6	4	6	4	2	6
SULAWESI BARAT											
354	Majene	1	5	6	6	6	3	6	6	2	4
355	Polewali Mandar	5	4	5	6	5	3	6	4	3	6
356	Mamasa	5	5	6	6	1	6	6	5	2	5
357	Mamuju	4	6	6	6	6	5	6	4	2	6
358	Pasangkayu	1	6	6	6	6	5	6	5	3	3
359	Mamuju Tengah	1	6	6	6	6	5	6	4	3	6
MALUKU											
360	Kepulauan Tanimbar	1	3	6	6	6	3	6	6	3	2

NO.	PROVINSI/ KABUPATEN	NCPR	POV	FOOD	ELEC	WATER	LIFE	HEALTH	SCHOOL	STUNTING	KOMPOSIT
361	Maluku Tenggara	1	3	6	6	5	4	6	6	2	2
362	Maluku Tengah	1	4	6	6	6	5	6	6	3	5
363	Buru	5	4	6	6	6	5	6	6	3	6
364	Kepulauan Aru	1	3	6	3	5	3	4	6	1	2
365	Seram Bagian Barat	1	3	6	6	4	3	6	6	2	4
366	Seram Bagian Timur	4	3	6	6	5	2	6	5	3	5
367	Maluku Barat Daya	2	2	6	6	5	3	5	6	3	4
368	Buru Selatan	1	4	6	6	5	4	6	5	2	3
MALUKU UTARA											
369	Halmahera Barat	1	6	6	6	4	4	6	5	3	3
370	Halmahera Tengah	1	5	6	6	5	4	6	6	3	3
371	Kepulauan Sula	1	6	6	6	4	3	6	6	4	3
372	Halmahera Selatan	1	6	6	6	5	4	6	4	2	3
373	Halmahera Utara	1	6	6	6	6	6	6	5	3	4
374	Halmahera Timur	4	5	6	6	5	5	5	5	4	6
375	Pulau Morotai	1	6	6	6	5	5	6	4	4	4
376	Pulau Taliabu	1	6	6	4	4	3	5	5	2	2
PAPUA BARAT											
377	Fak-Fak	1	3	6	6	3	5	4	6	2	2
378	Kaimana	1	5	6	5	4	4	2	6	3	2
379	Teluk Wondama	1	2	6	5	1	2	4	4	4	1
380	Teluk Bintuni	1	2	6	6	4	3	2	6	4	2

NO.	PROVINSI/ KABUPATEN	NCPR	POV	FOOD	ELEC	WATER	LIFE	HEALTH	SCHOOL	STUNTING	KOMPOSIT
381	Manokwari	1	4	6	6	4	5	6	6	3	5
382	Sorong Selatan	1	4	6	4	1	5	4	4	2	1
383	Sorong	1	2	6	6	3	4	5	6	3	2
384	Raja Ampat	1	4	6	6	4	4	5	5	2	3
385	Tambrauw	1	2	6	6	4	3	1	4	2	2
386	Maybrat	1	2	6	6	2	4	3	6	2	1
387	Manokwari Selatan	3	2	6	6	6	5	5	4	3	5
388	Pegunungan Arfak	1	2	6	3	3	5	2	2	2	1
PAPUA											
389	Merauke	6	5	6	6	6	5	1	6	3	6
390	Jayawijaya	1	2	5	6	1	2	6	2	2	1
391	Jayapura	1	5	6	6	5	5	4	6	3	4
392	Nabire	1	3	6	6	6	5	4	6	3	4
393	Kepulauan Yapen	1	2	6	5	6	5	6	6	2	2
394	Biak Namfor	1	3	6	6	5	5	6	6	2	2
395	Paniai	1	1	3	2	1	5	5	1	1	1
396	Puncak Jaya	1	1	5	1	1	4	2	1	1	1
397	Mimika	5	5	6	6	6	6	5	6	3	6
398	Boven Digoel	1	4	6	5	5	2	1	6	2	2
399	Mappi	1	2	5	4	1	4	1	3	3	1
400	Asmat	1	3	4	1	1	2	1	2	3	2
401	Yahukimo	1	1	2	2	2	4	1	1	2	1

NO.	PROVINSI/ KABUPATEN	NCPR	POV	FOOD	ELEC	WATER	LIFE	HEALTH	SCHOOL	STUNTING	KOMPOSIT
402	Pegunungan Bintang	1	2	4	1	1	4	1	1	2	1
403	Tolikara	1	2	1	6	1	4	4	1	1	1
404	Sarmi	1	5	6	6	4	5	1	6	3	4
405	Keerom	1	4	6	6	1	5	3	4	2	3
406	Waropen	1	2	6	5	3	4	1	5	3	2
407	Supiori	1	1	3	4	2	4	6	6	2	1
408	Mamberamo Raya	1	2	3	6	1	2	1	5	1	1
409	Nduga	1	1	3	3	1	1	2	1	1	1
410	Lanny Jaya	1	1	1	4	1	4	5	1	2	1
411	Mamberamo Tengah	1	1	1	5	1	4	1	1	2	1
412	Yalimo	1	2	6	3	3	4	3	3	3	1
413	Puncak	1	1	1	5	6	4	1	1	2	1
414	Dogiyai	1	2	4	1	2	4	4	1	1	1
415	Intan Jaya	1	1	2	1	1	4	1	1	1	1
416	Deiyai	1	1	3	4	1	4	2	1	1	1

Lampiran 4.

Situasi Indikator Individu dan Ketahanan Pangan Komposit Wilayah Kota

NO.	PROVINSI/ KOTA	POV	FOOD	ELEC	WATER	LIFE	HEALTH	SCHOOL	STUNTING	KOMPOSIT
ACEH										
1	Kota Banda Aceh	6	6	6	6	6	6	6	3	6
2	Kota Sabang	5	6	6	6	6	6	6	3	6
3	Kota Langsa	5	6	6	6	5	6	6	3	6
4	Kota Lhokseumawe	5	6	6	6	6	6	6	3	6
5	Kota Subulussalam	4	6	6	3	4	6	5	3	2
SUMATERA UTARA										
6	Kota Sibolga	5	6	6	6	6	6	6	4	6
7	Kota Tanjung Balai	5	5	6	6	4	6	6	4	6
8	Kota Pematang Siantar	6	6	6	6	6	6	6	4	6
9	Kota Tebing Tinggi	6	6	6	6	6	6	6	4	6
10	Kota Medan	6	6	6	6	6	6	6	4	6
11	Kota Binjai	6	6	6	6	6	6	6	4	6
12	Kota Padang Sidempuan	6	6	6	5	6	6	6	3	6
13	Kota Gunungsitoli	5	6	6	6	6	6	5	4	5
SUMATERA BARAT										
14	Kota Padang	6	6	6	6	6	6	6	3	6
15	Kota Solok	6	6	6	6	6	6	6	4	6
16	Kota Sawah Lunto	6	6	6	6	6	6	6	4	6

NO.	PROVINSI/ KOTA	POV	FOOD	ELEC	WATER	LIFE	HEALTH	SCHOOL	STUNTING	KOMPOSIT
17	Kota Padang Panjang	6	6	6	6	6	6	6	4	6
18	Kota Bukittinggi	6	6	6	6	6	6	6	3	6
19	Kota Payakumbuh	6	6	6	6	6	6	6	4	6
20	Kota Pariaman	6	6	6	6	6	6	6	4	6
RIAU										
21	Kota Pekanbaru	6	6	6	6	6	6	6	4	6
22	Kota Dumai	6	6	6	6	6	6	6	4	6
JAMBI										
23	Kota Jambi	6	6	6	6	6	6	6	4	6
24	Kota Sungai Penuh	6	6	6	6	6	6	6	4	6
SUMATERA SELATAN										
25	Kota Palembang	5	6	6	6	6	6	6	4	6
26	Kota Prabumulih	5	6	6	4	6	6	6	4	5
27	Kota Pagar Alam	6	5	6	4	5	6	6	3	4
28	Kota Lubuklinggau	5	6	6	5	6	6	6	4	5
BENGGULU										
29	Kota Bengkulu	5	6	6	6	6	6	6	4	6
LAMPUNG										
30	Kota Bandar Lampung	6	6	6	6	6	6	6	4	6
31	Kota Metro	6	6	6	6	6	6	6	4	6
KEP. BANGKA BELITUNG										
32	Kota Pangkal Pinang	6	6	6	6	6	6	6	3	6

NO.	PROVINSI/ KOTA	POV	FOOD	ELEC	WATER	LIFE	HEALTH	SCHOOL	STUNTING	KOMPOSIT
KEP. RIAU										
33	Kota Batam	6	6	6	6	6	6	6	4	6
34	Kota Tanjung Pinang	6	6	6	6	6	6	6	4	6
DKI JAKARTA										
35	Kota Jakarta Selatan	6	6	6	6	6	6	6	4	6
36	Kota Jakarta Timur	6	6	6	6	6	6	6	4	6
37	Kota Jakarta Pusat	6	6	6	6	6	6	6	4	6
38	Kota Jakarta Barat	6	6	6	6	6	6	6	4	6
39	Kota Jakarta Utara	6	6	6	6	6	6	6	4	6
JAWA BARAT										
40	Kota Bogor	6	6	6	6	6	6	6	4	6
41	Kota Sukabumi	6	6	6	6	6	6	6	3	6
42	Kota Bandung	6	6	6	6	6	6	6	4	6
43	Kota Cirebon	6	6	6	6	6	6	6	4	6
44	Kota Bekasi	6	6	6	6	6	6	6	4	6
45	Kota Depok	6	6	6	6	6	6	6	4	6
46	Kota Cimahi	6	6	6	6	6	6	6	3	6
47	Kota Tasikmalaya	5	5	6	6	6	6	6	3	6
48	Kota Banjar	6	6	6	6	6	6	5	3	6
JAWA TENGAH										
49	Kota Magelang	6	6	6	6	6	6	6	4	6
50	Kota Surakarta	6	6	6	6	6	6	6	4	6

NO.	PROVINSI/ KOTA	POV	FOOD	ELEC	WATER	LIFE	HEALTH	SCHOOL	STUNTING	KOMPOSIT
51	Kota Salatiga	6	6	6	6	6	6	6	4	6
52	Kota Semarang	6	6	6	6	6	6	6	4	6
53	Kota Pekalongan	6	6	6	6	6	6	6	3	6
54	Kota Tegal	6	6	6	6	6	6	6	3	6
D.I YOGYAKARTA										
55	Kota Yogyakarta	6	6	6	6	6	6	6	4	6
JAWA TIMUR										
56	Kota Kediri	6	6	6	4	6	6	6	4	6
57	Kota Blitar	6	6	6	6	6	6	6	4	6
58	Kota Malang	6	6	6	6	6	6	6	4	6
59	Kota Probolinggo	6	6	6	6	6	6	6	2	6
60	Kota Pasuruan	6	6	6	6	6	6	6	4	6
61	Kota Mojokerto	6	6	6	6	6	6	6	4	6
62	Kota Madiun	6	6	6	6	6	6	6	4	6
63	Kota Surabaya	6	6	6	6	6	6	6	4	6
64	Kota Batu	6	6	6	6	6	6	6	3	6
BANTEN										
65	Kota Tangerang	6	6	6	6	6	6	6	4	6
66	Kota Cilegon	6	6	6	6	5	6	6	3	6
67	Kota Serang	6	6	6	6	5	6	5	3	6
68	Kota Tangerang Selatan	6	6	6	6	6	6	6	4	6

NO.	PROVINSI/ KOTA	POV	FOOD	ELEC	WATER	LIFE	HEALTH	SCHOOL	STUNTING	KOMPOSIT
BALI										
69	Kota Denpasar	6	6	6	6	6	6	6	4	6
NUSA TENGGARA BARAT										
70	Kota Mataram	6	6	6	6	6	6	6	3	6
71	Kota Bima	6	6	6	6	6	6	6	2	6
NUSA TENGGARA TIMUR										
72	Kota Kupang	6	6	6	6	6	6	6	3	6
KALIMANTAN BARAT										
73	Kota Pontianak	6	6	6	3	6	6	6	4	6
74	Kota Singkawang	6	6	6	4	6	6	5	3	5
KALIMANTAN TENGAH										
75	Kota Palangka Raya	6	6	6	6	6	6	6	3	6
KALIMANTAN SELATAN										
76	Kota Banjarmasin	6	6	6	6	6	6	6	3	6
77	Kota Banjar Baru	6	6	6	6	6	6	6	4	6
KALIMANTAN TIMUR										
78	Kota Balikpapan	6	6	6	6	6	6	6	3	6
79	Kota Samarinda	6	6	6	6	6	6	6	3	6
80	Kota Bontang	6	6	6	6	6	6	6	3	6
KALIMANTAN UTARA										
81	Kota Tarakan	6	6	6	6	6	6	6	4	6

NO.	PROVINSI/ KOTA	POV	FOOD	ELEC	WATER	LIFE	HEALTH	SCHOOL	STUNTING	KOMPOSIT
SULAWESI UTARA										
82	Kota Manado	6	6	6	6	6	6	6	3	6
83	Kota Bitung	6	5	6	6	6	6	6	4	6
84	Kota Tomohon	6	5	6	6	6	6	6	4	6
85	Kota Kotamobago	6	6	6	6	6	6	6	3	6
SULAWESI TENGAH										
86	Kota Palu	6	6	6	6	6	6	6	3	6
SULAWESI SELATAN										
87	Kota Makasar	6	6	6	6	6	6	6	3	6
88	Kota Pare-Pare	6	6	6	6	6	6	6	3	6
89	Kota Palopo	6	6	6	6	6	6	6	3	6
SULAWESI TENGGARA										
90	Kota Kendari	6	6	6	6	6	6	6	3	6
91	Kota Bau-Bau	6	6	6	6	6	6	6	3	6
GORONTALO										
92	Kota Gorontalo	6	6	6	6	6	6	6	3	6
MALUKU										
93	Kota Ambon	6	6	6	6	6	6	6	3	6
94	Kota Tual	3	6	6	6	4	6	6	2	4
MALUKU UTARA										
95	Kota Ternate	6	6	6	6	6	6	6	4	6
96	Kota Tidore Kepulauan	6	6	6	5	6	6	6	4	5

NO.	PROVINSI/ KOTA	POV	FOOD	ELEC	WATER	LIFE	HEALTH	SCHOOL	STUNTING	KOMPOSIT
PAPUA BARAT										
97	Kota Sorong	5	6	6	6	6	6	6	2	6
PAPUA										
98	Kota Jayapura	5	6	6	6	6	6	6	3	6

Lampiran 5.

Data Indeks Ketersediaan, Indeks Keterjangkauan, Indeks Pemanfaatan dan Indeks Ketahanan Pangan Wilayah Kabupaten

NO.	PROVINSI/ KABUPATEN	2023				2024			
		KETER- SEDIAAN	KETER- JANGKAUAN	PEMAN- FAATAN	KOMPOSIT	KETER- SEDIAAN	KETER- JANGKAUAN	PEMAN- FAATAN	KOMPOSIT
ACEH									
1	Simeulue	75,01	69,21	73,10	72,51	86,75	72,56	74,36	77,54
2	Aceh Singkil	0,00	70,04	65,13	47,06	0,00	65,88	65,85	46,10
3	Aceh Selatan	82,10	74,57	60,27	71,11	85,00	77,88	62,44	73,84
4	Aceh Tenggara	95,35	80,37	64,38	78,47	91,67	75,02	67,15	76,87
5	Aceh Timur	90,19	75,72	65,02	75,78	87,40	77,73	69,13	77,19
6	Aceh Tengah	41,00	79,02	73,90	65,57	47,57	79,80	77,17	69,08
7	Aceh Barat	90,06	73,49	77,21	79,95	88,42	72,56	74,95	78,27
8	Aceh Besar	94,63	78,89	83,91	85,62	92,41	79,15	83,12	84,72
9	Pidie	93,11	66,54	69,48	75,69	94,75	66,82	70,55	76,69
10	Bireuen	91,41	76,93	77,10	81,34	90,19	77,44	76,36	80,83
11	Aceh Utara	95,06	69,55	68,19	76,66	92,57	68,76	71,81	77,12
12	Aceh Barat Daya	93,47	69,60	70,02	76,93	91,29	73,41	71,59	78,05
13	Gayo Lues	91,34	69,54	68,06	75,49	88,60	67,71	75,42	77,06
14	Aceh Tamiang	83,22	80,66	80,63	81,41	85,45	80,42	78,50	81,16
15	Nagan Raya	82,17	71,05	75,80	76,29	86,85	68,58	74,92	76,60
16	Aceh Jaya	93,81	77,29	72,21	80,22	95,35	76,49	70,35	79,69

NO.	PROVINSI/ KABUPATEN	2023				2024			
		KETER- SEDIAAN	KETER- JANGKAUAN	PEMAN- FAATAN	KOMPOSIT	KETER- SEDIAAN	KETER- JANGKAUAN	PEMAN- FAATAN	KOMPOSIT
17	Bener Meriah	0,00	72,66	59,69	45,67	0,00	73,46	62,35	46,98
18	Pidie Jaya	95,34	65,80	73,37	77,69	94,97	68,93	74,44	78,95
SUMATERA UTARA									
19	Nias	86,85	72,59	58,87	71,38	88,86	71,31	60,90	72,41
20	Mandailing Natal	80,98	77,05	55,32	69,54	80,45	75,11	59,68	70,54
21	Tapanuli Selatan	91,28	81,66	53,80	73,40	90,52	82,26	63,64	77,29
22	Tapanuli Tengah	73,11	75,77	68,79	72,18	74,26	77,23	70,90	73,81
23	Tapanuli Utara	95,45	75,25	65,19	77,29	96,05	75,15	66,96	78,14
24	Toba Samosir	95,83	78,12	77,26	83,09	96,48	79,48	78,86	84,33
25	Labuhan Batu	78,57	84,24	72,79	77,96	73,16	85,08	73,73	76,96
26	Asahan	59,79	84,20	76,98	73,99	63,09	85,22	80,38	76,65
27	Simalungun	90,26	82,00	74,34	81,41	90,70	82,83	75,90	82,42
28	Dairi	93,63	85,72	72,78	82,92	95,11	84,36	71,66	82,50
29	Karo	96,27	76,72	73,65	81,35	96,95	77,43	74,91	82,28
30	Deli Serdang	83,75	90,73	86,15	86,81	84,55	92,32	82,85	86,20
31	Langkat	74,43	80,11	76,33	76,89	81,58	80,90	77,94	79,92
32	Nias Selatan	74,47	70,49	55,46	65,67	76,57	67,10	56,93	65,87
33	Humbang Hasundutan	94,53	78,07	67,79	78,90	95,12	80,98	70,82	81,16
34	Pakpak Bharat	84,28	82,95	67,88	77,32	85,67	83,98	61,06	75,32
35	Samosir	93,77	76,95	69,19	78,89	94,96	77,39	71,60	80,35
36	Serdang Bedagai	98,27	83,07	73,39	83,76	97,85	84,74	76,45	85,35

NO.	PROVINSI/ KABUPATEN	2023				2024			
		KETER- SEDIAAN	KETER- JANGKAUAN	PEMAN- FAATAN	KOMPOSIT	KETER- SEDIAAN	KETER- JANGKAUAN	PEMAN- FAATAN	KOMPOSIT
37	Batu Bara	81,35	80,79	70,43	76,82	82,26	81,86	72,84	78,37
38	Padang Lawas Utara	68,41	80,45	64,35	70,40	78,79	79,10	69,43	75,14
39	Padang Lawas	69,45	81,62	63,95	70,90	77,74	82,40	71,76	76,75
40	Labuhan Batu Selatan	0,00	85,52	76,30	56,18	0,00	87,09	79,32	57,85
41	Labuhan Batu Utara	83,14	81,75	79,39	81,22	83,14	82,16	76,77	80,30
42	Nias Utara	88,81	63,58	69,89	73,67	90,20	63,71	67,48	73,17
43	Nias Barat	70,06	64,45	52,13	61,20	82,26	68,84	50,06	65,35
SUMATERA BARAT									
44	Kepulauan Mentawai	37,34	67,98	48,28	50,91	42,10	73,30	48,10	53,86
45	Pesisir Selatan	93,98	87,54	78,73	85,95	94,00	86,43	81,44	86,71
46	Solok	94,77	81,99	71,89	81,78	94,94	83,66	72,46	82,56
47	Sijunjung	86,08	87,81	69,41	79,93	88,76	89,15	71,69	82,05
48	Tanah Datar	95,43	87,56	81,64	87,55	95,66	90,42	83,95	89,40
49	Padang Pariaman	91,63	87,39	73,57	83,13	91,74	87,15	78,55	85,08
50	Agam	91,81	84,41	83,83	86,40	91,53	85,84	84,27	86,92
51	Limapuluh Koto	93,21	81,82	70,42	80,68	93,77	86,05	71,61	82,59
52	Pasaman	96,08	82,57	67,48	80,59	95,77	85,28	69,45	82,09
53	Solok Selatan	95,05	87,23	68,70	82,16	94,02	87,90	77,55	85,60
54	Dharmas Raya	83,93	92,86	78,37	84,38	82,65	92,82	80,85	84,98
55	Pasaman Barat	90,87	82,02	72,00	80,67	89,67	85,21	71,11	80,91

NO.	PROVINSI/ KABUPATEN	2023				2024			
		KETER- SEDIAAN	KETER- JANGKAUAN	PEMAN- FAATAN	KOMPOSIT	KETER- SEDIAAN	KETER- JANGKAUAN	PEMAN- FAATAN	KOMPOSIT
RIAU									
56	Kuantan Sengingi	44,43	85,80	74,68	68,94	58,06	88,50	74,58	73,80
57	Indragiri Hulu	0,00	90,90	80,19	59,35	0,00	91,09	83,45	60,71
58	Indragiri Hilir	71,90	86,62	54,33	69,29	70,49	85,33	56,38	69,30
59	Pelalawan	33,69	85,89	84,04	69,49	35,71	87,16	86,83	71,59
60	Siak	44,52	92,57	84,03	74,74	44,98	92,46	89,58	77,06
61	Kampar	0,00	86,02	79,47	57,59	0,00	88,36	82,95	59,69
62	Rokan Hulu	0,00	82,89	79,72	56,76	0,00	84,35	83,93	58,88
63	Bengkalis	16,61	88,38	75,45	61,68	28,49	88,45	76,66	65,75
64	Rokan Hilir	36,51	87,70	75,47	67,45	39,61	89,00	75,21	68,67
65	Kepulauan Meranti	100,00	69,55	49,02	70,47	100,00	69,62	50,66	71,15
JAMBI									
66	Kerinci	92,92	84,26	73,16	82,42	91,90	83,95	77,51	83,76
67	Merangin	62,81	82,97	69,83	71,66	66,76	88,26	71,26	75,01
68	Sarolangun	34,33	87,64	68,55	64,01	38,82	87,00	69,73	65,64
69	Batang Hari	54,32	83,28	73,77	70,79	54,44	86,47	79,63	74,13
70	Muaro Jambi	28,36	87,58	77,79	65,90	30,87	89,66	80,88	68,51
71	Tanjung Jabung Timur	70,14	80,84	64,81	71,22	68,65	80,57	63,05	69,99
72	Tanjung Jabung Barat	38,52	82,45	68,24	63,59	58,89	84,01	66,83	69,60
73	Tebo	50,48	86,61	74,41	70,89	47,89	89,39	75,45	71,36
74	Bungo	26,76	89,82	76,55	65,60	51,29	90,81	76,91	73,39

NO.	PROVINSI/ KABUPATEN	2023				2024			
		KETER- SEDIAAN	KETER- JANGKAUAN	PEMAN- FAATAN	KOMPOSIT	KETER- SEDIAAN	KETER- JANGKAUAN	PEMAN- FAATAN	KOMPOSIT
SUMATERA SELATAN									
75	Ogan Komering Ulu	65,44	81,63	75,59	74,36	57,43	82,22	77,78	73,01
76	Ogan Komering Ilir	96,73	74,87	68,89	79,04	96,52	76,76	68,89	79,54
77	Muara Enim	66,99	82,40	71,01	73,22	69,72	85,20	72,85	75,62
78	Lahat	80,19	74,21	66,38	72,87	79,80	76,03	71,10	75,19
79	Musi Rawas	92,43	76,51	72,20	79,56	91,21	75,53	69,10	77,66
80	Musi Banyuasin	89,22	77,55	72,65	79,09	87,55	76,75	75,47	79,48
81	Banyuasin	98,63	81,42	62,24	78,91	98,62	80,12	63,86	79,17
82	Ogan Komering Ulu Selatan	93,68	76,25	62,93	76,15	88,52	76,57	64,60	75,37
83	Ogan Komering Ulu Timur	98,77	86,03	72,70	84,52	98,76	84,93	75,17	85,17
84	Ogan Ilir	87,50	74,41	69,36	76,32	88,14	75,48	71,17	77,55
85	Empat Lawang	75,62	81,91	55,04	69,27	79,29	78,43	50,27	67,42
86	Penukal Abab Lematang Ilir	70,91	79,90	71,18	73,71	78,92	85,26	73,84	78,79
87	Musi Rawas Utara	45,80	69,89	64,00	60,31	47,77	70,25	60,43	59,58
BENGKULU									
88	Bengkulu Selatan	93,07	71,11	63,43	74,63	91,27	74,32	63,09	74,91
89	Rejang Lebong	79,13	77,19	64,43	72,67	82,00	76,99	63,54	73,11
90	Bengkulu Utara	63,91	83,64	66,19	70,74	70,27	80,81	68,24	72,62
91	Kaur	85,74	68,82	68,82	73,90	87,40	72,10	67,25	74,75
92	Seluma	85,28	71,21	61,72	71,64	84,98	72,48	60,93	71,61
93	Mukomuko	79,85	82,67	69,69	76,63	76,90	87,02	68,50	76,57

NO.	PROVINSI/ KABUPATEN	2023				2024			
		KETER- SEDIAAN	KETER- JANGKAUAN	PEMAN- FAATAN	KOMPOSIT	KETER- SEDIAAN	KETER- JANGKAUAN	PEMAN- FAATAN	KOMPOSIT
94	Lebong	94,69	76,59	61,13	75,84	94,60	76,44	64,36	77,06
95	Kepahiang	71,25	76,94	62,39	69,41	77,21	79,63	63,43	72,43
96	Bengkulu Tengah	39,46	84,34	60,99	61,54	43,15	83,88	60,07	62,14
LAMPUNG									
97	Lampung Barat	85,16	81,31	63,64	75,39	87,57	81,60	63,58	76,18
98	Tanggamus	83,52	79,87	62,93	74,19	86,44	81,81	64,82	76,40
99	Lampung Selatan	95,66	82,16	80,28	85,46	94,14	78,99	81,31	84,46
100	Lampung Timur	99,25	77,79	76,11	83,55	98,70	81,10	78,21	85,22
101	Lampung Tengah	99,63	81,79	75,32	84,55	99,76	82,50	75,64	84,93
102	Lampung Utara	98,48	70,32	60,74	74,94	99,54	72,95	62,69	76,82
103	Way Kanan	97,17	78,95	66,18	79,31	92,81	81,89	68,00	79,61
104	Tulang Bawang	99,36	86,62	79,28	87,51	99,93	88,09	80,93	88,78
105	Pesawaran	93,18	76,59	67,40	77,89	93,02	79,89	72,44	80,85
106	Pringsewu	92,08	84,31	86,16	87,38	91,33	86,04	85,34	87,35
107	Mesuji	99,37	90,76	72,93	86,21	99,21	90,98	77,81	88,18
108	Tulang Bawang Barat	99,69	89,66	66,97	83,59	98,73	89,20	68,41	83,74
109	Pesisir Barat	92,94	79,75	61,29	76,32	92,17	81,32	59,30	75,77
KEP. BANGKA BELITUNG									
110	Bangka	66,67	91,97	84,29	81,31	42,84	93,28	83,79	74,35
111	Belitung	0,00	91,79	85,73	61,83	0,00	93,18	85,97	62,34
112	Bangka Barat	15,42	94,19	77,20	63,76	0,00	96,34	78,37	60,25

NO.	PROVINSI/ KABUPATEN	2023				2024			
		KETER- SEDIAAN	KETER- JANGKAUAN	PEMAN- FAATAN	KOMPOSIT	KETER- SEDIAAN	KETER- JANGKAUAN	PEMAN- FAATAN	KOMPOSIT
113	Bangka Tengah	0,00	88,48	80,19	58,62	0,00	90,74	82,89	60,38
114	Bangka Selatan	88,77	90,99	72,53	82,94	89,41	93,79	74,78	84,87
115	Belitung Timur	0,00	90,52	87,34	62,09	0,00	92,58	85,63	62,02
KEP. RIAU									
116	Karimun	0,00	91,81	88,56	62,97	0,00	93,80	86,34	62,68
117	Bintan	0,00	91,73	80,14	59,58	0,00	92,19	81,90	60,42
118	Natuna	0,00	92,61	78,43	59,15	0,00	92,45	81,93	60,51
119	Lingga	0,00	79,72	71,23	52,41	0,00	83,64	69,81	53,02
120	Kepulauan Anambas	0,00	90,35	71,55	55,72	0,00	92,79	68,76	55,34
DKI JAKARTA									
121	Kep. Seribu	0,00	73,33	86,59	56,63	0,00	77,29	87,17	58,05
JAWA BARAT									
122	Bogor	47,79	86,41	75,78	70,57	48,33	84,79	75,18	70,01
123	Sukabumi	87,53	81,65	67,25	77,65	85,76	84,45	68,82	78,59
124	Cianjur	87,53	78,98	72,59	78,99	88,47	78,58	76,21	80,60
125	Bandung	73,77	89,94	83,43	82,48	70,89	89,12	81,55	80,63
126	Garut	91,91	76,06	69,14	78,04	91,77	78,46	69,81	78,99
127	Tasikmalaya	86,15	75,16	68,22	75,68	85,85	78,12	73,20	78,47
128	Ciamis	88,13	82,48	77,96	82,36	87,96	82,69	80,01	83,20
129	Kuningan	89,85	74,97	78,77	80,95	88,50	77,60	79,01	81,43
130	Cirebon	84,33	78,87	82,67	82,03	85,47	80,22	82,66	82,77

NO.	PROVINSI/ KABUPATEN	2023				2024			
		KETER- SEDIAAN	KETER- JANGKAUAN	PEMAN- FAATAN	KOMPOSIT	KETER- SEDIAAN	KETER- JANGKAUAN	PEMAN- FAATAN	KOMPOSIT
131	Majalengka	93,75	78,01	74,65	81,39	93,79	80,00	76,10	82,58
132	Sumedang	91,15	81,35	82,84	84,88	91,36	83,33	86,17	86,88
133	Indramayu	97,28	73,37	83,31	84,52	97,13	76,59	86,00	86,52
134	Subang	96,29	84,01	78,06	85,31	96,17	83,60	79,31	85,65
135	Purwakarta	82,71	82,80	76,92	80,42	82,83	82,88	76,20	80,19
136	Karawang	94,28	86,96	85,27	88,48	93,72	87,88	86,41	89,04
137	Bekasi	79,91	92,86	90,56	88,05	78,01	92,99	90,44	87,48
138	Bandung Barat	67,84	78,56	75,68	74,19	65,89	80,99	79,32	75,79
139	Pangandaran	91,11	80,81	79,98	83,57	90,77	82,90	79,41	83,86
JAWA TENGAH									
140	Cilacap	92,57	81,55	79,74	84,13	93,01	82,21	80,30	84,69
141	Banyumas	79,12	79,77	80,36	79,81	81,19	82,54	79,05	80,74
142	Purbalingga	80,96	77,40	76,35	78,05	82,12	76,55	77,16	78,47
143	Banjarnegara	82,06	77,38	81,13	80,28	78,00	78,28	81,29	79,40
144	Kebumen	90,19	76,05	76,16	80,34	90,12	77,75	77,11	81,21
145	Purworejo	91,77	82,25	81,33	84,74	92,28	83,51	83,70	86,22
146	Wonosobo	78,60	76,23	78,42	77,82	79,71	76,87	77,23	77,87
147	Magelang	77,33	83,67	79,03	79,91	77,30	84,43	79,21	80,20
148	Boyolali	91,81	85,24	85,50	87,31	91,42	86,83	85,57	87,70
149	Klaten	89,31	81,76	85,44	85,50	89,86	83,95	83,75	85,64
150	Sukoharjo	91,08	89,93	91,80	91,02	92,28	91,55	89,46	90,93

NO.	PROVINSI/ KABUPATEN	2023				2024			
		KETER- SEDIAAN	KETER- JANGKAUAN	PEMAN- FAATAN	KOMPOSIT	KETER- SEDIAAN	KETER- JANGKAUAN	PEMAN- FAATAN	KOMPOSIT
151	Wonogiri	97,94	81,25	85,08	87,79	98,34	84,30	85,30	88,91
152	Karanganyar	90,51	86,10	88,76	88,48	90,52	87,09	90,98	89,67
153	Sragen	96,41	80,12	88,03	88,17	96,68	81,18	90,02	89,37
154	Grobogan	96,98	77,27	87,25	87,18	96,25	78,05	87,51	87,29
155	Blora	97,00	79,24	85,17	86,94	96,71	81,98	87,31	88,53
156	Rembang	93,63	74,71	84,88	84,45	93,82	76,99	89,02	86,85
157	Pati	97,56	85,18	86,11	89,27	96,56	86,16	90,15	90,88
158	Kudus	86,91	89,40	90,03	88,91	83,97	90,82	90,94	88,81
159	Jejara	89,85	87,95	83,93	86,91	88,34	88,30	85,02	87,00
160	Demak	94,95	79,93	91,42	89,03	94,43	81,39	94,32	90,47
161	Semarang	80,91	88,44	86,36	85,35	81,28	89,60	85,75	85,57
162	Temanggung	61,45	87,67	82,75	77,84	61,87	85,85	86,48	78,91
163	Kendal	86,97	85,18	84,83	85,58	85,02	86,45	83,47	84,83
164	Batang	84,46	86,12	79,92	83,15	87,03	86,67	81,64	84,77
165	Pekalongan	80,25	84,01	81,32	81,81	81,37	84,07	77,53	80,65
166	Pemalang	88,52	73,29	80,75	80,84	88,24	74,68	82,33	81,81
167	Tegal	86,56	86,50	77,32	82,84	85,10	86,33	80,70	83,71
168	Brebes	87,29	75,16	71,20	77,21	87,01	76,33	74,48	78,79
D.I YOGYAKARTA									
169	Kulon Progo	89,61	78,74	87,58	85,54	89,78	80,54	86,59	85,73
170	Bantul	73,11	83,49	87,74	82,07	75,08	86,26	86,29	82,92

NO.	PROVINSI/ KABUPATEN	2023				2024			
		KETER- SEDIAAN	KETER- JANGKAUAN	PEMAN- FAATAN	KOMPOSIT	KETER- SEDIAAN	KETER- JANGKAUAN	PEMAN- FAATAN	KOMPOSIT
171	Gunung Kidul	98,15	75,04	75,05	81,98	98,82	79,42	73,74	82,97
172	Sleman	66,51	90,17	90,40	83,16	70,63	91,26	90,85	84,91
JAWA TIMUR									
173	Pacitan	90,82	76,59	76,40	80,78	92,19	79,93	78,25	82,94
174	Ponorogo	95,65	83,93	85,09	87,91	96,42	87,03	84,28	88,74
175	Trenggalek	90,29	80,74	76,48	81,90	89,54	82,79	78,67	83,17
176	Tulungagung	90,19	85,87	81,04	85,23	90,68	89,92	82,92	87,35
177	Blitar	88,53	86,52	84,38	86,27	88,98	86,98	84,11	86,43
178	Kediri	79,36	80,09	75,96	78,22	82,64	82,00	79,50	81,19
179	Malang	80,03	83,47	77,29	79,97	80,48	83,84	79,49	81,09
180	Lumajang	90,37	80,45	70,44	79,42	90,81	79,89	70,93	79,58
181	Jember	88,67	78,16	68,46	77,43	89,43	81,11	69,52	78,97
182	Banyuwangi	90,06	87,67	78,98	84,91	89,32	89,28	80,48	85,77
183	Bondowoso	92,99	74,75	62,95	75,50	93,59	75,77	69,09	78,44
184	Situbondo	91,04	76,62	65,87	76,64	92,76	76,32	73,75	80,22
185	Probolinggo	85,99	69,31	66,70	73,27	88,48	72,72	64,63	74,22
186	Pasuruan	85,69	80,55	74,99	79,87	85,29	80,31	76,58	80,31
187	Sidoarjo	60,65	93,77	92,95	83,51	62,28	95,21	93,09	84,49
188	Mojokerto	90,91	82,82	86,44	86,70	91,50	81,75	88,35	87,32
189	Jombang	89,74	82,37	80,90	83,99	90,40	83,95	85,31	86,43
190	Nganjuk	93,01	80,86	78,80	83,68	93,91	82,08	80,19	84,88

NO.	PROVINSI/ KABUPATEN	2023				2024			
		KETER- SEDIAAN	KETER- JANGKAUAN	PEMAN- FAATAN	KOMPOSIT	KETER- SEDIAAN	KETER- JANGKAUAN	PEMAN- FAATAN	KOMPOSIT
191	Madiun	95,34	83,23	79,37	85,32	95,94	82,23	81,93	86,22
192	Magetan	94,92	81,61	84,67	86,83	95,04	85,73	84,37	87,98
193	Ngawi	98,26	78,12	80,16	84,98	98,38	77,02	87,29	87,53
194	Bojonegoro	96,14	80,53	81,01	85,40	96,20	81,07	86,11	87,63
195	Tuban	96,21	74,50	83,00	84,41	96,26	74,86	86,29	85,85
196	Lamongan	96,98	81,11	84,65	87,28	96,61	82,58	91,35	90,30
197	Gresik	91,27	84,21	94,37	90,39	91,61	86,37	93,75	90,90
198	Bangkalan	88,22	62,67	69,91	73,23	87,87	66,60	74,20	76,02
199	Sampang	90,57	62,01	78,26	77,08	92,49	65,50	78,93	78,97
200	Pamekasan	84,91	72,47	80,56	79,44	84,18	75,25	78,12	79,08
201	Sumenep	95,18	61,46	75,08	77,02	93,82	66,91	78,88	79,77
BANTEN									
202	Pandeglang	93,25	81,73	55,95	74,87	92,22	83,20	57,52	75,63
203	Lebak	89,78	76,52	56,06	72,32	89,07	78,73	56,05	72,76
204	Tangerang	57,43	87,73	82,35	76,49	59,82	89,71	81,86	77,60
205	Serang	87,94	84,80	68,59	79,26	88,13	89,39	70,33	81,39
BALI									
206	Jembrana	80,36	92,65	86,72	86,59	83,43	93,63	86,31	87,64
207	Tabanan	91,53	93,89	87,28	90,54	92,01	96,58	89,83	92,51
208	Badung	80,90	99,08	94,00	91,59	81,49	99,68	96,37	92,90
209	Gianyar	86,89	96,82	92,60	92,16	85,93	97,10	94,66	92,77

NO.	PROVINSI/ KABUPATEN	2023				2024			
		KETER- SEDIAAN	KETER- JANGKAUAN	PEMAN- FAATAN	KOMPOSIT	KETER- SEDIAAN	KETER- JANGKAUAN	PEMAN- FAATAN	KOMPOSIT
210	Klungkung	82,41	94,00	86,51	87,53	82,51	93,53	86,63	87,47
211	Bangli	62,16	91,69	77,97	77,35	64,03	92,25	75,77	77,19
212	Karangasem	87,20	92,44	78,47	85,28	81,39	93,44	78,79	83,97
213	Buleleng	72,53	88,69	84,12	82,02	71,40	92,51	85,21	83,26
NUSA TENGGARA BARAT									
214	Lombok Barat	83,70	72,76	66,25	73,44	84,90	71,03	72,40	75,74
215	Lombok Tengah	91,89	72,37	65,79	75,60	92,31	73,92	74,08	79,50
216	Lombok Timur	84,97	67,58	64,29	71,48	85,77	69,27	67,02	73,32
217	Sumbawa	98,11	76,60	78,98	84,00	98,26	79,11	81,53	85,82
218	Dompu	98,31	74,19	67,74	78,85	97,71	75,36	73,32	81,24
219	Bima	96,39	69,87	69,50	77,68	97,17	70,43	69,95	78,26
220	Sumbawa Barat	96,00	77,56	84,88	86,02	96,17	77,73	85,76	86,47
221	Lombok Utara	83,62	53,52	61,93	65,92	85,49	57,39	63,80	68,39
NUSA TENGGARA TIMUR									
222	Sumba Barat	89,01	58,67	62,89	69,46	86,79	62,40	66,38	71,31
223	Sumba Timur	89,86	61,28	62,16	70,21	90,30	62,10	63,14	70,98
224	Kupang	83,37	68,09	58,95	69,02	87,85	63,83	62,37	70,45
225	Timor Tengah Selatan	83,51	56,40	64,08	67,61	81,81	60,15	61,09	67,02
226	Timor Tengah Utara	88,95	62,28	68,98	72,96	87,23	66,58	68,66	73,61
227	Belu	92,29	75,15	63,65	75,69	80,12	78,56	59,02	71,21
228	Alor	84,14	64,63	52,00	65,43	76,40	67,39	51,68	63,81

NO.	PROVINSI/ KABUPATEN	2023				2024			
		KETER- SEDIAAN	KETER- JANGKAUAN	PEMAN- FAATAN	KOMPOSIT	KETER- SEDIAAN	KETER- JANGKAUAN	PEMAN- FAATAN	KOMPOSIT
229	Lembata	81,38	65,68	62,20	69,00	81,69	65,54	64,85	70,11
230	Flores Timur	76,34	80,93	65,90	73,54	58,93	81,12	66,48	68,61
231	Sikka	81,84	80,20	71,14	77,07	81,35	80,02	72,02	77,22
232	Ende	85,18	65,70	70,38	73,42	77,39	68,80	72,68	72,93
233	Ngada	93,08	79,68	74,78	81,74	92,78	80,92	76,54	82,72
234	Manggarai	89,48	67,87	74,31	76,93	87,88	68,34	72,06	75,69
235	Rote Ndao	86,26	62,90	64,19	70,43	86,36	63,32	65,92	71,27
236	Manggarai Barat	95,50	73,45	65,20	76,76	94,15	76,03	67,35	78,00
237	Sumba Tengah	94,38	50,11	59,86	67,29	91,81	52,72	56,50	65,96
238	Sumba Barat Daya	91,03	47,19	52,99	62,66	90,11	48,40	52,44	62,53
239	Nagekeo	84,29	81,92	61,03	74,27	80,94	81,26	66,34	75,20
240	Manggarai Timur	90,33	53,55	58,81	66,69	89,46	54,29	59,49	66,92
241	Sabu Raijua	69,38	55,39	52,47	58,42	66,50	54,88	50,63	56,66
242	Malaka	92,19	73,23	58,44	73,00	88,91	75,33	56,27	71,78
KALIMANTAN BARAT									
243	Sambas	88,73	83,27	45,26	69,71	89,02	86,43	45,48	70,83
244	Bengkayang	89,60	89,18	69,31	81,36	85,33	89,66	71,87	81,24
245	Landak	91,21	80,04	63,80	76,89	89,69	80,12	65,05	76,96
246	Mempawah	82,39	90,63	55,33	74,04	83,80	89,81	54,43	73,85
247	Sanggau	77,87	90,80	68,05	77,82	76,70	92,07	69,70	78,51
248	Ketapang	83,27	84,64	64,04	75,99	80,18	85,99	68,29	77,17

NO.	PROVINSI/ KABUPATEN	2023				2024			
		KETER- SEDIAAN	KETER- JANGKAUAN	PEMAN- FAATAN	KOMPOSIT	KETER- SEDIAAN	KETER- JANGKAUAN	PEMAN- FAATAN	KOMPOSIT
249	Sintang	69,97	84,12	73,09	75,46	72,19	86,40	71,49	76,17
250	Kapuas Hulu	65,80	80,99	64,83	69,97	67,06	84,91	72,10	74,43
251	Sekadau	76,54	85,30	57,50	71,55	76,32	84,73	63,81	73,84
252	Melawi	25,67	76,55	60,33	54,80	32,35	78,26	65,96	59,56
253	Kayong Utara	90,67	84,23	57,00	75,27	89,72	86,85	58,90	76,53
254	Kubu Raya	72,46	90,17	49,55	68,61	66,71	93,26	52,28	68,90
KALIMANTAN TENGAH									
255	Kotawaringin Barat	0,00	94,25	79,98	60,27	0,00	95,87	83,77	62,27
256	Kotawaringin Timur	58,20	89,35	73,57	73,69	56,90	91,39	71,37	73,03
257	Kapuas	92,14	85,66	68,13	80,59	91,01	88,25	72,21	82,66
258	Barito Selatan	44,26	87,77	66,85	66,35	41,69	87,13	71,11	67,09
259	Barito Utara	82,52	88,47	79,30	83,01	73,32	88,80	82,52	81,65
260	Sukamara	3,26	91,64	78,92	60,04	9,74	93,46	77,05	61,78
261	Lamandau	5,97	90,19	75,13	58,90	0,00	93,48	78,23	59,34
262	Seruyan	20,59	87,07	67,37	59,25	36,15	87,18	70,08	65,03
263	Katingan	82,97	87,35	64,11	76,74	86,42	87,57	64,48	77,99
264	Pulang Pisau	96,79	92,03	61,71	81,33	96,48	88,76	65,76	81,88
265	Gunung Mas	0,00	88,52	72,32	55,49	0,00	89,50	73,83	56,38
266	Barito Timur	80,13	90,81	72,51	80,29	81,77	89,90	74,15	81,16
267	Murung Raya	0,00	87,38	57,17	49,08	0,00	84,52	64,83	51,29

NO.	PROVINSI/ KABUPATEN	2023				2024			
		KETER- SEDIAAN	KETER- JANGKAUAN	PEMAN- FAATAN	KOMPOSIT	KETER- SEDIAAN	KETER- JANGKAUAN	PEMAN- FAATAN	KOMPOSIT
KALIMANTAN SELATAN									
268	Tanah Laut	89,38	92,25	72,40	83,45	84,84	91,64	69,10	80,59
269	Kota Baru	46,63	91,18	71,24	69,84	57,57	91,96	76,21	75,34
270	Banjar	85,92	91,98	70,64	81,63	83,95	93,95	70,43	81,54
271	Barito Kuala	95,95	87,58	64,46	80,84	96,11	86,49	70,17	82,85
272	Tapin	95,04	90,83	80,84	88,10	95,53	92,80	80,20	88,58
273	Hulu Sungai Selatan	87,71	90,53	69,58	81,31	92,56	91,30	70,07	83,19
274	Hulu Sungai Tengah	93,52	85,10	63,68	79,06	93,46	83,68	70,38	81,30
275	Hulu Sungai Utara	70,54	90,36	64,91	74,23	91,78	91,09	65,84	81,20
276	Tabalong	84,49	90,10	79,82	84,31	86,64	90,36	82,09	85,94
277	Tanah Bumbu	72,35	95,55	83,38	83,73	74,43	93,13	82,20	83,15
278	Balangan	80,47	90,49	76,63	81,94	81,78	92,17	76,29	82,70
KALIMANTAN TIMUR									
279	Paser	81,31	87,38	82,73	83,70	67,75	87,26	83,85	80,04
280	Kutai Barat	0,00	87,03	80,70	58,39	6,86	87,65	81,28	60,87
281	Kutai Kertanegara	78,27	91,28	86,67	85,53	80,09	90,95	89,65	87,17
282	Kutai Timur	19,13	87,09	84,74	65,76	4,40	89,91	83,37	61,64
283	Berau	76,02	94,43	85,50	85,33	63,23	94,86	86,21	81,91
284	Penajam Paser Utara	87,62	91,46	84,18	87,40	86,51	92,42	86,07	88,11
285	Mahakam Ulu	0,00	84,63	80,73	57,68	0,00	82,68	79,30	56,53

NO.	PROVINSI/ KABUPATEN	2023				2024			
		KETER- SEDIAAN	KETER- JANGKAUAN	PEMAN- FAATAN	KOMPOSIT	KETER- SEDIAAN	KETER- JANGKAUAN	PEMAN- FAATAN	KOMPOSIT
KALIMANTAN UTARA									
286	Malinau	55,65	91,15	72,60	73,08	59,18	91,14	73,93	74,67
287	Bulungan	59,18	88,08	82,33	77,11	57,44	89,33	81,46	76,61
288	Tana Tidung	0,00	94,64	80,37	60,54	0,00	93,60	82,92	61,25
289	Nunukan	69,38	91,09	70,06	76,17	68,03	92,04	76,95	78,80
SULAWESI UTARA									
290	Bolaang Mongondow	95,32	82,58	78,75	84,87	95,24	84,65	75,12	84,02
291	Minahasa	85,94	85,21	83,36	84,69	67,13	87,67	82,93	79,61
292	Kepulauan Sangihe	0,00	74,63	77,08	53,22	16,37	80,02	78,89	60,47
293	Kepulauan Talaud	74,06	79,16	76,37	76,51	80,22	78,94	79,03	79,36
294	Minahasa Selatan	91,19	78,19	80,97	83,20	55,94	80,72	79,56	72,82
295	Minahasa Utara	81,92	82,87	84,63	83,29	57,10	84,85	90,51	78,79
296	Bolaang Mongondow Utara	92,83	79,50	74,76	81,60	86,80	82,73	73,16	80,12
297	Kep. Siau Tagulandang Biaro	0,00	83,20	69,58	52,79	0,00	83,63	70,07	53,11
298	Minahasa Tenggara	88,14	74,09	79,41	80,44	63,70	75,40	85,23	75,82
299	Bolaang Mongondow Selatan	76,73	73,24	69,71	72,88	73,15	76,46	67,31	71,81
300	Bolaang Mongondow Timur	84,35	83,60	72,44	79,36	64,53	87,07	74,36	75,22
SULAWESI TENGAH									
301	Banggai Kepulauan	5,41	76,14	72,85	53,61	40,61	79,36	76,26	66,50
302	Banggai	93,92	90,69	75,83	85,72	94,79	90,02	74,24	85,14
303	Morowali	85,73	83,94	78,65	82,36	80,92	84,84	79,28	81,44

NO.	PROVINSI/ KABUPATEN	2023				2024			
		KETER- SEDIAAN	KETER- JANGKAUAN	PEMAN- FAATAN	KOMPOSIT	KETER- SEDIAAN	KETER- JANGKAUAN	PEMAN- FAATAN	KOMPOSIT
304	Poso	92,82	79,87	79,40	83,57	93,07	80,10	81,62	84,60
305	Donggala	84,30	73,83	62,07	72,27	84,63	75,73	64,65	73,97
306	Toli-Toli	88,20	82,93	69,59	79,18	87,52	84,55	69,41	79,39
307	Buol	91,27	80,69	78,81	83,11	79,88	82,21	78,37	79,97
308	Parigi Moutong	95,71	77,86	63,80	77,59	95,61	78,72	66,51	78,91
309	Tojo Una-Una	83,26	75,41	73,32	76,93	66,07	75,90	77,97	73,78
310	Sigi	92,45	81,75	64,77	78,17	92,72	81,01	69,85	80,06
311	Banggai Laut	0,00	75,04	70,66	50,77	0,00	77,29	71,81	51,91
312	Morowali Utara	89,19	83,11	77,07	82,52	89,21	81,29	75,15	81,21
SULAWESI SELATAN									
313	Selayar	57,63	77,94	77,99	71,87	59,12	77,55	77,57	72,03
314	Bulukumba	95,59	83,58	73,19	83,03	95,21	86,26	73,22	83,73
315	Bantaeng	94,44	83,77	79,81	85,38	93,07	84,10	83,61	86,59
316	Jeneponto	95,59	76,92	69,85	79,69	93,74	79,90	73,96	81,67
317	Takalar	93,05	88,96	74,46	84,39	93,82	87,16	75,84	84,63
318	Gowa	95,50	87,07	76,18	85,24	95,64	88,66	80,59	87,53
319	Sinjai	92,80	87,17	71,84	82,73	93,08	85,33	71,97	82,31
320	Maros	95,18	85,67	73,71	83,74	94,48	86,47	73,62	83,73
321	Pangkajene dan Kepulauan	90,87	78,32	71,79	79,47	90,67	82,37	72,73	81,00
322	Barru	97,45	86,82	81,06	87,71	96,01	87,03	79,39	86,67
323	Bone	99,17	86,64	70,29	83,86	98,84	88,42	73,70	85,66

NO.	PROVINSI/ KABUPATEN	2023				2024			
		KETER- SEDIAAN	KETER- JANGKAUAN	PEMAN- FAATAN	KOMPOSIT	KETER- SEDIAAN	KETER- JANGKAUAN	PEMAN- FAATAN	KOMPOSIT
324	Soppeng	99,59	89,10	74,37	86,35	99,20	89,91	77,91	87,90
325	Wajo	100,00	87,49	70,28	84,36	99,88	89,60	74,51	86,65
326	Sidenreng Rappang	99,90	92,09	74,80	87,52	99,68	91,19	76,65	87,92
327	Pinrang	99,34	86,97	78,26	87,20	98,72	84,10	80,22	86,94
328	Enrekang	91,02	80,69	76,51	82,12	87,83	80,28	74,69	80,31
329	Luwu	97,23	79,69	71,34	81,61	97,40	79,88	72,60	82,23
330	Tana Toraja	88,78	81,23	66,83	77,74	87,00	78,55	68,04	76,88
331	Luwu Utara	97,03	82,01	73,29	83,03	96,90	82,61	79,53	85,66
332	Luwu Timur	96,86	91,37	78,38	87,82	97,08	90,05	78,98	87,73
333	Toraja Utara	91,98	79,46	72,51	80,44	90,35	78,15	74,25	80,25
SULAWESI TENGGARA									
334	Buton	54,27	77,91	74,52	69,46	64,40	78,77	74,12	72,59
335	Muna	72,08	78,00	72,41	73,99	60,58	80,21	74,22	71,93
336	Konawe	94,75	82,37	77,74	84,23	95,64	83,74	80,20	85,89
337	Kolaka	85,41	84,57	86,42	85,56	85,84	82,79	82,75	83,69
338	Konawe Selatan	91,16	83,86	82,01	85,31	89,14	85,13	80,32	84,41
339	Bombana	94,71	85,53	78,88	85,63	93,67	82,97	80,85	85,33
340	Wakatobi	0,00	78,56	71,02	51,98	29,92	80,99	73,17	62,54
341	Kolaka Utara	25,81	81,59	83,33	65,55	44,55	80,90	81,55	70,26
342	Buton Utara	77,83	80,62	80,83	79,87	82,35	82,12	80,14	81,40
343	Konawe Utara	76,10	77,95	81,13	78,67	74,31	82,51	81,66	79,71

NO.	PROVINSI/ KABUPATEN	2023				2024			
		KETER- SEDIAAN	KETER- JANGKAUAN	PEMAN- FAATAN	KOMPOSIT	KETER- SEDIAAN	KETER- JANGKAUAN	PEMAN- FAATAN	KOMPOSIT
344	Kolaka Timur	97,29	81,34	82,01	86,40	96,70	82,03	79,81	85,54
345	Konawe Kepulauan	0,00	78,38	67,29	50,43	0,00	79,70	75,26	54,01
346	Muna Barat	85,77	76,79	70,38	76,92	85,28	80,34	73,43	79,06
347	Buton Tengah	46,41	79,23	73,19	66,97	44,78	80,71	73,55	67,07
348	Buton Selatan	59,12	76,65	59,52	64,54	76,09	76,82	60,35	70,01
GORONTALO									
349	Boalemo	97,60	68,73	78,78	81,41	97,20	67,12	81,54	81,91
350	Gorontalo	94,16	72,87	75,04	80,13	93,30	72,05	74,75	79,50
351	Pohuwato	98,31	71,11	81,29	83,34	96,83	68,79	80,06	81,71
352	Bone Bolango	79,30	76,22	79,03	78,27	85,75	74,67	80,48	80,32
353	Gorontalo Utara	96,48	71,14	71,95	79,07	95,75	68,11	74,30	78,88
SULAWESI BARAT									
354	Majene	50,04	78,17	69,66	66,33	42,46	78,01	74,14	65,80
355	Polewali Mandar	93,21	73,44	61,50	74,59	91,52	74,51	65,15	75,87
356	Mamasa	91,77	75,77	55,97	72,65	90,20	78,39	56,54	73,19
357	Mamuju	91,58	88,19	70,82	82,26	85,65	89,89	72,02	81,47
358	Pasangkayu	11,77	92,11	72,33	60,10	0,00	91,06	75,05	57,34
359	Mamuju Tengah	84,28	90,39	74,65	82,26	70,23	90,66	75,07	78,29
MALUKU									
360	Kepulauan Tanimbar	50,21	69,48	67,11	62,75	0,00	70,66	71,86	49,94
361	Maluku Tenggara	23,32	73,02	67,85	56,04	0,00	74,69	67,57	49,43

NO.	PROVINSI/ KABUPATEN	2023				2024			
		KETER- SEDIAAN	KETER- JANGKAUAN	PEMAN- FAATAN	KOMPOSIT	KETER- SEDIAAN	KETER- JANGKAUAN	PEMAN- FAATAN	KOMPOSIT
362	Maluku Tengah	67,18	75,23	73,72	72,21	63,37	77,11	74,44	71,92
363	Buru	92,02	80,23	72,93	80,85	89,88	79,34	73,61	80,21
364	Kepulauan Aru	0,00	61,91	63,58	44,01	0,00	60,55	62,47	43,15
365	Seram Bagian Barat	54,06	67,46	57,62	59,50	55,14	69,70	59,58	61,29
366	Seram Bagian Timur	83,39	67,55	58,75	68,78	84,19	71,67	59,53	70,57
367	Maluku Barat Daya	65,91	65,96	64,20	65,24	75,36	61,23	62,42	65,95
368	Buru Selatan	33,92	76,72	64,73	59,08	13,20	77,13	65,54	53,32
MALUKU UTARA									
369	Halmahera Barat	0,00	87,61	66,38	52,84	0,00	89,40	65,62	53,07
370	Halmahera Tengah	1,85	87,04	60,02	50,67	0,00	87,88	66,50	52,96
371	Kepulauan Sula	11,34	87,08	59,38	53,28	0,00	87,74	63,60	51,76
372	Halmahera Selatan	0,00	89,86	63,61	52,40	0,00	88,85	65,08	52,69
373	Halmahera Utara	78,69	93,02	74,21	81,20	13,05	93,73	75,76	62,34
374	Halmahera Timur	84,00	80,98	66,55	76,12	85,06	82,96	73,07	79,63
375	Pulau Morotai	0,00	90,16	66,63	53,70	14,87	89,73	73,32	60,71
376	Pulau Taliabu	0,00	79,58	59,98	47,87	0,00	82,80	58,59	48,28
PAPUA BARAT									
377	Fak-Fak	0,00	70,92	65,10	47,32	0,00	73,69	65,23	48,20
378	Kaimana	0,00	75,03	61,54	47,12	0,00	76,72	62,93	48,19
379	Teluk Wondama	0,00	51,61	43,63	32,93	0,00	58,05	48,37	36,76
380	Teluk Bintuni	0,00	58,93	58,00	40,88	0,00	62,62	60,84	43,12

NO.	PROVINSI/ KABUPATEN	2023				2024			
		KETER- SEDIAAN	KETER- JANGKAUAN	PEMAN- FAATAN	KOMPOSIT	KETER- SEDIAAN	KETER- JANGKAUAN	PEMAN- FAATAN	KOMPOSIT
381	Manokwari	57,12	74,93	68,10	66,85	67,17	78,35	70,38	71,81
382	Sorong Selatan	21,63	70,48	52,06	48,46	0,00	69,97	48,50	40,39
383	Sorong	9,68	62,76	63,16	46,99	19,46	67,73	61,79	50,88
384	Raja Ampat	0,00	71,91	56,36	44,12	27,74	74,89	59,09	54,42
385	Tambrauw	0,00	50,60	44,25	32,88	32,35	55,58	48,86	45,92
386	Maybrat	0,00	64,21	55,84	41,60	0,00	65,14	54,32	41,27
387	Manokwari Selatan	73,16	59,07	68,62	67,12	81,40	65,20	77,33	74,91
388	Pegunungan Arfak	0,00	48,39	45,89	32,87	0,00	48,43	52,50	35,53
PAPUA									
389	Merauke	97,58	83,66	71,77	83,08	97,19	86,11	72,70	84,07
390	Jayawijaya	0,00	46,29	34,48	27,68	0,00	48,23	39,84	30,40
391	Jayapura	62,75	82,30	71,56	72,14	51,43	80,20	68,50	66,89
392	Nabire	83,29	69,05	80,91	78,07	48,15	70,41	78,50	66,97
393	Kepulauan Yapen	78,02	60,40	70,44	69,70	0,00	61,18	71,11	46,80
394	Biak Namfor	0,00	69,81	72,17	49,81	0,00	72,12	68,99	49,23
395	Paniai	0,00	31,18	30,41	21,52	0,00	33,72	30,39	22,27
396	Puncak Jaya	0,00	37,68	34,58	25,14	0,00	36,37	33,20	24,19
397	Mimika	88,50	78,32	79,47	81,83	87,12	82,35	81,99	83,64
398	Boven Digoel	0,00	67,10	51,04	40,55	0,00	69,91	55,54	43,19
399	Mappi	41,55	58,62	44,50	47,85	7,78	55,47	41,16	35,44
400	Asmat	50,62	39,68	24,01	36,69	58,07	48,64	34,94	45,99

NO.	PROVINSI/ KABUPATEN	2023				2024			
		KETER- SEDIAAN	KETER- JANGKAUAN	PEMAN- FAATAN	KOMPOSIT	KETER- SEDIAAN	KETER- JANGKAUAN	PEMAN- FAATAN	KOMPOSIT
401	Yahukimo	0,00	24,93	36,17	21,95	0,00	29,18	42,16	25,62
402	Pegunungan Bintang	100,00	28,29	33,75	51,99	0,00	35,71	35,88	25,07
403	Tolikara	0,00	41,03	26,72	23,00	0,00	40,06	27,03	22,83
404	Sarmi	39,73	75,87	66,42	61,25	46,77	77,88	64,20	63,07
405	Keerom	75,85	73,29	67,94	71,92	39,75	75,95	48,76	54,21
406	Waropen	67,72	60,48	57,91	61,63	25,78	58,47	55,27	47,38
407	Supiori	0,00	33,51	50,90	30,41	0,00	35,60	55,03	32,69
408	Mamberamo Raya	0,00	43,04	24,00	22,51	0,00	49,93	20,29	23,09
409	Nduga	0,00	36,11	16,99	17,63	0,00	31,83	18,88	17,10
410	Lanny Jaya	0,00	27,45	33,40	21,60	0,00	27,56	32,66	21,33
411	Mamberamo Tengah	0,00	30,46	27,31	20,06	0,00	31,41	30,22	21,51
412	Yalimo	0,00	36,17	32,75	23,95	0,00	49,83	57,12	37,80
413	Puncak	0,00	33,67	24,99	20,10	0,00	28,73	53,74	30,12
414	Dogiyai	0,00	48,45	41,75	31,23	10,60	38,90	41,29	31,37
415	Intan Jaya	0,00	13,44	26,28	14,54	0,00	19,70	20,58	14,14
416	Deiyai	0,00	26,75	34,77	21,93	0,00	34,56	27,45	21,35

Lampiran 6.

Data Indeks Keterjangkauan, Indeks Pemanfaatan dan Indeks Ketahanan Pangan Wilayah Kota

NO.	PROVINSI/ KOTA	2023			2024		
		KETERJANGKAUAN	PEMANFAATAN	KOMPOSIT	KETERJANGKAUAN	PEMANFAATAN	KOMPOSIT
ACEH							
1	Kota Banda Aceh	89,27	85,09	86,97	89,45	86,74	87,96
2	Kota Sabang	69,22	77,69	73,88	70,99	76,11	73,80
3	Kota Langsa	82,29	72,58	76,95	82,47	74,42	78,05
4	Kota Lhokseumawe	81,85	79,71	80,67	82,07	83,82	83,03
5	Kota Subulussalam	69,66	8,62	36,09	70,72	16,90	41,12
SUMATERA UTARA							
6	Kota Sibolga	80,60	79,23	79,85	80,70	81,30	81,03
7	Kota Tanjung Balai	78,26	64,74	70,83	76,92	72,68	74,59
8	Kota Pematang Siantar	87,77	86,71	87,19	89,05	90,45	89,82
9	Kota Tebing Tinggi	84,35	68,83	75,82	84,55	71,38	77,31
10	Kota Medan	86,84	88,60	87,80	87,47	92,53	90,25
11	Kota Binjai	93,33	82,28	87,25	93,94	83,53	88,22
12	Kota Padang Sidempuan	88,01	55,08	69,90	88,40	57,34	71,32
13	Kota Gunungsitoli	72,48	59,12	65,13	70,67	62,40	66,12
SUMATERA BARAT							
14	Kota Padang	94,17	83,56	88,33	95,18	85,09	89,63
15	Kota Solok	97,48	89,10	92,87	97,42	89,20	92,90

NO.	PROVINSI/ KOTA	2023			2024		
		KETERJANGKAUAN	PEMANFAATAN	KOMPOSIT	KETERJANGKAUAN	PEMANFAATAN	KOMPOSIT
16	Kota Sawah Lunto	98,81	72,58	84,38	98,13	71,43	83,45
17	Kota Padang Panjang	93,25	86,58	89,58	90,85	83,94	87,05
18	Kota Bukittinggi	94,60	89,46	91,78	95,30	90,85	92,86
19	Kota Payakumbuh	92,21	85,57	88,56	92,65	86,62	89,33
20	Kota Pariaman	94,21	71,23	81,57	95,12	75,04	84,08
RIAU							
21	Kota Pekanbaru	97,40	83,60	89,81	97,20	88,11	92,20
22	Kota Dumai	93,60	66,35	78,61	93,25	62,44	76,30
JAMBI							
23	Kota Jambi	86,87	82,85	84,66	87,05	84,93	85,88
24	Kota Sungai Penuh	97,58	71,32	83,14	97,52	78,50	87,06
SUMATERA SELATAN							
25	Kota Palembang	82,57	83,87	83,29	83,09	84,05	83,62
26	Kota Prabumulih	80,43	59,33	68,83	81,04	57,53	68,11
27	Kota Pagar Alam	85,05	38,00	59,17	83,04	37,13	57,79
28	Kota Lubuklinggau	78,18	56,51	66,26	78,24	56,16	66,10
BENGGULU							
29	Kota Bengkulu	71,79	78,87	75,68	73,86	82,70	78,72
LAMPUNG							
30	Kota Bandar Lampung	87,11	80,31	83,37	87,99	81,91	84,64
31	Kota Metro	87,79	80,28	83,66	88,97	83,16	85,78

NO.	PROVINSI/ KOTA	2023			2024		
		KETERJANGKAUAN	PEMANFAATAN	KOMPOSIT	KETERJANGKAUAN	PEMANFAATAN	KOMPOSIT
KEP. BANGKA BELITUNG							
32	Kota Pangkal Pinang	94,42	81,68	87,42	94,98	80,96	87,27
KEP. RIAU							
33	Kota Batam	91,88	85,02	88,10	92,84	85,54	88,83
34	Kota Tanjung Pinang	83,83	72,77	77,75	87,63	79,62	83,22
DKI JAKARTA							
35	Kota Jakarta Selatan	96,18	82,47	88,64	97,32	84,95	90,52
36	Kota Jakarta Timur	94,92	86,35	90,21	95,12	89,09	91,81
37	Kota Jakarta Pusat	92,02	90,18	91,00	94,16	89,56	91,63
38	Kota Jakarta Barat	94,32	87,99	90,84	95,34	88,08	91,35
39	Kota Jakarta Utara	89,05	82,52	85,46	89,36	85,83	87,42
JAWA BARAT							
40	Kota Bogor	89,33	79,24	83,78	90,19	81,72	85,53
41	Kota Sukabumi	86,77	72,80	79,08	88,53	74,67	80,90
42	Kota Bandung	95,02	86,73	90,46	95,60	88,23	91,55
43	Kota Cirebon	83,89	83,67	83,77	85,17	82,64	83,78
44	Kota Bekasi	94,66	92,64	93,55	95,32	92,74	93,90
45	Kota Depok	98,46	82,11	89,47	98,76	82,49	89,81
46	Kota Cimahi	92,87	82,51	87,17	94,20	84,15	88,68
47	Kota Tasikmalaya	78,10	68,30	72,71	80,48	69,38	74,37
48	Kota Banjar	90,07	70,94	79,55	91,25	68,83	78,92

NO.	PROVINSI/ KOTA	2023			2024		
		KETERJANGKAUAN	PEMANFAATAN	KOMPOSIT	KETERJANGKAUAN	PEMANFAATAN	KOMPOSIT
JAWA TENGAH							
49	Kota Magelang	89,33	92,69	91,18	91,31	91,50	91,41
50	Kota Surakarta	85,85	85,77	85,80	86,65	88,51	87,67
51	Kota Salatiga	94,06	94,1	94,20	94,20	89,02	91,35
52	Kota Semarang	95,02	88,27	91,31	95,06	90,85	92,74
53	Kota Pekalongan	89,53	70,27	78,94	89,91	68,75	78,27
54	Kota Tegal	87,71	84,60	86,00	88,17	83,74	85,73
D.I YOGYAKARTA							
55	Kota Yogyakarta	90,29	77,24	83,11	90,55	79,03	84,21
JAWA TIMUR							
56	Kota Kediri	89,07	66,08	76,42	89,23	66,39	76,67
57	Kota Blitar	88,79	71,45	79,25	88,93	74,15	80,80
58	Kota Malang	94,78	77,49	85,27	95,00	83,66	88,76
59	Kota Probolinggo	90,23	71,65	80,01	90,57	68,85	78,62
60	Kota Pasuruan	90,79	73,81	81,45	90,33	79,11	84,16
61	Kota Mojokerto	91,57	88,40	89,83	91,99	87,11	89,30
62	Kota Madiun	94,00	91,25	92,49	94,04	90,85	92,29
63	Kota Surabaya	94,08	90,55	92,14	94,22	92,11	93,06
64	Kota Batu	95,94	67,25	80,16	96,90	68,55	81,31
BANTEN							
65	Kota Tangerang	91,99	81,81	86,39	91,75	81,14	85,92
66	Kota Cilegon	96,24	69,51	81,54	95,56	67,48	80,12

NO.	PROVINSI/ KOTA	2023			2024		
		KETERJANGKAUAN	PEMANFAATAN	KOMPOSIT	KETERJANGKAUAN	PEMANFAATAN	KOMPOSIT
67	Kota Serang	91,65	54,88	71,42	91,13	56,25	71,95
68	Kota Tangerang Selatan	98,52	78,35	87,43	98,38	80,72	88,67
BALI							
69	Kota Denpasar	97,58	94,35	95,80	98,16	94,91	96,37
NUSA TENGGARA BARAT							
70	Kota Mataram	86,27	70,85	77,79	86,29	75,13	80,15
71	Kota Bima	85,93	64,80	74,31	86,19	66,81	75,53
NUSA TENGGARA TIMUR							
72	Kota Kupang	86,24	67,35	75,85	86,17	67,57	75,94
KALIMANTAN BARAT							
73	Kota Pontianak	94,60	51,95	71,15	94,62	54,50	72,55
74	Kota Singkawang	93,85	47,07	68,12	93,78	47,40	68,27
KALIMANTAN TENGAH							
75	Kota Palangka Raya	96,16	66,06	79,61	96,64	67,63	80,69
KALIMANTAN SELATAN							
76	Kota Banjarmasin	94,04	78,73	85,62	94,26	78,55	85,62
77	Kota Banjar Baru	95,18	71,85	82,35	95,68	78,69	86,34
KALIMANTAN TIMUR							
78	Kota Balikpapan	98,62	85,49	91,40	98,90	84,95	91,23
79	Kota Samarinda	93,82	85,00	88,97	93,90	86,22	89,68
80	Kota Bontang	92,12	86,02	88,76	94,16	84,58	88,89

NO.	PROVINSI/ KOTA	2023			2024		
		KETERJANGKAUAN	PEMANFAATAN	KOMPOSIT	KETERJANGKAUAN	PEMANFAATAN	KOMPOSIT
KALIMANTAN UTARA							
81	Kota Tarakan	90,93	82,08	86,06	91,33	84,42	87,53
SULAWESI UTARA							
82	Kota Manado	91,83	80,01	85,33	91,95	83,98	87,56
83	Kota Bitung	90,07	73,37	80,89	90,38	75,15	82,00
84	Kota Tomohon	93,01	75,07	83,14	92,33	77,03	83,92
85	Kota Kotamobago	92,70	65,26	77,61	93,47	69,37	80,21
SULAWESI TENGAH							
86	Kota Palu	90,27	71,69	80,05	90,41	75,90	82,43
SULAWESI SELATAN							
87	Kota Makassar	94,36	85,12	89,28	93,39	83,50	87,95
88	Kota Pare-Pare	92,71	75,18	83,07	89,73	77,06	82,76
89	Kota Palopo	87,40	79,27	82,93	87,98	79,02	83,05
SULAWESI TENGGARA							
90	Kota Kendari	94,38	83,39	88,34	94,34	85,85	89,67
91	Kota Bau-Bau	87,38	74,84	80,48	88,02	74,34	80,49
GORONTALO							
92	Kota Gorontalo	92,07	83,92	87,59	92,25	81,80	86,50
MALUKU							
93	Kota Ambon	93,09	77,90	84,73	92,46	78,10	84,56
94	Kota Tual	54,09	55,58	54,91	59,11	59,12	59,11

NO.	PROVINSI/ KOTA	2023			2024		
		KETERJANGKAUAN	PEMANFAATAN	KOMPOSIT	KETERJANGKAUAN	PEMANFAATAN	KOMPOSIT
MALUKU UTARA							
95	Kota Ternate	97,30	83,14	89,51	96,74	81,28	88,24
96	Kota Tidore Kepulauan	90,76	45,43	65,83	90,83	43,28	64,68
PAPUA BARAT							
97	Kota Sorong	72,96	75,19	74,18	74,72	77,63	76,32
PAPUA							
98	Kota Jayapura	79,49	73,17	76,01	82,53	74,93	78,35

Lampiran 7.

Data Indeks Ketersediaan, Indeks Keterjangkauan, Indeks Pemanfaatan dan Indeks Ketahanan Pangan Wilayah Provinsi Tahun 2024

NO.	PROVINSI	2023				2024			
		KETER- SEDIAAN	KETER- JANGKAUAN	PEMAN- FAATAN	KOMPOSIT	KETER- SEDIAAN	KETER- JANGKAUAN	PEMAN- FAATAN	KOMPOSIT
1	Aceh	77,07	74,49	69,62	72,96	77,74	74,71	71,24	73,94
2	Sumatera Utara	80,27	80,17	69,91	75,97	82,25	80,60	71,95	77,49
3	Sumatera Barat	87,51	88,21	75,92	83,22	87,88	89,36	77,54	84,32
4	Riau	34,76	87,28	73,86	68,68	37,73	87,90	75,90	70,42
5	Jambi	50,96	86,35	72,84	72,17	56,61	87,70	74,97	74,94
6	Sumatera Selatan	81,69	79,01	65,99	73,82	81,71	79,35	66,44	74,07
7	Bengkulu	76,93	76,43	65,77	72,27	78,64	77,75	66,21	73,39
8	Lampung	95,04	82,32	71,99	81,56	94,87	83,55	73,57	82,58
9	Kep. Bangka Belitung	28,48	91,77	81,28	71,14	22,04	93,56	81,77	70,21
10	Kep. Riau	0,00	88,85	78,24	65,10	0,00	90,76	79,13	66,29
11	DKI Jakarta	0,00	89,97	86,01	83,80	0,00	91,43	87,45	85,13
12	Jawa Barat	85,07	84,16	78,59	82,19	84,59	85,36	79,65	82,97
13	Jawa Tengah	87,69	83,44	83,61	84,80	87,58	84,46	84,26	85,34
14	D.I Yogyakarta	81,84	83,55	83,60	83,17	83,58	85,61	83,30	84,15
15	Jawa Timur	89,72	81,99	78,24	82,46	90,24	83,32	80,29	83,86
16	Banten	82,10	88,65	68,44	78,71	82,31	89,73	68,92	79,25
17	Bali	80,50	94,10	86,89	87,65	80,28	95,21	87,61	88,23

NO.	PROVINSI	2023				2024			
		KETER- SEDIAAN	KETER- JANGKAUAN	PEMAN- FAATAN	KOMPOSIT	KETER- SEDIAAN	KETER- JANGKAUAN	PEMAN- FAATAN	KOMPOSIT
18	Nusa Tenggara Barat	91,63	73,67	69,50	76,51	92,22	74,67	72,98	78,44
19	Nusa Tenggara Timur	86,75	66,84	63,26	71,25	83,75	68,10	63,61	70,91
20	Kalimantan Barat	76,18	86,31	59,08	72,20	75,76	87,63	61,52	73,49
21	Kalimantan Tengah	43,60	89,76	70,22	68,90	44,11	90,18	72,64	70,16
22	Kalimantan Selatan	82,00	91,17	72,94	81,26	85,33	91,43	74,63	82,95
23	Kalimantan Timur	48,91	90,79	84,18	79,29	44,12	91,27	84,55	78,61
24	Kalimantan Utara	46,05	91,18	77,49	74,59	46,16	91,49	79,93	75,77
25	Sulawesi Utara	70,04	82,93	76,05	77,32	60,02	84,68	77,45	76,32
26	Sulawesi Tengah	75,19	80,89	72,19	75,83	75,42	81,65	73,92	76,87
27	Sulawesi Selatan	93,76	85,31	74,85	83,36	93,23	85,36	76,38	83,82
28	Sulawesi Tenggara	64,05	81,48	76,41	74,96	68,22	82,48	77,15	76,68
29	Gorontalo	93,17	75,36	78,33	81,63	93,76	73,83	78,82	81,47
30	Sulawesi Barat	70,44	83,01	67,49	73,03	63,34	83,75	69,66	71,99
31	Maluku	52,22	71,34	65,82	64,37	42,35	72,15	66,75	62,68
32	Maluku Utara	21,99	88,34	64,53	62,34	14,12	89,07	66,61	61,44
33	Papua Barat	13,46	63,98	58,29	47,95	19,01	67,01	60,60	51,36
34	Papua	28,06	49,54	46,23	42,27	16,88	51,47	47,67	40,21

Keterangan:

- Jumlah Provinsi adalah 34
- Peringkat 1 adalah peringkat terbaik
- Skor bernilai 0-100. Skor 100 adalah terbaik
- IKP Provinsi dihitung dengan memperhitungkan IK, IA, dan IP
- Bobot IK=0,30; IA=0,30; dan IP=0,40



**BADAN
PANGAN
NASIONAL**

***NATIONAL
FOOD
AGENCY (NFA)***

Jalan Harsono RM No. 3, Ragunan, Pasar Minggu
Kota Jakarta Selatan, 12550
Email: nfa_official@badanpangan.go.id
Telp/Fax: (021) 7807377